

PAPER NAME

**3. Buku_2023_Tionghoa dalam Pend Sej_
full.pdf**

AUTHOR

Hendra Kurniawan

WORD COUNT

61694 Words

CHARACTER COUNT

400740 Characters

PAGE COUNT

288 Pages

FILE SIZE

2.3MB

SUBMISSION DATE

Aug 21, 2024 9:59 AM GMT+7

REPORT DATE

Aug 21, 2024 10:03 AM GMT+7

● 10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 5% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Abstract
- Small Matches (Less than 9 words)
- Manually excluded sources

TIONGHOA

dalam Pendidikan Sejarah di Indonesia

Analisis Wacana Kritis Buku Teks

Di tengah membanjirnya karya-karya tentang Tionghoa dan ketionghoan di masa pasca-1998 ini, ternyata belum banyak dilakukan kajian dari sudut pandang pendidikan sejarah. Berbeda dengan era Orde Baru ketika Tionghoa dihapus dari wacana belajar mengajar, dewasa ini topik tersebut telah dimasukkan ke dalam buku-buku teks di sekolah. *Tionghoa dalam Pendidikan Sejarah di Indonesia*, yang diangkat dari disertasi pendidik muda, Hendra Kurniawan (2023), melakukan analisis wacana kritis terhadap buku-buku teks Sejarah Indonesia menurut Kurikulum 2013. Di tengah gencarnya seruan akan keberagaman dan kesetaraan untuk semua, bagaimanakah negara merepresentasikan salah satu elemen masyarakatnya yang banyak disalahpahami –bahkan hingga kini—itu di ruang kelas? Jawabnya ada di buku menarik ini. Selamat untuk Hendra dan kajiannya atas kurikulum-kurikulum selanjutnya, tentu tetap ditunggu!

Didi Kwartanada, sejarawan dan penulis "Diingat Sekaligus Dihapuskan: 'Cina' dalam Memori Kolektif dan Historiografi Orde Baru" (2020).

Penulis memiliki keyakinan bahwa buku teks memegang peran menentukan dalam pembelajaran sejarah, maka penulis menawarkan konsep dekonstruksi. Dekonstruksi bisa saja dilakukan terhadap narasi yang masih meminggirkan berbagai kelompok etnis, termasuk Tionghoa. Dekonstruksi juga dapat dilakukan terhadap cara pikir atau *mindset* guru sejarah yang sudah lama terkonstruksi oleh hegemoni pemegang kuasa. Diskursus sejarah yang seragam yang melekat pada *the mainstream* dan kelompok dominan yang masih tampak pada diskursus pendidikan sejarah di Indonesia harus dibongkar.

Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed., Guru Besar Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, penulis buku Konstruksi Pembelajaran Sejarah Kritis (2007) dan Pedagogi Kreatif: Menumbuhkan Kreativitas dalam Pembelajaran Sejarah dan IPS (2021).

Ada banyak kajian buku teks sejarah yang menganalisis tentang wacana nasionalisme, multikulturalisme, muatan sejarah lokal, kemaritiman, hingga peran perempuan. Buku ini menjadi yang pertama secara kritis dan komprehensif membongkar representasi Tionghoa sebagai konstruksi kebinekaan dalam buku teks sejarah di Indonesia.

Prof. Dr. Leo Agung S., M.Pd., Guru Besar Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret, penulis buku ajar Sejarah Asia Timur Jilid 1 (2015) dan Jilid 2 (2016).

Pembelajaran sejarah diperkaya oleh gagasan dalam buku karya Hendra Kurniawan ini tentang betapa pentingnya menghadirkan peran berbagai kelompok masyarakat, termasuk Tionghoa, dalam mengukir jejak sejarah bangsa.

Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M., Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, penulis buku ajar Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX (2006) dan Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi sampai Pemilu 2009 (2011).



Tionghoa dalam Pendidikan Sejarah di Indonesia

HENDRA KURNIAWAN



TIONGHOA

dalam Pendidikan Sejarah di Indonesia

Analisis Wacana Kritis Buku Teks



HENDRA KURNIAWAN

Kata Pengantar
Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed.

TIONGHOA

**dalam Pendidikan Sejarah
di Indonesia**

3

Penentuan Pidana

Pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIONGHOA

dalam Pendidikan Sejarah di Indonesia

Analisis Wacana Kritis Buku Teks



Kata Pengantar
Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed.

HENDRA KURNIAWAN

TIONGHOA DALAM PENDIDIKAN SEJARAH DI INDONESIA

Analisis Wacana Kritis Buku Teks

102300xxxxx

© 2023 ¹⁸ T Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.co.id

Website : www.kanisiusmedia.co.id

Cetakan ke- 3 2 1

Tahun 25 24 23

Penulis : Dr. Hendra Kurniawan, M.Pd.

Editor : V. M. Murwaningsih

Desain Isi : Oktavianus

Desain Cover : Niko Dampitara

Sumber Ilustrasi Sampul: www.bing.com/images/create

Arsip Nasional RI

¹⁸

ISBN 978-979-21-xxxx-x

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PRAKATA

Pada tahun pertama sebagai dosen Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, saya terhenyak saat membaca sebuah artikel lawas. Artikel yang saya peroleh tanpa sengaja itu berjudul “Cina Absen dalam Pelajaran Sejarah” ditulis oleh Dr. Asvi Warman Adam (sekarang guru besar) dalam Koran Tempo, 2 Februari 2002. Bergelegak pertanyaan dalam diri, “Mengapa saya baru membaca tulisan ini dan menyadari isinya sekarang?” Sebelumnya, saya memang tidak pernah menyentuh isu tentang Tionghoa, entah dalam penelitian skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lain. Demikian pula ketika saya menjadi guru di SMP maupun SMA, tidak pernah terlontar pembicaraan maupun diskusi tentang peran Tionghoa dalam Sejarah Indonesia. Akan tetapi, sejak menjadi dosen dengan bacaan tak sengaja tadi itulah saya memulai *mesu budi* untuk meneliti, menulis, dan berbicara tentang Tionghoa secara khusus dalam konteks pendidikan sejarah di Indonesia. Alhasil, topik itu kerap saya angkat ke dalam beberapa penelitian, artikel jurnal ilmiah, makalah seminar (prosiding), buku, puluhan artikel populer di berbagai surat kabar, bahkan dalam disertasi yang saya selesaikan pada medio 2023.

Sejak Reformasi 1998 bergulir, historiografi Tionghoa di Indonesia memang bergeliat. Berbagai karya tulis tentang

sejarah, budaya, biografi tokoh, dan berbagai hal yang membicarakan Tionghoa makin berlimpah. Akan tetapi, sebagaimana kegelisahan Prof. Dr. Asvi Warman Adam, kisah mengenai Tionghoa tidak pernah disuarakan dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Pembelajaran sejarah terikat oleh kurikulum, buku teks, dan politik pendidikan yang tidak serta merta berubah seiring Reformasi 1998. Perubahan signifikan baru muncul dalam buku teks Sejarah Indonesia berdasarkan Kurikulum 2013 yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2017-2018. Penanda paling kentara yakni hadirnya topik perlawanan Tionghoa terhadap VOC atau dikenal sebagai Geger Pacinan.

Terkait episode Geger Pacinan ini, beruntung saya berkesempatan mengoleksi beberapa buku teks Sejarah era awal kemerdekaan hingga Orde Baru. Saya menjumpai peristiwa ini pernah dimuat dalam buku teks Sejarah pada era Presiden Sukarno hingga kemudian lenyap akibat perlakuan diskriminasi atas nama asimilasi total pada masa Orde Baru. Saya menemukan dinamika menarik terkait narasi ini. Termasuk ketika membandingkannya dengan narasi teranyar dalam buku teks Sejarah Indonesia berdasarkan Kurikulum 2013 ternyata dijumpai beberapa perbedaan perspektif dan wacana. Hal ini tidak lepas dari sifat politis dan relasi kuasa warisan Orde Baru yang memandang Tionghoa sebagai liyan, sarat stereotipe dan prasangka negatif, serta melulu menjadi korban sentimen anti-Cina.

Dari rentetan pergulatan dan temuan awal tersebut, tak dinyana, Prof. Dr. Asvi Warman Adam kembali menulis artikel berjudul “Memasukkan Tionghoa dalam Sejarah Indonesia” dalam Kompas tanggal 16 Februari 2021. Saya pun kembali diingatkan pada berbagai diskusi bersama para dosen saat menempuh studi Doktor Pendidikan Sejarah di

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Ada pandangan baru yang kemudian muncul dalam diri saya bahwa representasi Tionghoa dalam pembelajaran sejarah bukan semata-mata masalah konten, namun terdapat nilai (*value*) yang hendak dikonstruksi di dalamnya. Secara filosofis, aksiologi memang menjadi poin penting dari keilmuan pendidikan sejarah. Untuk itu, saya makin yakin harus memasukkan variabel kebinekaan dalam buku ini. Selain itu, saya juga makin mantap memilih metode *Critical Discourse Analysis* (CDA) atau Analisis Wacana Kritis (AWK) untuk membongkar praktik wacana dalam narasi-narasi Tionghoa dan perannya yang disampaikan dalam buku teks Sejarah Indonesia menurut Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh negara.

Melalui karya ini, saya ingin menggerakkan kesadaran bahwa pendidikan sejarah perlu menemukan bentuk ideal dalam mengakomodasi kenyataan kebhinekaan melalui pendidikan sejarah yang inklusif. Upaya ini tidak hanya terkait dengan penulisan buku teks yang selama ini menjadi ranah pemerintah, namun termasuk pula buku teks yang diusahakan oleh masyarakat atau penerbit swasta. Di sisi lain, buku ini juga membuka rekomendasi bagi para guru sejarah bahwa upaya mewujudkan pendidikan sejarah yang inklusif di kelas tidak boleh hanya mengandalkan buku teks belaka. Ketersediaan sumber belajar yang sangat berlimpah saat ini, termasuk kearifan lokal setempat bahkan pengalaman hidup siswa, dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar yang memberi ruang pada peran Tionghoa maupun kelompok masyarakat lain dalam mengonstruksi sejarah nasional. Buku teks harus ditempatkan sebagai *living document* sebagai sumber belajar yang senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks siswa sehingga tercipta pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Dalam pandangan pedagogi kritis, pembelajaran

sejarah harus memberdayakan siswa dengan mengeksplorasi beragam sumber belajar untuk mengembangkan daya kritis dan kreatifnya.

Akhirnya, saya sebagai penulis masih menyimpan sejumlah harapan untuk melihat sudut-sudut lain yang belum terjamah. Di antaranya buku teks dari beragam penerbit lain dalam merepresentasikan Tionghoa, pengalaman pembelajaran tentang sejarah Tionghoa di sekolah-sekolah dengan berbagai latar belakang dan konteks siswa yang beragam, pengembangan narasi sejarah Tionghoa yang diharapkan ideal dalam buku teks, hingga model-model pembelajaran yang variatif dalam merepresentasikan Tionghoa untuk menguatkan kesadaran kebinekaan. Terutama pula dengan hadirnya kurikulum baru, Kurikulum Merdeka. Artinya, buku ini masih membutuhkan berbagai masukan dan kajian-kajian lain agar menjadikannya utuh dan bermakna. Semoga karya awal ini dapat bermanfaat terutama bagi para guru maupun mahasiswa calon guru sejarah dalam mendidik generasi muda bangsa ini. Selamat membaca dan menemukan perspektif baru. Soja!

Bandung, 7 Agustus 2023

Penulis

Dr. Hendra Kurniawan, M.Pd.



UCAPAN TERIMA KASIH

Hadirnya buku ini tidak lepas dari kontribusi dan dukungan banyak pihak. Pertama, rasa syukur, kebahagiaan, dan ucapan terima kasih ini saya haturkan pada keluarga besar yang selalu mendukung selama saya berkarya sebagai dosen maupun saat menempuh studi lanjut. Terutama istri tercinta, dr. Mellyta Karunia Yuliani dan putri kami terkasih, Kimberly Kurnia Njoo, serta Papa Irwan Dwidjo Seno, Mama Lani Herawati (Almh.), Papa dr. Daniel Kartipin, Sp. OG., dan Mama Lilya Ratna Inggawati. Kalianlah yang selama ini tak pernah putus mendoakan dan senantiasa menjadi bagian terpenting dalam hidup ini. Untuk itu, sudah tentu, karya ini saya persembahkan pada kalian.

Kedua, saya bersyukur dan berterima kasih karena selama studi lanjut melalui berbagai diskusi disertasi bersama Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed. yang bertindak sebagai promotor, Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum. sebagai kopromotor, dan Dr. Leli Yulifar, M.Pd. sebagai anggota promotor, sudut pandang saya makin kaya. Terima kasih kepada Dr. Wawan Darmawan, M.Hum. dan Prof. Dr. Leo Agung Sutimin, M.Pd. yang bersedia memberi masukan berharga saat sidang tertutup dan terbuka terkait disertasi yang saya susun. Terima kasih juga kepada para dosen di S3 Pendidikan Sejarah UPI, di antaranya Prof. Dr. Helius

Sjamsuddin, M.A.,⁹⁵ Prof. Dr. Said Hamid Hasan, M.A., Prof. Dr. Rochiati Wiriaatmadja, M.A., Prof. Dr. Didin Saripudin, M.Si., Dr. Erlina Wiyanarti, M.Pd., dan Dr. Tarunasena, M.Pd. Terima kasih tak lupa pula teruntuk guru-guru saya di sekolah dasar dan menengah serta para dosen yang telah membimbing saya di S1 dan S2 Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret (UNS).

Ketiga, ucapan syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada Yayasan Sanata Dharma, para pejabat struktural, dan kolega dosen serta para mahasiswa hingga alumni Program Studi Pendidikan Sejarah USD yang memberi dukungan maupun semangat selama saya meneruskan studi. Tentu juga pada teman-teman seperjuangan di S3 Pendidikan Sejarah UPI angkatan 2020 beserta handai taulan dan para sahabat, saya ucapkan terima kasih. Terbitnya buku ini juga tidak lepas dari kesediaan penerbit, maka ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Penerbit PT Kanisius yang dengan telaten mengawal proses penerbitan hingga sampai di tangan pembaca. Terakhir, buku ini menjadi tak bermakna tanpa kehadiran pembacanya. Untuk itu,¹⁰⁷ ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya haturkan kepada sidang pembaca yang terhormat.

Bandung, 7 Agustus 2023

Penulis

Dr. Hendra Kurniawan, M.Pd.



KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed.¹

Saya merasa senang dapat memberi kata pengantar dalam buku *Tionghoa dalam Pendidikan Sejarah di Indonesia* yang ditulis oleh Hendra Kurniawan. Penulis adalah mahasiswa yang saya bimbing selama menempuh studi doktoral Pendidikan Sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Buku yang berangkat dari disertasi doktoralnya ini menjadi karya yang patut diapresiasi. Penulis sejak awal konsisten mengusung isu Tionghoa dalam konteks Pendidikan Sejarah. Pemikirannya tajam dan menantang dalam mempertanyakan posisi narasi Tionghoa dalam praktik Pendidikan Sejarah di Indonesia. Upaya akademik ini menjadi bagian dari memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan menghargai keberagaman yang menjadi realitas hidup berbangsa.

Sebagai promotor, melalui berbagai diskusi, saya memberi penguatan kepada penulis dengan menawarkan paradigma postmodernisme dan teori kritis (*critical theory*). Postmodernisme digunakan sebagai wahana untuk

88

Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed. adalah Guru Besar Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, penulis buku *Konstruksi Pembelajaran Sejarah Kritis* (2007) dan *Pedagogi Kreatif: Menumbuhkan Kreativitas dalam Pembelajaran Sejarah dan IPS* (2021).

124

mengembangkan pikiran-pikiran alternatif dari narasi modernisme yang terlalu melihat sejarah sebagai garis lurus perjalanan bangsa dalam narasi besar. Melalui paradigma ini, Hendra Kurniawan menarasikan bahwa Pelajaran Sejarah yang sarat dengan nilai-nilai yang diambil dari masa lalu tidak semata memberi ruang kepada *the mainstream* atau hal-hal besar, melainkan juga pada hal-hal yang kecil dan spesifik. Bila Pelajaran Sejarah Nasional sebagai sejarah resmi (*official history*) fokus pada narasi-narasi besar seperti kebangsaan, integrasi bangsa, persatuan dan kesatuan, serta kemajemukan, maka isu-isu tersebut harus memberi ruang pada semua kelompok berbasis ras, etnis, gender, dan lokalitas budaya masyarakat yang juga memiliki narasi-narasi kecil yang penting untuk penguatan berbangsa dan bernegara. Mengangkat isu kebangsaan, misalnya, tidak boleh dialamatkan semata pada kelompok etnis tertentu. Peran tokoh besar atau elite yang identik dengan peristiwa-peristiwa besar atau nasional selama ini yang mewarnai pelajaran Sejarah Indonesia harus didekonstruksi. Hasil dekonstruksi tersebut dapat diisi secara pedagogis dengan memasukkan sejarah lokal, sejarah etnis tertentu, dan bahkan sejarah publik ke dalam ruang kelas. Paradigma postmodernisme memberi wahana bagi guru sejarah untuk mengembangkan kreatifitas dalam pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi semua peserta didik yang majemuk. Lebih penting dari itu adalah aspek-aspek psikologis mengenai keterwakilan, keberadaan, dan adanya pengakuan terhadap latar belakang etnisitas peserta didik dalam konten Pendidikan Sejarah juga terakomodasi.

Melalui teori kritis, Hendra Kurniawan ingin melihat bahwa Pelajaran Sejarah dan juga buku teks Pelajaran Sejarah sarat dengan kepentingan politik. Kepentingan politik yang

dimaksud adalah politik pendidikan untuk integrasi bangsa. Dalam konteks ini, Hendra Kurniawan sebagai pendidik di Program Studi Pendidikan Sejarah yang juga sedang menyiapkan para mahasiswanya sebagai calon guru sejarah, berada dalam posisi sepakat bahwa kepentingan politik dan ideologi adalah penting untuk integrasi bangsa. Teori kritis yang digunakannya adalah ingin melihat bahwa kepentingan politik tersebut tidak menempatkan pemegang kuasa yang bisa melekat pada penguasa politik, kelompok dominan, etnisitas, gender, atau kelompok-kelompok tertentu memonopoli tafsir terhadap peristiwa sejarah. Pelajaran Sejarah berisi konten Pendidikan Sejarah sebagaimana tampak pada buku teks pelajaran Sejarah dan/atau kurikulum Pendidikan Sejarah bisa tetap digunakan sesuai dengan tujuannya. Dengan teori kritis ini sebenarnya, siapa pun, ahli Sejarah, ahli Pendidikan Sejarah, hingga guru Sejarah boleh menafsir secara kritis. Tafsir mereka tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah keilmuan Sejarah dan Pendidikan Sejarah serta tujuan pendidikan. Tafsir boleh dilakukan untuk memberi ruang terhadap isu keterwakilan, representasi, atau peran historis berbagai kelompok etnis, ras, dan gender. Tafsir juga harus memberi wadah bagi isu keterwakilan atau representasi yang tersurat dalam buku teks Pelajaran Sejarah. Bila tafsir itu dilakukan oleh guru Sejarah, maka sebenarnya terbuka ruang untuk memperkaya konten Pendidikan Sejarah menjadi kontekstual dengan karakteristik etnisitas, ras, dan gender yang berada di ruang kelas.

Riset awal terhadap buku teks yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan menemukan bahwa peran etnisitas Tionghoa teralienasi dalam konten Pendidikan Sejarah, khususnya tampak selama pemerintahan Orde Baru (1966–1998). Kini, di Era Reformasi, isu keterwakilan sudah

terakomodasi dalam diskursus Sejarah dan Pembelajaran Sejarah. Artinya Pendidikan Sejarah di Indonesia mulai membuka ruang diskursus tentang representasi Tionghoa dalam Sejarah Nasional sebagai konten Pendidikan Sejarah. Penulis memiliki keyakinan bahwa buku teks memegang peran menentukan dalam pembelajaran sejarah, maka penulis menawarkan konsep dekonstruksi. Dekonstruksi bisa saja dilakukan terhadap narasi yang masih meminggirkan berbagai kelompok etnis, termasuk Tionghoa. Dekonstruksi juga dapat dilakukan terhadap cara pikir atau *mindset* guru Sejarah yang sudah lama terkonstruksi oleh hegemoni pemegang kuasa. Diskursus Sejarah yang seragam yang melekat pada *the mainstream* dan kelompok dominan yang masih tampak pada diskursus Pendidikan Sejarah di Indonesia harus dibongkar. Setelah dekonstruksi itu, guru Sejarah dapat mengonstruksi isu-isu representasi, keadilan, kesetaraan, dan lebih penting dari itu adalah memasukkan peran historis berbagai kelompok etnis, termasuk Tionghoa, sebagai pengayaan konten Pendidikan Sejarah.

Representasi Tionghoa dalam buku ini bukan hanya tentang keberadaannya secara tersurat dalam buku teks sebagai penanda hadirnya keadilan terhadap peran semua golongan di masyarakat. Dalam pandangan kritis, wacana yang hendak dibangun menjadi jauh lebih menentukan, apalagi buku teks Sejarah Indonesia disusun untuk kepentingan pendidikan. Kesadaran multikultural untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi wacana utama yang sejatinya perlu dibangun dalam merepresentasikan berbagai kelompok etnis di Indonesia dengan nama bangsa Indonesia. Sesuai tugasnya, Pendidikan Sejarah harus mengembangkan dan memperkuat jati diri bangsa berdasarkan keberagaman yang dimiliki masyarakat.

Pendidikan Sejarah harus mampu membangun penghargaan terhadap perbedaan dan memperkuat persamaan di antara keberagaman tersebut.

Melalui paradigma postmodernisme dan teori kritis dalam riset ini, Hendra Kurniawan melakukan analisis kritis terhadap buku teks Pelajaran Sejarah²⁴ dengan menggunakan analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis* (CDA). Hasil CDA memang menemukan pemilihan kata, teks, diksi, dan bahkan wacana yang masih meminggirkan, mengesampingkan, dan menganggap tidak penting peran yang dilakukan Tionghoa dalam perjalanan Sejarah Indonesia. Namun demikian, bagi Hendra Kurniawan, terkait peran Tionghoa, tidak semata meminta pengambil kebijakan dalam pendidikan di negeri ini memasukkan kata Tionghoa atau Sejarah kelompok etnis Tionghoa ke dalam kurikulum dan buku teks Pelajaran Sejarah. Melalui pedagogi kritis, kolaborasi lebih lanjut dengan guru Sejarah sangat diperlukan. Yang dapat dilakukan adalah tetap menggunakan buku teks Pelajaran Sejarah Indonesia yang diperkaya dengan isu-isu etnisitas, kesetaraan, pemberdayaan, dan pentingnya dialog lintas kelompok etnis. Baginya, pengayaan yang jauh lebih penting adalah menghubungkan setiap peristiwa Sejarah di Indonesia – ada atau tidak ada nama dan peran Tionghoa di dalamnya – dengan dunia nyata peserta didik (termasuk anak-anak Tionghoa) pada masa kini. Dunia nyata anak-anak Tionghoa adalah anak dari orangtua mereka yang memiliki latar belakang keluarga, kebiasaan dan adat-istiadat warisan leluhur, sekaligus hasil pergaulan dengan beragam kelompok etnis di lingkungan tempat tinggalnya. Wacana keturunan Tionghoa dengan etos kerjanya, kisah kegagalan dan kesuksesan, serta peran ekonomi di negeri ini jauh lebih krusial dijadikan konten Pendidikan Sejarah. Di tangan guru

sejarah yang kritis dan kreatif, persoalan-persoalan relasi etnis masa lalu dan masa kini menjadi isu yang menarik dan bermakna untuk penguatan integrasi bangsa. Kompetensi yang dibangunnya adalah menjadikan anak-anak Tionghoa memiliki peran historis dalam mengangkat nama keluarga mereka, dan peran historis untuk kebaikan bersama tanpa dilabeli oleh latar belakang etnis kecuali lebel Indonesia yang majemuk, adil, dan sejahtera.

Terakhir, saya meyakini, keberhasilan studi terletak pada kebermaknaan lulusan bagi masyarakatnya. Untuk itu, semoga buku ini bermanfaat terutama bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran sejarah kritis, kreatif, sekaligus inklusif. Lagi-lagi dalam paradigma kritis yang sejalan dengan merdeka belajar, guru sejarah didorong menjadi pengembang kurikulum yang menciptakan pembelajaran sejarah yang bermakna bagi siswa. Selamat kepada penulis dan para pembaca atas terbitnya buku ini yang memperkaya kajian Pendidikan Sejarah di Indonesia.

Bandung, Oktober 2023



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
11 KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I HISTORIOGRAFI TIONGHOA DI INDONESIA	1
A. Tionghoa dalam Sejarah Resmi	7
B. Tionghoa dalam Karya Sejarah Akademik dan Populer	19
C. Tionghoa dalam Buku Teks Sejarah	25
BAB II IDENTIFIKASI TIONGHOA DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA	36
16 A. Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas X SMA	43
B. Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XI SMA	48
C. Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XII SMA ...	54
BAB III 2 REPRESENTASI TIONGHOA DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA	60
A. Jalinan Harmoni: Zaman Praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam	64
B. Warisan Stereotype: Masa Kolonial sampai Orde Baru	79
C. Pemulihan Relasi: Era Reformasi	109

BAB IV	ANALISIS WACANA KRITIS NARASI TIONGHOA DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA.....	115
A.	Konsep Analisis Wacana Kritis.....	115
B.	Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk	126
C.	Arti Penting Analisis Wacana Kritis terkait Representasi Tionghoa dalam Buku Teks Sejarah Indonesia.....	136
BAB V	ANALISIS DIMENSI TEKS TENTANG TIONGHOA DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA.....	142
A.	Analisis Struktur Makro.....	147
B.	Analisis Superstruktur	153
C.	Analisis Struktur Mikro.....	163
BAB VI	ANALISIS DIMENSI KOGNISI SOSIAL DAN KONTEKS SOSIAL TENTANG TIONGHOA DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA	190
A.	Analisis Dimensi Kognisi Sosial.....	194
B.	Analisis Dimensi Konteks Sosial	208
BAB VII	REPRESENTASI TIONGHOA DAN KEBINEKAAN DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA.....	220
A.	Eksplorasi Pengetahuan	223
B.	Penghormatan terhadap Keberagaman	229
C.	Penghilangan Stereotype dan Prasangka.....	233
D.	Refleksi Kritis Pengalaman Kebinekaaan.....	236
E.	Kesadaran Inklusif untuk Keharmonisan Hidup Bersama.....	239
DAFTAR PUSTAKA	244
BIODATA PENULIS	266



BAB I

HISTORIOGRAFI TIONGHOA DI INDONESIA

Keberadaan masyarakat Tionghoa turut membentuk keberagaman bangsa Indonesia sejak era Nusantara. Mereka bukanlah komunitas yang homogen, namun sangat heterogen dengan menilik berbagai aspek seperti daerah asal, bahasa, kebudayaan, agama, kondisi ekonomi, kewarganegaraan, latar belakang pendidikan, hingga orientasi politiknya. Berdasarkan daerah asal dan budaya yang dibawa, mayoritas Tionghoa Hokkien tinggal di Jawa dan Sumatera, Teochiu banyak dijumpai di Kepulauan Riau, Hakka di Kalimantan Barat, dan Kanton yang jumlahnya sedikit tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Selain itu, sudah begitu banyak dari mereka ini yang mengalami kawin campur alias peranakan dan tidak lagi merasa memiliki identitas ketionghoan. Secara fisik memang masih menunjukkan ciri-ciri Tionghoa, namun secara kultural lebih akrab dengan suku lokal tempat mereka tinggal (Arifin, Hasbullah, & Pramono, 2016).

¹²³ Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah orang Tionghoa di Indonesia ⁸⁷ sebanyak 2.832.510 jiwa atau 1,2 % dari total penduduk Indonesia dan diperkirakan mencapai

3.280.000 jiwa pada tahun 2020. Keberadaannya tersebar di seluruh provinsi dengan lebih dari sepuluh provinsi memiliki jumlah Tionghoa yang tergolong dalam sepuluh besar etnis terbanyak (Mackie, 2005, hlm. 100). Paling banyak mereka ada di DKI Jakarta sejumlah 632.372 jiwa dan paling sedikit di Sulawesi Barat dengan 660 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010, hlm. 9, 41). Mayoritas merupakan kelompok peranakan atau hasil kawin campur dengan penduduk setempat yang juga telah mendorong terjadinya akulturasi budaya. Menurut Suryadinata (1986, hlm. 20), kaum peranakan telah berakulturasi ke dalam masyarakat setempat dan hubungannya dengan negara Tiongkok sangat tipis bahkan sungguh telah merasa sebagai bagian dari penduduk lokal. Dalam perkembangannya program asimilasi Orde Baru meningkatkan kecenderungan ini.

Sebagian besar Tionghoa di Indonesia enggan menunjukkan identitas dirinya dan hanya mempertahankan ketionghoan sampai pada batas tertentu. Dengan berinteraksi dan bertransformasi, mereka lebih nyaman mengidentifikasi diri sebagai bagian dari mayoritas kelompok suku setempat (Arifin et al., 2016). Orang Tionghoa di Jawa Tengah dan Jawa Timur cenderung merasa sebagai orang Jawa. Orang Tionghoa di Jawa Barat lebih senang disebut orang Sunda. Demikian juga orang Tionghoa di Kalimantan mengidentifikasi dirinya sebagai orang Dayak. Kecenderungan ini juga hasil dari asimilasi (pembauran) Orde Baru (1966–1998). *“This programme [asimilasi] prescribed the total dissolution of any markers and identifiers of ‘Chineseness’, and urged this problematic ethnic group to immerse itself in officially constructed local cultures”* (Hoon, 2006, hlm. 152). Asimilasi mendorong mereka tidak lagi mendefinisikan diri sebagai Tionghoa dan memilih lebur

dengan kelompok suku beserta budaya lokal setempat sebagai identitas diri.

Paling populer, teori asal-usul manusia Indonesia kerap dihubungkan dengan para pendatang dari Yunnan, Tiongkok Selatan. Sumber tertulis menyebut kontak awal Tionghoa dengan kawasan selatan (Nusantara) atau Nanyang terjadi sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini tertulis dalam buku Fo Kuo Chi yang mengisahkan seorang musafir bernama Faxian (Fa Hsien) dalam perjalanan pulang dari India menuju Tiongkok singgah di Sriwijaya. Keterangan lain juga didapati dalam berita tahunan dinasti-dinasti selatan yang menyebut adanya utusan-utusan dari Jawa (She-po) ke Tiongkok. Peninggalan keramik Tiongkok di Indonesia juga menunjukkan adanya kontak dagang (Intisari & Indonesia, 2018, hlm. 18; Lombard, 1996, hlm. 12–13; Suryadinata, 2016, hlm. xxxix). Akan tetapi, kedatangan Tionghoa ke Nusantara dalam jumlah besar mulai terjadi pada abad ke-9 pada era Dinasti Tang dengan tujuan mencari penghidupan yang lebih baik melalui berdagang atau bertani (Setiono, 2008, hlm. 21).

Berkaca dari latar historis ini, sesungguhnya masalah asli-tidak asli, pribumi-nonpribumi sangat tidak relevan untuk dipersoalkan bahkan menjadi sangat kabur. Artinya, secara antropologis, semua penduduk Indonesia saat ini sebenarnya bukan asli dari Indonesia. Satu hal yang membedakan hanyalah soal waktu leluhurnya mulai berdatangan ke Nusantara (Setiono, 2008, hlm. 16). Di kalangan Tionghoa, ada yang dengan jelas teridentifikasi sebagai Tionghoa totok maupun peranakan bahkan sekadar memiliki darah campuran Tionghoa. Persoalan ekonomi dan politik di negara Tiongkok menjadi alasan orang-orang Tionghoa berdiaspora ke berbagai penjuru tempat termasuk kawasan Nanyang. Keberadaan Tionghoa kerap turut mewarnai peradaban di

tempat mereka tinggal yang menandakan adanya suasana hidup bersama yang harmonis. Situasi inilah yang oleh Mahfud (2013) ditegaskan bahwa ⁴ Tionghoa yang sudah menyatakan diri menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis masuk ke dalam masyarakat Indonesia.

³⁷ Secara linguistik, istilah Tionghoa dan Tiongkok tidak dikenali di luar masyarakat Indonesia. Tionghoa dan Tiongkok merupakan istilah bahasa Indonesia yang khas. Ini menguatkan pandangan bahwa Tionghoa sudah menjadi bagian dari bangsa ini sejak sebelum konsensus kebangsaan disepakati dan negara Indonesia lahir. Saat ini, sebutan Tionghoa identik dengan kelompok peranakan atau mereka yang lahir, hidup, dan mati di Indonesia. Mereka tidak lagi mengenal dengan baik negara Tiongkok. ³⁷ Istilah Tionghoa dan Tiongkok berasal dari bahasa Kanton, salah satu bahasa di Tiongkok yang digunakan oleh sebagian orang Tionghoa di Indonesia. Tionghoa diturunkan dari pelafalan *Zhonghua* (中華) atau juga disebut *Huaren* (華人) yang berarti orang-orang Cina. Sementara Tiongkok dari *Zhongguo* (中國) yang merujuk pada Cina sebagai negara.

Istilah Tionghoa dan Tiongkok lebih dapat diterima ketimbang Cina. Menurut Lembong (2011, hlm. 5-6), istilah ⁶⁴ Cina (Inggris: *China/Chinese*, Belanda: *China/Chinees*, Jerman: *Chinesische*, Perancis: *Chinois*) berasal dari bahasa Sansekerta, *China* yang berarti daerah yang sangat jauh. Orang-orang Tionghoa sendiri tidak mengenal, apalagi menggunakan istilah tersebut. Awal mulanya istilah Cina memang tidak berkonotasi buruk. Akan tetapi, ¹ pada masa kolonial Belanda di Indonesia – dalam sentimen yang emosional – istilah Cina sering diucapkan dengan aksen penuh kebencian. Selain itu, politik diskriminatif yang diterapkan kolonial Belanda terhadap masyarakat Tionghoa juga berdampak

terus kendati telah memasuki era kemerdekaan (Wasino, Putro, Aji, Kurniawan, & Shintasiwi, 2019, hlm. 216). Penyebutan Cina bagi Tionghoa di Indonesia dirasa kurang nyaman terutama bagi generasi sebelum tahun 2000-an. Sementara, generasi muda Tionghoa setelah Orde Baru memiliki kecenderungan untuk tidak begitu peduli dengan persoalan penyebutan Cina. Sekarang ini, makin banyak sebutan yang bisa diterima lintas generasi, mulai dari Tionghoa, *Tenglang*, *Zhongguoren*, *Chinese*, hingga istilah gaul *Chindo* singkatan dari *Chinese Indonesians*.

Istilah Tionghoa diperkenalkan melalui penerbitan pers pada masa pergerakan nasional. Bermula dari Sin Po yang memelopori penggunaan kata “Indonesia” menggantikan “Hindia Belanda” dan anti menggunakan istilah “inlander” karena dianggap sebagai penghinaan. Buahnya berbagai penerbitan pers lain perlahan mengubah sebutan “Cina” menjadi “Tionghoa”. Sementara pada masa Orde Baru lebih biasa digunakan istilah Cina untuk menyebut masyarakat Tionghoa di Indonesia. Adopsi sikap politik kolonial Belanda ini disepakati dalam Seminar Angkatan Darat II tanggal 25-31 Agustus 1966 di Bandung yang mengusulkan istilah Cina kembali digunakan untuk mengurangi atau menghapus perasaan superior dan inferior antara Tionghoa dengan pribumi (Lembong, 2011, hlm. 10; Mahfud, 2013, hlm. 51; Setiono, 2008, hlm. 986; Suryadinata, 2002, hlm. 107). Penggunaan istilah Cina disahkan melalui Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 dan menimbulkan dampak psikososial dan diskriminatif bagi masyarakat Tionghoa selama puluhan tahun.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keluarlah Keppres Nomor 12 Tahun 2014 yang

memulihkan sebutan Republik Rakyat Tiongkok bagi negara Republik Rakyat Cina dan Tionghoa untuk menyebut orang atau komunitas Cina di Indonesia. Keputusan ini tidak lepas dari arus Reformasi yang membuat penerimaan terhadap etnis Tionghoa makin baik. Pada tahun 1999, Presiden B. J. Habibie mengeluarkan aturan mengenai penghapusan istilah pribumi dan nonpribumi. Selanjutnya Presiden K. H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Inpres diskriminatif yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto ini telah menghambat pelaksanaan tradisi dan berbagai hal berbau Tionghoa demi berhasilnya proses asimilasi. Sejak masa Reformasi, orang-orang Tionghoa tidak lagi takut menunjukkan identitas ketionghoannya (Arifin, Ananta, Utami, Handayani, & Pramono, 2015; Giblin, 2003; Turner, 2003).

Dengan demikian, dinamika politik sangat menentukan persepsi terhadap masyarakat Tionghoa termasuk wajah historiografinya. Penulisan sejarah Tionghoa dalam jejak langkah perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak lepas dari kognisi sosial masyarakat yang terbentuk. Historiografi Tionghoa pernah tampil apa adanya termasuk soal perannya dalam sejarah nasional Indonesia. Pernah pula dikonstruksi dengan wacana yang diskriminatif, serba objektifikasi, dan memarginalkan. Bahkan ada pula masa ketika historiografi Tionghoa dilenyapkan sama sekali dari sejarah nasional Indonesia. Berbagai dinamika ini dapat dijumpai dalam karya sejarah resmi yang ditentukan negara, tulisan-tulisan sejarah yang bersifat akademik maupun populer, hingga buku telaten yang diatur oleh negara untuk kepentingan pendidikan sejarah di sekolah-sekolah.

A. Tionghoa dalam Sejarah Resmi

Sejarah resmi atau *official history* menjadi konstruksi narasi kesejarahan yang ditentukan oleh negara untuk maksud stabilitas, pembentukan jati diri bangsa, *national pride*, hingga tujuan politis pemerintah yang berkuasa. Di Indonesia, penulisan sejarah resmi pertama kali hadir dalam buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang dihasilkan oleh pemerintah Orde Baru. Rintisan SNI sebenarnya bermula dari Seminar Sejarah Nasional I pada tanggal 14-18 Desember 1957 di Yogyakarta, namun baru terwujud pada masa Orde Baru berkuasa. Hasil penting dari seminar tersebut adalah perlunya historiografi nasional yang bersifat Indonesiasentris. Selanjutnya dalam Seminar Sejarah Nasional II tahun 1970 dibicarakan tindak lanjut dari masalah penulisan sejarah yang Indonesiasentris. Hasilnya dibentuklah sebuah panitia penulisan buku standar sejarah Indonesia.

Buku babon sejarah Indonesia ini ditulis sebanyak enam jilid dengan mengusung semangat Indonesiasentris sebagai bentuk dekolonisasi terhadap historiografi Indonesia yang sebelumnya bercorak *Neerlandosentris* (Kartodirdjo, 1982, hlm. 29). Awalnya Sartono Kartodirdjo terlibat dalam penulisan SNI namun kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri sehingga Nugroho Notosusanto tampil sebagai sosok utama dalam proyek ini. Narasi-narasi SNI mencerminkan konsep-konsep besar yang diusung oleh Orde Baru mengenai identitas nasional yakni nasionalisme dan militerisme (Mulyana, 2013; Wood, 2013). Nasionalisme merupakan konsep politik sebagai *civic nationalism* maka penulisan sejarah Indonesia resmi menggunakan pendekatan politik (Klinken, 2001, hlm. 324; Mulyana, 2013, hlm. 81). Ideologi militer memberi warna dalam penulisan sejarah

Indonesia tidak lepas dari peran besar militer dalam tegaknya pemerintahan Orde Baru (Adam, 2008, hlm. 114; McGregor, 2008; Mulyana, 2013, hlm. 83).

Historiografi gaya Orde Baru sebagaimana direpresentasikan dalam SNI bersifat anti-intelektual dan menimbulkan kurangnya pengetahuan sejarah karena hanya berfokus pada peristiwa-peristiwa besar yang dianggap penting dan tokoh-tokoh besar saja. Klinken (2001, hlm. 325) mengungkapkannya sebagai berikut

²³ Official nationalist history took a martial turn under Suharto's New Order – a turn not unlike that once promoted by the Japanese. ... ²³ Nugroho also directed the writing of the key final volume of the six-part official national history text *Sejarah Nasional Indonesia [SNI] (1975)*. This dealt with Indonesia's living history, from 1945 to 1965. It was largely this volume (or rather the school texts based on it) that provoked ... ²⁹ its stark anti-communism privileged the military as national saviors at every crucial moment. The sheer anti-intellectualism of this particular martial view of national history, reinforced by countless monuments, films, and national commemorations, must bear much of the responsibility for the appalling historical ignorance even among liberal arts university students today.

Akibatnya banyak peristiwa sejarah lokal, tokoh-tokoh daerah atau etnis tertentu, maupun tema-tema sejarah lainnya tidak mendapat tempat. Pemikiran Indonesiasentris yang melatarbelakangi penulisan SNI pada akhirnya mengalami kegagalan. Dalam aspek keruangan, banyak peristiwa sejarah yang besar dan penting terjadi di Jawa (Mulyana, 2017, hlm. 18). Ditambah dengan pendekatan politik yang kuat dalam penulisan SNI membuat sifat Jawasentris mendominasi karena sejak dulu Jawa menjadi

pusat politik. Penerapan prinsip Indonesiasentris seharusnya memberi perhatian pada sejarah regional maupun lokal dengan maksud menonjolkan peranan bangsa Indonesia sendiri (Kartodirdjo, 1982, hlm. 39). Dengan demikian, SNI yang disusun Orde Baru tidak hanya menyimpan persoalan bagi representasi Tionghoa, namun juga kelompok masyarakat lain dalam kategori gender, kedaerahan, etnis, maupun agama yang tidak terakomodasi peran sejarahnya dalam sejarah nasional.

Secara khusus terkait dengan Tionghoa, pandangan stereotipe dan prasangka pada masa Orde Baru seakan dipupuk guna mendukung kebijakan asimilasi. Pandangan miring terhadap Tionghoa sebenarnya terkait erat dengan warisan kolonial yang memberi sekat pada kelompok-kelompok masyarakat melalui stratifikasi sosial. Dalam kasus ketika seorang Tionghoa dijumpai enggan berasimilasi (berbaur), maka makin menguatkan (membenarkan) stereotipe dan prasangka di masyarakat. Fenomena ini pula yang kemudian meminggirkan Tionghoa dari arus utama sejarah nasional Indonesia. Dengan maksud asimilasi, keberadaan Tionghoa diharapkan lebur ke dalam kelompok suku setempat mereka tinggal. Maka, sejarah mereka pun dianggap telah terepresentasikan pula melalui kelompok suku setempat tanpa harus menghadirkan eksistensi dan peran Tionghoa secara khusus. Atas dasar anggapan itu, narasi sejarah tentang peran Tionghoa lenyap dalam SNI menurut Orde Baru.

Paling kentara, perang besar pasukan koalisi Tionghoa-Jawa melawan VOC yang kerap muncul dalam karya-karya sejarah, termasuk buku teks, sebelum SNI terbit sama sekali tidak disinggung. Tionghoa hanya disebut dalam Jilid V yang hampir semua dalam konteks *economic animal* pun bernada negatif seperti *pachter* tol, pembunga uang, pematat candu,

kuli perkebunan, dan sepintas dalam usaha penerbitan pers. Dalam Jilid VI, keanggotaan Tionghoa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) perlahan menghilang dari edisi ke edisi. Pada edisi pertama tahun 1975 masih disebut “empat orang golongan Cina dan golongan Arab serta seorang golongan peranakan Belanda”. Sementara pada edisi keempat tahun 1984 dan kelima tahun 1993 menjadi tertulis “empat orang golongan Arab serta golongan peranakan Belanda”. Tentu hal ini patut dipertanyakan karena kenyataannya dalam BPUPK memang terdapat empat orang Tionghoa dan hanya satu wakil Arab (Kwartanada, 2020, hlm. 29).

Pada masa Reformasi, SNI mengalami revisi dan kemudian disebut sebagai SNI Edisi Pemutakhiran yang terbit tahun 2008. Narasi “Pemberontakan Cina dan Jawa melawan VOC” muncul dalam Jilid IV dan “Huru-hara Mei 1998” pada Jilid VI. Pemerintah pada era Reformasi juga mendukung munculnya buku baru sebagai acuan alternatif yakni Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) sebanyak delapan jilid dan satu jilid khusus indeks. Buku ini lebih akomodatif terhadap minoritas. Pada Jilid 4 terdapat bab berjudul “Geger Cina: Dari Batavia hingga Mataram (1740–1743)”. Kemudian pada Jilid 8 muncul bab “Peran Etnik Tionghoa dan Kebijakan Negara”. Akan tetapi, hilangnya tokoh Tionghoa dalam narasi mengenai BPUPK masih belum dikoreksi dalam SNI Edisi Pemutakhiran ini maupun IDAS (Kwartanada, 2020, hlm. 32).

Berikut ini dipaparkan secara garis besar historiografi Tionghoa dalam SNI Edisi Pemutakhiran dan IDAS. Peradaban awal manusia Indonesia yang dipengaruhi Tionghoa disampaikan dalam SNI Jilid I Edisi Pemutakhiran (Poesponegoro & Notosusanto, 2008a).



Gambar 1 Tampilan cover buku SNI Edisi Pemutakhiran dan IDAS

(Sumber: *Online marketplace Shopee Indonesia*)

Bahkan IDAS Jilid 1 juga membahas mengenai teori *out of Taiwan* yang berangkat dari kajian linguistik mengenai bahasa penutur Austronesia (Abdullah & Lopian, 2012a). Hubungan Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan Nusantara sehingga membawa pengaruh bagi perkembangan agama Buddha di Indonesia dibahas dalam SNI Jilid II Edisi Pemutakhiran maupun IDAS Jilid 2 (Abdullah & Lopian, 2012b; Poesponegoro & Notosusanto, 2008b). Hal lain yang dapat dijumpai dalam IDAS yakni banyaknya penggunaan sumber-sumber sejarah dari Tiongkok untuk menjelaskan masa Buddha di Indonesia. Dalam penyebaran Islam di Nusantara, peran Tionghoa tidak lepas dari tokoh Laksamana Cheng Ho. Kajian tentang ini hanya muncul dalam IDAS Jilid 3 dan 4 yang mengisahkan tentang pelayaran Cheng Ho dan keberadaan komunitas Muslim di pesisir utara Jawa Timur (Abdullah & Lopian, 2012d, 2012c). Dalam SNI Jilid III Edisi Pemutakhiran hanya dijelaskan tentang keberadaan permukiman dan

para tukang yang berasal dari Tiongkok (Poesponegoro & Notosusanto, 2008c).

Memasuki era kolonial, posisi dan peran Tionghoa di masyarakat makin luas. Belanda mengatur komunitas Tionghoa dengan menunjuk pemimpin atau opsir Tionghoa. Mereka diberi pangkat militer, "*The lowest rank, i.e. lieutenant ... the middle-level officers, i.e. captains ... the most prestigious position was obviously that of Chinese major*" (Lohanda, 2001, hlm. 75-76). Penentuan pangkat ini didasarkan pada seberapa banyak penduduk Tionghoa yang mereka urus. Batavia, sejak awal institusi opsir Tionghoa ada, dipimpin seorang berpangkat kapitan (kapten) hingga kemudian mayor. Penunjukan pemimpin komunitas Tionghoa tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di daerah kabupaten. Misalnya Ciamis pada tahun 1920-1930-an, penduduk Tionghoa di wilayah kabupaten tersebut dipimpin seorang letnan (Yulifar, 2019a, hlm. 134).

Kapitan Tionghoa meskipun bekerja untuk pemerintah kolonial namun banyak diantaranya berjasa dalam mengembangkan kota dan masyarakat di wilayahnya (P.-C. Chang, 2021). Relasi masyarakat juga berlangsung harmonis. Semua berubah sejak tahun 1740 meletus tragedi pembantaian Tionghoa di Batavia atau Tragedi Muara Angke sehingga mendorong perlawanan Tionghoa-Jawa melawan VOC (Daradjadi, 2013; Rimmelink, 2002; Vermeulen, 2010; Wijayakusuma, 2005). Belanda lantas membatasi relasi harmonis dua kelompok masyarakat ini melalui aturan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* yang mendorong munculnya kawasan-kawasan pecinan (Setiono, 2008, hlm. 130). Sejak itu kebencian dan sikap anti-Cina kerap dengan mudah tersulut karena anggapan bahwa Tionghoa adalah bagian dari kolonial sebagaimana dijelaskan Davidson (2009, hlm. 342).

Thus, as Indonesia gained its independence, this economically strong yet politically weak Chinese class was juxtaposed against the impoverished masses of Javanese who, living in closed, corporate villages, held an ingrained aversion to capitalism, a system of exploitative relations of production that was equated with colonialism and being "Chinese."

Peristiwa besar yang senantiasa muncul dalam buku teks sejarah pada era pemerintahan Presiden Sukarno ini kembali diangkat dalam SNI Jilid IV Edisi Pemutakhiran setelah lama absen. Dikatakan bahwa peristiwa ini menjadi malapetaka besar yang menentukan nasib Mataram (Poesponegoro & Notosusanto, 2008d, hlm. 49). Narasi yang lebih mendalam dan tergolong berani dapat dijumpai dalam IDAS Jilid 4 dengan judul "Huru-Hara Cina di Batavia 1740" dan "Huru-Hara Cina Meluas ke Mataram (Kartasura)". Latar belakang peristiwa menjelaskan peran Tionghoa dalam sosial dan politik pada masa Majapahit dan penyebaran Islam. Jika diamati, maka penjelasan pada IDAS Jilid 4 ini banyak menggunakan sumber dari buku karya Slamet Muljana yang sempat dilarang edar pada masa Orde Baru atau H. J. de Graaf (De Graaf, H.J dan Pigeud, 1997; Muljana, 2005). Terutama dengan dimunculkannya pendapat tentang Walisanga yang keturunan Tionghoa (Abdullah & Lopian, 2012d, hlm. 334–335). Bahkan kehidupan Tionghoa yang membaur dengan penduduk lokal juga diceritakan dengan cukup rinci.

Pada masa pergerakan nasional, peran Tionghoa diawali dengan organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang bertujuan melestarikan tradisi dan budaya Tionghoa khususnya ajaran-ajaran Konghucu (Setiono, 2008, hlm. 304). Menurut Suryadinata (1984, hlm. 4) berdirinya THHK

menunjukkan kesadaran nasionalisme Tionghoa sudah ada sebelum organisasi proto-nasionalis Indonesia yang pertama lahir yakni Boedi Oetomo tahun 1908. Tionghoa juga kerap dikaitkan dengan berdirinya Sarekat Islam (SI) yang bermula dari Sarekat Dagang Islam (SDI). Sejak konflik yang terkait SI, sikap permusuhan terhadap Tionghoa makin menguat. Narasi ini muncul dalam SNI Jilid V Edisi Pemutakhiran maupun IDAS (Abdullah & Lapian, 2012e, hlm. 345; Poesponegoro & Notosusanto, 2008e, hlm. 343).

Pada periode ini, Tionghoa memiliki peran penting bagi berkembangnya sastra Melayu Tionghoa. Banyak Tionghoa yang menjalankan usaha penerbitan. Hal ini juga mendukung pertumbuhan di bidang seni pertunjukan, perfilman, dan pers. Banyak sastrawan Tionghoa yang kemudian merangkap sebagai pekerja pers. Beberapa pers peranakan Tionghoa yang terkenal di antaranya Sin Po, Keng Po, Sin Tit Po, dan beberapa lainnya. Mingguan Sin Po malahan menjadi surat kabar pertama yang memuat teks lagu Indonesia Raya ciptaan W. R. Supratman (Setiono, 2008, hlm. 448-449). Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, saat lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya dimainkan, beberapa pemuda Tionghoa juga hadir. Mereka adalah Kwee Thiam Hong (Daud Budiman), Ong Khai Siang, Jong Liauw Tjoan Hok, Tjio Jin Kwee, dan Muhammad Chai. Bahkan kegiatan tersebut juga diselenggarakan di rumah milik seorang Tionghoa bernama Sie Kong Liong di Jalan Kramat Raya Nomor 106 Jakarta (Setiono, 2008, hlm. 504). Sayangnya narasi tentang ini tidak disinggung dalam SNI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS.

Pembahasan tentang pers Tionghoa dijelaskan terbatas dalam SNI Jilid V (Poesponegoro & Notosusanto, 2008e, hlm. 318). Sementara dalam IDAS Jilid 5, pandangan nasionalisme

keindonesiaan dari kalangan Tionghoa justru ditampakkan (Abdullah & Lapian, 2012e, hlm. 299). Suryadinata (1984, hlm. 45–54) menjelaskan bahwa masyarakat Tionghoa pada masa itu terbagi dalam tiga pandangan politik, yakni (1) Golongan Sin Po yang berorientasi kebangsaan Tiongkok dan menolak kekawulaan Belanda; (2) Golongan Chung Hwa Hui (CHH) yang bersikap pragmatis dengan berdiri di belakang Belanda untuk memperbaiki posisinya; dan (3) ⁷⁵ Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang didirikan oleh Liem Koen Hian berkiblat ke Indonesia dan mengidentifikasi diri sebagai orang Indonesia daripada ke Tiongkok maupun Belanda.

Dalam SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran dan IDAS Jilid 6 dijelaskan keterlibatan Tionghoa dalam organisasi semi militer Jepang, pers Tionghoa pada masa Jepang, dan penutupan sekolah Tionghoa (Abdullah & Lapian, 2012f; Poesponegoro & Notosusanto, 2008f). Dalam menyongsong kemerdekaan, beberapa Tionghoa masuk sebagai ⁸⁰ anggota BPUPK yakni Liem Koen Hian, Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, dan Tan Eng Hoa (Dhakidae, 2020, hlm. 46; Setiono, 2008, hlm. 543). Selanjutnya dalam ⁹⁹ Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdapat nama Drs. Yap Tjwan Bing (Setiono, 2008, hlm. 445). Sebagaimana disampaikan Kwartanada (2020, hlm. 32), narasi tentang ini memang menyimpan persoalan. Dalam SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS Jilid VI tidak disebut nama-nama ini, malah dikatakan bahwa 60 orang anggota BPUPK di antaranya empat orang golongan Arab serta peranakan Belanda (Abdullah & Lapian, 2012f, hlm. 93; Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 122).

Selanjutnya dalam peristiwa Rengasdengklok, didapati nama Djiauw Kie Siong, seorang Tionghoa yang mendukung kemerdekaan Indonesia (Setiono, 2008, hlm. 548). Tentang

ini, IDAS tidak menyinggungnya, sementara SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran hanya menampilkan gambar rumah di Rengasdengklok yang menjadi tempat Sukarno dan Hatta diamankan tanpa menyebut nama Djiauw Kie Siong sebagai pemiliknya (Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 142). Pada masa mempertahankan kemerdekaan, Tionghoa turut bergabung dalam beberapa barisan pendukung Republik Indonesia. Akan tetapi, ada kalangan Tionghoa yang membentuk Pao An Tui yang didukung Belanda untuk mempertahankan diri dari aksi-aksi penjarahan. Meskipun berseberangan, Pao An Tui di daerah tertentu seperti di Padang pimpinan Sho Bun Seng justru mendukung perjuangan Indonesia. Pada masa ini terjadi aksi anti-Cina disertai pembunuhan dan penjarahan yang dikenal sebagai “Zaman Bersiap” seperti di Tangerang dan Bagansiapiapi tahun 1946 (Abdullah & Lopian, 2012f; Setiono, 2008; Sumantri, 1963).

Pada periode ini, SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran menyebut nama Laksamana Muda John Lie yang bertugas membeli senjata dan perlengkapan perang (Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 277). Selain itu dalam perjuangan diplomasi, tokoh Tionghoa juga turut terlibat sebagai perwakilan. Misalnya dalam Perundingan Renville, salah satu anggota delegasi Republik adalah dr. Tjoa Siek len (Abdullah & Lopian, 2012f, hlm. 373; Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 221). Demikian pula jasa Oey Gie Hwat yang bersama Suripno pada Juli 1947 ditugasi oleh Presiden Sukarno untuk menjajaki kemungkinan mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa Timur (Abdullah & Lopian, 2012f, hlm. 390). Selain para pendukung kemerdekaan, dalam SNI Edisi Pemutakhiran Jilid VI dan IDAS Jilid 6 disebut nama Tan Ling Djie sebagai salah satu

tokoh yang ditangkap bersama dengan Ir. Sakirman dan Abdulmajid akibat terlibat dalam peristiwa PKI Madiun 1948 (Abdullah & Lopian, 2012f, hlm. 397; Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 242). Demikian pula dengan sosok Thio Thian Tjong yang dalam Perundingan Renville menjadi penasihat Van Mook (Abdullah & Lopian, 2012f, hlm. 374). Sebenarnya dalam periode ini, IDAS tampak lebih detail mengungkap sosok-sosok Tionghoa yang berjasa maupun yang tampil berseberangan dengan Indonesia yang baru lahir.

Perlakuan pemerintah terhadap Tionghoa pada Demokrasi Liberal maupun Terpimpin banyak dipengaruhi praktik-praktik yang terjadi pada masa kolonial (Permana & Purwantiningsih, 2021). Terkait masalah ekonomi, SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran menyebut pula peran Dr. Ong Eng Die selain Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Demikian pula IDAS Jilid 7 tatkala menarasikan mengenai Program Benteng, lebih menonjolkan sisi keberhasilan program (Abdullah & Lopian, 2012g, hlm. 288). Dalam urusan politik, IDAS Jilid 7 mencatat komposisi keanggotaan Dewan Konstituante dan parlemen (DPR) terkait dengan kursi untuk golongan Tionghoa (Abdullah & Lopian, 2012g, hlm. 279).

Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno dituliskan beberapa persoalan terkait Tionghoa yang berkepanjangan. Antara lain masalah dwi kewarganegaraan yang muncul tahun 1955 (Xi, 2014). Terkait ini muncul kelompok yang mendukung proses integrasi wajar orang-orang Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia sebagaimana diusulkan Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) pimpinan Siauw Giok Tjhan. Ada pula yang memilih asimilasi total dengan menghilangkan identitas ketionghoan untuk menjadi bangsa Indonesia seutuhnya diusulkan oleh Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) diketuai Ong

Tjong Hai alias Kristoforus Sindhunata. Kelak setelah tragedi 1965, Baperki dibubarkan dan LPKB dengan dukungan militer menentukan kebijakan pemerintahan baru lewat program asimilasi. Pada periode ini, IDAS Jilid 7 juga mencatat kedekatan pemerintah dengan Tiongkok (Abdullah & Lopian, 2012g).

Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menjadi kisah suram. Hanya beberapa Tionghoa yang menjadi konglomerat dan mendominasi perekonomian (Arifin et al., 2016; Freedman, 2003; Sunny Lie & Bailey, 2016), namun sejak awal Orde Baru berkuasa, kampanye dan aksi anti-Cina (Sinophobia) yang berujung kerusuhan rasial meluas, mulai dari Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 hingga tumbanganya Orde Baru 1998. Antara lain terjadi di Purwakarta, Pekalongan, Situbondo, Tasikmalaya, Banjarmasin, Rengasdengklok, Makassar, Kebumen, Solo, dan Jakarta dalam kurun waktu 1996 sampai 1999 (Purdey, 2006). Puncaknya tentu saja di Jakarta dalam kerusuhan 12–15 Mei 1998. Tidak hanya kerusakan harta benda, namun juga harga diri dan nyawa. Ratusan perempuan Tionghoa diperkosa hingga mendorong banyak keluarga Tionghoa mengungsi ke luar negeri (Winarnita, Chan, & Butt, 2018). Tragedi ini juga disinggung dalam SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran (Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 669–670). Sementara IDAS Jilid 8 menyebutnya sebagai buah simalakama, keberhasilan ekonomi Tionghoa menimbulkan kecemburuan sosial yang membuat Tionghoa kerap menjadi korban kerusuhan (Abdullah & Lopian, 2012h, hlm. 65–66).

B. Tionghoa dalam Karya Sejarah Akademik dan Populer

Karya sejarah akademik dimaksudkan sebagai historiografi yang ditulis oleh kalangan akademisi atau sejarawan. Sementara karya sejarah populer dapat dihasilkan oleh masyarakat siapa saja yang menaruh perhatian pada sejarah. Dalam konsep yang berkembang dewasa ini, karya sejarah populer memang lebih identik dengan sejarah publik yang dihasilkan oleh masyarakat (Ashton & Kean, 2009; Sayer, 2017). Sementara tulisan para sejarawan atau akademisi sejarah lebih dianggap sebagai karya sejarah ilmiah. Akan tetapi, dalam konteks historiografi Tionghoa ini, sejarah akademik dan populer dapat diidentifikasi sebagai karya-karya sejarah yang tidak terikat dengan narasi sejarah resmi. Karya-karya ini bisa bersifat benar-benar akademis melalui riset ilmiah maupun populer yang beredar di masyarakat. Bentuknya pun beragam, mulai dari buku, jurnal, maupun audio visual. Pada intinya, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana Tionghoa dinarasikan dalam karya-karya di luar sejarah resmi.

Karya sejarah yang pertama kalinya dengan cukup komprehensif memberi ruang memadai bagi representasi Tionghoa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia barangkali ditulis oleh Iwa Kusuma Sumantri. Penulis bukanlah sejarawan, namun seorang ahli hukum yang pernah beberapa kali menduduki jabatan menteri dalam kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Tentu saja buku karyanya yang berjudul “Sedjarah Revolusi Indonesia” yang terbit tahun 1963 sebanyak tiga jilid banyak didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman dirinya sebagai pelaku dan saksi sejarah. Untuk itu, bukunya

ini dapat dikatakan sarat dengan sumber-sumber primer sejarah. Pada jilid kedua buku ini sepanjang tujuh halaman dituliskan peranan golongan Tionghoa dalam masa revolusi bersenjata hingga peristiwa Tangerang dan Konferensi Pangkalpinang (Sumantri, 1963, hlm. 178–184). Bercermin dari karya ini, dapat diduga pada tahun-tahun tersebut sangat dimungkinkan Tionghoa juga dibicarakan dalam karya-karya sejarah yang ditulis oleh para penulis lain.



Gambar 2 Tiga jilid buku *Sedjarah Revolusi Indonesia* karya Iwa Kusuma Sumantri

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Memasuki era Orde Baru, historiografi Tionghoa tidak serta-merta lenyap. Pada awal Orde Baru, sejarah yang berhubungan dengan Tionghoa masih dapat dijumpai. Pada dasawarsa 1970-an sebelum SNI terbit, beberapa historiografi sejarah lokal yang difasilitasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih mengakomodasi peran Tionghoa. Misalnya dalam *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah* yang menyebut nama-nama Go

Weng Sui, The Tong Lam, Sho Lip Pia, dan Shio Kie Lien sebagai anggota Pasukan Pemberontak Pemuda Merah Putih yang menghadapi Belanda saat perang kemerdekaan (Kwartanada, 2020, hlm. 26). Bahkan pada dekade 1980-an dan 1990-an, masa-masa ketika Orde Baru sedang kokoh-kokohnya, beberapa karya sejarah masih mengisahkan kiprah warga Tionghoa dalam perjuangan bangsa Indonesia. Misalnya dalam buku sejarah Brigade Infantri (Brigif) 15 Kujang, Siliwangi dikisahkan tentang para sukarelawan untuk Operasi Dwikora dari keturunan Tionghoa. Buku sejarah Pasukan “O” Angkatan Laut atau Pemuda Angkatan Samudra Oembaran di Jawa Timur juga menghadirkan sosok Oei Ban Hok yang memasok obat-obatan bagi pasukan “O”. Demikian pula buku sejarah Trikora terbitan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI menceritakan peran Mayor AURI Gan Sing Liep (Kwartanada, 2020, hlm. 27). Sayangnya buku-buku ini kurang terpublikasi sehingga hanya kalangan terbatas saja di masyarakat yang membacanya.

Selain terselip di sana-sini – menariknya banyak di antaranya karya-karya sejarah militer – historiografi Tionghoa pada masa Orde Baru terbilang minim. Buku-buku sejarah yang secara khusus mengkaji peran Tionghoa dalam perjuangan bangsa yang dapat dijumpai pada masa ini adalah karya-karya dari Leo Suryadinata. Kajiannya pun lebih banyak berkuat pada politik Tionghoa di Jawa. Sementara sejarawan atau peneliti lain termasuk jarang yang mengangkat secara mengenai sejarah Tionghoa dan perannya bagi bangsa. Sartono Kartodirdjo dalam buku “Pengantar Sejarah Indonesia Baru” memberi sedikit porsi pada Tionghoa. Dalam Jilid 1 dibahas khusus “Peranan Pedagang Cina” dan “Pemberontakan Cina” beserta pengaruhnya pada pembagian kerajaan-kerajaan di Jawa (Kartodirdjo, 1987).

Demikian pula pada Jilid 2 – meskipun dengan pandangan yang agak berbeda jika dibandingkan dengan Jilid 1 – juga dibahas mengenai “Golongan Cina” dalam kaitannya dengan pergerakan nasional dan juga pers (Kartodirdjo, 1990). Buku sejarah lainnya yang terbilang mengakomodasi Tionghoa dan juga sering menjadi rujukan misalnya “Sejarah Indonesia Modern” karya M.C. Ricklefs.

Perubahan besar terjadi memasuki masa Reformasi. Bagaimana pun, kendati penuh luka dan duka, peristiwa Mei 1998 menjadi titik balik bagi masyarakat Tionghoa (Turner, 2003, hlm. 344). Lahirnya reformasi yang mendorong perubahan di segala bidang juga mengubah pandangan dan sikap terhadap Tionghoa sebagai bukti gagalnya asimilasi (Hoon, 2006, hlm. 153). Masyarakat Tionghoa juga memiliki kesempatan yang terbuka di berbagai bidang termasuk mendirikan organisasi sosial politik, partai politik, dan menjadi pejabat politik. Salah satu daerah di Indonesia yang begitu dinamis dalam merespons perubahan ini adalah Kalimantan Barat (Tanasaldy, 2015).

Pada masa Reformasi, berbagai kajian, penelitian, dan publikasi ilmiah mengenai Tionghoa juga makin berlimpah. Para peneliti tentang Tionghoa maupun penulis sejarah Tionghoa banyak bermunculan. Hal ini seiring dengan dibukanya kebebasan berekspresi, berpendapat, dan upaya penghapusan diskriminasi terhadap Tionghoa. Di sisi lain, perubahan ini membuka kesempatan bagi Tionghoa untuk memilih jalan integrasi wajar dengan melestarikan budayanya dalam hidup berbangsa atau asimilasi seperti cara Orde Baru (Purdey, 2003).



Gambar 3. Sebagian kecil karya-karya sejarah populer tentang Tionghoa setelah Reformasi

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Buku yang tergolong komprehensif membahas mengenai eksistensi dan peran Tionghoa dalam perjalanan sejarah Indonesia ditulis oleh Benny G. Setiono tahun 2008 berjudul “Tionghoa dalam Pusaran Politik” (Setiono, 2008). Demikian pula buku “Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran: Sejak Nusantara sampai Indonesia” yang menampilkan sepenggal demi sepenggal kisah-kisah tentang peran Tionghoa dalam perjuangan bangsa Indonesia (Santosa, 2014). Terakhir yang fenomenal yakni karya bersama para sejarawan dan pemerhati Tionghoa berjudul “Tionghoa dalam Keindonesiaan: Peran dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa” secara tematis mengkaji mengenai Tionghoa yang di dalamnya juga membincangkan mengenai sejarahnya (Suryadinata, 2016). Hadirnya buku sebanyak tiga jilid yang mengkaji Tionghoa dari berbagai perspektif dan perannya di berbagai bidang ini digagas oleh Yayasan Nabil yang didirikan oleh Eddie Lembong. Lainnya lagi begitu banyak buku-buku tentang Tionghoa dan budayanya, biografi tokoh-tokoh

Tionghoa, hingga novel-novel yang berlatar kehidupan warga Tionghoa.

Dalam tataran riset, penelitian tentang Tionghoa di perguruan tinggi di Indonesia sejak tahun 1960-an hingga 2000-an menunjukkan dinamika menarik. Wirawan (2017) mencatat bahwa penelitian masyarakat Tionghoa kemungkinan yang paling awal dilakukan oleh Leo Suryadinata dalam skripsinya di Universitas Indonesia tahun 1965. Skripsi tersebut membahas tentang pers Indonesia-Tionghoa. Tahun 1970-an, penelitian tentang Tionghoa masih terbatas. Tema budaya Tionghoa dijumpai cukup signifikan dalam riset perguruan tinggi pada tahun 1980-an. Tema-tema yang lebih luas mulai muncul pada tahun 1990-an. Akan tetapi, pada era Orde Baru ini karya-karya tentang Tionghoa masih sebatas kajian akademik di perguruan tinggi. Sejak tahun 2000-an, riset mengenai Tionghoa makin meningkat jumlahnya dan beragam temanya secara signifikan. Lebih lanjut Wirawan (2017) memberi catatan akhir, bahwa periode zaman pendudukan Jepang, sejarah perempuan, dan seni masih terbuka lebar untuk diangkat sebagai tema-tema studi terkait masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Sejak Orde Baru tumbang, seiring perkembangan penelitian, kajian-kajian populer tentang masyarakat Tionghoa juga bertumbuh pesat. Apalagi media penyampai konten-konten sejarah dalam versi digital berkembang begitu luar biasa akhir-akhir ini. Pemanfaatan bahan ajar dengan media-media kekinian ini juga sudah merambah ke dalam pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Gambar, video, dan film tentu tak lagi asing, namun pada era kekinian juga mulai dimanfaatkan poster dalam rupa digital atau infografik, siniar (*podcast*), hingga meme (Kurniawan, 2020; Nur'aini, Supriatna, & Ratmaningsih, 2023; Suswandari, Absor, &

Soleh, 2021). Berbagai media ini memiliki *platform* media sosial yang begitu akrab dengan masyarakat pada umumnya termasuk siswa, seperti *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Spotify*, hingga *TikTok*. Pada ranah perkembangan media publikasi ini, representasi Tionghoa lebih banyak hadir sebagai karya sejarah publik ketimbang akademik. Kendati tentu saja sisi akademik dari karya-karya tersebut masih dapat dijumpai di dalamnya. Celah ini banyak diisi oleh kisah-kisah sejarah lokal (*local history*) dan keluarga (*family history*) mengenai kelompok masyarakat Tionghoa di Indonesia.

C. Tionghoa dalam Buku Teks Sejarah

Pendidikan dilaksanakan melalui sistem pembelajaran yang melibatkan banyak komponen. Salah satu komponen tersebut adalah buku teks yang berfungsi sebagai bahan ajar (*instructional materials*). Buku teks berisi seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis sehingga siswa dapat mempelajari semua kompetensi secara utuh dan terpadu (Prastowo, 2014). Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2017, buku teks atau buku cetak disebut sebagai buku pendidikan yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Buku pendidikan terdiri atas buku teks dan buku nonteks. Buku teks terdiri atas buku utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama bersifat wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya. Buku teks pendamping disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.

Dari era ke era, buku teks masih menjadi sumber pembelajaran utama yang dipakai di sekolah maka harus selalu dikembangkan dan ditingkatkan kualifikasinya (Pusat Perbukuan, 2019). Buku teks dalam penggunaannya disajikan oleh guru untuk kemudian diolah dan dipahami siswa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan (Ibrahim & Syaodih, 2002, hlm. 100). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 diatur tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan bahwa “Buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan” (Kemendikbud RI, 2016).

Selain *handout*, modul, dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), buku teks juga tergolong ke dalam bahan ajar cetak. Buku teks ditulis dengan tujuan memberi ruang menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis siswa (E. Supriatna, 2013). Sejalan dengan Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan buku teks dilakukan atas dasar pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003). Pengembangan bahan ajar hendaknya tidak mengembangkan ranah kognitif saja, namun juga afektif dan psikomotorik. Buku teks digunakan untuk kepentingan pendidikan, maka buku teks juga mengemban tugas sebagai sarana pendidikan karakter. Untuk itu, pengembangan buku teks harus tepat

agar dapat membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan secara utuh dan optimal.

Jaminan bahwa buku teks yang diterbitkan memenuhi kepentingan negara juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan. “Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan baik buku teks pelajaran maupun buku non teks pelajaran harus sejalan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan norma positif yang berlaku di masyarakat”. Selanjutnya juga diatur bahwa “Buku teks pelajaran merupakan perangkat operasional utama atas pelaksanaan kurikulum dan buku non teks pelajaran merupakan sarana pendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan pendidik sehingga harus memenuhi kriteria buku yang layak digunakan satuan pendidikan”. Untuk itu buku teks pelajaran yang diterbitkan oleh negara maupun swasta harus melalui proses telaah dan penilaian terlebih dahulu sebelum digunakan.

Ada tiga tipe buku teks sejarah yaitu (1) *precis* artinya ringkasan, buku cetak ini menyajikan kerangka atau garis besar fakta-fakta sejarah; (2) *manuals* artinya manual, buku cetak ini mengembangkan garis-garis besar secara lengkap namun masih menyediakan ruang kemungkinan untuk pengembangan materi lebih lanjut, dan (3) *cours* artinya pelajaran, buku cetak ini dapat berdiri sendiri karena ulasannya yang terbilang lengkap dan dapat dipahami tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut (Kochhar, 2008, hlm. 168). Buku teks sejarah yang berkembang di Indonesia, baik terbitan negara (utama) maupun swasta (pendamping), umumnya tipe *cours* yakni ulasannya relatif lengkap,

membantu guru, dan membantu siswa untuk belajar secara mandiri.

Idealnya, buku teks mencerminkan dan merepresentasikan isi dari kurikulum yang dianut (Karim, 1980, hlm. 2). Perkembangan pemikiran dan keberlanjutan kurikulum sejak awal kemerdekaan hingga kini disebabkan oleh faktor eksternal seperti keputusan politik dan faktor internal yang bersifat filosofis dan teoretis pendidikan. Pemikiran kurikulum di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zamannya selain juga perubahan-perubahan politik yang terjadi secara nasional. Pada masa awal kemerdekaan, kurikulum ditandai dengan pemikiran untuk menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Pada masa Demokrasi Liberal, mulai ada pemikiran yang memberi tempat bagi relasi dengan bangsa lain secara lebih luas. Pada masa Demokrasi Terpimpin, kurikulum bersifat ideologis seturut semangat ²¹ Manipol USDEK (Manifesto Politik: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Pada masa Orde Baru, kurikulum menolak komunisme dan ideologi yang dianut dalam kurikulum masa Demokrasi Terpimpin, berlandaskan ideologi Pancasila, berorientasi pembangunan, dan mulai tersistematis. Pada masa Reformasi, kurikulum ditandai dengan semangat menolak hal-hal yang berbau Orde Baru, memperhatikan perkembangan zaman seperti teknologi informasi dan komunikasi, dan mempersiapkan menghadapi abad ke-21. Untuk itu, kurikulum yang berlaku tidak hanya menentukan dalam konteks akademis, namun juga dinamika politik, pandangan, dan campur tangan pemerintah dalam penulisan buku teks sejarah menjadi hal yang kerap terjadi di banyak negara.

Buku teks sejarah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di negara mana pun karena memainkan peran utama sebagai penjaga ideologi dan pembentuk identitas nasional (Huntington & Won, 2020; Kim & Kim, 2019; Kochhar, 2008; Pavlick, 2019; Hieronymus Purwanta, Santosa, & Haryono, 2015; Qazi & Shah, 2019; Sumaludin, 2017; Wang, 2016). Selain terkait dengan perasaan nasionalisme, beberapa negara yang memiliki latar belakang sejarah penuh konflik juga memanfaatkan pembelajaran sejarah sesuai dengan kebutuhannya itu. Dalam konteks tersebut, buku teks sejarah juga berperan dalam memahami pengalaman konflik yang pernah terjadi serta membina perdamaian dan hidup harmonis antarkelompok masyarakat (Ide, Kirchheimer, & Bentrovato, 2018).

Buku teks sejarah menyajikan materi-materi pilihan yang menjadi *the best story* bagi bangsa yang disebut sebagai pendekatan berorientasi pada "*enhancing collective memory*" (Seixas, 2000, hlm. 20). Untuk itu buku teks sejarah paling krusial bila dibandingkan buku teks mata pelajaran lainnya (Crutchley, Parker, & Roberts, 2018). Materi-materi pilihan yang mengacu pada *official history* bertujuan menumbuhkan kesadaran historis untuk penanaman nilai-nilai (*values*) seperti nasionalisme, patriotisme, dan karakter kebangsaan lainnya untuk membentuk *national pride* (Aman, 2011, hlm. 31; Pavlick, 2019; Sjamsuddin, 2017; Wineburg, 2006, hlm. 16; Wiriaatmadja, 2002, hlm. 146–150; Yao, 2018). Sejarah nasional menekankan peran bangsa Indonesia serta masyarakat dan kebudayaannya dari abad ke abad. Untuk mewujudkan integrasi nasional dalam artian mempersatukan yang berbeda-beda atau terpisah-pisah ke dalam suatu kesatuan maka loyalitas rakyat terhadap golongan regional, etnis, bahasa, dan religius perlu

ditingkatkan menjadi loyalitas terhadap nasion atau bangsa (Kartodirdjo, 1982, hlm. 239).

Buku teks sejarah memuat *official history* atau sejarah resmi versi pemerintah. Hasan (2012, hlm. 29) menjelaskannya sebagai berikut

Dalam konteks pendidikan sejarah maka tafsiran resmi pemerintah atau “official history” yang digunakan. Dengan “official history” bukan kebenaran yang berdasarkan kaedah ilmu semata yang dijadikan kriteria tetapi kebenaran berdasarkan kaedah keilmuan dan kepentingan bangsa. ... Setiap pandangan dan pendapat dapat dibenarkan menurut kaedah keilmuan termasuk pendapat dan pandangan yang dianut pemerintah. Setiap pandangan dan pendapat terkandung “bias” termasuk pandangan resmi pemerintah. Sesuai dengan kaedah “official history” dan sesuai dengan kaedah bahwa pendidikan adalah wewenang pemerintah dalam menentukan maka pemerintah memiliki wewenang politis dalam menentukan versi mana yang digunakan untuk pendidikan sejarah.

Pengaruh dinamika sosial politik – yang memiliki wewenang dalam menentukan *official history* – terhadap penulisan narasi buku teks sejarah jamak terjadi di banyak negara. Buku teks sejarah di Irlandia Utara beberapa kali mengalami perubahan konten terutama dalam mengkaji peristiwa kontroversial. Dari lima belas buku teks sejarah yang terbit sejak tahun 1968-2010 menyajikan perspektif yang beragam (Terra, 2014). Bagi negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Yugoslavia, Estonia, Latvia, Slovakia, Ukraina dan sebagainya, representasi periode Perang Dunia I, II, maupun Perang Dingin dalam buku teks sejarah mereka juga menyimpan persoalan. Dengan analisis perspektif temporal terjadi perubahan dan perbedaan sikap yang dipe-

ngaruhi ideologi pemerintah dalam memunculkan *common sense* yang dibangun oleh narasi buku teksnya (Kello & Wagner, 2017; Korbits, 2014; Korostelina, 2010; Michael, 2013; Seixas, Fromowitz, & Hill, 2005; Trost & Trbovc, 2020). Buku teks Sejarah Amerika juga mengalami misinterpretasi dalam menjelaskan gerakan abolisi. Artinya bahasa dijadikan sarana untuk menyembunyikan hal-hal tertentu dalam historiografi buku teks sejarah ketika menarasikan tentang perbudakan (Stoskopf & Bermudez, 2017).

Demikian pula di Indonesia, penulisan buku teks sejarah yang didasarkan pada narasi sejarah resmi dapat dijabarkan ke dalam beberapa masa. Pada awal kemerdekaan, penulisan buku teks sejarah berusaha lepas dari pengaruh kolonialisme. Buku teks sejarah bertujuan membangkitkan semangat kemerdekaan dan kebanggaan pada negara yang baru merdeka. Situasi ini masih mewarnai penulisan buku teks pada masa Demokrasi Liberal. Memasuki Demokrasi Terpimpin, buku teks sejarah diwarnai gagasan sosialisme serta ketokohan dan ajaran Presiden Sukarno. Sementara pada masa Orde Baru, penulisan buku teks sejarah menyuguhkan nuansa pendidikan nasionalisme dengan sifat militeristik, anti-komunis, de-Sukarnoisasi dan menonjolkan ketokohan Presiden Suharto, serta mengusung keberhasilan pembangunan (Darmawan, 2019; Darmawan & Mulyana, 2019; Farawita, 2018; McGregor, 2008; Mulyana, 2013; Hieronymus Purwanta, 2012, 2016). Lenyap dan munculnya materi atau versi tertentu dalam buku teks sejarah tidak lepas dari pengaruh politik dan kepentingan pemerintah sebagai ideologi dalam buku teks. Pemerintah memiliki otoritas untuk membatasi, menambah, dan menghilangkan materi sejarah dan menafsirkannya sendiri (Darmawan, Sjamsuddin, & Mulyana, 2018).



Gambar 4 Beberapa buku teks pada awal kemerdekaan sampai sebelum Orde Baru yang mengakomodasi peran Tionghoa dalam Sejarah Indonesia

(Sumber: Dokumentasi pribadi)

Sejalan dengan perlakuan pemerintah yang berkuasa, historiografi Tionghoa di Indonesia begitu dinamis mengikuti perubahan politik yang menyertainya (Kurniawan, Supriatna, Mulyana, & Yulifar, 2023b). Buku-buku teks sejarah pada masa awal kemerdekaan telah membahas mengenai peran Tionghoa. Episode sejarah yang wajib muncul mengenai peristiwa pembantaian terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia oleh VOC hingga meletusnya pemberontakan Tionghoa atau Geger Pacinan tahun 1740-1743 (Pane, 1950, hlm. 232–235; Sanusi, 1955, hlm. 68–72; Sundhoro, 1969, hlm. 31–34; Suparno, 1960, hlm. 5–10). Historiografi Tionghoa dalam buku teks sejarah pada masa itu juga menyinggung peran Tionghoa dalam lingkup sejarah lokal. Pane (1956, hlm. 110–111) dan Sundhoro (1969, hlm. 79) dalam buku teks yang ditulisnya memuat peristiwa perlawanan orang-orang Tionghoa terhadap Belanda di Montrado (Sambas) dan Mandor. Perlawanan-perlawanan

Tionghoa di Kalimantan Barat ini terjadi berulang kali sejak tahun 1716 hingga 1888.

Situasi berubah memasuki era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pada awal pemerintahan anti komunis yang ditopang kuat oleh militer ini, narasi-narasi tentang Tionghoa disampaikan dengan nuansa negatif yang bermaksud memarginalisasi (Kurniawan et al., 2023b). Pada tahun-tahun selanjutnya, narasi tentang Tionghoa malah sama sekali lenyap. Ini tidak lepas dari terbitnya SNI pada tahun 1975. Karya *official history* atau sejarah resmi ini menjadi acuan penulisan buku teks sejarah yang digunakan di sekolah. Dalam buku ini, Tionghoa dihapus dari memori sejarah nasional (Kwartanada, 2020). Mulai Kurikulum 1975, pembelajaran sejarah tidak pernah membicarakan peran Tionghoa dalam sejarah nasional. Narasi-narasi tentang Tionghoa tidak pernah lagi didengar generasi muda. Stereotip maupun prasangka terhadap Tionghoa sebagaimana yang dikonstruksi pemerintah Orde Baru dipupuk guna mendukung keberhasilan program asimilasi.

Tionghoa mulai diakomodasi kembali dalam Kurikulum 2006. Dalam buku teks Sejarah SMA/MA Kelas XI Bahasa muncul pembahasan Sastra Melayu Tionghoa dan tokoh Kwee Tek Hoay (Kwartanada, 2020, hlm. 33). Itu pun dari buku teks terbitan swasta yang sifatnya penunjang. Paling signifikan, representasi Tionghoa muncul dalam buku teks Sejarah Indonesia menurut Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI. Buku teks ini bersifat wajib dan secara resmi diterbitkan oleh pemerintah sehingga mencerminkan pandangan negara. Memang kini juga muncul Kurikulum Merdeka, namun pada kelas X SMA relatif mengusik ruang gerak karena Sejarah terintegrasi ke dalam mata pelajaran IPS. Selain itu, pembelajaran juga didorong pada materi

yang bersifat esensial. Kajian tentang Tionghoa mengalami kenisbian ketika dilihat dari perspektif materi esensial karena sangat bergantung pada nilai dan tujuan yang diyakini oleh masing-masing guru. Ruang untuk merepresentasikan Tionghoa dalam pembelajaran sejarah terbuka melalui strans kecakapan belajar sejarah yang diharapkan dalam Kurikulum Merdeka. Untuk itu, dalam kajian ini, analisis wacana kritis dilakukan terhadap buku¹¹⁸ buku teks Sejarah Indonesia menurut Kurikulum 2013.



Gambaran 5 Buku teks Sejarah Indonesia menurut Kurikulum 2013 yang kembali mengakomodasi narasi tentang Tionghoa

(Sumber: Tangkap layar file buku digital atau e-book)

Walaupun narasi yang disajikan dalam buku teks sejarah senantiasa merepresentasikan politik pemerintah yang berkuasa, namun hal ini juga tidaklah mudah. Sering terjadi permasalahan mendasar yakni ketika kurikulum berubah, namun narasi buku teks tidak berubah. Buku teks sejarah yang beredar pada masa Reformasi tidak jauh berbeda dengan isi¹²⁸ buku teks pada masa Orde Baru. Penulisan buku teks lebih banyak didasarkan dari buku teks yang telah ada sebelumnya, kendati kurikulum yang berlaku telah berubah (Darmawan, 2019). Pernyataan “berdasarkan kurikulum” dalam sampul buku teks dianggap memiliki validitas. Seakan kedalaman materi maupun ruang lingkungannya sudah tidak perlu diperbincangkan lagi (Hasan, 1997, hlm. 135). Hal ini

membuat penulisan buku teks sejarah tidak berkembang sehingga yang bersifat tunggal pada era Orde Baru terlanjur bercokol dan sulit disesuaikan dengan dinamika sosial maupun politik. Buku teks sejarah memiliki aspek hegemoni yang kuat dan sulit berubah. Poin inilah yang menjadi titik pijak perlunya membongkar representasi Tionghoa sebagaimana diupayakan dalam penulisan buku teks Sejarah Indonesia pada Kurikulum 2013.



BAB II

IDENTIFIKASI TIONGHOA DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA

Dalam kajian ini, narasi Tionghoa yang diidentifikasi berasal dari buku teks Sejarah Indonesia menurut Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengatur bidang studi sejarah menjadi dua mata pelajaran yakni Sejarah Indonesia dan Sejarah.²⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 70 Tahun 2013, mata pelajaran Sejarah Indonesia wajib ditempuh semua siswa di jenjang pendidikan menengah tanpa memandang peminatan yang dipilihnya termasuk pada jenjang sekolah vokasional. Hal ini menunjukkan posisi dan peran Sejarah Indonesia yang begitu penting bagi pendidikan nilai generasi muda. Sementara mata pelajaran Sejarah yang hanya diperuntukkan bagi siswa pada peminatan IPS memiliki tujuan yang berbeda. Mata pelajaran Sejarah menekankan aspek akademik dan keilmuan sejarah sebagai bagian dari ilmu sosial.

⁴ Mata pelajaran Sejarah Indonesia dalam Kurikulum 2013 diberikan pada setiap jenjang dan peminatan di SMA/MA/SMK/MAK. Akan tetapi, dalam perkembangannya, secara khusus di SMK/MAK, kurikulum Sejarah Indonesia mengalami

perubahan. Terakhir,²⁷ berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 180/D/KEP/KR/2017 disebutkan bahwa mata pelajaran Sejarah Indonesia dalam struktur kurikulum SMK/MAK berkurang menjadi 108 jam yang berarti hanya diberikan pada jenjang kelas X saja. Dengan demikian terjadi pemadatan kurikulum dan materi Sejarah Indonesia di SMK/MAK, namun tidak demikian halnya di SMA/MA.

Secara khusus, objek yang diidentifikasi dalam kajian buku teks ini meliputi teks-teks yang terdapat² dalam buku teks Sejarah Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK terbitan Kemendikbud RI melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Buku teks tersebut diterbitkan dengan revisi pada tahun 2017 dan 2018. Penyusunannya dilakukan sejak tahun 2013 dan 2014 untuk memenuhi kebutuhan Kurikulum 2013. Sebagaimana telah dijelaskan, seiring pemadatan kurikulum Sejarah Indonesia di SMK/MAK, maka penggunaan buku teks tersebut menjadi paling relevan bagi siswa di SMA/MA. Untuk itu, dengan pertimbangan praktis, kita hanya akan menyebutnya sebagai buku teks Sejarah Indonesia. Sejalan dengan visinya,¹⁰³ mata pelajaran Sejarah Indonesia menekankan aspek penanaman nilai untuk menumbuhkembangkan sikap kebangsaan. Mata pelajaran Sejarah Indonesia mengemban visi pendidikan nilai karakter yang hendak ditumbuhkembangkan dalam diri siswa. Representasi Tionghoa dalam materi-materi *school history* yang diejawantahkan dalam buku teks Sejarah Indonesia diharapkan menyandingkan nilai multikultural atau kebinekaan untuk integrasi bangsa yang juga menjadi bagian dari pendidikan nilai karakter bagi siswa sebagai generasi muda.

Terkait aspek itu, penelitian buku teks di negara lain kerap menunjukkan kegagalan dalam menampilkan nilai multikultural. Buku teks sejarah belum mengakomodasi minoritas sekaligus membentuk pandangan sejarah nasional yang inklusif dengan mengeksplorasi situasi multietnis yang ada. Penelitian Chu (2015) mendapati kelompok etnis minoritas terpinggirkan dalam narasi buku teks sejarah tingkat sekolah dasar di Tiongkok. Pengetahuan tentang mereka juga tidak lengkap karena adanya kecenderungan stereotipe. Pengetahuan tentang minoritas dikonstruksi dan disajikan dari sudut pandang orang Han yang menjadi mayoritas di Tiongkok. Demikian pula penelitian Yan & Vickers (2019) yang membandingkan berbagai buku teks yang terbit di Tiongkok selama tahun 1990-an sampai 2000-an. Hasilnya menunjukkan bahwa narasi buku teks sejarah yang dibangun dari tahun ke tahun justru makin menjauh dari cita-cita pembelajaran inklusif dan multietnis. Di Indonesia, buku teks Sejarah Indonesia pada Kurikulum 2013 mulai mengakomodasi keberagaman, termasuk kelompok minoritas Tionghoa yang pernah terpinggirkan dalam narasi sejarah nasional.

Sejak Reformasi 1998, bahasa, sastra, dan budaya Tionghoa makin banyak dipelajari, bahkan oleh mereka yang bukan Tionghoa. Dalam perkembangan ilmu sejarah, berbagai historiografi Tionghoa juga bermunculan. Perspektif baru mengenai Tionghoa mulai terbuka dan mengubah pandangan bersama mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkembang selama Orde Baru. Sejumlah organisasi sipil didirikan untuk mencoba mengatasi stereotipe anti-Cina yang selama ini berkembang (Giblin, 2003). Wacana nasionalisme Indonesia yang sebelumnya kerap menempatkan Tionghoa sebagai *liyan* mengalami

perubahan. Asimilasi telah gagal dan muncul pergeseran pandangan terhadap Tionghoa ke arah yang lebih positif sehingga konsep kebinekaan lebih diterima sebagai strategi untuk memperkuat integrasi bangsa (Purdey, 2003). Perubahan tersebut tentu memengaruhi wacana nasionalisme dan persatuan ala Orde Baru yang selama ini dibangun dalam buku teks sejarah.

Nasionalisme secara umum biasa ditempatkan sebagai ideologi dalam buku teks (Mulyana, 2021). Akan tetapi, perubahan wacana nasionalisme dan integrasi yang memberi tempat pada keberagaman bangsa di era Reformasi menjadi faktor pendorong hadirnya kembali Tionghoa dalam buku teks Sejarah Indonesia. Buku teks tidak hanya mewakili kurikulum yang berlaku, namun juga menjadi titik temu antara siswa dengan kekuatan makro masyarakat, budaya, dan politik. Buku teks isinya tidak netral dan semestinya mencerminkan kekuatan yang erat kaitannya dengan perubahan sosial budaya yang mendasarinya (Lucy, Demzky, Bromley, & Jurafsky, 2020). Untuk itu, meskipun Kurikulum 2013 tidak secara eksplisit menunjukkan perlunya representasi Tionghoa dihadirkan dalam buku teks, namun dorongan perubahan sosial politik setelah Orde Baru tumbang lebih menentukan. Di sisi lain, temuan Darmawan (2019) dalam penelitian disertasinya mengindikasikan adanya relasi kuasa Orde Baru dalam produksi buku teks. Wacana nasionalisme dalam buku teks sejarah pada masa Orde Baru dan Reformasi tidak menunjukkan perubahan mendasar. Hal ini makin meyakinkan bahwa penentuan materi dan porsi representasi Tionghoa dalam buku teks masih dipengaruhi aspek politis warisan Orde Baru.

Representasi Tionghoa yang mulai dihadirkan dalam SNI Edisi Pemutakhiran tahun 2008 maupun IDAS 2012

ditanggapi cukup signifikan dalam penulisan buku teks Sejarah Indonesia pada Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI tahun 2017 dan 2018. Sebelumnya Kurikulum 2006 dalam buku teks Sejarah untuk penjurusan Bahasa di SMA juga mulai mengakomodasi narasi tentang Tionghoa (Kwartanada, 2020), namun tidak seberarti buku teks Sejarah Indonesia pada Kurikulum 2013 yang sifatnya wajib untuk semua peminatan di SMA. Harus diakui bahwa dinamika Reformasi 1998 juga membawa perubahan dengan diadakannya kembali Tionghoa dalam pembelajaran sejarah. Fenomena serupa jamak terjadi di negara-negara lain, salah satunya Estonia yang menunjukkan perubahan dalam menampilkan peran Uni Soviet dalam buku teks sejarahnya. Uni Soviet ditampilkan positif dalam buku teks sejarah Estonia tahun 1957 dan 1986. Setelah Estonia lepas dari Uni Soviet, dalam buku teks terbitan tahun 2000 muncul penilaian negatif terhadap Uni Soviet (Korbits, 2014). Artinya dinamika politik menentukan dalam penulisan buku teks sejarah di suatu negara.

Kehadiran narasi tentang Tionghoa terkait erat dengan SNI Edisi pemutakhiran dan IDAS juga tampak dari pemanfaatan kedua karya sejarah resmi ini sebagai referensi yang dominan diacu oleh buku teks Sejarah Indonesia. Ada dua alasan pokok. Pertama, seperti telah dijelaskan, SNI Edisi Pemutakhiran dan IDAS (sebagai alternatif) merupakan karya sejarah nasional yang menjadi sejarah resmi di era Reformasi. Sebagai tambahan, IDAS lebih akomodatif terhadap minoritas termasuk Tionghoa (Kwartanada, 2020). Sosok-sosok Tionghoa yang berjasa dalam perjuangan bangsa Indonesia dikaji lebih detail dalam IDAS. Kedua, temuan menunjukkan bahwa sebagian dari penulis buku teks Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud RI ini juga terlibat dalam penulisan

IDAS. Dengan demikian, amatlah wajar apabila gagasan-gagasan IDAS masuk dan turut mengisi narasi-narasi dalam buku teks, termasuk tentang Tionghoa.

Tersedia empat jilid buku teks Sejarah Indonesia yang masing-masing diperuntukkan bagi kelas X, XI semester 1, XI semester 2, dan XII SMA. Tim penulis dan penelaah buku teks tersebut juga dipilih dan ditentukan oleh pihak Kemendikbud RI yang pada saat itu melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Buku teks yang diterbitkan oleh pemerintah sudah sewajarnya akan merepresentasikan *school history* yang diturunkan dari *official history* yang ditetapkan negara. Proses penulisan hingga publikasi buku teks ini menggunakan anggaran negara dan didistribusikan dalam bentuk digital sehingga dapat diunduh secara bebas. Dengan demikian, buku teks tersebut berpotensi untuk digunakan secara luas pada sekolah-sekolah di Indonesia. Buku digital ini dapat dicetak menjadi buku fisik oleh percetakan-percetakan seizin pemerintah. Untuk penjualannya ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan lima zona.

Munculnya kembali narasi tentang Tionghoa dalam buku teks Sejarah Indonesia yang dianalisis ini mencerminkan pandangan negara. Buku teks ini diterbitkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud RI sebagai buku teks utama yang wajib digunakan dalam pembelajaran (Pusat Perbukuan, 2019). Sementara buku teks pendamping yang disusun oleh masyarakat melalui penerbitan swasta belum banyak yang mengakomodasi narasi terkait Tionghoa dan masih didominasi narasi lawas gaya Orde Baru. Salah satu penyebabnya, penulis buku teks kerap mendasarkan tulisannya pada buku teks sebelumnya (Darmawan, 2019). Validitas isi buku teks juga diyakini begitu saja asal terdapat pernyataan “berdasarkan kurikulum” dalam sampul buku

teks (Hasan, 2000). Temuan menarik di lapangan justru menunjukkan buku teks pendamping ini lebih banyak digunakan oleh guru dan siswa ketimbang buku teks wajib dari pemerintah. Situasi ini menguatkan perlunya peran guru dalam mengolah bahan ajar yang akomodatif, komprehensif, dan bermakna bagi siswa.

Buku teks Sejarah Indonesia yang dikaji hanyalah buku siswa – tidak termasuk buku guru – sehingga pengguna utamanya adalah siswa. Dalam disclaimer ditegaskan bahwa buku siswa disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kemendikbud RI dan digunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku-buku teks ini disebut sebagai dokumen hidup (*living document*) yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Buku-buku teks ini membuka diri untuk dikritisi dan menerima masukan dari berbagai kalangan demi meningkatkan kualitasnya. Di sisi lain, dalam perkembangannya sekarang ini, penulisan buku teks yang baru tentu saja dibutuhkan seiring dengan penerapan Kurikulum Merdeka. Pada kesempatan lain, analisis narasi Tionghoa dalam buku teks keluaran Kurikulum Merdeka tentu juga diperlukan.

Identifikasi narasi Tionghoa dilakukan dengan menelusuri kata, kalimat, paragraf, maupun tanda atau simbol yang mengandung istilah Tionghoa maupun beragam diksinya yang memiliki makna sama, misalnya Cina, China, maupun Tiongkok. Akan tetapi, jika yang dimaksud semata-mata merujuk pada negara Cina (Tiongkok) dan tidak berhubungan dengan masyarakat Tionghoa di Indonesia atau tidak berpengaruh terhadap dinamika perkembangan dari zaman ke zaman di Indonesia maka tidak dianggap sebagai temuan. Demikian juga penggunaan istilah Cina yang mengacu pada

etnis Cina di luar Indonesia atau memiliki makna lain di luar konteks penelitian seperti Indocina, Laut Cina Selatan, dan sebagainya juga tidak diperhitungkan sebagai temuan.

Dalam struktur mata pelajaran Sejarah Indonesia SMA menurut Kurikulum 2013, total terdapat tujuh belas pokok bahasan atau materi pokok. Tujuh belas pokok bahasan ini dirumuskan dari Kompetensi Dasar (KD) pada Kompetensi Inti (KI) 3 sebagai kompetensi pengetahuan. Konten materi sebagaimana disajikan dalam buku teks pelajaran menjabarkan kompetensi pengetahuan yang digariskan dalam kurikulum. Kompetensi keterampilan (KI 4) menampilkan KD-KD yang berkelindan dengan KD-KD pada KI 3. Sementara kompetensi sikap spiritual dan sosial (KI 1 dan 2) menjadi payung dari nilai-nilai (*values*) yang digali dalam proses pembelajaran. Narasi-narasi yang merepresentasikan Tionghoa dalam konten materi pada buku teks Sejarah Indonesia merupakan bagian dari kompetensi pengetahuan. Oleh karena itu, identifikasi narasi-narasi tentang representasi Tionghoa yang dijabarkan berikut ini hanya menampilkan KD-KD pada KI 3 saja sebagai kompetensi pengetahuan.

A. Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas X SMA

Buku teks Sejarah Indonesia SMA untuk kelas X merupakan hasil revisi yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI pada tahun 2017. Buku teks ini disusun pertama kali pada tahun 2013 oleh tim penulis dan penelaah yang ditunjuk oleh kementerian. Buku teks setebal 288 halaman ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama menguraikan mengenai peradaban awal di Indonesia. Pada bab ini dibahas tentang masa sebelum mengenal tulisan (praaksara), terbentuknya

Kepulauan Indonesia, kehidupan manusia purba, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, dan corak kehidupan masyarakat praaksara. Bab kedua mengkaji perkembangan pada masa klasik atau lebih dikenal sebagai masa Hindu-Buddha. Bab ini dimulai dengan memaparkan pengaruh budaya India, kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha, jaringan perdagangan, dan akulturasi budaya Nusantara dan Hindu-Buddha. Bab ketiga memaparkan tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Dimulai dengan kedatangan Islam ke Nusantara, perdagangan masa Islam, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, jaringan keilmuan di Nusantara, akulturasi dan perkembangan budaya Islam, hingga proses integrasi Nusantara.

Dari sumber literatur Cina, Cheng Ho mencatat terdapat kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan, antara lain, Samudra Pasai dan Malaka yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13



Sumber: Taufik Abdulah dan A.B Lapan (ed). 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: jilid III*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Gambar 3.8 Laksamana Cheng Ho

sampai abad ke-15, sedangkan Ma Huan juga memberitakan adanya komunitas-komunitas Muslim di pesisir utara Jawa bagian timur. Berita Tome Pires dalam *Suma Oriental* (1512-1515) memberikan gambaran mengenai keberadaan jalur pelayaran jaringan perdagangan, baik regional maupun internasional. Ia menceritakan tentang lalu lintas dan kehadiran para pedagang di Samudra Pasai yang berasal dari Bengal, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Kling, Malayu, Jawa, dan Siam. Selain itu Tome Pires juga mencatat kehadiran para pedagang di Malaka dari Kairo, Mekkah, Aden, Abyssinia, Kilwa, Malindi, Ormuz, Persia, Rum, Turki, Kristen Armenia, Gujarat, Chaul, Dabbol, Goa, Keling, Dekkan, Malabar, Orissa, Ceylon, Bengal, Arakan, Pegu, Siam, Kedah, Malayu, Pahang, Patani, Kamboja, Campa, Cossin Cina,

Gambar 6 Penggalan narasi dan grafis Laksamana Cheng Ho dalam buku teks kelas X SMA

(Sumber: Tangkap layar file buku digital atau e-book)

Pada kelas X terdapat delapan KD pada KI 3 dengan lima pokok bahasan yakni ⁷ cara berpikir sejarah, konsep perubahan dan keberlanjutan, Indonesia zaman praaksara: awal kehidupan manusia Indonesia, Indonesia zaman Hindu dan Buddha: silang budaya lokal dan global tahap awal, dan zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dari kelima pokok bahasan, hanya pokok bahasan tentang ²² zaman praaksara, zaman Hindu-Buddha, dan zaman kerajaan-kerajaan Islam saja yang dijabarkan konten materinya dalam buku teks. Narasi-narasi yang merepresentasikan Tionghoa dapat dijumpai dalam tiga pokok bahasan tersebut, meskipun kerap disinggung namun tidak didapati pembahasan yang signifikan.

Tabel 1. Identifikasi Representasi Tionghoa dalam Buku Teks Sejarah Indonesia untuk SMA Kelas X (Tahun 2017)

No.	Kompetensi Dasar (Hanya dituliskan KD-KD pada KI 3)	Pokok Bahasan	Judul Bab	Subbab (Materi) yang Merepresentasikan Tionghoa	Halaman
1.	1.1 Memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah	Cara Berpikir Sejarah	tidak didapati	tidak didapati	-
2.	1.2 Memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah	Konsep Perubahan dan Keberlanjutan	tidak didapati	tidak didapati	-
3.	1.3 Menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia (Melanesoid, Proto, dan Deutero Melayu) 1.4 Memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat	Indonesia Zaman Praaksara Awal Kehidupan Manusia Indonesia	Menelusuri Peradaban Awal di Kepulauan Indonesia	Asal usul dan Persebaran Nenek Moyang Bangsa Indonesia	34-44

No.	Kompetensi Dasar (Hanya dituliskan KD-KD pada KI 3)	Pokok Bahasan	Judul Bab	Subbab (Materi) yang Merepresentasikan Tionghoa	Halaman
4.	<p>1.5 Menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia</p> <p>1.6 Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia serta menunjukkan bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini</p>	Indonesia Zaman Hindu dan Buddha: Silang Budaya Lokal dan Global Tahap Awal	Perda-gangan, Penguasa, dan Pujangga pada Masa Klasik (Hindu dan Buddha)	<p>1. Pengaruh Budaya India</p> <p>2. Kerajaan-Kerajaan pada Masa Hindu-Buddha (Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Sriwijaya, Mataram Kuno, Kediri, Singhasari, Majapahit, Buleleng dan Dinasti Warmadewa di Bali, dan Tulang Bawang)</p> <p>3. Terbentuknya Jaringan Nusantara Melalui Perdagangan</p>	75-84 86-147
5.	<p>1.7 Menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia</p> <p>1.8 Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini</p>	Zaman Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia	Islamisasi dan Silang Budaya di Nusantara	<p>1. Islam dan Jaringan Perdagangan Antar pulau</p> <p>2. Islam Masuk Istana Raja (Samudra Pasai, Kerajaan Islam di Sumatra Selatan, Kerajaan Islam di Sumatra Barat, Kerajaan-kerajaan Islam di Maluku Utara)</p>	151-157 176-183 185-188, 196-199, 199-202, 225-229

B. Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XI SMA

Agak berbeda, materi Sejarah Indonesia untuk kelas XI tidak disajikan dalam satu buku, namun terpisah untuk semester 1 dan 2. Tentu saja pertimbangannya karena cakupan materinya yang banyak sehingga membutuhkan ruang penyajian yang memadai. Jika dijadikan satu maka buku teks akan menjadi terlalu tebal. Selain faktor kenyamanan bagi siswa dalam belajar, buku teks yang terlalu tebal juga dapat memengaruhi harga keekonomisan ketika dicetak. Buku teks Sejarah Indonesia SMA kelas XI semester 1 disusun pertama kalinya pada tahun 2014 dan mengalami revisi pada tahun 2017. Jilid pertama ini terdiri dari 264 halaman dengan empat bab. Bab pertama menjelaskan permulaan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Bab kedua memaparkan mengenai perang melawan kolonialisme dan imperialisme yang terdiri dari perlawanan terhadap VOC dan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Bab ketiga mengkaji mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik-pemerintahan dan ekonomi serta sosial-budaya dan pendidikan. Bab keempat membahas tentang Sumpah Pemuda dan jati diri keindonesiaan. Bab ini meliputi kajian tentang latar belakang Sumpah Pemuda, cita-cita dan nilai penting Sumpah Pemuda, hingga politik yang dilakukan para pemuda serta keberadaan *Volksraad*.

7. Orang-orang Cina Berontak

Sejak abad ke-5 orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, yang menikah dengan penduduk Jawa khususnya ke Batavia. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Ternyata kota Batavia juga menjadi daya tarik bagi orang-orang Cina miskin untuk mengadu nasib di kota ini. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis bahkan ada yang menjadi pencuri. Sudah barang tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan Kota Batavia. Akhirnya VOC mengeluarkan kebijakan membatasi imigran Cina.

Gambar 7 Penggalan narasi Orang-orang Cina Berontak dalam buku teks kelas XI SMA

(Sumber: Tangkap layar file buku digital atau e-book)

16 Buku teks Sejarah Indonesia SMA kelas XI semester 2 disusun bersamaan dengan buku teks untuk semester 1 pada tahun 2014 dan mengalami revisi juga pada tahun 2017. Tim yang terlibat dalam penulis buku teks jilid keduaini sama dengan jilid pertama. Buku teks setebal 240 halaman ini terdiri atas tiga bab kelanjutan dari bab-bab pada semester 1. Maka buku ini diawali dengan bab lima yang memaparkan tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dimulai dari pokok bahasan mengenai kedatangan Jepang, organisasi-organisasi pada masa Jepang, praktik-praktik penjajahan dan perlawanan terhadap Jepang, hingga akhir dari kekuasaan Jepang di Indonesia. Pada bab enam dijelaskan mengenai kemerdekaan Indonesia. Bab ini menguraikan peristiwa Rengasdengklok, terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia, dan peran para tokoh sekitar Proklamasi. Bab tujuh membahas masa revolusi Indonesia mulai dari berbagai tantangan di awal kemerdekaan, perang dan diplomasi dalam

rangka mempertahankan kemerdekaan, hingga nilai-nilai kejuangan pada masa revolusi.

Untuk kelas XI terdiri dari sepuluh KD pada KI 3 dengan tujuh pokok bahasan yakni perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa, dampak penjajahan Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) bagi bangsa Indonesia, pendidikan dan pergerakan nasional, pendudukan Jepang di Indonesia, tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. Tiga pokok bahasan pertama dijabarkan dalam buku teks untuk semester 1, sementara empat sisanya dalam buku teks semester 2. Pada semester 1, narasi tentang peran Tionghoa didapati pada pokok bahasan masa kolonialisme imperialisme, dan pergerakan nasional. Pada semester 2, narasi tentang Tionghoa ditemui pada pokok bahasan pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Tabel 2. Identifikasi Representasi Tionghoa dalam Buku Teks Sejarah Indonesia untuk SMA Kelas XI (Tahun 2017)

No.	Kompetensi Dasar (Hanya dituliskan KD-KD pada KI 3)	Pokok Bahasan	Judul Bab	Subbab (Materi) yang Merepresentasikan Tionghoa	Halaman
1.	<p>3.1 Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) ke Indonesia ¹⁰</p> <p>3.2 Menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) sampai dengan abad ke-20</p>	Perkem-bangan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa	Antara Kolonialisme dan Imperialisme Peran ⁸³ Melawan Kolonialisme dan Imperialisme	tidak didapati	-
2.	3.3 Menganalisis dampak politik, budaya ⁶ sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini	Dampak Penjajahan Bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) bagi Bangsa Indonesia	Dampak Perkembangan Kolonialism ⁵ dan Imperialisme	Perang Melawan Hegemoni dan Keserakahan Kongsi Dagang (Perlawanan Banten, Perlawanan Gowa, Rakyat Riau Angkat Senjata, Orang-orang Cina Berontak) tidak didapati	83–86, 87–90, 90–92, 92–93

No.	Kompetensi Dasar (Hanya dituliskan KD-KD pada KI 3)	Pokok Bahasan	Judul Bab	Subbab (Materi) yang Merepre-sentasikan Tionghoa	Halaman
3.	3.4 Menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda ⁹ dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini	Pendidikan dan Pergerakan Nasional	Sumpah Pemuda ²⁸ dan Jati Diri Keindonesiaan	Latar belakang Sumpah Pemuda (Pers Membawa Kemajuan)	186-187
4.	3.5 Menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia	Pendudukan Jepang di Indonesia	Tirani Matahari Terbit	Organisasi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang (Keibodan)	29
5.	3.6 Menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia	Tokoh-Tokoh Nasional dan Daerah dalam Memperjuangkan Kemerdekaan	tidak didapati	tidak didapati	-
6.	3.7 Menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia ⁸ 3.8 Menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini	Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	Indonesia ¹³⁰ Merdeka	Dari Rengasdengklok sampai ke Pegangsaan Timur (Keanggotaan PPKI dan Peristiwa Rengasdengklok)	81, 85

No.	Kompetensi Dasar (Hanya dituliskan KD-KD pada KI 3)	Pokok Bahasan	Judul Bab	Subbab (Materi) yang Merepresentasikan Tionghoa	Halaman
3.9	Menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi				
7.	3.10 Menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda	Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan Belanda	Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI	Antara Perang dan Diplomasi (Agresi Militer I)	180

Sumber: Data yang ditolah peneliti (2022)

C. ¹⁶ Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XII SMA

Penyusunan buku teks Sejarah Indonesia SMA kelas XII dilakukan untuk pertama kalinya pada tahun 2014 dan mengalami revisi pada tahun 2018. Rata-rata sama dengan jilid lainnya, buku teks ini tebalnya mencapai 280 halaman. Buku teks ³⁴ Sejarah Indonesia SMA kelas XII terdiri atas enam bab dan terbilang padat. Bab satu memaparkan mengenai ³⁴ perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Pada bab dua dikaji tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer. Kajian dimulai dari ⁴¹ sistem pemerintahan, kepartaian, pemilu 1955, ⁴¹ pemikiran ekonomi nasional, dan ekonomi liberal. Bab tiga membahas sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Bab ini dimulai dari latar belakang ⁴¹ demokrasi terpimpin, peta kekuatan politik nasional, pembebasan Irian Barat, konfrontasi terhadap Malaysia, dan perkembangan ekonomi nasional. Bab empat mengkaji sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. ³⁴ Bab lima membahas sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa Reformasi. Bab enam membicarakan tentang ³³ Indonesia dalam panggung dunia mulai dari politik luar negeri bebas aktif hingga peran dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

Pada kelas XII, mata pelajaran Sejarah Indonesia dalam Kurikulum 2013 menyediakan sembilan KD pada KI 3. Dari situ dirumuskan lima pokok bahasan yakni ¹⁵ perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa dan negara RI, Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan Demokrasi Terpimpin, kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai Reformasi, peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, dan prestasi

13 Bangsa Indonesia dalam mengembangkan Iptek pada era kemerdekaan. Dalam buku teks, pokok bahasan tentang prestasi bangsa Indonesia dalam mengembangkan Iptek pada era kemerdekaan dibahas lebih dulu, sedangkan peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia dibahas paling akhir.

Peristiwa 15 Januari 1974

Menjelang kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka, pada 15 Januari 1974 di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang disusul dengan aksi anarki. Proyek Senen, gedung Toyota Astra, sejumlah toko milik pedagang Tionghoa di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Glodok dan Cempaka Putih, terbakar habis karena aksi tersebut. Geger Jakarta ini mengejutkan jajaran aparat keamanan dan pemerintah, karena itu diberi julukan Malapetaka Lima Belas Januari yang populer dengan Malari (R.P Soejono ed, 2009:637).

Gambar 8 Narasi tentang Tionghoa dalam Peristiwa Malari dalam buku teks kelas XII SMA

(Sumber: Tangkap layar file buku digital atau e-book)

Dari lima pokok bahasan, identifikasi tentang Tionghoa hanya didapati dalam pokok bahasan 15 Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan Demokrasi Terpimpin, dan kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai Reformasi. Munculnya Tionghoa dalam dua pokok bahasan ini cukup signifikan, namun sebenarnya mengerucut pada satu isu sama tentang sentimen anti-Cina. Pembahasan mengenai Tionghoa ada masa awal kemerdekaan, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru berfokus pada masalah Tionghoa dalam perekonomian nasional yang menjadi pemicu menguatnya stereotipe dan prasangka sehingga mendorong terjadinya sentimen anti-Cina. Pembahasan diteruskan pada masa Reformasi yang memulihkan relasi sosial dengan Tionghoa, menghentikan praktik-praktik diskriminasi, dan memberi kebebasan berekspresi bagi Tionghoa.

Tabel 3. Identifikasi Representasi Tionghoa dalam Buku Teks Sejarah Indonesia untuk SMA Kelas XII (Tahun 2018)

No.	Kompetensi Dasar (Hanya dituliskan KD-KD pada KI 3)	Pokok Bahasan	Judul Bab	Subbab (Materi) yang Merepre-sentasikan Tionghoa	Halaman
1.	<p>1.1 Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI Per-mesta, G-30-S/PKI ¹⁰</p> <p>1.2 Mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945–1965</p>	Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Mempertahankan Integrasi Bangsa dan Negara RI ¹³	Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa	tidak didapati	-
2.	<p>1.3 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal ⁸</p> <p>1.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin</p>	Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai dengan Demokrasi Terpimpin ⁸	Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer (1950–1959) Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)	Mencari Sistem Ekonomi Nasional tidak didapati ³³	70–72 -

No.	Kompetensi Dasar (Hanya dituliskan KD-KD pada KI 3)	Pokok Bahasan	Judul Bab	Subbab (Materi) yang Merepre-sentasikan Tionghoa	Halaman
3.	<p>1.5 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru</p> <p>1.6 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi</p> <p>1.7 Mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia</p>	<p>Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Masa Orde Baru Sampai Reformasi</p>	<p>Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966–1998)</p> <p>Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Reformasi (1998–sekarang)</p>	<p>Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi (Malari)</p> <p>Masa Akhir Orde Baru</p> <p>Perkembangan Politik dan Ekonomi (Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dan Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid)</p>	<p>119</p> <p>147-149 153, 164</p>
	<p>1.9 Mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan (sejak Proklamasi sampai dengan Reformasi *)</p>	<p>Prestasi Bangsa Indonesia Dalam Mengembangkan Iptek Pada Era Kemerdekaan</p>		<p>tidak didapati</p>	-

No.	Kompetensi Dasar (Hanya dituliskan KD-KD pada KI 3)	Pokok Bahasan	Judul Bab	Subbab (Materi) yang Merepre-sentasikan Tionghoa	Halaman
4.	1.8 Mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia antara lain: KAA, Misi Garuda Deklarasi Djuanda, Gerakan Non Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting	Peran Bangsa Indonesia dalam per-damaian dunia: KAA, misi Garuda, Deklarasi Djuanda, Gerakan Non Blok, ASEAN, OKI, Jakarta Informal Meeting	Indonesia dalam Panggung Dunia	tidak didapati	-

*1) KD 3.9 dikaji lebih awal dari KD 3.8 dalam penyusunan materi pada buku teks
 Sumber: Data yang diolah peneliti (2022)

Dengan demikian, total representasi Tionghoa dalam buku teks Sejarah Indonesia SMA menurut Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI didapati dalam sepuluh pokok bahasan. Dengan rincian tiga pokok bahasan pada kelas X, lima pokok bahasan pada kelas XI, dan dua pokok bahasan pada kelas XII. Dari sepuluh pokok bahasan tersebut, pembahasan mengenai Tionghoa tidak seluruhnya memiliki porsi yang sama. Ada pokok bahasan yang membahas tentang Tionghoa dengan cukup signifikan, namun ada pula yang hanya menyebutnya sepintas sebagai sekadar informasi. Di sisi lain dengan mencermati perkembangan historiografi Tionghoa dewasa ini, tentu masih banyak peran Tionghoa yang belum terakomodasi dalam buku teks tersebut.

Identifikasi Tionghoa dalam buku teks Sejarah Indonesia menunjukkan penonjolan pada aspek keluasan ketimbang kedalaman materi. Identifikasi yang dijumpai dalam sepuluh pokok bahasan menunjukkan ketercakupannya seluruh pembabakan zaman sejak masa Praaksara sampai Reformasi. Kendati tidak semuanya menampilkan peran Tionghoa, namun eksistensinya selalu ada. Hal ini menunjukkan bentuk pengakuan terhadap Tionghoa yang turut hadir dan membentuk perjalanan Sejarah Indonesia. Akan tetapi, seberapa jauh dan mendalamnya Tionghoa direpresentasikan sebagai bagian dari bangsa Indonesia masih perlu ditelaah lebih lanjut.



BAB III

REPRESENTASI TIONGHOA DALAM ¹⁶ BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA

Hasil analisis terhadap buku teks Sejarah Indonesia SMA menurut Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI menunjukkan tiga kecenderungan penulisan representasi Tionghoa. Secara umum, kecenderungan ini sedikit banyak juga dapat dijumpai dalam buku-buku teks Sejarah Indonesia berdasarkan Kurikulum 2013 dari beragam penerbit lain. Akan tetapi, pola ini semestinya tidak berlaku untuk kurikulum yang berbeda. Selain belum tentu Tionghoa ditampilkan, misalnya dalam kurikulum sepanjang Orde Baru, setiap kurikulum juga memiliki landasan penyusunan dan jiwanya masing-masing. Kurikulum Merdeka yang hadir sekarang ini, juga memiliki perspektif tersendiri dalam mengakomodasi Tionghoa. Kendati demikian, pola penulisan buku teks Sejarah Indonesia menurut Kurikulum 2013 yang mengikuti alur kronologis sedikit banyak memberi gambaran umum tentang gaya penulis buku teks sejarah dalam merepresentasikan Tionghoa dan perannya pada peristiwa-peristiwa sejarah nasional.

Pertama, Tionghoa dalam pokok bahasan masa pra-aksara, Hindu-Buddha, dan Islam direpresentasikan dengan menonjolkan jalinan keharmonisan. Berbagai sumber sejarah pada umumnya, termasuk historiografi resmi, kerap memang menunjukkan suasana keharmonisan hidup masyarakat yang beragam pada periode-periode ini (Abdullah & Lopian, 2012a, 2012b, 2012c; Poesponegoro & Notosusanto, 2008a, 2008b, 2008c). Keberagaman yang ditonjolkan pada masa ini biasanya terkait dengan agama Hindu, Buddha, Islam, dan kepercayaan lokal (animisme-dinamisme) yang hidup berdampingan. Bukti keharmonisan agama dan kepercayaan pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam ditunjukkan melalui keberadaan benda-benda peninggalan akulturasi budaya seperti candi-candi, relief, makam, wayang, kesenian, maupun budaya tak benda lainnya. Jalinan keharmonisan tampak ditekankan karena materi pada ketiga periode ini umumnya tergolong sebagai fakta keras dengan bukti-bukti sejarah yang sudah dijumpai begitu lama. Selain itu, ketiga periode ini juga dapat dikatakan jauh dari kepentingan politik tertentu.

Kedua, representasi Tionghoa mulai menampilkan stigmatisasi negatif pada pokok bahasan masa **kolonialisme dan imperialisme, pergerakan nasional, pendudukan Jepang, Proklamasi Kemerdekaan RI, perjuangan mempertahankan kemerdekaan**, masa awal kemerdekaan sampai dengan Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru. Ada temuan menarik pada awal narasi kolonialisme dan imperialisme dalam buku teks yang juga didapati dalam IDAS. Intinya tentang pelayaran Laksamana Cheng Ho sebagai yang pertama mengelilingi dunia (Abdullah & Lopian, 2012d, hlm. 6; Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 17). Pernyataan ini menunjukkan pengakuan terhadap peran dan pengaruh Tionghoa.

Akan tetapi, narasi selanjutnya dalam buku teks mulai mengerucut pada pelabelan terhadap Tionghoa sebagai pendatang dengan tujuan ekonominya saja, sementara peran lainnya terpinggirkan (dipinggirkan). Narasi dengan stereotype semacam ini, berpotensi besar menggiring pada kebencian rasial yang tidak lepas dari warisan kolonial dan dilanggengkan melalui politik Orde Baru.

Pada bagian ini, buku teks sebenarnya mulai menyentuh peran Tionghoa secara lebih luas. Peran Tionghoa mulai mendapat perhatian dan pengaruh politik dari penguasa kolonial Belanda. Dalam SNI Jilid IV Edisi Pemutakhiran disebut bahwa Belanda mulai mengatur komunitas Tionghoa dengan menunjuk pemimpin yang disebut Kapiten Tionghoa (Poesponegoro & Notosusanto, 2008d, hlm. 127). Institusi ini memiliki tiga pangkat yakni mayor, kapitan (kapten), dan letnan sesuai dengan jumlah masyarakat Tionghoa di daerah masing-masing (Lohanda, 2001, hlm. 75–76; Yulifar, 2019, hlm. 134). Tugas mereka mengurus kepentingan orang-orang Tionghoa, menarik pajak, hingga mengatasi keributan yang melibatkan warga Tionghoa. Banyak kapitan Tionghoa yang berjasa mengembangkan kota dan masyarakat di wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tionghoa memang memiliki peran sosial dan politik yang patut diperhitungkan (Chang, 2021). Sayangnya narasi tentang jasa baik ini tidak muncul dalam buku teks.

Ketiga, representasi Tionghoa mulai mengusung upaya pemulihan hak-hak Tionghoa pada materi masa Reformasi. Akan tetapi, narasi yang ditampilkan juga sangat terbatas, hanya pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Kerusakan yang menyasar Tionghoa disinggung

dalam narasi periode Reformasi, namun tidak menjelaskan aksi-aksi di sejumlah dalam kurun waktu 1996–1999. Buku teks hanya menyinggung puncaknya di Jakarta pada 12–15 Mei 1998 dan kembali menyebut Tionghoa mendominasi perekonomian sehingga menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Dalam peristiwa Mei 1998, puluhan sampai ratusan perempuan Tionghoa mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan sehingga banyak keluarga Tionghoa mengungsi ke luar negeri (Winarnita et al., 2018). Tragedi ini diakui dalam SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran.

Tentang ini, buku teks sejarah semestinya tidak menggiring pandangan bahwa Tionghoa menjadi korban kerusuhan rasial karena adanya kecemburuan terhadap keberhasilan ekonomi. Narasi semacam itu hanya akan mereproduksi kebencian dan dendam. Kendati fakta tersebut tak dipungkiri, namun ada makna penting yang jauh lebih perlu untuk disampaikan dalam konteks pendidikan sejarah. Narasi yang dibangun seyogianya mengarahkan siswa untuk terbuka bergandengan tangan, berkolaborasi, dan bekerja sama membangun kemajuan ekonomi masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa provokasi, konflik, dan kerusuhan tidak pernah menyelesaikan persoalan namun justru merugikan semua pihak. Peristiwa Mei 1998 kemudian memang menjadi titik balik relasi antara Tionghoa dengan kelompok masyarakat luas (Turner, 2003, hlm. 344). Lahirnya Reformasi telah menyadarkan gagalnya program asimilasi Orde Baru (Hoon, 2006, hlm. 153).

A. Jalinan Harmoni: Zaman Praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam

1. Indonesia Zaman Praaksara: Awal Kehidupan Manusia Indonesia

Pokok bahasan ini umumnya muncul dalam bab awal buku teks Sejarah Indonesia SMA kelas X, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Dalam buku teks yang dianalisis, narasi yang menyebut Cina sebagai negara (Tiongkok) muncul dalam pokok bahasan asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Narasi ini ada kaitannya dengan penjelasan mengenai siapa penduduk asli Kepulauan Indonesia. Pada intinya dipaparkan teori mengenai penduduk asli Kepulauan Indonesia yang jika disimpulkan dapat dimaknai memiliki hubungan erat yakni nenek moyang yang sama dengan beberapa kelompok suku bangsa lain, salah satunya Tionghoa. Dalam narasi tersebut dijelaskan bahwa penduduk asli Kepulauan Indonesia disebut sebagai suku bangsa Vedda yang juga didapati di Tiongkok yang disebut sebagai suku bangsa Yao-Jen. Dengan demikian penduduk asli Kepulauan Indonesia memiliki nenek moyang yang sama dengan orang-orang Yao-Jen di Tiongkok (Gunawan, Lestariningsih, & Sardiman, 2017, hlm. 34–35).

Teks selanjutnya menjelaskan bahwa pendatang Kepulauan Indonesia yang disebut sebagai Proto Melayu dan Deutero Melayu digambarkan memiliki ciri-ciri fisik yang identik dengan orang-orang Tionghoa yakni berambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Mereka ini datang dari Tiongkok selatan (Yunan).

Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan

datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan (Yunan) mereka bermigrasi ke Indocina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. ... Penduduk asli dan ras proto melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo (Gunawan et al., 2017, hlm. 35).

Tidak hanya teks yang berkenaan dengan Proto Melayu namun juga Deutero Melayu menjelaskan asal-usul yang berkaitan dengan Tiongkok. “Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indocina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia, atau Kebudayaan Dongson” (Gunawan et al., 2017, hlm. 36). Kebudayaan Dongson ini selain ditemukan di Indonesia juga menyebar di Indocina. Dengan demikian, dalam kedua teks ini kendati Cina yang dimaksud merujuk pada negara (Tiongkok) termasuk penduduknya, namun tampak bahwa ada hubungan asal-usul antara suku-suku di Indonesia sekarang ini dengan orang-orang di Tiongkok.

Masih dalam bab ini juga disampaikan hasil penelitian baru yang melibatkan ahli arkeologi, genetika, dan bahasa bahwa ternyata asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari persamaan budaya, bahasa, dan dua atau lebih populasi keturunan sehingga menghasilkan teori *Out of Africa* dan *Out of Taiwan*. Kendati yang dimaksud adalah penduduk asli, namun teori *Out of Taiwan* menegaskan tentang adanya gelombang migrasi dari penduduk-penduduk di wilayah selatan Tiongkok menuju ke Nusantara. Penduduk asli

Taiwan adalah bangsa Austronesia yang memiliki hubungan linguistik dan genetik dengan kelompok Austronesia lainnya di Filipina, Malaysia, Indonesia, Madagaskar, dan Oseania. Teks menegaskan bahwa di Indonesia, interaksi budaya dan silang genetik tak dapat dihindari sehingga menghasilkan keturunan Austromelanesoid atau lebih dikenal dengan Melanesia. “Dalam studi genetika terbaru menunjukkan bahwa, genetika manusia Indonesia saat ini kebanyakan adalah campuran, berasal dari dua atau lebih populasi moyang” (Gunawan et al., 2017, hlm. 43).

Pada pokok bahasan Indonesia zaman praaksara ini, narasi yang berkaitan dengan Tionghoa ini secara lengkap dapat dijumpai dalam karya historiografi yang secara khusus mengkaji tentang Tionghoa (Setiono, 2008). Teori *Out of Taiwan* juga cukup banyak diteliti (Blust, 1995; Capelli et al., 2001; K. C. Chang, 1964). Narasi zaman praaksara menampilkan multikulturalisme telah mengakar sebagai pondasi kehidupan manusia Indonesia termasuk di dalamnya jalinan keharmonisan dengan Tionghoa. Narasi ini senada dengan ulasan IDAS yang menegaskan bahwa keberagaman tak terpisahkan dan telah menjadi bagian dari iklim pergaulan berbagai komunitas di Nusantara (Abdullah & Lopian, 2012, hlm. 340).

2. ¹³ Indonesia Zaman Hindu dan Buddha: Silang Budaya Lokal dan Global Tahap Awal

Bab dua dalam buku teks Sejarah Indonesia SMA kelas X membahas pokok bahasan Indonesia Zaman Hindu dan Buddha. Pengaruh budaya India dan Tiongkok disebut dalam kaitannya dengan perkembangan agama Buddha. Dalam konteks ini, Cina disebut berkaitan dengan negara (Tiongkok) sebagai sumber sejarah dalam membahas mengenai perkem-

bankan agama Buddha di Indonesia. “Sumber-sumber Tibet dan Nepal menyebutkan, seorang pendeta Buddha yang bernama Atisa, belajar Agama Buddha di Sriwijaya selama 12 tahun, atas saran I-tsing, seorang musafir dari Cina yang lebih dahulu pernah singgah di Sriwijaya” (Gunawan et al., 2017, hlm. 77).

Cina sebagai negara maupun masyarakatnya juga disebut dalam konteks jaringan perdagangan yang membawa pengaruh secara sosial, budaya, bahkan politik ketatanegaraan. “Dalam masa itulah para pedagang datang dari India, Cina dan Arab untuk meramaikan Sriwijaya. ... Pada masa itu pula hubungan dengan India dan Cina berkembang pesat” (Gunawan et al., 2017, hlm. 76). Selanjutnya Gunawan et al. (2017, hlm. 78) juga menuliskan

Satu di antara bangsa yang berinteraksi dengan penduduk kepulauan di Indonesia adalah bangsa India. Interaksi itu terjalin sejalan dengan meluasnya hubungan perdagangan antara India dan Cina. Hubungan itu yang mendorong pedagang-pedagang India dan Cina datang ke kepulauan di Indonesia. Menurut van Leur, barang yang diperdagangkan dalam pasar internasional saat itu adalah barang komoditas yang bernilai tinggi. ... Interaksi dengan kedua bangsa itu membawa perubahan pada bentuk tata negara di beberapa daerah di Kepulauan Indonesia. Juga perubahan dalam susunan kemasyarakatan dan sistem kepercayaan. Sejak saat itu pula pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha berkembang di Indonesia.

Pada pokok bahasan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Tiongkok sebagai negara berulang kali disebut selain dalam kaitannya dengan hubungan perdagangan juga dalam kapasitasnya sebagai sumber sejarah bagi Indonesia. Hubungan dagang dengan Tiongkok terutama dijelaskan dalam pema-

paran mengenai Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit, dan Tulang Bawang (Gunawan et al., 2017, hlm. 89, 94, 103, 107, 138, 141, 146). Dalam penjelasan tentang Tarumanegara, Gunawan et al. (2017, hlm. 94–95) menuliskan sebagai berikut

Berdasarkan berita dari Fa-Hien, di To-lo-mo (Tarumanegara) terdapat tiga agama, yakni agama Hindu, agama Buddha dan kepercayaan animisme. ... Sumber Cina lainnya menyatakan bahwa, pada masa Dinasti T'ang terjadi hubungan perdagangan dengan Jawa. Barang-barang yang diperdagangkan adalah kulit penyus, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Dituliskan pula bahwa penduduk daerah itu pandai membuat minuman keras yang terbuat dari bunga kelapa. Rakyat Tarumanegara hidup aman dan tenteram. Pertanian merupakan mata pencaharian pokok. Di samping itu, perdagangan juga berkembang. Kerajaan Tarumanegara mengadakan hubungan dagang dengan Cina dan India.

Sumber sejarah yang menggambarkan hubungan erat dengan Tiongkok juga disebut-sebut dalam penjelasan mengenai Kalingga. Gunawan et al. (2017, hlm. 97) menuliskannya sebagai berikut

Menurut berita Cina, di sebelah timur Kalingga [Holing] ada Poli (Bali sekarang), di sebelah barat Kalingga terdapat To-po-Teng (Sumatra). Sementara di sebelah utara Kalingga terdapat Chenla (Kamboja) dan sebelah selatan berbatasan dengan samudra. Oleh karena itu, lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah atau di sebelah utara Gunung Muria. Sumber utama mengenai Kerajaan Kalingga adalah berita Cina, misalnya berita dari Dinasti T'ang. Sumber lain adalah Prasasti Tuk Mas di lereng Gunung Merbabu. Melalui berita Cina, banyak hal yang kita ketahui tentang perkembangan Kerajaan Kalingga

dan kehidupan masyarakatnya. Kerajaan Kalingga berkembang kira-kira abad ke-7 sampai ke-9 M.

Perkembangan agama Buddha yang erat kaitannya dengan Tionghoa juga dipaparkan terjadi di Kerajaan Kalingga. “Bahkan pendeta Cina yang bernama Hwi-ning datang di Kalingga dan tinggal selama tiga tahun. Selama di Kalingga, ia menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Dalam usaha menerjemahkan kitab itu Hwi-ning dibantu oleh seorang pendeta bernama Janabadra” (Gunawan et al., 2017, hlm. 98).

Sumber berita Tionghoa juga digunakan dalam pemaparan mengenai Sriwijaya. “Di samping prasasti-prasasti tersebut, berita Cina juga merupakan sumber sejarah Sriwijaya yang penting. Misalnya berita dari I-tsing, yang pernah tinggal di Sriwijaya” (Gunawan et al., 2017, hlm. 102). Penguasaan Sriwijaya atas Kalingga juga didapat dari berita Cina. “Menurut berita Cina, diterangkan adanya serangan dari barat, sehingga mendesak Kerajaan Kalingga pindah ke sebelah timur. Diduga yang melakukan serangan adalah Sriwijaya. Sriwijaya ingin menguasai Jawa bagian tengah karena pantai utara Jawa bagian tengah juga merupakan jalur perdagangan yang penting” (Gunawan et al., 2017, hlm. 105).

¹¹ Sumber sejarah untuk Kerajaan Mataram Kuno, selain prasasti juga dikatakan ada yang berasal dari berita Tionghoa. “Di samping beberapa prasasti tersebut, sumber sejarah untuk Kerajaan Mataram Kuno juga berasal dari berita Cina” (Gunawan et al., 2017, hlm. 111). Demikian juga dengan kerajaan Kediri, berita Tionghoa memberi informasi mengenai kehidupan keseharian di sana.

Menurut berita Cina, dan kitab Ling-wai-tai-ta diterangkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang-orang memakai kain sampai di bawah lutut. Rambutnya diurai.

Rumah-rumah mereka bersih dan teratur, lantainya ubin yang berwarna kuning dan hijau. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Rajanya berpakaian sutera, memakai sepatu, dan perhiasan emas. Rambutnya disanggul ke atas. Kalau bepergian, Raja naik gajah atau kereta yang diiringi oleh 500 sampai 700 prajurit (Gunawan et al., 2017, hlm. 127).

Berita Tionghoa sebagai sumber sejarah juga digunakan untuk menjelaskan mengenai Kerajaan Buleleng dan Dinasti Warmadewa di Bali. “Menurut berita Cina di sebelah timur Kerajaan Kalingga ada daerah *Po-li* atau *Dwa-pa-tan* yang dapat disamakan dengan Bali. Adat istiadat di *Dwa-pa-tan* sama dengan kebiasaan orang-orang Kaling” (Gunawan et al., 2017, hlm. 145). Bahkan dalam pemaparan materi mengenai ² Kerajaan Tulang Bawang di Lampung, hampir seluruhnya didominasi oleh sumber sejarah Tionghoa. Antara lain dengan menyebutkan kitab *Liu-sungShu* dari masa pemerintahan Kaisar Liu Sung (420–479), ⁵ kitab *T'ai-p'inghuang-yu-chi* yang ditulis pada tahun 976–983 M, dan catatan *Wu-pei-chih* atau “Petunjuk Pelayaran” (Gunawan et al., 2017, hlm. 146–147).

Relasi dengan Tiongkok digambarkan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun perkembangan agama, namun pola relasi yang berbeda dalam aspek politik dipaparkan dalam materi mengenai Singasari.

Kertanegara menginginkan wilayah Singhasari hingga meliputi seluruh Nusantara. Beberapa daerah berhasil ditaklukkan, misalnya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Penguasaan daerah-daerah di luar Jawa yang merupakan pelaksanaan politik luar negeri bertujuan untuk mengimbangi pengaruh Kubilai Khan dari Cina. ... Kertanegara memandang Cina sebagai saingan. Berkali-kali utusan Kaisar Cina

memaksa Kertanegara agar mengakui kekuasaan Cina, tetapi ditolak oleh Kertanegara. Terakhir pada tahun 1289 M datang utusan Cina yang dipimpin oleh Mengki. Kertanegara marah, Mengki disakiti dan disuruh kembali ke Cina. Hal inilah yang membuat marah Kaisar Cina yang bernama Kubilai Khan. Ia merencanakan membalas tindakan Kertanegara (Gunawan et al., 2017, hlm. 132–133).

Kerajaan Majapahit dinarasikan memiliki hubungan erat dengan negeri Tiongkok. Hubungan ini tidak semata-mata dalam konteks perdagangan, namun juga bilateral melalui duta negara sebagaimana terjadi di era sekarang ini.

Menurut Kakawin Nagarakertagama pupuh XIII–XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik (Singapura) dan sebagian Kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok (Gunawan et al., 2017, hlm. 138).

Terkait hubungan dan persahabatan yang baik dengan berbagai negara ini, Gunawan et al. (2017, hlm. 140) menegaskan melalui narasi berikutnya yang menyebut semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kehidupan beragama di Majapahit berkembang semarak. Pemeluk yang beragama Hindu maupun Buddha saling bersatu. Pada masa itu pun sudah dikenal semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya, sekalipun berbeda-beda baik Hindu maupun Buddha pada hakikatnya adalah satu jua. Kemudian secara umum kita artikan berbeda-beda akhirnya satu jua. ... Hubungan dengan Siam, Birma, Kamboja, Anam, India, dan Cina berlangsung dengan baik. Dalam membina hubungan dengan luar negeri, Majapahit mengenal motto *Mitreka Satata*, artinya negara sahabat.

Masih dalam bab dua ini, Tiongkok melalui para pedagang Tionghoa disebut pula turut membentuk jaringan Nusantara melalui perdagangan. ¹Gunawan et al. (2017, hlm. 151–152) memaparkan narasinya sebagai berikut.

Jika pada masa praaksara hegemoni budaya dominan datang dari pendukung budaya Austronesia di Asia Tenggara Daratan, maka pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara terdapat dua kekuatan peradaban besar, yaitu Cina di utara dan India di bagian barat daya. Keduanya merupakan dua kekuatan super power pada masanya dan mempunyai pengaruh amat besar terhadap penduduk di Kepulauan Indonesia. ... Selat Malaka menjadi penting sebagai pintu gerbang yang menghubungkan antara pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. ... Selat itu merupakan jalan laut yang menghubungkan Arab dan India di sebelah barat laut Nusantara, dan dengan Cina di sebelah timur laut Nusantara. Jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama “jalur sutra”. ... Ramainya rute pelayaran ini mendorong timbulnya bandar-bandar penting di sekitar jalur, antara lain Samudra Pasai, Malaka, dan Kota Cina (Sumatra Utara sekarang).

Relasi dengan Tiongkok yang secara kuat turut membentuk jaringan Nusantara ditegaskan lebih lanjut melalui narasi pengaruh Tionghoa di Indonesia. “Kebudayaan India dan Cina ketika itu jelas sangat berpengaruh terhadap masyarakat di sekitar Selat Malaka” ²(Gunawan et al., 2017, hlm. 153). Pengaruh Tionghoa juga ditunjukkan dengan menampilkan gambar relief terakota yang disebut menggambarkan paras muka orang Cina (Gunawan et al., 2017, hlm. 155). Kendati tidak dijelaskan lebih lanjut, buku teks membuka kesempatan bagi siswa untuk mencari dan menggali informasi mengenai ²pengaruh budaya Tionghoa

dalam bidang kuliner melalui pertanyaan uji kompetensi. “Budaya Cina juga membawa pengaruh pada kuliner kita saat ini. Coba kamu identifikasi, pengaruh budaya Cina pada kuliner di sekitar tempat tinggalmu!” (Gunawan et al., 2017, hlm. 157).

Pada pokok bahasan Indonesia zaman Hindu dan Buddha, narasi tentang Tionghoa dan Buddha yang cukup kaya muncul dalam materi Kerajaan Sriwijaya sebagaimana juga banyak dibicarakan dalam SNI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS (Abdullah & Lopian, 2012b; Poesponegoro & Notosusanto, 2008b). Kontak pelayaran dan perdagangan langsung antara Nusantara dan Tiongkok terjadi sejak abad ke-3 hingga 5 yang membawa serta barang-barang dagangan, sehingga di Indonesia banyak dijumpai peninggalan keramik dari Tiongkok banyak dicatat dalam beragam karya (Abdullah & Lopian, 2012b, hlm. 310; Intisari & Indonesia, 2018, hlm. 18; Lombard, 1996, hlm. 12).

Terkait sumber sejarah, buku teks senada dengan IDAS, menjadikannya sebagai penguat informasi mengenai Tarumanegara atau Tolomo, bahkan narasi Kerajaan Tulang Bawang dalam buku teks sama persis dengan narasi IDAS (Abdullah & Lopian, 2012b, hlm. 50, 54-55). Narasi pengiriman utusan Kaisar Cina ke Singasari untuk menemui Kertanegara dipandang sebagai pesaing politik sehingga membangkitkan suasana emosional sebagaimana ditulis dalam SNI (Gunawan et al., 2017, hlm. 132–133; Poesponegoro & Notosusanto, 2008b, hlm. 414, 417). Sementara narasi IDAS lebih menekankan upaya-upaya Kertanegara memperkokoh posisi Singasari dalam menghadapi ekspansi yang dilancarkan Khubilai Khan ketimbang menonjolkan nuansa peperangan (Abdullah & Lopian, 2012b, hlm. 232–233).



Sumber: Kartodirdjo, Sartono dkk, 2012, 700 Tahun Majapahit suatu Bunga Rampai, Dinas Pariwisata Daerah propinsi Daerah Jawa Timur.

Gambar 2.53 Relief terakota yang menggambarkan paras muka orang Cina

Gambar 9 Tampilan gambar terkait Tionghoa dalam buku teks kelas X SMA

(Sumber: Tangkap layar file buku digital atau e-book)

Penulisan narasi Tionghoa di era Hindu-Buddha juga bernuansa keharmonisan. Senada dengan kajian Lombard, buku teks dalam soal uji kompetensi menanyakan interaksi dengan Tiongkok yang terjalin harmonis lewat budaya kuliner (Gunawan et al., 2017, hlm. 157; Lombard, 1996). Kajian ini dapat digali lebih lanjut dan kontekstual karena bukti akulturasinya juga masih dapat dinikmati. Perkawinan para lelaki Tionghoa dengan perempuan setempat mendorong munculnya akulturasi budaya yang dikembangkan turun-temurun oleh kaum nyonya (*niowa*) yang berarti perempuan (Kurniawan, Supriatna, Mulyana, & Yulifar, 2023a).

1. Setelah kamu mencermati cuplikan artikel di atas, bagaimana kesan kamu tentang bacaan di atas?
 2. Menurut kamu bagaimanakah pengaruh budaya India itu dapat diterima oleh penduduk saat itu?
 3. Coba kamu gali jenis kuliner yang terdapat di sekitar kamu yang mendapat pengaruh dari India!
 4. Bagaimanakah proses masuk dan berkembangnya kuliner yang mendapat pengaruh India itu di sekitar kamu?
 5. Apakah saat ini masih ada pengaruh budaya India yang masih melekat dalam kehidupan kita sehari-hari? Berilah contohnya!
 6. Budaya Cina juga membawa pengaruh pada kuliner kita saat ini. Coba kamu identifikasi, pengaruh budaya Cina pada kuliner di sekitar tempat tinggalmu!
-

Gambar 10 Soal uji kompetensi pada nomor 6 dalam buku teks kelas X SMA mengajukan pertanyaan tentang Tionghoa

(Sumber: Tangkap layar file buku digital atau e-book)

Dari mereka muncul budaya Tionghoa peranakan – di kawasan Malaka dan Singapura dinamakan budaya *baba-nyonya* – dalam wujud makanan, pakaian, maupun tradisi lainnya (Lee, 2016; Neo, Ngo, & Heng, 2020). Hal ini menjadi kebaruan yang dapat diusung dalam pembelajaran sejarah untuk menguatkan penghargaan terhadap keberagaman (Kurniawan et al., 2023a). Terkecuali narasi tentang Kertanegara dan Khubilai Khan, buku teks berupaya menonjolkan jalinan keharmonisan melalui narasi tentang Tionghoa. Bahkan secara tersurat melalui narasi Mitreka Satata yang menempatkan negara lain sebagai sahabat yang konteks ini Majapahit dengan Tiongkok. Juga tentang Bhinneka Tunggal Ika yang kini menjadi semboyan bangsa.

3. Zaman Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia

Pada pokok bahasan ini, identifikasi Tionghoa muncul dalam beberapa narasi. Dalam materi Islam dan jaringan perdagangan antarpulau disampaikan narasi yang dilengkapi gambar bahwa sejak lama kapal-kapal dari Cina berlayar hingga ke Kepulauan Indonesia (Gunawan et al., 2017, hlm. 176). Narasi diperkuat dengan pernyataan bahwa sumber-sumber berita Tionghoa menunjukkan adanya jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dengan berbagai negeri terutama Tiongkok sejak abad-abad pertama Masehi sampai abad ke-16. Kemudian kapal-kapal dagang Arab juga mulai berdatangan sejak permulaan abad ke-7 yang turut mendukung perkembangan jaringan perdagangan di Nusantara (Gunawan et al., 2017, hlm. 177).

Sosok yang kerap muncul ketika mengkaji peran Tionghoa dalam Islamisasi adalah Laksamana Cheng Ho. Dalam teks ini, Gunawan et al. (2017, hlm. 178) menarasikan tentang Laksamana Cheng Ho sebagai berikut “Dari sumber literatur Cina, Cheng Ho mencatat terdapat kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan, antara lain, Samudra Pasai dan Malaka yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai abad ke-15, sedangkan Ma Huan juga memberitakan adanya komunitas-komunitas Muslim di pesisir utara Jawa bagian timur”. Narasi ini dilengkapi dengan gambar Laksamana Cheng Ho di halaman yang sama dengan teks. Narasi selanjutnya menerangkan mengenai masuknya pedagang-pedagang Arab yang transit di Kepulauan Indonesia sebelum menuju ke Cina. Dengan demikian pelabuhan-pelabuhan di berbagai wilayah Kepulauan Indonesia kerap didatangi para pedagang dari Cina dan Arab (Gunawan et al., 2017, hlm. 181).

Pada pokok bahasan mengenai kerajaan-kerajaan Islam, Tionghoa beberapa kali disinggung. Pembahasan mengenai kerajaan Samudra Pasai menarasikan hubungannya dengan negeri Tiongkok sebagai berikut

Pada masa pemerintahan Sultan Malik as-Shaleh, Kerajaan Pasai mempunyai hubungan dengan negara Cina. Seperti yang disebutkan dalam sumber sejarah Dinasti Yuan, pada 1282 duta Cina bertemu dengan Menteri Kerajaan Sumatra di Quilan yang meminta agar Raja Sumatra mengirimkan dutanya ke Cina. Pada tahun itu pula disebutkan bahwa kerajaan Sumatra mengirimkan dutanya yang bernama Sulaiman dan Syamsuddin (Gunawan et al., 2017, hlm. 186).

Dalam pembahasan mengenai kerajaan Islam di Sumatera Selatan juga disebutkan keberadaan permukiman Tionghoa tahun 1600-an di Palembang. Artinya sebelum tahun-tahun itu pula, sebelum bangsa-bangsa Barat datang, para pendatang Tionghoa telah masuk ke Nusantara.

Pada 1658 wakil dagang VOC, Ockersz beserta pasukannya dibunuh dan dua buah kapalnya yaitu Wachter dan Jacatra dirampas. Akibatnya pada 4 November 1659 terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dengan VOC di bawah pimpinan Laksamana Joan van der Laen. Pada perang ini Keraton Kesultanan Palembang dibakar. Demikian pula Kuta dan permukiman penduduk Cina, Portugis, Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang berada di seberang Kuta juga dibakar (Gunawan et al., 2017, hlm. 197).

Demikian pula ketika membahas kerajaan Islam di Sumatera Barat disebutkan sepenggal berita Tionghoa. “Berdasarkan berita Cina dari Dinasti T’ang yang menyebutkan sekitar abad ke-7 (674 M) ada kelompok orang-orang Arab (Ta’shih) dan disebutkan oleh W.P. Goeneveldt, wilayah

perkampungan mereka berada di pesisir barat Sumatra” (Gunawan et al., 2017, hlm. 199). Berita Tionghoa juga disebut sebagai salah satu sumber yang amat menunjang cerita sejarah mengenai kehadiran Islam di daerah Maluku selain berita dari Portugis (Gunawan et al., 2017, hlm. 226). Pembahasan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa maupun Kalimantan dan Sulawesi sama sekali tidak menyinggung eksistensi maupun peran Tionghoa. Padahal ada banyak sumber sejarah yang membicarakan mengenai anasir-anasir Tionghoa dalam persebaran dan perkembangan Islam di Jawa.

Pada pokok bahasan zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, buku teks hanya menyinggung Laksamana Cheng Ho dan keberadaan permukiman Tionghoa (Gunawan et al., 2017, hlm. 178, 181). Senada dengan beberapa historiografi lain, Cheng Ho dikatakan mengemban misi perdagangan (Deng, 1995; Ming, 2004). Pembahasan tentang permukiman Tionghoa menandakan buku teks mulai menghubungkannya dengan pedagang perantara (*middleman*) yang menjual barang dari Tiongkok dan membeli hasil produksi para petani (Poesponegoro & Notosusanto, 2008c, hlm. 310). Selain itu, beberapa ulama Walisanga juga diyakini berdarah Tionghoa (De Graaf, H.J dan Pigeud, 1997; Muljana, 2005). Sejumlah masjid di pantai utara Jawa, terutama masjid-masjid Walisanga, tampak kuat pengaruh Tionghoa (Muljana, 2005; Setiono, 2008). Akan tetapi, hal kontroversial ini tidak disinggung dalam buku teks. Narasi mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Papua, materi yang tidak pernah ada sebelumnya, kini hadir dalam buku teks (Gunawan et al., 2017, hlm. 229–231). Ini menguatkan indikasi bahwa buku teks berusaha menyajikan materi yang Indonesiasentris dengan mengakomodasi aspek kedaerahan maupun kesu-

kuan. Pada periode selanjutnya, pendekatan penulisan yang bernuansa keharmonisan ini perlahan ditinggalkan.

B. Warisan Stereotipe: Masa Kolonial sampai Orde Baru

1. Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa

Pokok bahasan perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa mulai diberikan dalam buku teks Sejarah Indonesia SMA kelas XI. Identifikasi mengenai Tionghoa dalam bab pertama buku teks ini mengenai permulaan kolonialisme dan imperialisme disinggung sepintas. Pada pembahasan tentang penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat disebut-sebut tentang Laksamana Cheng Ho yang dianggap sebagai orang yang pertama kali mengelilingi dunia sebelum Magellan-del Cano. Hal yang menarik, pendapat ini justru dirujuk dari orang Eropa. Temuan ini memang tidak berkaitan langsung dengan Indonesia, namun pelayaran Laksamana Cheng Ho diketahui memiliki relasi erat dengan informasi sejarah mengenai penyebaran dan perkembangan Islam khususnya di Jawa. Sardiman & Lestariningsih (2017a, hlm. 17) menarasikannya sebagai berikut

Dalam kaitannya dengan pelayaran dan penjelajahan samudra itu ada pendapat yang menarik dari Menzies, seorang perwira angkatan laut Inggris. Ia menegaskan bahwa yang berhasil mengelilingi dunia pertama kali adalah armada Cina yang dipimpin oleh Panglima Zheng He (Cheng Ho) pada tahun 1421. Zheng He adalah seorang kasim kepercayaan Kaisar Cina dari Dinasti Ming yang bernama Zhu Di atau Yong Le. Dijelaskan oleh Menzies bahwa Zheng He bersama armadanya telah berlayar mengelilingi dunia dengan berpedoman

pada peta-peta kuno yang dibuat oleh para kartografer Cina dan juga beberapa peta yang dibuat misalnya oleh Fra Mauro (orang Italia), dan yang dibuat oleh Piri Reis (orang Turki).

Bab dua menjadi bagian yang istimewa karena representasi Tionghoa tampak begitu jelas dengan hadirnya materi khusus mengenai eksistensi dan peran Tionghoa dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Materi tersebut diberi judul “Orang-orang Cina Berontak”. Sebelumnya Tionghoa juga beberapa kali disinggung dalam perlawanan-perlawanan lain. Dalam perlawanan Banten dinarasikan bahwa Sultan Ageng Tirtayasa menjalin hubungan dagang dengan negara-negara Asia termasuk Tiongkok dan membuat VOC tidak senang.

Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Jung-jung Cina dan kapal-kapal dagang dari Maluku dilarang oleh VOC meneruskan perjalanan menuju Banten. Sebagai balasan Sultan Ageng mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 84).

Dalam perkembangannya masalah ini membuat Belanda bekerja sama dengan Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten.

Dalam persekongkolan tersebut VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten tetapi dengan empat syarat. (1) Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC, (2) monopoli lada di

Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina, (3) Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji, dan (4) pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 85).

Narasi mengenai perlawanan Gowa juga menyebut peran Tionghoa dalam perdagangan lokal di Makassar yang membuat VOC tidak mampu bersaing. Dikatakan bahwa para pedagang Tionghoa sangat menghargai produk lokal, berbeda dengan VOC sehingga kalah saing. Narasi tersebut dikutip dari artikel Singgih Tri Sulistiyono tentang Pasang Surut Jaringan Makasar hingga Masa Akhir Dominasi Kolonial Belanda. Tulisan ini menjadi bagian dari buku Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) yang terbit pada tahun 2012. Buku ini menjadi alternatif buku babon Sejarah Indonesia pasca Orde Baru selain Sejarah Nasional Indonesia (SNI).

Heather Sutherland menjelaskan kegagalan VOC mengendalikan perdagangan di perairan Indonesia Timur yang dilakukan oleh orang-orang Bugis-Makassar itu, karena: (1) ketidakmungkinan membatasi perdagangan yang didukung dengan motif mencari untung dipadu dengan kondisi geografis yang sulit terpantau sehingga mudah untuk melakukan penyelundupan dagang, (2) VOC memiliki kelemahan dalam pemasaran, karena mengejar keuntungan yang tinggi dan tidak mampu membangun jaringan dengan pasar lokal/tidak paham dengan selera pasar lokal, dan (3) keterlibatan VOC dalam pembelian produk-produk lokal sangat kecil, termasuk produk-produk laut, sementara para pedagang Cina sangat menghargai produk lokal dan produk-produk laut ini. Akhirnya VOC tidak mampu bersaing dengan pedagang Cina dan pribumi (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 90).

Apabila dalam perlawanan Gowa dinarasikan Tionghoa bekerja sama dengan penduduk setempat dalam perdagangan, maka berbeda dengan narasi rakyat Riau angkat senjata. Dalam suatu pertempuran dinarasikan bahwa orang-orang Tionghoa diminta bantuannya oleh VOC untuk menghadapi pasukan Siak.

Serangan ini diperkuat dengan kapal perang “Harimau Buas” yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Terjadilah pertempuran sengit di Pulau Guntung (1752 – 1753). Ternyata benteng VOC di Pulau Guntung berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam besar. Dengan demikian pasukan Siak sulit menembus benteng pertahanan itu. Namun banyak pula jatuh korban dari VOC, sehingga VOC harus mendatangkan bantuan kekuatan termasuk juga orang-orang Cina. Pertempuran hampir berlangsung satu bulan. Sementara VOC terus mendatangkan bantuan. Melihat situasi yang demikian itu kedua panglima perang Siak menyerukan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 91).

Dalam bab ini yang paling signifikan yakni tampilnya peristiwa tentang perlawanan Tionghoa terhadap VOC. Peristiwa ini bermula dari tragedi Muara Angke atau pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia oleh VOC dan puncaknya terjadi peristiwa geger Pacinan atau pertempuran pasukan koalisi Tionghoa-Jawa melawan VOC. Narasi mengenai peristiwa ini tergolong ringkas jika dibandingkan dengan narasi senada yang membicarakan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bab dua ini. Peristiwa lainnya yang dimaksud adalah ⁶ Aceh versus Portugis dan VOC, Maluku Angkat Senjata, Sultan Agung versus J.P. Coen, Perlawanan Banten, Perlawanan Gowa, Rakyat Riau Angkat

Senjata, serta Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Narasi ini diberi judul “Orang-orang Cina Berontak” dan disajikan sepanjang satu setengah halaman (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92–93). Sementara yang lain rata-rata tiga halaman, bahkan untuk Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said ditulis enam halaman (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 94–99).

Pada awal teks dijumpai deskripsi bahwa Tionghoa sudah sejak abad ke-5 mengadakan hubungan dagang dan berketurunan di Jawa. Suatu gambaran yang senada dengan narasi-narasi lainnya dalam buku teks ini yang mengusung Tionghoa. Kendati secara tersirat memberi penjelasan bahwa Tionghoa adalah pendatang, namun narasi tidak menghadirkan dikotomi dengan menyebut penduduk Jawa sebagai asli dan Tionghoa sebagai pendatang. Narasi menggambarkan relasi Tionghoa-Jawa yang membaaur dengan harmonis.

Sejak abad ke-5 orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun makin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, yang menikah dengan penduduk Jawa khususnya ke Batavia (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92).

Teks menegaskan peran Tionghoa sebagai *economic animal* sejak semula dibuat oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan mereka sendiri. “VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92). Kedatangan Tionghoa ke Nusantara, sebagaimana diungkap dalam berbagai sumber sejarah, bertujuan untuk

keperluan ekonomi yakni berdagang. Akan tetapi, selanjutnya VOC sengaja mendatangkan orang-orang Tionghoa untuk kepentingan ekonomi kolonial. Dalam perkembangannya stereotip Tionghoa sebagai alat ekonomi yang senantiasa bekerja sama dengan penguasa begitu lekat. Kelanjutan dari narasi ini menunjukkan situasi tidak menguntungkan bagi VOC yang memicu terjadinya peristiwa pembantaian berhari-hari terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia yang dimulai sejak 9 Oktober 1740.

Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis bahkan ada yang menjadi pencuri. Sudah barang tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan Kota Batavia. Akhirnya VOC mengeluarkan kebijakan membatasi imigran Cina (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92).

Narasi selanjutnya menjelaskan tindakan-tindakan yang ditempuh VOC terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia. Mulai dari pembatasan kedatangan, adanya surat izin bermukim, hingga ancaman pembuangan ke Sailand (Srilanka) bagi yang tidak memiliki izin tinggal. Biaya izin yang resmi ditetapkan dua ringgit per orang, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh para pegawai VOC melalui pungutan liar. Akibatnya banyak yang mengalami kesulitan dan tidak mampu membayar surat izin tinggal. Orang-orang Tionghoa yang mengalami penindasan ini kemudian ditangkap oleh VOC, narasi menggambarkan perlakuan VOC terhadap mereka yang bernasib buruk ini sebagai suatu tindakan tegas. "VOC bertindak tegas, orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim ditangkap. Tetapi mereka banyak yang dapat

melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 93).

Menjelang akhir narasi disampaikan bahwa pada tahun 1740 terjadi peristiwa kebakaran di Batavia yang berlanjut dengan pembunuhan terhadap orang-orang Tionghoa oleh VOC. Mereka yang selamat lantas melakukan perlawanan di berbagai daerah. Narasi hanya memberi penjelasan sekilas mengenai perlawanan ini. Narasi hanya menyebut satu nama tokoh yang berperan dari kalangan Tionghoa selebihnya disebut nama Pakubuwana II dan para bupati pesisir pendukung perlawanan. Kurun waktu perlawanan tidak disinggung, hanya disebut pada tahun 1741 pertempuran telah sampai di Kartasura.

Orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Oey Panko atau kemudian dikenal dengan sebutan Khe Panjang, kemudian di Jawa menjadi Ki Sapanjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC kemudian menumbuhkan kekacauan yang meluas di berbagai tempat terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir. Atas desakan para pangeran, Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741 benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara dan persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 93).

Pada akhir narasi “Orang-orang Cina Berontak”, setelah perlawanan pasukan Tionghoa-Jawa berhasil dipadamkan oleh VOC, disampaikan pula dampak panjang dari peristiwa ini bagi perlawanan selanjutnya terhadap VOC di Jawa.

Pada kondisi yang demikian ini Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Sikap Pakubuwana II yang demikian ini telah menambah panjang barisan orang-orang yang kecewa dan sakit hati di lingkungan kraton. Kondisi ini pula yang telah mendorong VOC kemudian melakukan intervensi politik di lingkungan istana (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, p. 93).

Penjelasan ini berkaitan erat dengan narasi mengenai ⁵ perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said dilatarbelakangi juga oleh peristiwa sebelumnya yakni Geger Pacinan. Pasukan Tionghoa-Jawa yang berkoalisi menghadapi VOC memang kemudian terlibat dalam peristiwa penyerangan terhadap keraton di Kartasura. Penyerangan itu tidak lepas dari sakit hati akibat sikap Paku Buwana II yang sebelumnya mendukung pasukan Tionghoa-Jawa menjadi berbalik bekerja sama dengan VOC. Dalam narasi perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said disebut bahwa Mas Said merasa tidak senang ketika keluarga kepatihan mencemooh dirinya telah membantu perlawanan orang-orang Tionghoa. Dari situlah timbul niat Mas Said untuk melawan VOC yang dianggap telah mengacau situasi di keraton sekaligus bentuk protesnya terhadap keraton yang memilih bekerja sama dengan VOC.

Pada usia 14 tahun Raden Mas Said sudah diangkat sebagai gandek kraton (pegawai rendahan di istana) dan diberi gelar R.M.Ng. Suryokusumo. Karena merasa sudah berpengalaman, Raden Mas Said kemudian

5. mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Akibat permohonan ini Mas Said justru mendapat celaan dan hinaan dari keluarga kepatihan, bahkan dikait-kaitkan dengan tuduhan ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina yang sedang berlangsung. Mas Said merasa sakit hati dengan sikap keluarga kepatihan. Muncullah niat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC yang telah membuat kerajaan kacau karena banyak kaum bangsawan [bangsawan] yang bekerja sama dengan VOC. Hal ini merupakan bentuk protes dan perlawanan terhadap penguasa Mataram yang bersekutu dengan VOC (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 94).

Dalam latihan uji kompetensi, materi mengenai perlawanan Tionghoa terhadap VOC juga diangkat sebagai pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. “Coba lakukan telaah hal ihwal tentang surat izin bermukim atau “surat pas” bagi orang-orang Cina dan coba kaitkan dengan fenomena kehidupan masyarakat Indonesia sekarang [!]” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 101). Pertanyaan serupa kembali muncul dalam latihan ulangan akhir bab. “Jelaskan kasus tentang “surat pas” atau surat izin bermukim bagi orang Cina. Coba kaitkan kasus ini dengan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini!” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 153). Perlawanan Tionghoa terhadap VOC ini tampaknya dianggap paling merepresentasikan Tionghoa dalam sejarah nasional.

Pada materi masa kolonialisme dan imperialisme ini, buku teks menyajikan satu-satunya narasi istimewa tentang Tionghoa yang berjudul “Orang-orang Cina Berontak”. Tionghoa juga disinggung dalam peristiwa perlawanan lainnya sebagaimana dijumpai dalam IDAS (Abdullah & Lopian, 2012d). Dalam buku teks, narasi “Orang-orang Cina

Berontak” mengawalinya dengan peran ekonomi orang Tionghoa yang dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92). Narasi yang lebih mendalam dapat dijumpai dalam IDAS Jilid 4 (Abdullah & Lapian, 2012d, hlm. 334–335). Paparan IDAS yang komprehensif berpotensi menguatkan pandangan bahwa sejak semula hubungan Tionghoa dengan masyarakat lainnya begitu harmonis sampai kemudian Belanda merusaknya. Sayangnya, kendati buku teks menggambarkan kehidupan Tionghoa yang membaaur dan harmonis, namun begitu terasa penegasan posisi Tionghoa sebagai economic animal, pemain utama perekonomian, antek Belanda dalam urusan ekonomi, dan stigma sejenisnya.

Teks “Orang-orang Cina Berontak” lebih fokus menarasikan pembantaian di Batavia. Peristiwa ini terjadi pada masa Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier yang disebut sebagai tragedi Muara Angke dan mendorong persekutuan Tionghoa-Jawa melawan VOC (Daradjadi, 2013; Remmelink, 2002; Vermeulen, 2010). Narasi dalam buku teks kurang memberi tekanan pada peristiwa perlawanan Tionghoa-Jawa terhadap VOC. Dalam IDAS, pembunuhan orang-orang Tionghoa di Batavia diberi tajuk “Huru-Hara Cina di Batavia 1740”, sedangkan perlawanan Tionghoa-Jawa terhadap VOC berjudul “Huru-Hara Cina Meluas ke Mataram (Kartasura)”. Kedua judul ini bernuansa denotatif, demikian juga dengan isi narasinya (Abdullah & Lapian, 2012d, hlm. 348).

Dalam konteks pendidikan sejarah, peristiwa pembantaian Tionghoa di Batavia tahun 1740 perlu dipahami sebagai awal dari berbagai peristiwa yang dibalut kebencian rasial terhadap Tionghoa. Perlawanan hebat persekutuan Tionghoa-Jawa terhadap VOC meninggalkan luka. Pemerintah Kolonial Belanda, menciptakan perpecahan agar koalisi

Tionghoa-Jawa tidak terjadi lagi dengan menempatkan Tionghoa sebagai alat ekonomi penguasa. Munculnya kebencian dan sikap anti-Cina yang berujung pada kerusuhan merupakan warisan kolonial. Sejak itu, kalangan Tionghoa yang kuat ekonominya namun lemah secara politik dianggap kaum kapitalis yang eksploitatif seperti perilaku kolonial (Davidson, 2009). “Orang-orang Cina Berontak” dalam buku teks dinarasikan dalam bayang-bayang stigma ekonomi yang lekat dengan Tionghoa selanjutnya.

2. Pendidikan dan Pergerakan Nasional

Bab empat dalam buku teks Sejarah Indonesia SMA kelas XI berjudul **Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan**. Bab ini membahas pokok bahasan pendidikan dan pergerakan nasional. Pembahasan tentang peran Tionghoa terutama dibicarakan dalam sejarah perkembangan pers. Sardiman & Lestariningsih (2017a, hlm. 186) menarasikannya sebagai berikut.

Pada abad itu penerbit Tionghoa mulai bermunculan. Para penerbit Tionghoa itulah yang menjadikan pertumbuhan surat kabar berkembang pesat. Dalam perkembangannya kaum bumiputra juga mengambil bagian. Mereka pada mulanya magang pada jurnalis Indo dan Tionghoa, kemudian peran mereka meningkat sebagai redaktur surat kabar orang Indo dan Tionghoa. Bermula dari itulah para bumiputra itu mendirikan sendiri penerbitan surat kabar mereka. Penerbit bumiputra pertama di Batavia yang muncul pada pertengahan abad ke-20 adalah R.M. Tirtoadisuryo, F.D.J Pangemanan, dan R.M. Tumenggung Kusuma Utaya, sebagai redaktur Ilmoe Tani, Kabar Perniagaan, dan Pewarta Prijaji.

Dalam narasi selanjutnya juga disebut nama Kwee Khaij Khee yang mendirikan surat kabar Tjahaja Timoer. Akan tetapi, pernyataan ini dihadirkan dengan tujuan memberi penjelasan lebih lanjut terhadap munculnya sejumlah jurnalis bumiputera yang menjadi subjek utama narasi. “Bermunculannya media cetak itu segera diikuti dengan munculnya sejumlah jurnalis bumiputra lainnya. Mereka adalah R. Tirtodanudja dan R. Mohammad Jusuf. Keduanya adalah redaktur Sinar Djawa, yang diterbitkan Honh Thaij & Co. Djojosediro, redaktur Tjahaja Timoer yang diterbitkan di Malang oleh Kwee Khaij Khee” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 187).

Selain pers, Tionghoa juga direpresentasikan dalam pembahasan mengenai gerakan Revolusi Tiongkok. Bersama dengan gerakan Turki Muda serta gerakan nasional di India dan Filipina, Revolusi Tiongkok dikatakan mendorong munculnya kesadaran nasional di Indonesia (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 191). Tionghoa tidak disinggung dalam pemaparan mengenai berbagai organisasi pergerakan, Sumpah Pemuda, hingga Volksraad. Terkait Sumpah Pemuda hanya disebut nama Djohan Muh. Tjai dari Jong Islamieten Bond yang merupakan tokoh Tionghoa yang menjabat sebagai Pembantu I dalam kepanitiaan Kongres Pemuda II (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 211).

Temuan yang menarik terkait dengan narasi mengenai Sarekat Islam (SI). Persoalan persaingan dagang antara pedagang batik pribumi dengan pedagang batik Tionghoa kerap dikaitkan saat menjelaskan latar belakang berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo yang kemudian menjadi SI, namun ternyata dalam buku teks ini hal tersebut tidak muncul. Pada umumnya berbagai referensi termasuk buku teks mengangkat hal tersebut. Narasi mengenai berdirinya

SDI dalam buku teks ini berkuat pada kapan, di mana, dan siapa tokoh-tokohnya hingga perubahan SDI menjadi SI saja (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 189, 192, 222). Narasi arus utama yang membicarakan latar belakang berdirinya SDI akibat konflik dagang antaretnis tidak didapati. Terakhir dalam penjelasan mengenai pokok bahasan penguatan jati diri keindonesiaan, Tionghoa juga tidak disebut.

Pada pokok bahasan pendidikan dan pergerakan nasional, ada dua isu pokok tentang Tionghoa yakni perkembangan pers dan Sumpah Pemuda. Dikotomi pribumi-nonpribumi mulai muncul dalam narasi sejarah yang membangkitkan kesadaran hidup berbangsa ini. Narasi menjelaskan bahwa kaum bumiputra (pribumi) magang sebagai jurnalis di surat kabar milik kaum Indo dan Tionghoa (nonpribumi). Historiografi Tionghoa banyak menyebut peran Tionghoa dalam pertumbuhan pers dan berkembangnya sastra Melayu Tionghoa yang mengenalkan bahasa Melayu tingkat tinggi. Berulang kali SNI maupun IDAS juga menyebut nama surat kabar maupun tokoh pers Tionghoa yang mendorong munculnya pers bumiputra. Akan tetapi, sebagai pelopor tetap dilekatkan kepada pers bumiputra (Abdullah & Lopian, 2012e, hlm. 299; Poesponegoro & Notosusanto, 2008e, hlm. 318). Narasi Tionghoa dalam Sumpah Pemuda pada buku teks mengambil dari IDAS karena senada hanya menyebut nama Djohan Muhammad Tjai. Padahal berbagai historiografi lain mencatat nama-nama Kwee Thiam Hong (Daud Budiman), Ong Khai Siang, Jong Liauw Tjoan Hok, dan Tjio Jin Kwee. Sumpah Pemuda juga diselenggarakan di rumah milik seorang Tionghoa bernama Sie Kong Liong di Jalan Kramat Raya Nomor 106 Jakarta (Setiono, 2008, hlm. 504). Pengakuan terhadap Tionghoa dalam kedua materi ini

masih sangat terbatas ditampilkan dalam buku teks. Padahal beragam karya sejarah mengenai Tionghoa sudah banyak menampilkannya.

Masih banyak fakta sejarah tentang Tionghoa yang tidak muncul dalam buku teks. Sin Po, surat kabar pertama yang memelopori penggunaan kata “Indonesia” menggantikan “Hindia Belanda”. Mingguan Sin Po juga menjadi surat kabar pertama yang memuat teks lagu Indonesia Raya ciptaan W. R. Supratman (Setiono, 2008, hlm. 448-449). Bibit nasionalisme di kalangan Tionghoa juga bertumbuh, salah satunya tampak dari tokoh Liem Koen Hian. Tionghoa juga mendukung pertumbuhan seni pertunjukan dan perfilman nasional sebagaimana dinarasikan dalam IDAS (Abdullah & Lopian, 2012e). Termasuk berdirinya Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang menunjukkan kesadaran nasionalisme kaum Tionghoa sudah ada sebelum organisasi proto-nasionalis Indonesia yang pertama lahir yakni Boedi Oetomo (Suryadinata, 1984). Tentang persaingan dan konflik dagang Tionghoa-Jawa terkait berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) juga tidak tampil.

Tumbuhnya kesadaran nasionalisme di kalangan Tionghoa hampir tidak pernah dibicarakan. Malahan kerap muncul tuduhan pada masa Orde Baru, orang Tionghoa nasionalismenya diragukan. Terhitung sejak 1854, penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi tiga kelompok yakni Eropa, Vreemde Oosterlingen, dan Inlander. Tionghoa masuk dalam golongan kedua. Perlakuan berbeda dirasakan melalui aturan wijkenstelsel dan passenstelsel. Saat itu, masyarakat Tionghoa terbagi dalam tiga pandangan politik, yakni (1) Golongan Sin Po yang berorientasi kebangsaan Tiongkok dan menolak kekawulaan Belanda; (2) Golongan Chung Hwa Hui (CHH) yang bersikap pragmatis dengan berdiri di

belakang Belanda untuk memperbaiki posisinya; dan (3) ⁷⁵ Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang didirikan oleh Liem Koen Hian berkiblat ke Indonesia dan mengidentifikasi diri sebagai orang Indonesia daripada ke Tiongkok maupun Belanda (Suryadinata, 1984, hlm. 45–54). Ulasan mengenai ini juga ditulis oleh Leo Suryadinata dalam IDAS Jilid 8. Sayangnya narasi yang menunjukkan nasionalisme orang-orang Tionghoa yang merasa menjadi dari bangsa Indonesia tidak pernah dimunculkan, termasuk dalam buku teks yang dianalisis ini.

¹³¹ 3. Pendudukan Jepang di Indonesia

Pokok bahasan masa pendudukan Jepang di Indonesia muncul dalam bab lima buku teks Sejarah Indonesia SMA kelas XI untuk semester 2. Pembahasan Tionghoa muncul dalam materi organisasi pergerakan pada masa Jepang. Organisasi semimiliter pada masa Jepang salah satunya adalah Keibodan yang dinarasikan memiliki anggota khusus untuk orang-orang Tionghoa yang disebut Kakyō Keibotai. “Di kalangan orang-orang Cina juga dibentuk Keibodan yang dinamakan Kakyō Keibotai” (Sardiman & Lestariningsih, 2017b, hlm. 29).

Pada bab masa pendudukan Jepang juga dijelaskan akhir kekuasaan Jepang di Indonesia. Salah satunya terkait dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam materi ini dinarasikan bahwa Tionghoa memiliki wakil yang duduk sebagai anggota PPKI. ⁷⁴ Sebenarnya dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) juga terdapat wakil-wakil dari kalangan Tionghoa, namun tidak disampaikan dalam buku teks ini. Tentang keanggotaan BPUPK, Sardiman &

Lestariningsih (2017b, hlm. 67) hanya menuliskannya sebagai berikut.

Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P Suroso sebagai wakil ketua merangkap kepala Tata Usaha dan seorang Jepang sebagai wakilnya Tata Usaha, yaitu Masuda Toyohiko dan Mr. R. M. Abdul Gafar Pringgodigdo. Semua anggotanya terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia, ditambah tujuh orang Jepang yang tidak punya suara.

Terkait dengan keanggotaan PPKI, Sardiman & Lestariningsih (2017b, hlm. 69) menyebut adanya wakil dari kalangan Tionghoa melalui narasi sebagai berikut.

BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, tiga orang wakil dari Sumatra, dan dua orang dari Sulawesi dan masing-masing satu orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah enam orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945.

Pada pokok bahasan pendudukan Jepang di Indonesia ini, narasi hanya menyebut tentang Kakyo Keibotai sebagaimana dalam SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS

Jilid 6 (Abdullah & Lopian, 2012f, hlm. 53; Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 46). Secara umum, kajian mengenai Tionghoa pada masa pendudukan Jepang memang terbatas (Wirawan, 2017).

4. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Selanjutnya pada bab yang memuat pokok bahasan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tentang PPKI dibahas kembali dan wakil Tionghoa yang duduk sebagai anggota PPKI juga disebut lagi. Susunan anggota PPKI ditulis pada Sardiman & Lestariningsih (2017b, hlm. 81) sebagai berikut.

Panitia persiapan atau PPKI itu beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah.

5 Jawa	12 wakil
Wakil Sumatera	3 wakil
Sulawesi	2 wakil
Wakil Kalimantan	1 wakil
Wakil Sunda Kecil	1 wakil
Wakil Maluku	1 wakil
Wakil dan [dari (?)] golongan penduduk Cina	1 wakil

Tionghoa juga muncul dalam pembahasan mengenai peristiwa Rengasdengklok. Saat itu, 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengasdengklok dan beristirahat seharian di rumah seorang Tionghoa bernama Djiau Kie Siong. Narasi yang dilengkapi dengan foto rumah Djiau Kie Siong tersebut (Sardiman & Lestariningsih, 2017b, hlm. 85) ditulis sebagai berikut.

Dipilihnya daerah Kawedanan Rengasdengklok, karena daerah itu terpencil yaitu 15 km dari Kedunggede, Karawang. Selain itu, juga ada hubungan baik antara

1

Daidan Peta Purwakarta dan Daidan Jakarta, sehingga dari segi keamanan terjamin. Pagi hari rombongan Sukarno sampai di Rengasdengklok. Mereka diterima oleh Shodanco Subeno dan Affan. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa, Djiau Kie Siong yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia.

Pada pokok bahasan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia senada dengan SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS menyebut satu orang Tionghoa, Drs. Yap Tjwan Bing, menjadi anggota PPKI (Abdullah & Lapian, 2012f, hlm. 108; Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 136). Keanggotaan Tionghoa dalam BPUPK juga tidak disinggung dalam buku teks. Sebenarnya dalam BPUPK terdapat wakil-wakil kalangan Tionghoa – jumlahnya empat orang ⁶¹ Liem Koen Hian, Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, dan Mr. Tan Eng Hoa. Selanjutnya dalam susunan keanggotaan PPKI diangkat Drs. Yap Tjwan Bing sebagai anggota dari Tionghoa (Setiono, 2008, hlm. 543, 445). Nama-nama empat orang anggota BPUPK dari kalangan Tionghoa ini juga dijumpai dalam denah tempat duduk persidangan BPUPK yang tercantum dalam Risalah Sidang BPUPK dan ¹⁰⁸ PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 terbitan Sekretariat Negara RI tahun 1998 (Dhakidae, 2020, hlm. 46).

Dalam SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS Jilid VI tidak dijumpai nama-nama keempat tokoh Tionghoa itu. Kedua buku tersebut menulis bahwa dari 60 orang anggota itu di antaranya empat orang golongan Arab serta peranakan Belanda (Abdullah & Lapian, 2012f, hlm. 93; Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 122). Kekaburan bahkan hilangnya informasi mengenai tokoh Tionghoa dalam BPUPK sejak SNI edisi awal yang masih belum juga dikoreksi dalam SNI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS menjadi persoalan serius.

Catatan sejarah membuktikan bahwa di BPUPK hanya ada seorang wakil dari golongan Arab yakni A. R. Baswedan (Kwartanada, 2020). Narasi IDAS selanjutnya menyatakan bahwa “Sesungguhnya semua anggota BPUPKI [lebih tepat disebut BPUPK] yang 60 orang – kemudian ditambah 6 orang – itulah yang berhak disebut sebagai ‘bapak pendiri bangsa’ (*the founding fathers*). Mereka ini adalah *the founding fathers* karena dalam arti sebenarnya mereka inilah yang dianggap sebagai *the men who made Indonesia merdeka*” (Abdullah & Lopian, 2012f, hlm. 93).

Tionghoa juga muncul dalam pembahasan tentang Rengasdengklok. Narasi buku teks bahkan dilengkapi dengan foto rumah Djiau Kie Siong (Sardiman & Lestariningsih, 2017b, hlm. 85). Fakta ini memang tergolong fakta keras yang tidak perlu diragukan kebenarannya. Jejak-jejak sejarah termasuk rumah Djiau Kie Siong itu hingga kini masih bisa disaksikan. Berbagai historiografi juga menyebut tentang sikap Djiauw Kie Siong dan keluarganya yang mendukung kemerdekaan Indonesia (Setiono, 2008, hlm. 548). Kendati demikian, tentang kediaman Djiau Kie Siong ini tidak disebut dalam SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS. Dalam SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran hanya ditampilkan gambar rumah di Rengasdengklok yang menjadi tempat Soekarno dan Hatta diamankan tanpa menyebut rumah milik siapa yang dimaksud itu (Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 142). Pada episode sejarah ini, narasi buku teks patut diapresiasi.

5. ⁸ Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan Belanda

Pokok bahasan ini dimuat dalam buku teks yang dianalisis dengan judul Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI.

Tionghoa dinarasikan dalam peristiwa agresi militer Belanda I. Tepatnya terkait aksi-aksi yang terjadi di Jawa Barat yang menjadikan orang-orang Tionghoa sebagai korban pembunuhan pasukan Belanda.

Pada tanggal 21 Juli 1947 tengah malam, pihak Belanda melancarkan ‘aksi polisional’ mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan di Jawa. Di Sumatra, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batu bara di sekitar Palembang dan Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan. Di beberapa daerah terjadi aksi-aksi pembalasan. Orang-orang Cina di Jawa Barat dan kaum bangsawan yang dipenjarakan di Sumatra Timur dibunuh. Beberapa orang Belanda, termasuk Van Mook ingin melanjutkan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang tidak menyukai ‘aksi polisional’ tersebut menggiring Belanda untuk segera menghentikan peperangan terhadap Republik Indonesia (Sardiman & Lestariningsih, 2017b, hlm. 179–180).

Selain narasi-narasi tersebut, buku teks ini tidak merepresentasikan Tionghoa dalam peristiwa-peristiwa sejarah era revolusi lainnya. Tionghoa tidak lagi disebut dalam materi selanjutnya yang membicarakan mengenai Konferensi Meja Bundar (KMB), pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), hingga kembali pada bentuk negara kesatuan. Dalam paparan mengenai nilai-nilai kejuangan masa revolusi juga tidak disinggung tentang arti penting peran berbagai etnis

termasuk Tionghoa bagi perjuangan kemerdekaan. Padahal dalam materi ini disampaikan ⁵ nilai-nilai perjuangan seperti persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta Tanah Air, saling pengertian dan menghargai yang relevan dengan kenyataan kebinekaan.

Pada pokok bahasan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, hanya satu narasi yang muncul menempatkan Tionghoa sebagai korban dari agresi militer Belanda. Padahal, pada periode ini para pemuda Tionghoa di beberapa daerah membentuk pasukan pendukung kemerdekaan Republik Indonesia seperti di Solo dan Jawa Timur. Peran lain yang disebut dalam SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran yakni Laksamana Muda John Lie yang menyelundupkan senjata maupun kebutuhan perang lainnya untuk pasukan Republik (Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 277). Selain itu dalam perjuangan diplomasi, tokoh Tionghoa juga turut terlibat sebagai perwakilan. Misalnya dalam Perundingan Renville, salah satu anggota delegasi Republik adalah dr. Tjoa Siek Ien (Abdullah & Lopian, 2012f, hlm. 373; Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 221). Demikian pula jasa Oey Gie Hwat yang bersama Suripno pada Juli 1947 ditugasi oleh Presiden Soekarno untuk menjajaki kemungkinan mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa Timur (Abdullah & Lopian, 2012f, hlm. 390). Lagi-lagi dalam narasi perjuangan seperti ini, Tionghoa hanya dibicarakan sebagai korban saja.

Di sisi lain, harus diakui bahwa dinamika pada masa mempertahankan kemerdekaan cukup pelik bagi Tionghoa. Beberapa kelompok masyarakat Tionghoa, dengan maksud untuk mempertahankan diri dari aksi-aksi penjarahan, membentuk Pao An Tui (PAT) yang didukung Belanda. Meskipun posisinya berseberangan dengan para pejuang

Indonesia, namun ada PAT di daerah tertentu seperti di Padang pimpinan Sho Bun Seng justru mendukung perjuangan Indonesia. Keberadaan PAT yang mendapat stigma negatif sebagai antek Belanda di mata pejuang Republik makin mendorong munculnya aksi anti-Cina disertai pembunuhan dan penjarahan yang dikenal sebagai “Zaman Bersiap” seperti di Tangerang dan Bagansiapiapi tahun 1946 (Setiono, 2008, hlm. 564; Sumantri, 1963, hlm. 181–183). “Masa bersiap” juga disebut dalam IDAS Jilid 6, bangkitnya rasa kebencian terhadap unsur asing mendorong terjadinya konflik dan benturan internal termasuk dengan unsur Cina (Abdullah & Lapian, 2012f, hlm. 202). Buku teks tidak bicara banyak tentang Tionghoa dalam dinamika masa Revolusi.

6. **Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan sampai dengan Demokrasi Terpimpin**

Pada bab dua yang menjelaskan mengenai masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1950–1959) cukup banyak merepresentasikan eksistensi dan peran Tionghoa. Perkembangan politik pada masa Demokrasi Terpimpin salah satunya diwarnai dengan munculnya masalah anti-Cina yang dilatarbelakangi oleh kecemburuan dalam ekonomi. “Munculnya masalah anti-Cina di antara kalangan rakyat yang kurang senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 59). Dalam konteks ini hendak ditegaskan bahwa sentimen anti-Cina bersama dengan persoalan Irian Barat dan meningkatnya sikap kritis daerah terhadap pusat telah melemahkan posisi Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Terkait dengan pemilihan umum 1955 yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Parlemen dan Dewan Konstituante juga mengusung narasi mengenai

Tionghoa. Dalam hal keanggotaan Dewan Konstituante diatur mengenai golongan penduduk minoritas sebagai berikut

Keanggotaan Dewan Konstituante terdiri atas anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Pemerintah mengangkat anggota Konstituante jika ada golongan penduduk minoritas yang turut dalam pemilihan umum tidak memperoleh jumlah kursi sejumlah yang ditetapkan dalam UUDS 1950. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi dan golongan Arab 6 kursi (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 68).

Tionghoa cukup banyak diperbincangkan dalam narasi mengenai sistem ekonomi nasional pada masa Demokrasi Liberal. Narasi diawali dengan memaparkan dampak kolonialisme yang menempatkan Tionghoa sebagai *economic animal* yang memiliki peran menentukan dalam perekonomian. Situasi ini ingin diubah sebagai bentuk mewujudkan struktur perekonomian yang bersifat nasional.

Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era Demokrasi Parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era Demokrasi Parlementer, Kabinet Natsir. (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 70).

Dalam penjelasan selanjutnya disebut nama Soemitro Djojohadikusumo yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha pribumi yang umumnya bermodal lemah dengan pemberian kredit. Gagasan Soemitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) atau Plan Soemitro. Untuk itu dicanangkanlah Program Benteng yang lagi-lagi menarasikan Tionghoa sebagai pesaing ekonomi sebagai berikut

Program ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Selain tujuan tersebut, juga untuk menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 71).

Pelaksanaan Program Benteng mengalami banyak persoalan. Di antaranya yakni pemberian lisensi impor yang disalahgunakan. Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang yang memiliki potensi kewirausahaan tinggi namun karena kedekatan hubungan dengan kalangan birokrat. Akibatnya demi mendapatkan keuntungan yang cepat, lisensi impor tersebut bukan digunakan sebagaimana mestinya malahan diperjualbelikan. Dalam narasi ini kembali Tionghoa ditempatkan sebagai kelompok ekonomi yang diuntungkan.

Akibatnya, pengusaha-pengusaha yang masuk dalam Program Benteng lambat menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah tersebut untuk mencari keuntungan yang cepat dengan menjual lisensi impor yang dimilikinya kepada pengusaha impor yang sesungguhnya, yang kebanyakan berasal dari keturunan Cina. Penyelewengan lain dalam pelaksanaan Politik Benteng adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi, pada kenyataannya yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Perusahaan yang lahir dari kerja sama tersebut dikenal sebagai perusahaan “Ali-Baba”. Ali mewakili Pribumi dan Baba mewakili warga keturunan Cina (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 71).

Narasi demi narasi ini menempatkan Tionghoa sebagai pesaing ekonomi yang harus disingkirkan agar pribumi mendapat tempat dalam perekonomian. Upaya seperti ini di sisi lain menimbulkan permusuhan dan konflik antaretnis yang justru merugikan banyak pihak. Hal ini muncul dalam narasi mengenai Gerakan Asaat.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui “Gerakan Asaat”. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina.

Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 71–72).

Terkait dengan materi ini, buku teks menyediakan aktivitas bagi siswa berupa tugas dan latihan uji kompetensi. Tugas yang diberikan yakni “Buatlah karikatur yang menggambarkan tentang Program Gunting Syarifuddin [Sjafruddin], Gerakan Benteng, Program Ali Baba, Gerakan Asaat (pilih salah satu). [!] Ikuti petunjuk guru kalian!” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 73). Pertanyaan dalam latihan uji kompetensi yang diberikan berbunyi “Jelaskan tujuan diberlakukannya kebijakan ekonomi Benteng. [!] Jelaskan pula mengapa program ekonomi Benteng ini akhirnya mengalami kegagalan!” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 76).

Berbeda dengan bab dua, representasi Tionghoa dalam bab tiga mengenai masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1959-1965) tidak didapati. Tionghoa kembali muncul dalam bab empat pada materi mengenai masa Orde Baru (1966-1998). Tidak lepas dari disebutnya Cina dalam konteks negara (Tiongkok) dalam materi Gerakan 30 September 1965, Cina muncul dalam narasi mengenai aksi protes mahasiswa pada masa transisi 1966-1967 (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 109). Kendati ditujukan pada Cina sebagai negara (Tiongkok), namun lagi-lagi peristiwa seperti ini berpengaruh pula terhadap orang-orang Tionghoa yang telah menjadi warga negara dan bagian dari bangsa Indonesia.

Pada pokok bahasan Indonesia masa awal kemerdekaan sampai dengan Demokrasi Terpimpin, narasi fokus membahas strategi pemerintah mewujudkan perekonomian

nasional melalui program Benteng, Ali-Baba, dan gerakan Assaat yang menunjukkan dikotomi pribumi-nonpribumi. Bahkan lebih lanjut, kalimat-kalimat yang muncul dapat dimaknai bahwa pribumi adalah orang Indonesia, sementara Tionghoa – kendati mereka telah menjadi WNI dan berabad-abad leluhurnya menetap di Indonesia – adalah asing. Narasi ini berujung pada munculnya golongan yang membenci Tionghoa dan menempatkan Tionghoa sebagai pesaing ekonomi yang harus disingkirkan. Di sisi lain narasi seolah memaklumkan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap Tionghoa karena persaingan ekonomi. Temuan ini diperparah dengan penugasan siswa membuat karikatur tentang salah satu dari ³⁴ Program Gunting Sjafruddin, Gerakan Benteng, Program Ali Baba, atau Gerakan Asaat (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 73). Tugas ini mengasah keterampilan dan kreativitas, namun jika tidak hati-hati dapat menjebak pada hal yang kontraproduktif dengan tujuan pendidikan sejarah. Karikatur yang sifatnya mengkritik bahkan menyindir berpotensi mengarah pada konten rasialis dan kebencian. Apalagi narasi yang dibangun buku teks dominan mengarah pada masalah persaingan ekonomi dan konflik. Kendati tidak ditulis dalam buku teks, namun puncaknya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 (PP-10) melarang orang-orang asing (dalam hal ini ditujukan pada Tionghoa) untuk berdagang eceran di daerah pedalaman (Setiono, 2008, hlm. 811). Bahkan dalam pelaksanaannya banyak keluarga Tionghoa diusir dari desa-desa. Akibatnya sikap anti-Cina makin menguat dan kerusuhan terjadi di beberapa kota di Jawa Barat pada tahun 1960-an. Pada periode ini juga ada beberapa persoalan terkait Tionghoa yang tidak disinggung dalam buku teks, misalnya masalah dwi kewarganegaraan.

Pemilihan materi dengan narasi-narasinya yang terkait Tionghoa pada pokok bahasan kolonialisme dan imperialisme hingga masa awal kemerdekaan ini mulai melabeli Tionghoa dengan stigma-stigma tertentu. Stigma tersebut meliputi Tionghoa sebagai *economic animal*, persaingan ekonomi, dikotomi pribumi-nonpribumi, korban peristiwa politik, hingga sentimen anti-Cina yang direproduksi terus-menerus hampir di setiap narasi. Sementara peran positif Tionghoa ditampilkan terbatas dalam narasi perlawanan terhadap VOC, peran pers, Sumpah Pemuda, dan keterlibatan dalam Proklamasi Kemerdekaan. Penulisan narasi yang merepresentasikan Tionghoa dalam buku teks sepanjang periode-periode ini mulai memunculkan (sekaligus mengekalkan) stereotipe dan prasangka terhadap Tionghoa. Representasi Tionghoa seakan memperhadapkan vis a vis “sisi gelap” dan “sisi terang” Tionghoa. Dalam pandangan politik Orde Baru, tentu saja yang terang itu dikalahkan untuk memenangkan “sisi gelap” yang dibuat dan diwariskan dari praktik-praktik pada masa kolonial (Permana & Purwantiningsih, 2021). Untuk itu, peran proses pembelajaran sangat menentukan agar materi tentang Tionghoa pada periode-periode ini dapat dimaknai sesuai jiwa zamannya dan tepat dalam konteks pendidikan sejarah yang sarat nilai.

13

7. Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Orde Baru sampai Reformasi

Pokok bahasan ini dibicarakan dalam bab empat dan lima tentang masa Orde Baru dan Reformasi. Pada bab empat tentang Orde Baru, peristiwa sejarah yang berhubungan dengan Tionghoa yang pertama kali disebut yakni Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) tahun 1974. Peristiwa

ini dinarasikan dengan mengutip tulisan dari buku yang dieditori oleh R. P. Soejono (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 119) sebagai berikut

Menjelang kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka, pada 15 Januari 1974 di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang disusul dengan aksi anarki. Proyek Senen, gedung Toyota Astra, sejumlah toko milik pedagang Tionghoa di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Glodok dan Cempaka Putih, terbakar habis karena aksi tersebut. Geger Jakarta ini mengejutkan jajaran aparat keamanan dan pemerintah, karena itu diberi julukan Malapetaka Lima Belas Januari yang populer dengan Malari.

Narasi ini senada dengan narasi-narasi mengenai peristiwa kerusuhan² yang berujung pada sentimen anti-Cina yang terjadi pada masa Revolusi maupun Demokrasi Liberal. Tionghoa sebagai korban direpresentasikan seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa. Inilah yang pada masa Orde Baru dilabeli sebagai “Masalah Cina”. Konflik dan kerusuhan akibat sentimen anti-Cina terjadi karena “kesalahan” orang-orang Tionghoa sendiri yang terlalu maju atau dianggap mendominasi perekonomian nasional. Pandangan inilah yang kemudian juga menjadi stereotip dan prasangka yang sulit untuk dihapus dari benak masyarakat kebanyakan bahwa semua Tionghoa pasti kaya dan mapan serta bermental sekali Cina tetap Cina. Tionghoa menjadi korban kerusuhan Malari dinarasikan sebagai eksekusi dari kesenjangan ekonomi. Dalam SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran, protes terhadap modal asing dari Jepang justru berkembang menyoroti tentang cukongisme (Poesponegoro & Notosusanto, 2008f, hlm. 637). Ditambah dengan stigma negatif bahwa Tionghoa mendominasi perekonomian, maka dengan mudah

mendorong aksi ini pada kerusuhan rasial yang menyasar warga Tionghoa.

Pada masa Orde Baru, secara kasuistik, beberapa orang Tionghoa memang menempati posisi yang nyaman sebagai konglomerat yang mendominasi perekonomian (Arifin et al., 2016; Freedman, 2003; Sunny Lie & Bailey, 2016). Orde Baru seakan menggunakan standar ganda. Di satu sisi bersikap diskriminatif dan berusaha menghapus segala hal yang berbau Tionghoa dengan menerapkan asimilasi, namun di sisi lain menjalin hubungan hangat dengan para taipan yang dianggap menguntungkan penguasa seperti Liem Sioe Liong (Chua, 2004, hlm. 469). Keuntungan yang sebenarnya hanya melibatkan segelintir kalangan atas Tionghoa ini makin memupuk kesenjangan sosial ekonomi yang berdampak besar bagi masyarakat Tionghoa kelas menengah ke bawah. Sentimen ekonomi menjadi pemantik utama timbulnya konflik horizontal dan kerusuhan anti-Cina. Ironisnya justru warga Tionghoa kelas menengah ke bawah – bukan para cukong, elite, atau mereka yang dekat dengan pemerintah – yang merasakan getahnya.

Sejak awal Orde Baru berkuasa, kampanye dan aksi anti-Cina (Sinophobia) memang makin meluas. Selanjutnya muncul larangan terhadap pelaksanaan tradisi dan budaya Tionghoa, penutupan sekolah-sekolah Tionghoa, pemberangusan surat kabar dan penerbitan berbahasa Tionghoa, larangan penggunaan nama-nama Tionghoa sehingga diimbau untuk mengganti nama menjadi lebih bernuansa Indonesia, dan mendorong asimilasi total salah satunya melalui perkawinan campur (Sunny Lie & Bailey, 2016). Tionghoa – kendati sudah menjadi WNI – kerap masih diragukan rasa nasionalisme dan kecintaannya pada negara. Padahal pada masa Orde Baru, para atlet bulutangkis

banyak yang berasal dari kalangan Tionghoa dan berhasil mengharumkan nama Indonesia dalam setiap pertandingan olahraga tingkat dunia (Tanasaldy & Palmer, 2019).

Dengan demikian, penulisan narasi pada materi masa kolonial hingga Orde Baru dalam buku teks cenderung hanya fokus pada Tionghoa sebagai korban konflik rasial seolah sebagai kompensasi atas dominasinya dalam bidang ekonomi. Buku teks cenderung hanya menyampaikan informasi kognitif berupa fakta sejarah yang tampak di permukaan. Pendekatan penulisan semacam ini menjadi pembuktian terhadap indikasi relasi kuasa Orde Baru masih mewarnai produksi buku teks (Darmawan, 2019) dan citra negatif terhadap Tionghoa masih menjadi warisan yang belum sepenuhnya hilang (Kuntjara & Hoon, 2020).

C. Pemulihan Relasi: Era Reformasi

Penulisan buku teks yang merepresentasikan Tionghoa mulai mengarah pada gagasan pemulihan relasi pada bab lima mengenai masa Reformasi di Indonesia. Materi ini menjadi satu kesatuan pokok bahasan dengan materi masa Orde Baru. Pada bab mengenai era Reformasi dipaparkan tentang perkembangan masa Reformasi di Indonesia (1998-sekarang), peristiwa kerusuhan akibat krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan juga masih menarasikan tentang terjadinya sentimen anti-Cina pada awal Reformasi.

Pada saat krisis makin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun makin menjalar dalam bentuk gejala-gejala non-ekonomi lainnya yang membawa

pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 148).

Pada narasi berikutnya juga digambarkan betapa posisi Tionghoa menentukan bagi perekonomian nasional. Dampak dari kerusuhan yang menyasar Tionghoa telah membuat situasi ekonomi menjadi hancur.

Ditambah kerusuhan Mei 1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan, khususnya di kalangan investor keturunan Cina yang memainkan peran dominan dalam ekonomi Indonesia. Larinya modal, dan hancurnya produksi serta distribusi barang-barang menjadikan upaya pemulihan menjadi sangat sulit, hal tersebut menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 153).

Kerusuhan 1998 dengan Tionghoa sebagai korbannya, di sisi lain mendorong terjadinya perubahan kebijakan pemerintah di era Reformasi terhadap Tionghoa. Praktik-praktik diskriminasi mulai dihapuskan serta keterbukaan dan penerimaan terhadap Tionghoa juga makin besar. Kebijakan yang paling signifikan ¹²² dimulai pada era pemerintahan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Teks mengenai ini disusun oleh Abdurakhman et al. (2018, hlm. 164) sebagai berikut “Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu”.

Sikap Gus Dur yang menjunjung keberagaman dinarasikan menjadi pemicu kejatuhannya dari kursi kepresidenan. “Sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung mendukung pluralisme dalam masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak kelompok minoritas

merupakan salah satu titik awal munculnya berbagai aksi penolakan terhadap kebijakan dan gagasan-gagasannya” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 165). Dalam aktivitas siswa, sikap menghargai kebinekaan yang lekat pada diri Gus Dur dijadikan pertanyaan yang dikaji secara khusus. “Coba anda jelaskan mengapa Presiden Abdurrahman Wahid dianggap sebagai pendorong semangat pluralis!” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 168).

Narasi yang ditampilkan terkait Tionghoa pada materi Reformasi sangat terbatas, hanya pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Kerusakan yang menyasar Tionghoa disinggung dalam narasi periode Reformasi, namun tidak menjelaskan aksi-aksi di sejumlah daerah seperti Purwakarta, Pekalongan, Situbondo, Tasikmalaya, Banjarmasin, Rengasdengklok, Makassar, Kebumen, dan Solo dalam kurun waktu 1996-1999. Buku teks hanya menyinggung puncaknya di Jakarta pada 12-15 Mei 1998 dan kembali menyebut Tionghoa mendominasi perekonomian sehingga menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Dalam peristiwa Mei 1998, puluhan sampai ratusan perempuan Tionghoa mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan sehingga banyak keluarga Tionghoa mengungsi ke luar negeri (Winarnita et al., 2018). Tragedi ini diakui dalam SNI Jilid VI Edisi Pemutakhiran.

Tentang ini, buku teks semestinya tidak menggiring pandangan bahwa Tionghoa menjadi korban kerusakan rasial karena adanya kecemburuan terhadap keberhasilan ekonomi. Narasi itu hanya mereproduksi kebencian dan dendam. Siswa harus didorong untuk bergandengan tangan, berkolaborasi, dan bekerja sama membangun kemajuan ekonomi masyarakat. Provokasi, konflik, dan kerusakan tidak pernah menyelesaikan persoalan namun justru merugikan

semua pihak. Peristiwa Mei 1998 kemudian memang menjadi titik balik relasi antara Tionghoa dengan kelompok masyarakat luas (Turner, 2003, hlm. 344). Lahirnya Reformasi telah menyadarkan gagalnya program asimilasi Orde Baru (Hoon, 2006, hlm. 153).

Pemulihan hak-hak sipil terhadap Tionghoa pada masa pemerintahan Presiden **K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)** ditandai dengan **Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000** (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 164). Sebenarnya tidak hanya itu, IDAS Jilid 8 mencatat mulai dari kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat hingga kesamaan di bidang hukum terhadap masyarakat Tionghoa yang dirintis Presiden B. J. Habibie. Juga pada masa **Presiden Megawati Soekarnoputri** yang mengumumkan **Tahun Baru Imlek sebagai hari libur umum di Indonesia** (Abdullah & Lopian, 2012h, hlm. 462–463). Kesempatan politik juga dibuka luas bagi Tionghoa dengan mendirikan organisasi sosial politik, partai politik, dan menjadi pejabat politik. Salah satu daerah di Indonesia yang begitu dinamis dalam merespon perubahan ini adalah Kalimantan Barat (Tanasaldy, 2015). Kepercayaan diri orang-orang Tionghoa juga makin tinggi untuk menunjukkan identitas ketionghoannya (Giblin, 2003; Turner, 2003). Berbagai perubahan ini membuka kesempatan bagi Tionghoa untuk memilih jalan integrasi wajar dengan melestarikan budayanya dalam hidup berbangsa dan tidak melulu hanyut dalam arus asimilasi Orde Baru yang terbukti gagal (Purdey, 2003). Sebenarnya aspek nilai (*value*) dapat digali secara kaya dan bermakna dari representasi Tionghoa pada masa Reformasi.

Berdasarkan tiga kecenderungan fokus penulisan representasi Tionghoa tersebut, maka apabila buku teks yang tergolong tipikal *cours* ini dimanfaatkan begitu saja

sebagai bahan belajar mandiri oleh siswa dapat berpotensi terjadi anomali. Narasi tentang Tionghoa dalam buku teks sebagian besar hanya mengacu pada *official history* yang ditulis dalam SNI Edisi Pemutakhiran dan IDAS. Pemanfaatan kedua sumber ini pun bergantung pada kepentingan narasi. Ada banyak narasi tentang peran Tionghoa, terutama dalam IDAS, yang berpotensi membentuk pandangan konstruktif dan menguatkan kebinekaan, justru tidak dimanfaatkan. Pemilihan dan keterbatasan (pembatasan) sumber ini membuat pembelajaran berpotensi menjadi kurang bermakna dan dapat memunculkan pemahaman yang kontraproduktif bagi internalisasi nilai kebinekaan.

Untuk itu, ada kecenderungan identifikasi mengenai eksistensi dan peran Tionghoa dalam perjalanan sejarah bangsa yang dinarasikan dalam buku teks Sejarah Indonesia SMA terbitan Kemendikbud RI ini rata-rata bersifat informatif. Hanya beberapa pokok bahasan yang menunjukkan representasi yang cukup signifikan dan berarti. Tionghoa dan perannya sering disebut dalam pokok bahasan Indonesia zaman Hindu dan Buddha. Berita Tionghoa menjadi sumber sejarah yang sangat berharga pada periode ini. Perkembangan agama Buddha juga tidak lepas dari peran orang-orang Tionghoa yang datang dan bermukim di berbagai wilayah kerajaan. Bahkan sebagian besar kerajaan Buddha memiliki keterkaitan erat dengan komunitas Tionghoa khususnya dalam bidang pelayaran dan perdagangan.

Pokok bahasan mengenai perlawanan Tionghoa terhadap VOC atau yang biasa disebut huru-hara Tionghoa di Batavia tahun 1740 telah mendorong terjadinya Geger Pacinan (1740-1743) yang berdampak besar bagi perjuangan melawan kolonialisme. Materi ini kembali hadir dalam

buku teks sejarah dengan judul Orang-orang Cina Berontak setelah sekian lama menghilang. Materi ini menjadi yang paling menonjol tentang Tionghoa karena dibahas secara khusus sebagai subbab dalam buku teks Sejarah Indonesia. Pokok bahasan lainnya yakni tentang peran Tionghoa dalam perkembangan pers pada masa pergerakan nasional. Ada banyak sumber dan kajian historiografi mengenai ini yang menyebutkan peran besar pers Tionghoa.

Pokok bahasan lain yang tergolong signifikan dalam buku teks Sejarah Indonesia yang dianalisis ini yakni mengenai Tionghoa pada masa awal kemerdekaan sampai Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru sampai Reformasi. Dalam pokok bahasan ini, Tionghoa dikisahkan dalam konteks perekonomian. Masalah ini kerap memicu terjadinya sentimen anti-Cina di berbagai tempat. Konflik dan kerusuhan berlatar belakang kebencian terhadap Tionghoa juga terjadi pada masa Orde Baru dan mengalami pemulihan pada masa Reformasi. Pada intinya, representasi Tionghoa dalam beragam pokok bahasan pasca-kemerdekaan mengungkap isu sentimen anti-Cina.



BAB IV

ANALISIS WACANA KRITIS NARASI TIONGHOA DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA

A. Konsep Analisis Wacana Kritis

Representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia, pertama-tama tampak dari buku teks yang tersedia. Analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis* (CDA) dapat digunakan untuk membongkar wacana yang dikonstruksi dalam buku teks. Analisis wacana kritis terhadap buku teks sejarah dirasa penting karena hakikatnya buku teks sejarah menyajikan materi-materi pilihan yang menjadi *the best story* bagi bangsa yang disebut sebagai pendekatan berorientasi pada “*enhancing collective memory*” (Seixas, 2000, hlm. 20). Untuk itu, buku teks sejarah paling krusial bila dibandingkan buku teks mata pelajaran lainnya (Crutchley et al., 2018). Materi-materi pilihan yang mengacu pada *official history* bertujuan menumbuhkan kesadaran historis untuk penanaman nilai-nilai (*values*) seperti nasionalisme, patriotisme, dan karakter kebangsaan lainnya untuk membentuk *national pride* (Aman, 2011; Pavlick, 2019;

Sjamsuddin, 2017; Wineburg, 2006; Wiriaatmadja, 2002; Yao, 2018). Sejarah nasional menekankan peran bangsa Indonesia serta masyarakat dan kebudayaannya dari abad ke abad. Untuk mewujudkan integrasi nasional dalam artian mempersatukan bagian-bagian yang berbeda-beda atau terpisah-pisah ke dalam suatu kesatuan maka loyalitas rakyat terhadap golongan regional, etnis, bahasa, dan religius perlu ditingkatkan menjadi loyalitas terhadap nasion atau bangsa (Kartodirdjo, 1982, hlm. 239).

Buku teks sejarah memuat *official history* atau sejarah resmi versi pemerintah. Hasan (2012a, hlm. 29) menjelaskannya sebagai berikut.

Dalam konteks pendidikan sejarah maka tafsiran resmi pemerintah atau “official history” yang digunakan. Dengan “official history” bukan kebenaran yang berdasarkan kaedah ilmu semata yang dijadikan kriteria tetapi kebenaran berdasarkan kaedah keilmuan dan kepentingan bangsa. ... Setiap pandangan dan pendapat dapat dibenarkan menurut kaedah keilmuan termasuk pendapat dan pandangan yang dianut pemerintah. Setiap pandangan dan pendapat terkandung “bias” termasuk pandangan resmi pemerintah. Sesuai dengan kaedah “official history” dan sesuai dengan kaedah bahwa pendidikan adalah wewenang pemerintah dalam menentukan maka pemerintah memiliki wewenang politis dalam menentukan versi mana yang digunakan untuk pendidikan sejarah.

Pengaruh dinamika sosial politik – yang memiliki wewenang dalam menentukan *official history* – terhadap penulisan narasi buku teks sejarah jamak terjadi di banyak negara. Buku teks sejarah di Irlandia Utara beberapa kali mengalami perubahan konten terutama dalam mengkaji peristiwa kontroversial. Dari lima belas buku teks sejarah

yang terbit sejak tahun 1968-2010 menyajikan perspektif yang beragam (Terra, 2014). Bagi negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Yugoslavia, Estonia, Latvia, Slovakia, Ukraina dan sebagainya, representasi periode Perang Dunia I, II, maupun Perang Dingin dalam buku teks sejarah mereka juga menyimpan persoalan. Dengan analisis perspektif temporal terjadi perubahan dan perbedaan sikap yang dipengaruhi ideologi pemerintah dalam memunculkan *common sense* yang dibangun oleh narasi buku teksnya (Kello & Wagner, 2017; Korbits, 2014; Korostelina, 2010; Michael, 2013; Seixas et al., 2005; Trost & Trbovc, 2020). Buku teks Sejarah Amerika juga mengalami misinterpretasi dalam menjelaskan gerakan abolisi. Artinya bahasa dijadikan sarana untuk menyembunyikan hal-hal tertentu dalam historiografi buku teks sejarah ketika menarasikan tentang perbudakan (Stoskopf & Bermudez, 2017).

Demikian pula di Indonesia, penulisan buku teks sejarah yang didasarkan pada narasi sejarah resmi dapat dijabarkan ke dalam beberapa masa. Pada awal kemerdekaan, penulisan buku teks sejarah berusaha lepas dari pengaruh kolonialisme. Buku teks sejarah bertujuan membangkitkan semangat kemerdekaan dan kebanggaan pada negara yang baru merdeka. Situasi ini masih mewarnai masa Demokrasi Liberal. Memasuki Demokrasi Terpimpin, buku teks sejarah didominasi gagasan sosialisme serta ketokohan dan ajaran Presiden Sukarno. Sementara pada masa Orde Baru, disuguhkan nuansa pendidikan nasionalisme yang militeristik, anti-komunis, de-Sukarnoisasi dan menonjolkan ketokohan Presiden Suharto, serta mengusung keberhasilan pembangunan (Darmawan & Mulyana, 2019; Farawita, 2018; McGregor, 2008; Mulyana, 2013; H. Purwanta & Novianto, 2022). Lenyap dan munculnya materi atau versi tertentu

47 dalam buku teks sejarah tidak lepas dari pengaruh politik dan kepentingan pemerintah sebagai ideologi dalam buku teks. Pemerintah memiliki otoritas untuk membatasi, menambah, dan menghilangkan materi sejarah dan menafsirkannya sendiri (Darmawan et al., 2018).

47 Buku SNI menjadi buku standar sejarah Indonesia yang lahir sebagai realisasi dari rekomendasi Seminar Sejarah Nasional II tahun 1970. Buku ini ditulis sebanyak enam jilid dengan mengusung semangat Indonesiasentris sebagai bentuk dekolonisasi terhadap historiografi Indonesia yang sebelumnya bercorak *Neerlandosentris* (Kartodirdjo, 1982, hlm. 29). Awalnya Sartono Kartodirdjo terlibat dalam penulisan SNI namun kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri sehingga Nugroho Notosusanto tampil sebagai sosok utama dalam proyek ini. Narasi-narasi dalam SNI mencerminkan konsep-konsep besar yang diusung oleh Orde Baru mengenai identitas nasional yakni nasionalisme dan militerisme (Mulyana, 2013). Nasionalisme merupakan konsep politik sebagai *civic nationalism* maka penulisan sejarah Indonesia resmi menggunakan pendekatan politik (Klinken, 2001, hlm. 324; Mulyana, 2013, hlm. 81). Ideologi militer memberi warna dalam penulisan sejarah Indonesia tidak lepas dari peran militer dalam tegaknya Orde Baru (McGregor, 2008; Mulyana, 2013).

Historiografi gaya Orde Baru sebagaimana direpresentasikan dalam SNI bersifat anti-intelektual dan menimbulkan kurangnya pengetahuan sejarah karena hanya berfokus pada peristiwa-peristiwa besar yang dianggap penting dan tokoh-tokoh besar saja. Klinken (2001, hlm. 325) mengungkapkannya sebagai berikut

Official nationalist history took a martial turn under Suharto's New Order – a turn not unlike that once promoted by the Japanese. ... Nugroho also directed the writing of the key final volume of the six-part official national history text *Sejarah Nasional Indonesia* [SNI] (1975). This dealt with Indonesia's living history, from 1945 to 1965. It was largely this volume (or rather the school texts based on it) that provoked Its stark anti-communism privileged the military as national saviors at every crucial moment. The sheer anti-intellectualism of this particular martial view of national history, reinforced by countless monuments, films, and national commemorations, must bear much of the responsibility for the appalling historical ignorance even among liberal arts university students today.

Akibatnya banyak peristiwa sejarah lokal, tokoh-tokoh daerah atau etnis tertentu, maupun tema-tema sejarah lainnya tidak mendapat tempat. Pemikiran Indonesia-sentris yang melatarbelakangi penulisan SNI pada akhirnya mengalami kegagalan. Dalam aspek keruangan, banyak peristiwa sejarah yang besar dan penting terjadi di Jawa (Mulyana, 2017, hlm. 18). Akan tetapi, terkait pembentukan karakter dan jati diri bangsa maka penulisan buku teks sejarah erat dengan kepentingan negara. Narasi yang disajikan dalam buku teks sejarah senantiasa merepresentasikan politik pemerintah yang berkuasa. Dalam perkembangannya sering terjadi permasalahan mendasar, kurikulum berubah namun buku teks tidak banyak berbeda karena penulisannya lebih banyak didasarkan dari buku teks sebelumnya (Darmawan, 2019). Pernyataan “berdasarkan kurikulum” dalam sampul buku teks membuat seakan kedalaman materi maupun ruang lingkungannya tidak perlu diperbincangkan lagi (Hasan, 2000). Jika demikian, penulisan buku teks tidak berkembang dan sulit disesuaikan dengan

dinamika sosial politik. Apalagi, buku teks sejarah memiliki aspek hegemoni yang kuat dan sulit berubah.

Selain menjadi salah satu komponen pembelajaran yang penting dan banyak digunakan, buku teks juga sangat penting dalam penelitian pendidikan karena mewakili “kurikulum yang dimaksudkan”. Buku teks menjadi titik temu antara siswa dengan kekuatan makro masyarakat, budaya, dan politik. Maka buku teks isinya tidak netral dan mencerminkan kekuatan-kekuatan dan keyakinan yang erat kaitannya dengan kondisi sosial budaya yang mendasarinya (Lucy, Demzsky, Bromley, & Jurafsky, 2020, hlm. 2). Dengan demikian, buku teks harus digunakan untuk mendorong tumbuh kembang pemikiran kritis dalam pembelajaran agar berpengaruh positif bagi siswa (E. Supriatna, 2013).

Dalam berbagai situasi pembelajaran, buku teks secara institusional diamanatkan bahkan diatur lewat peraturan khusus. Sayangnya, metode tradisional penyajian buku teks yang dikelola oleh guru tidak selalu dapat diterima dengan baik oleh siswa. Untuk itulah cara-cara kritis dan kreatif dari guru dalam menggunakan buku teks harus dieksplorasi untuk mempertahankan minat dan keterlibatan kelas dalam menggunakan buku teks. Buku teks belum tentu menjadi sumber belajar sejarah yang menarik, maka guru harus membangkitkan imajinasi historis agar membawa masa lalu dalam buku teks ke dalam kehidupan nyata siswa melalui *making connection* (N. Supriatna, 2021). Rowland & Barrs (2013, hlm. 69) menegaskan tentang perlunya guru membangun kembali dinamika penggunaan buku teks sebagai berikut

Thus, creative approaches to textbook use should be explored to sustain the interests and engagement of classes when working with the books. After all,

textbooks are a tool. Their efficacy is determined by use rather than any quality, innate or engineered, that the books may possess. By reworking the roles in a classroom, teachers can restructure the classroom dynamics of textbook use.

Dalam kenyataannya buku teks sejarah yang meng-
usung narasi *official history* memiliki keterbatasan karena
lebih banyak memuat fakta dan sedikit dapat diambil pela-
jaran atau maknanya bagi siswa. Untuk itu guru harus
mengupayakan pemanfaatan buku teks yang dapat mem-
berdayakan siswa melalui pertanyaan-pertanyaan kritis.
Selanjutnya siswa menjadi belajar dan mampu memproduksi
pengetahuan baru melalui buku teks yang dibacanya (N.
Supriatna, 2007, hlm. 174). Agar mampu mengelola siswa
untuk memanfaatkan buku teks secara kritis terlebih dahulu
diperlukan kemampuan guru untuk mengkritisi terlebih
dahulu buku teks tersebut sebelum digunakan dalam proses
pembelajaran di kelas. Untuk itu buku teks sejarah yang sarat
dengan ideologi dan kepentingan negara perlu dibongkar.

Analisis Wacana Kritis merupakan kategori dari analisis
wacana dan menjadi metode untuk membongkar teks. Untuk
memahaminya perlu terlebih dahulu dibedakan penger-
tian antara teks dan wacana. Teks (*text*) adalah wacana tulis
yang merupakan perwujudan bahasa. Dengan memahami
penjelasan Berger (1997), maka teks dalam buku teks
sejarah berisi narasi yang dapat diartikan sebagai kisah
yang menceritakan tentang hal-hal yang telah terjadi pada
manusia dengan urutan peristiwa atau beberapa periode
waktu yang memiliki jangka waktu singkat maupun panjang.
Sementara wacana (*discourse*) berarti wacana lisan yang
belum dilihat sebagai perwujudan fisik bahasa. Wacana
adalah bangun teoretis yang sifatnya abstrak. Masih menurut

Berger (1997) yang mendasarkan pada teori strukturalis, setiap narasi memiliki dua bagian yakni (1) cerita, konten, atau rangkaian peristiwa meliputi tindakan dan kejadian ditambah keberadaan (karakter dan *setting*), dan (2) wacana meliputi ekspresi dan bagaimana konten dikomunikasikan.

Analisis Wacana Kritis berangkat dari teori kritis (*critical theory*) Mahzab Frankfrut terutama karya Jurgen Habermas dan tradisi linguistik kritis (*critical linguistics*). Untuk itu CDA tidak dipahami semata-mata sebagai studi bahasa. Analisis Wacana Kritis memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa di sini agak berbeda dengan bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata-mata dari aspek kebahasaan, melainkan juga menghubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud bahwa bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk di dalamnya praktik kekuasaan (Eriyanto, 2001, hlm. 7). Bahasa bukan fenomena netral, namun terkait dengan pengembangan kesadaran akan suatu masalah. Bahasa sudah membekukan nilai atau ideologi tertentu (Haryatmoko, 2019, hlm. vi).

Ideologi menurut Fairclough merupakan makna yang melayani kekuasaan. Ideologi merupakan pengonstruksian makna yang memberi kontribusi bagi produksi, reproduksi, dan transformasi hubungan-hubungan dominasi. Wacana bisa bersifat ideologis yang memberi kontribusi bagi usaha untuk mempertahankan dan mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Makna teks sebagian diciptakan dalam proses interpretasi. Hegemoni tidak hanya merupakan dominasi namun juga proses negosiasi yang melahirkan konsensus tentang makna. Konsep hegemoni memberi kita alat yang bisa digunakan untuk menganalisis praktik kewacanaan menjadi bagian dari praktik sosial yang luas yang

melibatkan hubungan kekuasaan (Jorgensen & Phillips, 2017, hlm. 139).

Kajian buku teks untuk membongkar wacana tentang representasi Tionghoa menggunakan metode analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis* (CDA). Analisis wacana atau *discourse analysis* merupakan salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis isi kuantitatif yang sering digunakan. Jika analisis isi kuantitatif lebih menekankan pada pertanyaan “apa”, analisis wacana lebih melihat “bagaimana” dari pesan atau teks. Melalui analisis wacana bukan hanya mengetahui apa isi teks, namun juga bagaimana pesan itu disampaikan. Maka analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks. Bahkan salah satu kekuatan dari analisis wacana adalah kemampuannya melihat dan membongkar praktik ideologi dalam teks (Eriyanto, 2001, hlm. xv). Perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa analisis wacana lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif sementara analisis isi cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif.

Analisis wacana bersifat kualitatif karena memperhitungkan pemaknaan teks ketimbang penjumlahan unit kategori seperti dalam analisis isi. Dasar dari analisis wacana adalah interpretasi yang mengandalkan penafsiran peneliti. Analisis wacana berpretensi memfokuskan pada pesan yang tersembunyi (*latent*), sementara analisis isi hanya membedah muatan teks yang sifatnya nyata (*manifest*). Analisis isi hanya mempertimbangkan apa yang dikatakan (*what*) namun tidak menyelidiki bagaimana ia dikatakan (*how*). Analisis wacana tidak berpretensi melakukan generalisasi apalagi memprediksi (Eriyanto, 2001, hlm. 337–340).

Dalam analisis wacana terdapat pemahaman mengenai struktur sosial yang tampak dari pengungkapan bahasa

(sistem semiotik), praktik sosial yang tampak dari tatanan wacana yang dibangun, dan peristiwa sosial yakni teks yang dituliskan maupun diucapkan (Fairclough, 2013, hlm. 74). Konsep bahasa atau sistem semiotik dan teks sudah familiar dalam studi bahasa, namun konsep tatanan wacana relatif baru. Tatanan wacana merupakan struktur sosial dari variasi atau perbedaan semiotik. ⁵⁷ **Si teks mengandung jejak proses dan struktur ideologis, namun tidak mungkin untuk “membaca” ideologi dari teks. Makna diproduksi melalui interpretasi teks dan teks terbuka untuk berbagai interpretasi yang beragam. Wacana berkaitan dengan ideologi yang diproduksi, didistribusi, dan ditafsirkan dalam teks (Fairclough, 2013, hlm. 57).**

⁷² **Ada tiga pandangan dalam analisis wacana. Pertama, positivisme-empiris menekankan pada kebenaran atau ketidakbenaran sintaksis dan semantik. Dalam pemahaman ini ¹² analisis wacana menggambarkan tata urutan kalimat, bahasa, dan pengertiannya. Kedua, konstruktivisme yang berusaha mengungkap maksud atau makna tertentu dari posisi dan penafsiran pembicara. Ketiga, kritis yang mengoreksi ⁶⁷ pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Dalam pandangan kritis, **analisis melihat bahwa bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, konstelasi kekuatan, dan hegemoni. Analisis wacana dengan pandangan ⁹ kritis digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa (Eriyanto, 2001; Haryatmoko, 2019).****

Ideologi merupakan makna yang melayani kekuasaan. Maka praktik kewacanaan tidak lepas dari hegemoni. Analisis wacana yang bersifat kritis dimaksudkan untuk mengungkap peran praktik kewacanaan untuk mendorong

timbulnya perubahan sosial. Pendekatan analisis wacana kritis memihak pada kelompok-kelompok sosial yang terdidas atau terpinggirkan. Atas nama emansipasi, analisis wacana kritis tidak bisa dianggap sebagai pendekatan yang netral namun mengandung keberpihakan agar bisa memberi kontribusi pada perubahan sosial di masyarakat (Jorgensen & Phillips, 2017, hlm. 120). Kelompok sosial yang dimaksud adalah aktor dan peran Tionghoa dalam buku teks sejarah yang pernah mengalami ketidakadilan atau dipinggirkan dari narasi sejarah nasional pada masa Orde Baru.

Menurut perspektif Michel Foucault, wacana ditempatkan sebagai praktik sosial. Artinya wacana berperan mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan individu (Eriyanto, 2001, hlm. 19). Foucault mengembangkan teori kekuasaan pengetahuan. Wacana bukan (lagi) milik individu, kelompok, atau negara namun telah menyebar dalam praktik sosial melalui strategi sosial (Jorgensen & Phillips, 2017, hlm. 25). Untuk itu kekuasaan dan pengetahuan memiliki konsekuensinya yakni kekuasaan secara erat dikaitkan dengan wacana yang menjadi kebenaran universal.

Foucault menjelaskan bahwa kebenaran dipahami sebagai sistem prosedur untuk pemroduksian, pengaturan, dan pendifusian kalimat-kalimat atau bahasa. Kebenaran disematkan dan dihasilkan oleh sistem kekuasaan. Untuk itu yang harus dianalisis dalam wacana menurut Foucault adalah proses kewacanaan dalam mengonstruksi wacana tertentu dengan cara yang sekiranya dapat memberi kesan bahwa wacana tersebut memberi gambaran benar atau salah tentang realitas (Jorgensen & Phillips, 2017, hlm. 27). Ciri utama wacana menurut Foucault adalah kemampuannya untuk membentuk dan melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat. Eriyanto (2001, hlm. 77)

menambahkan bahwa menurut Foucault, dalam ⁴⁹ masyarakat biasanya terdapat berbagai macam wacana yang berbeda satu sama lain, namun kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga wacana tersebut menjadi dominan sementara wacana lain akan terpinggirkan (*marginalized*) atau terpendam (*submerged*).

B. Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk

Setidaknya ada ¹² dua teori wacana kritis yang dikenal luas, yaitu perspektif Michel Foucault dan Louis Althusser. Foucault mengenalkan wacana sebagai praktik sosial. Wacana berperan dalam mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan individu atau kelompok masyarakat. Sementara Althusser menjelaskan ¹ wacana berperan dalam mendefinisikan individu atau kelompok masyarakat dan memosisikannya dalam posisi tertentu. Wacana tertentu yang dibangun akan membentuk subjek dalam posisi-posisi tertentu dalam rangkaian hubungan dengan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat (Eriyanto, 2001, hlm. 19). Lebih lanjut, Foucault menekankan pentingnya produksi wacana dalam teks dan mengkaji wacana yang terpinggirkan. Perspektif Althusser menekankan tentang wacana dan ideologi. Mulai dari pembacaan teks yang mengandaikan hubungan antara pembuat dengan pembaca teks, interpelasi subjek yang diciptakan oleh ideologi, konsep hegemoni, dan representasi. Dalam representasi sangat mungkin terjadi misrepresentasi melalui ekskomunikasi, eksklusi, marginalisasi, dan delegitimasi (Eriyanto, 2001; Jorgensen & Phillips, 2017).

Konsep ¹² yang diperkenalkan oleh Foucault maupun Althusser adalah konsep yang abstrak. Untuk mengguna-

kannya, CDA memiliki beberapa model analisis, antara lain menurut pandangan Fowler dkk, Theo van Leeuwen, Sara Mills, Teun A. van Dijk, Norman Fairclough, dan Ruth Wodak. Fowler dkk menggunakan pendekatan *critical linguistics* yang memandang bahasa sebagai praktik sosial yang digunakan oleh suatu kelompok untuk memantapkan dan menyebarkan ideologinya (Eriyanto, 2001, hlm. 133). Theo van Leeuwen juga menggunakan pendekatan bahasa sebagai pencerminan dari ideologi (Eriyanto, 2001, hlm. 347–348). Sementara Sara Mills menekankan pada perspektif feminis yang menunjukkan bagaimana teks dalam menampilkan perempuan (Eriyanto, 2001, hlm. 199).

Menurut Van Dijk dan Fairclough, hubungan antara teks dengan kekuasaan tidak terjadi secara langsung namun melalui mediasi atau perantara (Eriyanto, 2001, hlm. 348–349). Ruth Wodak tampil berbeda dengan menawarkan *Discourse-Historical-Approach* (DHA) sebagai bentuk CDA yang memperhitungkan aspek sejarahnya (Haryatmoko, 2019, hlm. 150). Dalam kajian ini, teori CDA menurut Van Dijk dianggap paling mengakomodasi. Van Dijk meyakini persoalan stereotipe dan prasangka etnis bagaikan pengetahuan yang disebarluaskan dan direproduksi dalam masyarakat melalui wacana (Dijk, 1990, hlm. 165).

Van Dijk memandang ideologi sebagai suatu nilai yang diyakini oleh suatu kelompok sebagai sesuatu yang benar atau absah. Maka kelompok yang dominan akan menentukan dan menyebarkan ideologinya sehingga anggota kelompok menerima kekuasaan sebagai sesuatu yang sah. Proses persebaran itu melibatkan struktur kognisi sosial yang menentukan teks yang tercipta. Untuk itu Van Dijk merumuskan dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Gagasan tentang teks dapat merupakan wacana yang murni

verbal atau penggunaan bahasa tulis sehari-hari. Kognisi sosial merupakan sistem representasi sosial yang dimiliki bersama dalam masyarakat mencakup interpretasi, interaksi, dan wacana sosial. Konteks sosial adalah situasi sosial yang menjadi kerangka kerja kognisi sosial (Dijk, 1990).

Analisis pada dimensi teks menurut Van Dijk meliputi struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro (Dijk, 1990, 1994). Struktur makro yakni makna global atau umum dari suatu teks dengan melihat tema atau topik yang dikedepankan. Superstruktur berhubungan dengan kerangka teks atau bagian-bagian yang menyusun teks secara utuh. Struktur mikro adalah makna wacana yang dilihat dari bagian kecil suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, parafrase, dan gambar. Penjabarannya yakni analisis aspek tematik pada struktur makro. Aspek skematis pada pengamatan superstruktur. Selanjutnya aspek semantik, sintaksis, stilistika, dan retorik pada struktur mikro (Eriyanto, 2001, hlm. 226).

Aspek tematik merujuk pada gambaran umum dari suatu teks. Tema menunjukkan konsep dominan, sentral, dan paling penting dari isi suatu teks. Dalam gagasan Van Dijk, wacana dibentuk dalam tata aturan umum. Untuk itu teks tidak hanya didefinisikan mencerminkan suatu pandangan atau topik tertentu, namun suatu pandangan umum yang koheren. Hal ini disebut oleh Van Dijk sebagai koherensi global (*global coherence*), yakni bagian-bagian dalam teks yang saling mendukung dan jika dirunut akan menunjuk pada suatu titik gagasan atau topik umum tersebut. Topik akan didukung oleh subtopik satu dengan lainnya sehingga terbentuk topik umum. Subtopik didukung oleh serangkaian fakta yang ditampilkan yang menunjuk dan menggambarkan

subtopik. Dengan demikian secara keseluruhan terbentuk teks yang koheren dan utuh (Eriyanto, 2001, hlm. 230).

Skematis memiliki dua kategori besar yakni *summary* dan *story*. *Summary* meliputi judul dan *lead* atau pengantar. *Story* atau isi meliputi situasi jalannya peristiwa dan komentar (Eriyanto, 2001, hlm. 232). Skematis menjadi strategi untuk mendukung topik yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skematis memberi tekanan mana yang didahulukan dan bagian mana yang bisa menjadi strategi untuk menyembunyikan informasi. Ada efek yang timbul karena dengan menampilkan bagian tertentu merupakan proses penonjolan dan menyembunyikan bagian yang lain (Eriyanto, 2001, hlm. 234).

Elemen semantik berhubungan dengan makna yang ingin ditekankan dalam teks meliputi latar, detail, dan maksud teks. Latar menentukan ke arah mana pandangan pengguna teks hendak dibawa. Latar menjadi pembenar gagasan dan ideologi teks. Disajikan atau tidak disajikannya latar sangat bergantung pada kepentingan (Eriyanto, 2001, hlm. 235–236). Detail terkait dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Penulis teks akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Sebaliknya, akan menampilkan informasi dalam jumlah sedikit bahkan kalau perlu tidak disampaikan kalau hal itu merugikan. (Eriyanto, 2001, hlm. 238). Maksud teks bertujuan agar para pembaca disajikan informasi yang menguntungkan atau wacana yang dikehendaki saja. Dalam konteks ini maka digunakan praktik bahasa tertentu untuk secara implisit menonjolkan basis kebenarannya dan secara implisit pula menyingkirkan versi kebenaran lainnya (Eriyanto, 2001, hlm. 240–241).

Sintaksis adalah tata kalimat atau hubungan antarunsur bahasa yang membentuk kalimat. Elemen sintaksis dianalisis dengan memperhatikan koherensi, pengingkaran, bentuk kalimat, dan kata ganti yang digunakan. Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata atau kalimat dalam teks. Dalam koherensi kondisional, muncul anak kalimat sebagai penjelas atau keterangan. Penjelas ini bisa bersifat negatif namun bisa pula positif. Ada pula koherensi pembeda yang bermaksud membedakan dua fakta atau peristiwa. Dalam koherensi pembeda harus dikritisi bagian mana yang diperbandingkan dan dengan cara apa perbandingan dilakukan. Selain itu efek dari perbandingan juga perlu diperhatikan, apakah membuat satu fakta menjadi lebih baik atau buruk (Eriyanto, 2001, hlm. 242–248).

Pengingkaran merupakan strategi wacana dengan tidak secara tegas dan eksplisit menyampaikan pendapat dan gagasannya kepada khalayak. Ketidaktegasan ini dapat berupa sikap seakan menerima namun ternyata tidak setuju atau meningkari (Eriyanto, 2001, hlm. 249). Bentuk kalimat perhubungan dengan cara berpikir logis atau prinsip kausalitas. Logika kausalitas ini diterjemahkan sebagai susunan subjek (yang menerangkan) dan predikat (yang diterangkan). Dalam konteks ini bukan hanya persoalan teknis kebenaran tata bahasa, namun juga makna yang dibentuk oleh susunan kalimat. Struktur kalimat yang aktif atau pasif akan menentukan subjek atau objek yang dibicarakan atau diekspresikan secara eksplisit atau implisit dalam teks (Eriyanto, 2001, hlm. 251–252). Berikutnya kata ganti dimaknai sebagai elemen untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif yang menjadi alat untuk menunjukkan posisi seseorang dalam wacana (Eriyanto, 2001, hlm. 253).

Stilistika berkaitan dengan pemilihan kata yang dipakai dalam teks atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Pilihan kosakata atau leksikon tidak semata hanya karena kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas. Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu (Eriyanto, 2001, hlm. 255). Terakhir dalam aspek teks, elemen retorik terkait dengan bagaimana penekanan dilakukan meliputi grafis, ekspresi, dan metafora (Eriyanto, 2001, hlm. 257).

Dalam kerangka analisis wacana Van Dijk, perhatian juga diberikan pada bagaimana suatu teks diproduksi melalui suatu analisis yang dinamai sebagai kognisi sosial (Eriyanto, 2001, hlm. 259). Hal ini didasari oleh studi klasik mengenai sosiolinguistik yang menghubungkan bahasa dan wacana di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain. Teks merupakan struktur mikro sementara masyarakat merupakan struktur sosial yang makro. Kognisi sosial merupakan variabel penengah karena penulis teks merupakan bagian dari masyarakat yang senantiasa melakukan "*socially shared knowledge, beliefs, attitudes and ideologies*" yang bertindak sebagai *interface* yang diperlukan dalam interaksi antara teks dengan masyarakat (Dijk, 1994, hlm. 107).

Dalam dimensi kognisi sosial ada dua hal utama yakni skema atau model dan memori. Model menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan informasi dalam memorinya dan mengintegrasikannya dengan informasi baru sehingga sampai pada memahami peristiwa, menafsirkan, dan memasukkannya sebagai bagian dari pengetahuan. Model menjadi sesuatu yang sentral dalam kerangka Van Dijk. Event model adalah model yang digunakan seseorang untuk menafsirkan suatu peristiwa konkret yang terjadi

sehari-hari. *Context* model yakni model yang digunakan secara kontekstual dan dihubungkan dengan situasi komunikasi tertentu (Eriyanto, 2001, hlm. 264)

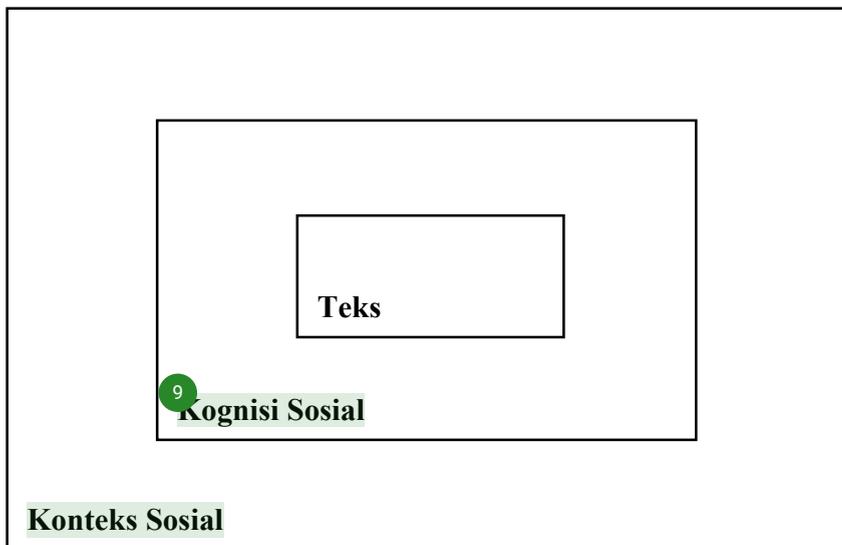
Memori terkait dengan aktivitas berpikir dan pengetahuan tentang sesuatu. Dalam setiap memori terkandung pemasukan (input) dan penyimpanan pesan-pesan saat ini maupun dahulu yang terus-menerus digunakan oleh seseorang dalam memandang suatu realitas (Eriyanto, 2001, hlm. 264). Ada memori jangka pendek (*short-term memory*) dan memori jangka panjang (*long-term memory*). Memori jangka panjang digunakan untuk mengingat peristiwa yang memiliki peran dominan. Memori jangka panjang juga paling relevan dengan kognisi sosial seseorang. Ada dua bagian besar dalam memori jangka panjang yakni memori episodik (*episodic memory*) dan memori semantik (*semantic memory*). Memori episodik terkait dengan diri sendiri, sedangkan memori semantik untuk menjelaskan pengetahuan tentang dunia atau realitas (Eriyanto, 2001, hlm. 265).

Berhubungan erat dengan dimensi kognisi sosial yakni dimensi konteks sosial yang memahami wacana sebagai bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat sehingga teks perlu diteliti secara intertekstual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat (Eriyanto, 2001, hlm. 271). Menurut Van Dijk ada dua poin penting yang dianalisis yakni praktik kekuasaan (*power*) dan akses (*access*). Kelompok yang lebih berkuasa mempunyai kesempatan akses yang lebih besar sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar pula untuk memengaruhi kesadaran khalayak (Eriyanto, 2001, hlm. 272–273).

Dapat dipahami bahwa CDA adalah bidang multidisiplin (sejarah, antropologi, sosial, politik, dan komunikasi) seka-

ligus²⁶ melewati tembok disiplin ilmu. Watak kajiannya bersifat emansipatoris yakni berpihak pada mereka yang terpinggirkan, termarginalkan, tidak bersuara, atau tidak diberi kesempatan untuk bersuara baik atas dasar ras, warna kulit, agama, gender, atau kelas sosial. Sumbangan pentingnya adalah menyadarkan apa yang semula dianggap sebagai kebenaran – diterima sebagai common sense – sehingga tidak dipertanyakan lagi, ternyata mengandung bias dengan lebih berpihak dan menyuarakan suara kelompok dominan. Hal inilah yang dibongkar oleh CDA (Eriyanto, 2001, hlm. 350). Atas dasar konsep inilah maka representasi Tionghoa dalam buku teks sejarah – yang pernah mengalami marginalisasi – perlu dianalisis dengan menggunakan CDA. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana representasi Tionghoa sebagai konstruksi kebinekaan kini diwacanakan dalam buku teks sejarah.

Kajian buku teks dianalisis menggunakan model Van Dijk. Teks hanyalah bagian kecil dari praktik wacana yang terjadi di masyarakat dan digambarkan memiliki tiga dimensi atau konstruk.² Dimensi teks terkait dengan struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema. Dimensi kognisi sosial melibatkan kognisi atau mental penulis. Dimensi konteks sosial mempelajari konstruksi wacana yang berkembang dalam masyarakat tentang suatu masalah (Eriyanto, 2001, hlm. 224). Ketiga dimensi tersebut merupakan suatu kesatuan yang menghubungkan analisis⁹⁰ tekstual ke arah analisis komprehensif tentang bagaimana teks diproduksi dalam kaitannya dengan penulis maupun masyarakat.



Gambar 11 Model Analisis Van Dijk

(Sumber: Eriyanto, 2001, hlm. 225)

Setelah teks-teks yang merepresentasikan Tionghoa diidentifikasi, teks dianalisis dengan menggunakan metode analisis *critical linguistics*. Analisis tersebut meliputi struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro (Dijk, 1990, 1994). Struktur makro menganalisis aspek tematik yakni makna global atau umum dari suatu teks dengan melihat tema atau topik yang dikedepankan. Superstruktur berhubungan dengan aspek skematis yakni kerangka teks atau bagian-bagian yang menyusun teks secara utuh. Struktur mikro adalah makna wacana yang dilihat dari bagian-bagian kecil suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, parafrase, dan gambar. Struktur mikro meliputi aspek semantik, sintaksis, stilistika, dan retorik (Eriyanto, 2001, hlm. 226).

Tabel 4. Struktur Teks yang Dianalisis Menurut Van Dijk

Struktur Wacana	Aspek yang Dianalisis	Elemen
Struktur Makro	Tematik Tema atau topik yang dikedepankan dalam teks.	Topik
Superstruktur	Skematis Bagaimana bagian dan urutan narasi diskemakan dalam teks utuh.	Skema
Struktur Mikro	Semantik Makna yang ingin ditekankan dalam teks. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi detail pada satu sisi atau membuat eksplisit pada satu sisi dan mengurangi detail pada sisi lain.	Latar, detail, maksud, praanggapan, dan nominalisasi
	Sintaksis Bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih.	Bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti
	Stilistika Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks.	Leksikon
	Retorik Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan.	Grafis, metafora, dan ekspresi

Sumber: Eriyanto (2001, hlm. 228–229) dengan beberapa penyesuaian oleh peneliti

Tidak berhenti pada dimensi teks, analisis selanjutnya dilakukan pada dimensi kognisi sosial sebagai sistem representasi sosial yang dimiliki bersama dalam masyarakat mencakup interpretasi, interaksi, dan wacana sosial. Kognisi sosial mencakup aspek skema atau model dan memori. Terakhir yakni analisis konteks sosial atau situasi sosial yang menjadi kerangka kerja kognisi sosial yang fokus pada aspek kekuasaan dan akses (Dijk, 1990). Dalam analisis ini, studi kepustakaan dan penelusuran sejarah diperlukan untuk menguatkan temuan (Eriyanto, 2001, hlm. 275). Sekali lagi perlu diingat bahwa ketiga analisis ini merupakan bagian integral yang tidak terpisah-pisahkan.

C. Arti Penting Analisis Wacana Kritis terkait Representasi Tionghoa dalam Buku Teks Sejarah Indonesia

Konsep representasi kerap digunakan dan memiliki peran penting dalam mempelajari budaya. Hall (1997, hlm. 15) menegaskan bahwa *“representation means using language to say something meaningful about, or to represent, the world meaningfully, to other people”*. Pernyataan Hall tersebut dapat dimaknai bahwa representasi adalah penggunaan bahasa untuk mengatakan sesuatu yang bermakna, mewakili, maupun menggambarkan sesuatu pada orang lain. Konsep representasi yang lain menjelaskan bahwa sebuah kata dapat menggambarkan sesuatu (seseorang, benda, struktur, proses, peristiwa, dan lainnya) dengan beberapa harapan pemaknaan atau pemahaman (Preucel, 2020).

Representasi atau keterwakilan sesuatu hal terkait erat dengan masalah keadilan dalam perspektif teori kritis. Dalam konteks penulisan sejarah, representasi dimaknai sebagai terakomodasinya peran berbagai kelompok masyarakat dalam peristiwa sejarah yang dikisahkan itu. Hal ini juga terkait erat dengan pandangan yang disebut *the new history* pada era positifis (Sjamsuddin, 2007). Aliran ini menyoroti sejarah konvensional yang menekankan penonjolan tokoh besar, peristiwa-peristiwa besar, dan peran mayoritas. Selanjutnya, sejarah hadir dengan pendekatan baru yang lebih menonjolkan analisis kritis terhadap peristiwa sejarah dan hubungannya dengan situasi masyarakat kontemporer. Peristiwa sejarah dapat dianalisis melalui wacana (*discourse*) serta didekonstruksi dan dikonstruksi agar narasi sejarah lebih memfasilitasi kepentingan semua golongan termasuk

hubungan sosialnya yang kompleks (Supriatna, 2007, hlm. 10).

Gagasan representasi sejarah lebih merujuk pada persoalan penulisan sejarah ketimbang pada penelitian sejarah. Representasi sejarah menyangkut soal teks sejarah atau narasi secara keseluruhan dan bukan hanya bagian-bagian tertentu saja. Perlu dipahami bahwa hubungan antara narasi sejarah dengan realitas sejarah pada dasarnya bersifat estetis (Ankersmit, 2012, hlm. 62). Hegemoni kekuasaan memberi pengaruh kuat dalam penulisan sejarah. Ideologi dominan telah tertanam dalam metodologi sejarah dan menjadi perspektif dalam historiografi sejarah nasional. Segall et al. (2018, hlm. 285) menuliskan "*History, they [sejarawan dan para filsuf sejarah yang bersikap kritis] argue, is not a mirror to the past but a positioned, value-laden, discursive inscription that requires exposing its 'made up' nature*".² Narasi sejarah selalu diposisikan untuk menceritakan kisah tertentu dari waktu, tempat, dan perspektif tertentu. Makna yang diberikan pada masa lalu tidak pernah objektif karena selalu diposisikan dan memosisikan.

Dalam paradigma teori kritis, berbagai interpretasi sejarah tidak dapat diterima begitu saja sebagai yang *given* melainkan senantiasa membuka ruang untuk dieksplorasi dan diinterpretasi lebih lanjut. Dalam mengakomodasi, menginterpretasi, dan memaknai peran Tionghoa dalam peristiwa-peristiwa sejarah tidak bisa lepas dari pemahaman terhadap jati diri masyarakat Tionghoa di Indonesia. Selama ini produksi citra diri Tionghoa di Indonesia sangat erat dengan hegemoni politik. Isu ras, etnis, dan gender dalam pandangan kritis menunjukkan adanya konstruksi sosial dalam hubungan kekuasaan dan dominasi. Pemahaman dominan mengenai Tionghoa juga

diproduksi dan direproduksi melalui dunia pendidikan. Kerap mengatasnamakan semangat inklusi, namun tanpa disadari dalam praktik yang dihasilkan justru pengapuran dan normalisasi yang berfungsi membungkam dan meminggirkan kelompok tertentu dalam sejarah yang semestinya juga menjadi sejarah mereka sendiri (Segall et al., 2018, hlm. 290).

Penerimaan terhadap Tionghoa perlahan berusaha mengikis stereotipe dan prasangka yang dibangun Orde Baru. Akan tetapi, kenyataannya kendati ada perubahan sikap akibat kebebasan terhadap identitas dan budaya Tionghoa, namun kelanjutan stereotipe lama masih ada dan belum berhasil menghilangkan sepenuhnya citra negatif terhadap Tionghoa (Kuntjara & Hoon, 2020). Sentimen-sentimen bernuansa rasis masih kerap muncul di masyarakat. Misalnya isu ketionghoan yang sering diembuskan saat masa kampanye politik, peristiwa pemukulan yang disertai intimidasi terhadap korban dengan kata-kata rasis, peristiwa Tanjung Balai tahun 2017 lalu, dan beberapa lainnya yang menunjukkan sentimen negatif terhadap Tionghoa di era Reformasi masih ada (Kristiono, 2018, hlm. 35–36). Hal ini sejalan dengan penelitian Setijadi (2017) yang menyimpulkan bahwa stereotipe terhadap etnis Tionghoa masih ada terkait dengan keistimewaan dalam hal ekonomi, pengaruh politik, dan kesetiaan terhadap negara.

Citra negatif terhadap Tionghoa yang mulanya dibentuk pemerintah kolonial Belanda terus direproduksi dari masa ke masa hingga sekarang ini dan bertentangan dengan pandangan poskolonial. Kolonialisme tidak hanya mengubah bentuk wilayah-wilayah fisik, namun juga wilayah sosial dan identitas-identitas manusia (Loomba, 2003, hlm. 240). Relasi harmonis Tionghoa dengan penduduk lokal setempat rusak akibat perlakuan kolonialisme yang

menginginkan hal tersebut terjadi. Wilayah sosial bahkan juga pembatasan secara jelas identitas-identitas masyarakat melalui pembagian strata sosial yang diciptakan tidak mudah dihilangkan begitu saja kendati kolonialisme telah raib. Perjuangan antikolonial yang menciptakan identitas baru – gagasan bangsa – juga kerap sulit melepaskan dirinya dari jeratan pemikiran-pemikiran kolonial yang dilawannya itu.

Secara konseptual dengan enyahnya kolonialisme maka muncullah perspektif baru yang bersifat poskolonialisme. Selama ini hubungan antara penjajah dengan yang terjajah bersifat ¹¹³ hegemoni. Penjajah sebagai kelompok superior dibanding pihak terjajah yang inferior. Dari situlah muncul dominasi dan subordinasi. Wacana poskolonial menjadi bagian dari semangat kebangsaan (*nationhood*). Persoalannya apakah nasionalisme merupakan alat konseptual yang sah atau hanya menjadi alat kaum esensialis untuk melakukan penyeragaman melalui penindasan terhadap keberagaman. Penyeragaman muncul sebagai upaya mewujudkan identitas baru dengan meminggirkan identitas kelompok-kelompok yang membangun bangsa. Dalam kegundahan inilah, Gayatri Spivak mempertanyakan apakah kelompok-kelompok marginal yang terpinggirkan itu sebenarnya memiliki hak atas representasi dirinya, “*Can subaltern speak?*” (Gandhi, 2001; Morton, 2008).

Istilah subaltern dapat dipahami sebagai subordinat untuk mendeskripsikan kelompok atau kelas yang non-hegemonik (Morton, 2008, hlm. 156). Konsep subaltern menandai perbedaan sosial antara kelompok elite dengan lainnya. Historiografi sejarah nasional menonjolkan peran elite atau aktor-aktor penting yang cenderung abai dengan keberadaan minoritas, *wong cilik*, atau subaltern. Sejarah kritis menekankan ajakan untuk memfokuskan perhatian

pada wilayah yang lebih luas mencakup kehidupan dan kesadaran orang-orang atau kelompok masyarakat yang tidak dihiraukan oleh negara (Morton, 2008, hlm. 161). Dalam konteks ini, keberadaan masyarakat Tionghoa yang pernah mengalami peminggiran dalam sejarah nasional Indonesia berarti ditempatkan sebagai subaltern dalam historiografi sejarah nasional. Hal inilah yang disoroti oleh teori kritis untuk membongkar lebih lanjut representasi Tionghoa pada masa sekarang ini dalam sejarah nasional Indonesia khususnya melalui pembelajaran sejarah di sekolah.

Segall et al. (2018, hlm. 293–294) menjelaskan fenomena mengakomodasi suatu ras, etnis, maupun kelompok masyarakat yang sebenarnya ditempatkan sebagai subaltern dalam buku teks sejarah suatu negara namun pada saat yang sama sebenarnya meminggirkannya disebut sebagai ilusi inklusif. Representasi kelompok marginal dalam buku teks sejarah bukan sekadar upaya inklusi yang sederhana namun juga harus memiliki posisi dan makna secara pedagogis. Sejarah nasional disusun secara standar dengan memusatkan banyak perhatian pada kontribusi tokoh-tokoh elite dalam membentuk suatu peristiwa sejarah. Di sisi lain secara kritis telah mendistorsi peran kelompok lain dan aktivitas kolektif masyarakat (sejarah sosial) serta konteks lokalitas (sejarah lokal).

Kartodirdjo (1982, hlm. 91) menegaskan bahwa sejarah nasional merupakan “sejarah dari dalam”. Gagasan yang disebutnya sebagai *the new history* diperlukan dalam pembelajaran sejarah yang mengurai tema-tema sejarah lokal, struktur sosial, kalangan marginal (*wong cilik*), berbagai aspek yang memengaruhi perkembangan masyarakat, 4 mengungkapkan aktivitas berbagai golongan masyarakat, dan mengarah pada integrasi bangsa. Materi

pembelajaran sejarah harus memuat dinamika berbagai kelompok masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Pembelajaran sejarah harus integratif dan konstruktif. Untuk itu pengembangan wawasan kebinekaan dapat diupayakan melalui mata pelajaran sejarah.

Pembelajaran sejarah harus menyesuaikan diri dengan situasi sosial agar tetap berfungsi dalam pendidikan (Kartodirdjo, 1989, hlm. 86). Penyesuaian ini termasuk pula dengan perkembangan zaman, keterbukaan informasi, hingga perubahan dinamika sosial politik. Jika pembelajaran sejarah terbatas pada pengetahuan fakta-fakta yang sudah biasa diketahui maka akan menjadi steril dan mematikan minat terhadap sejarah. Sudah saatnya para pengembang pendidikan sejarah memperhatikan berbagai perkembangan tersebut, termasuk terbuka terhadap keberagaman. Pendidikan sejarah harus mampu membangun penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada pada keberagaman budaya dan memperkuat persamaan di antara keragaman budaya tersebut. Dalam paradigma teori kritis, sudah selayaknya Tionghoa memperoleh porsi dan kesempatan yang sama pula untuk diungkap peran dan keterlibatannya dalam sejarah nasional Indonesia.



BAB V

ANALISIS DIMENSI TEKS TENTANG TIONGHOA DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA

102 Analisis pada dimensi teks melihat bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan eksistensi maupun peran Tionghoa dalam peristiwa sejarah yang dinarasikan buku teks. Dari hasil analisis dimensi teks dapat diketahui strategi tekstual yang digunakan untuk menampilkan maupun menyingkirkan atau memarjinalkan Tionghoa. Analisis dimensi teks yang merepresentasikan Tionghoa menurut Van Dijk (Dijk, 1990, 1994; Eriyanto, 2001, hlm. 226) meliputi (1) struktur makro atau elemen tematik, (2) superstruktur atau elemen skematis, dan (3) struktur mikro yang meliputi semantik, sintaksis, stilistika, dan retorik. Dimensi teks menjadi yang pertama dianalisis karena untuk membongkar gagasan representasi sejarah merujuk pada persoalan penulisan sejarah. Representasi sejarah menyangkut soal teks sejarah atau narasi secara keseluruhan dan bukan bagian-bagian tertentu saja. Untuk itulah 17 analisis wacana kritis atau Critical Discourse Analysis (CDA)

digunakan dengan asumsi bahasa dalam teks tidak bersifat netral namun sudah membekukan nilai atau ideologi tertentu termasuk praktik kekuasaan (Eriyanto, 2001; Haryatmoko, 2019). Konsep hegemoni menjadi alat untuk menganalisis praktik kewacanaan menjadi bagian dari praktik sosial yang melibatkan kekuasaan (Jorgensen & Phillips, 2017). Tabel berikut merangkum temuan-temuan dimensi teks berdasarkan enam aspek yang dianalisis tersebut.

Tabel 5. Temuan pada Dimensi Teks

Aspek	Temuan
Struktur Makro	
Tematik	Representasi Tionghoa muncul dalam buku teks pada sepuluh pokok bahasan mulai dari masa praaksara sampai reformasi. Hal ini menunjukkan koherensi global (<i>global coherence</i>) yang mengakui Tionghoa turut terlibat dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Temuan juga memperlihatkan perbedaan porsi dan penekanan dalam merepresentasikan Tionghoa yang mengutamakan keluasan topik ketimbang kedalaman materi.
Superstruktur	
Skematis	Skema narasi tentang Tionghoa meliputi <i>summary</i> (judul dan pengantar) yang terikat dengan pokok bahasan dan <i>story</i> (isi peristiwa dan sudut pandang) menunjukkan pola berikut <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran pendatang Tionghoa dan keberterimaannya secara harmonis muncul pada topik masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. 2. Tujuan kedatangan Tionghoa untuk berdagang dimulai pada narasi masa Hindu-Buddha dan Islam yang kemudian mengerucut menjadi penonjolan peran ekonomi Tionghoa dalam narasi masa kolonial hingga Orde Baru. 3. Dinamika sejarah yang memosisikan Tionghoa sebagai korban dari sentimen negatif muncul pada narasi sejak masa kolonial hingga Orde Baru. 4. Upaya pemulihan relasi harmonis dengan Tionghoa muncul pada narasi masa Reformasi. 5. Peran Tionghoa secara terbatas dalam bidang-bidang selain perekonomian muncul sepintas lalu pada beberapa pokok bahasan.

Aspek	Temuan
Struktur Mikro	
Semantik	<p>Secara keseluruhan, teks merepresentasikan Tionghoa secara terbatas pada fakta-fakta sejarah pilihan. Untuk itu didapati makna utama yang lebih ditekankan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendatang dengan tujuan ekonomi; latar historis Tionghoa sebagai pendatang dengan tujuan berdagang yang kemudian berkembang menjadi anggapan <i>economic animal</i> disampaikan secara eksplisit dan berulang, sedangkan peran-peran lainnya hanya disinggung sepintas lalu atau bahkan tidak disinggung sama sekali.2. Korban sentimen negatif; ketidaksenangan dan sentimen anti-Cina yang berujung pada Tionghoa sebagai korban atau objek penderita lebih sering disampaikan ketimbang Tionghoa sebagai pelaku atau subjek utama dalam narasi.
Sintaksis	<p>Representasi Tionghoa disusun dalam kalimat-kalimat dengan memperhatikan hal-hal berikut</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koherensi; jalinan antarkata atau kalimat yang bermakna positif maupun negatif digunakan sesuai keperluannya untuk memperjelas posisi Tionghoa dalam suatu peristiwa sejarah pada narasi masa Hindu-Buddha, kolonial, dan Proklamasi Kemerdekaan RI hingga masa Reformasi.2. Peningkaran; bentuk peningkaran muncul dalam susunan kalimat pada narasi masa pergerakan nasional tentang peran pers Tionghoa yang kemudian lebih menekankan peran pers dan jurnalis bumiputra sehingga terjadi pengaburan terhadap peran Tionghoa.3. Bentuk kalimat; secara keseluruhan, struktur kalimat lebih dominan menempatkan Tionghoa sebagai objek dengan subjek pihak-pihak lain yang diperhadapkan dengannya yakni VOC, penjajah Belanda, dan golongan maupun masyarakat (yang dianggap sebagai pembenci Tionghoa).4. Kata ganti; Tionghoa berulang kali disebut dengan menggunakan kata ganti “mereka” dan sekali disebut sebagai “gerombolan” maupun “kelompok”.

Aspek	Temuan
Stilistika	<p>Leksikon atau pemilihan kata yang perlu disoroti yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan umum secara keseluruhan narasi paling sering menggunakan istilah “Cina” dan hanya beberapa kali menggunakan istilah “keturunan Cina” maupun “Tionghoa”. Semuanya mengacu pada orang Tionghoa di Indonesia. Gonta-ganti istilah ini selain bentuk ketidakkonsistenan dalam satu karya yang sama juga dapat menunjukkan makna tertentu dalam memandang realitas masyarakat Tionghoa di Indonesia. 2. Temuan khusus pada narasi perlawanan Tionghoa-Jawa terhadap VOC (Geger Pacinan) dirumuskan dengan kata “berontak” alih-alih “perlawanan” dan Tionghoa sebagai “gerombolan” alih-alih “pasukan” atau “pejuang”.
Retorik	<p>Penekanan terhadap representasi Tionghoa dilakukan dengan menampilkan grafis atau ekspresi berupa ilustrasi (gambar maupun foto) sebagai berikut (1) relief terakota yang menggambarkan paras wajah orang Tionghoa pada narasi masa Hindu-Buddha, (2) kapal atau jung Tiongkok pada narasi masa Islam dan kolonial, (3) Laksamana Cheng Ho pada narasi masa Islam, dan (4) rumah Djiau Kie Siong di Rengasdengklok pada narasi Proklamasi Kemerdekaan RI.</p>

Sumber: Data yang Diolah Peneliti (2022)

Praktik wacana buku teks dalam kajian ini mengacu pada teori Foucault yang mengenalkan wacana sebagai praktik sosial. Foucault menekankan pentingnya produksi wacana dalam teks dan mengkaji wacana yang terpinggirkan (Eriyanto, 2001; Jorgensen & Phillips, 2017). Secara khusus digunakan model analisis wacana kritis menurut Van Dijk. Poin utamanya yakni dimensi kognisi sosial yang sangat menentukan (Eriyanto, 2001, hlm. 221). Analisis tidak hanya menyoroti ketidakberesan sosial, namun menekankan juga studi tentang representasi mental dan proses-proses yang terjadi dalam penggunaan bahasa ketika memproduksi dan memahami wacana serta ambil bagian dalam interaksi verbal (Haryatmoko, 2019). Lebih lanjut, analisis wacana kritis menurut Van Dijk ini mempelajari persilangan sosio-kognitif

wacana, hubungan antar-*mind* meliputi pengetahuan dan organisasinya, ideologi, sikap, proses kognitif, serta interaksi wacana dan masyarakat (Haryatmoko, 2019). Untuk itu, studi yang holistik tidak hanya berangkat dari pandangan kurikulum yang berlaku maupun kognisi sosial penulis buku teks namun juga mengkaji interaksi wacana dengan pengguna buku teks sebagai bagian dari masyarakat.

Makna suatu teks dalam hermeneutika menurut Paul Ricoeur, berpusat pada teks atau objektivitas teks (Ricoeur, 2021, hlm. 378). Berdasarkan pandangan tersebut, maksud dari penulis buku teks tidak terlalu penting. Peralnya begitu teks lahir, maka teks¹¹² terlepas dari penulisnya. Teks memiliki realitas dan integritasnya sendiri. Makna suatu teks terbentuk melalui relasi dialogis antara teks yang ditulis oleh penulisnya dengan pembaca. Pemahaman terhadap teks membutuhkan proses berpikir yang pada kenyataannya juga merupakan bentuk dialog secara internal dengan diri sendiri (Wegerif, 2020). Dialektika inilah yang berperan mewujudkan pemahaman yang holistik. Dalam pergulatan itu, Ricoeur (2021, hlm. 378) menawarkan cara dialektis relasi antara erklaren (penjelasan) dan verstehen (pemahaman) menurut Dilthey.

Berdasarkan pemikiran Ricoeur tersebut, maka dalam kajian ini dianalisis tentang bagaimana buku teks dalam merepresentasikan Tionghoa memberi pengaruh atau berdampak bagi pandangan penggunanya yakni siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dalam proses dialogis antara buku teks dan wacana yang dikonstruksi dengan siswa sebagai penggunanya. Dalam pendidikan dialogis, pembelajaran harus melibatkan dan memberdayakan siswa, mendorong dan mendukung mereka menemukan pemahaman sendiri terhadap dunia (Wegerif, 2020). Dalam

proses berpikir dan dialog inilah sebetulnya terbentuk kognisi sosial siswa terkait Tionghoa yang ditunjukkan dari pandangan dan tindakan siswa yang mencerminkan kecenderungan-kecenderungan nilai-nilai yang diyakininya (Bandura, 1986). Untuk itu, penggalian pengalaman belajar siswa sangat diperlukan dalam melengkapi praktik wacana buku teks untuk mendapatkan pemaknaan yang utuh terhadap representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia.

Narasi dalam buku teks sejarah dimaknai sebagai kisah yang menceritakan tentang hal-hal yang telah terjadi pada manusia dengan urutan peristiwa atau beberapa periode waktu tertentu (Berger, 1997).² Narasi sejarah selalu diposisikan untuk menceritakan kisah tertentu dari waktu, tempat, dan perspektif tertentu. Makna yang diberikan pada masa lalu tidak pernah objektif karena selalu diposisikan dan memosisikan. Masih menurut Berger (1997) yang mendasarkan pada teori strukturalis, setiap narasi memiliki dua bagian yakni (1) cerita, konten, atau rangkaian peristiwa meliputi tindakan dan kejadian ditambah keberadaan (karakter dan setting), dan (2) wacana meliputi ekspresi dan bagaimana konten dikomunikasikan. Cerita atau konten telah diidentifikasi dalam pembahasan sebelumnya, untuk itu pembahasan pada bagian ini akan fokus pada masalah wacana sebagai bangun teoretis yang sifatnya abstrak.

A. Analisis Struktur Makro

Analisis struktur makro menekankan pada aspek tematik. Tema umum buku teks Sejarah Indonesia ialah perjalanan bangsa Indonesia yang disusun dari peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis yang membentuk satu

jalanan sejarah nasional. Selain itu, ditambahkan pula pengetahuan tentang teori dan konsep sejarah serta beberapa kajian sejarah tematik. Untuk itu, buku teks dibangun oleh pokok bahasan-pokok bahasan sesuai kurikulum. Dalam Kurikulum 2013, mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk SMA Kelas X, XI, dan XII memuat 17 pokok bahasan yaitu (1) Cara berpikir sejarah, (2) Konsep perubahan dan keberlanjutan, (3) Indonesia zaman Praaksara: awal kehidupan manusia Indonesia, (4) Indonesia zaman Hindu dan Buddha: silang budaya lokal dan global tahap awal, (5) Zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, (6) Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa, (7) Dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia, (8) Pendidikan dan pergerakan nasional, (9) Pendudukan Jepang di Indonesia, (10) Tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan, (11) Proklamasi kemerdekaan Indonesia, (12) Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda, (13) Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa dan negara RI, (14) Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan Demokrasi Terpimpin, (15) Kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan Reformasi, (16) Prestasi bangsa Indonesia dalam mengembangkan iptek pada era kemerdekaan, dan (17) Peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia.

Teks-teks yang mengandung representasi Tionghoa menjadi bagian dari pokok bahasan-pokok bahasan tersebut. Keberadaan teks-teks yang merepresentasikan Tionghoa dapat dimaknai bahwa Tionghoa terlibat dan berperan dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia serta menjadi unsur pembangun sejarah nasional Indonesia. Kendati demikian, dalam buku teks Sejarah Indonesia untuk SMA ini, peran

Tionghoa tidak tampil dalam setiap pokok bahasan. Ada sepuluh pokok bahasan yang menyebut keterlibatan maupun peran serta Tionghoa dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang terkait. Kesepuluh pokok bahasan tersebut yakni (1) Indonesia zaman Praaksara: awal kehidupan manusia Indonesia, (2) Indonesia zaman Hindu dan Buddha: silang budaya lokal dan global tahap awal, (3) Zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, (4) Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa, (5) Pendidikan dan pergerakan nasional, (6) Pendudukan Jepang di Indonesia, (7) Proklamasi kemerdekaan Indonesia, (8) Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda, (9) Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan Demokrasi Terpimpin, dan (10) Kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan Reformasi.

Jika dicermati, maka sepuluh pokok bahasan atau topik-topik yang menampilkan Tionghoa tersebut mencakup setiap pembabakan zaman mulai dari masa praaksara sampai Reformasi. Artinya representasi Tionghoa dihadirkan pada setiap zaman dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Meskipun demikian, tentu saja pada setiap topik tersebut, muatan Tionghoa dihadirkan secara beragam. Ada yang terperinci, selang pandang atau sepintas lalu, dan ada pula yang sekadar menyebut perihal atau tokoh tertentu terkait Tionghoa. Representasi Tionghoa tidak didapati dalam topik cara berpikir sejarah serta konsep perubahan dan keberlanjutan maupun kajian sejarah tematik antara lain dampak penjajahan, tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan, prestasi bangsa Indonesia dalam Iptek, dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia.

Secara umum, Tionghoa muncul pada setiap pokok bahasan yang menggambarkan utuh perjalanan sejarah

nasional. Hal ini mencerminkan suatu koherensi global (*global coherence*) yang menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi, keterlibatan, dan peran Tionghoa dalam topik-topik tersebut yang saling mendukung, memperkuat, dan membentuk jalinan gagasan sentral tentang sejarah nasional bangsa Indonesia. Kendati pada setiap periode Sejarah Indonesia, Tionghoa eksis dan ambil bagian di dalamnya, namun buku teks memberinya porsi yang beragam. Topik perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa melalui materi Orang-orang Cina Berontak menjadi yang paling signifikan dikaji secara terperinci.

Topik lain yang cukup menekankan keberadaan dan peran Tionghoa dijumpai pada materi masa praaksara, Hindu-Buddha, Islam, pendidikan dan pergerakan nasional, **33** Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai Demokrasi Terpimpin, dan masa Orde Baru sampai Reformasi. Sementara pada topik yang lain, keterlibatan Tionghoa hanya disebut begitu saja tanpa penjelasan yang memadai. Perbedaan porsi dan penekanan saat membicarakan tentang Tionghoa dalam masing-masing topik menunjukkan bahwa buku teks yang diteliti berupaya menghadirkan representasi Tionghoa dengan mengutamakan keluasan topik kajian ketimbang kedalaman materi. Selanjutnya secara keseluruhan, representasi Tionghoa itu ambil bagian dalam membentuk teks sejarah nasional Indonesia yang koheren dan utuh untuk disampaikan kepada siswa melalui pembelajaran di sekolah.

Analisis struktur makro atau elemen tematik mengarah pada pemahaman teks yang **38** tidak hanya mencerminkan pandangan atau topik tertentu namun suatu pandangan umum yang koheren dan utuh. Oleh Van Dijk ini dinamakan sebagai *global coherence* (Eriyanto, 2001, hlm. 230). Temuan

menunjukkan bahwa representasi Tionghoa muncul sebagai bagian dari pokok bahasan atau topik-topik tertentu. Ada sepuluh pokok bahasan yang keseluruhannya mencakup setiap pembabakan zaman mulai dari praaksara sampai Reformasi. Hal ini menegaskan pengakuan bahwa Tionghoa menjadi bagian dari koherensi global dari tema besar buku teks Sejarah Indonesia. Artinya Tionghoa diakui turut terlibat dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang disusun dari peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis yang membentuk satu jalinan sejarah nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Sejarah Nasional Indonesia menekankan peranan masyarakat Indonesia dan kebudayaannya dari abad ke abad. Sejarah nasional mengarah pada integrasi bangsa yang mempersatukan bagian-bagian yang berbeda-beda atau terpisah-pisah – kedaerahan, etnis atau suku, agama, golongan, dan sebagainya – ke dalam suatu kesatuan. Perasaan primordial atau loyalitas terhadap kelompok regional, etnis atau suku, bahasa, dan agama tertentu ditingkatkan menjadi loyalitas terhadap bangsa (Kartodirdjo, 1982, hlm. 239).

Atas dasar pemahaman tersebut, maka representasi Tionghoa dalam buku teks Sejarah Indonesia menjadi bagian integral dalam teks yang mendukung gagasan atau topik umum sejarah nasional. Ide ini juga tampak dalam SNI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS yang memberi pengakuan terhadap Tionghoa sebagai bagian seutuhnya dari bangsa Indonesia. Sejarah mencatat keberadaan etnis Tionghoa menjadi salah satu yang turut membentuk keberagaman bangsa sejak era Nusantara. Berdasarkan daerah asal dan budaya yang dibawa, mayoritas Hokkien tinggal di Jawa dan Sumatera, Teochiu banyak dijumpai di Kepulauan Riau, Hakka di Kalimantan Barat, dan Kanton yang jumlahnya

sedikit tersebar di beberapa tempat. Mereka sudah banyak yang mengalami kawin campur sehingga identitas ke-tionghoannya mulai pudar. Secara fisik bisa masih menunjukkan ciri-ciri Tionghoa namun secara kultural lebih akrab dengan etnis lokal tempat mereka tinggal (Arifin, Hasbullah, & Pramono, 2016, hlm. 3). Situasi tersebut mendorong perbedaan akulturasi budaya, bahasa sehari-hari yang digunakan, pilihan agama, hingga orientasi politik yang makin membuat Tionghoa di Indonesia menjadi komunitas yang heterogen dari beragam aspek.

Temuan tersebut juga menunjukkan representasi Tionghoa dalam buku teks lebih diutamakan memenuhi aspek keluasan topik ketimbang kedalaman materi. Ada perbedaan porsi dan penekanan dalam pembahasan tentang Tionghoa. Fenomena ini membuktikan pandangan bahwa buku teks hanya menyajikan **16** materi-materi pilihan yang dianggap sebagai the best story bagi bangsa untuk menciptakan memori kolektif (Seixas, 2000). Oleh karenanya, penyusunan buku teks sejarah tidak dapat dipisahkan dari politik pemerintah yang berkuasa. Latar historisnya pada masa Orde Baru diterapkan asimilasi total atau pembauran sehingga eksistensi dan peran Tionghoa dalam historiografi sejarah nasional dilenyapkan. Tionghoa diharapkan dapat makin lebur dan menjadi bagian dari lokalitas setempat mereka tinggal. Di sisi lain, SNI juga didominasi peristiwa-peristiwa sejarah di Jawa, sehingga tidak hanya Tionghoa, sebenarnya representasi keberagaman gender, kedaerahan, etnis, maupun agama juga menjadi persoalan. Pada masa itu, prinsip Indonesiasentris diusung sebagai bentuk dekolonisasi, namun upaya memberi perhatian pada sejarah lokal dengan maksud menonjolkan peranan bangsa Indonesia sendiri mengalami kegagalan (Kartodirdjo, 1982, hlm. 39). Buku teks

Sejarah Indonesia yang dianalisis ini berusaha menyesuaikan dengan dinamika Reformasi yang memunculkan SNI Edisi Pemutakhiran dan IDAS. Dalam dua karya official history yang baru ini, aspek Indonesiasentris diperkuat dengan tampilnya keberagaman termasuk Tionghoa.

B. Analisis Superstruktur

Analisis superstruktur terkait dengan aspek skematis. Teks umumnya memiliki skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir yang menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti. Sekaligus juga dapat diketahui bagian mana yang diberi tekanan untuk diutamakan dan bagian mana yang menjadi strategi untuk menyembunyikan informasi tertentu. Elemen skematis pada narasi-narasi dalam buku teks Sejarah Indonesia yang diteliti ini relatif tidak mudah untuk ditunjukkan secara utuh. Hal ini dikarenakan representasi Tionghoa kerap hanya menjadi bagian kecil dari topik yang diangkat atau bahkan sekadar disebut begitu saja.

Dari kategori *summary*, judul maupun pengantar narasi ditulis sesuai dengan peristiwa atau topik yang sedang diangkat. Misalnya hubungan antara nenek moyang bangsa Indonesia dengan Tionghoa merupakan bagian dari judul utama “Asal usul dan Persebaran Nenek Moyang Bangsa Indonesia”. Relasi dagang, pengaruh, hingga keberadaan permukiman Tionghoa di kerajaan-kerajaan Nusantara pada masa Hindu-Buddha maupun Islam juga menjadi bagian dari teks yang mengkaji setiap kerajaan tersebut. Pers Tionghoa didapati dalam teks yang berbicara tentang Pergerakan Nasional dan Sumpah Pemuda. Demikian pula narasi tentang Tionghoa dalam masa pendudukan Jepang,

Proklamasi Kemerdekaan RI, Revolusi, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga Reformasi menjadi bagian dari judul utama yang dibicarakan. Kategori *story* juga tidak leluasa untuk ditelisik dari narasi-narasi yang hanya memuat Tionghoa sepintas lalu, meskipun kecenderungan sudut pandang untuk menonjolkan atau menyembunyikan informasi tertentu dapat diketahui. Secara umum, isi dan sudut pandang narasi Tionghoa menunjukkan pola tertentu pada topik-topik yang muncul.

Pertama, kehadiran pendatang Tionghoa dan keberterimaannya secara harmonis muncul pada topik *masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam*. Dalam teks *asal usul dan persebaran nenek moyang Indonesia* dijelaskan dengan merujuk Sarasin bersaudara bahwa penduduk asli Indonesia seperti suku *Kubu, Lubu, Talang Mamak di Sumatra dan Toala di Sulawesi* berasal dari suku bangsa Vedda. Sementara di Cina didapati suku Yao-Jen yang juga berasal dari suku bangsa Vedda (Gunawan et al., 2017, hlm. 34–35). Proto dan Deutro Melayu yang menjadi cikal bakal suku-suku yang tersebar di Indonesia disebut berasal dari Cina Selatan (Yunan) atau Indocina bagian utara. Teks juga menyampaikan ciri-ciri mereka yakni *berambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit*. Mereka membawa kebudayaan Dongson yang juga ditemukan di Indocina (Gunawan et al., 2017, hlm. 35–36). Penjelasan masih ditambah dengan studi genetika terbaru tentang teori *Out of Africa* dan *Out of Taiwan* yang menunjukkan leluhur suku-suku di Indonesia adalah pendatang. Teori *Out of Taiwan* menegaskan gelombang migrasi dari arah Cina Selatan menuju Nusantara (Gunawan et al., 2017, hlm. 43). Kendati tidak menyampaikan secara eksplisit bahwa nenek moyang suku-suku yang ada di Indonesia berdarah sama dengan suku Tionghoa, namun

terbentuk pandangan tentang berbagi nenek moyang yang sama.

Pada topik masa Hindu-Buddha, selain penyebaran agama Buddha, kerap disebut relasi dagang kerajaan-kerajaan setempat dengan orang-orang Tionghoa. Begitu pula dicatat sumber-sumber berita dari Cina yang merujuk keberadaan suatu kerajaan, bahkan menceritakan mengenai kehidupan masyarakat yang ada di tempat itu. Misalnya narasi tentang Kerajaan Tulang Bawang di Lampung yang didominasi oleh sumber sejarah dari berita Cina (Gunawan et al., 2017, hlm. 146–147). Pengaruh budaya Tionghoa dalam kehidupan masyarakat di Nusantara, dalam hal kuliner, juga muncul dalam soal uji kompetensi. Pada topik masa Islam, hubungan dagang kerajaan-kerajaan setempat dengan orang-orang Tionghoa makin berkembang bahkan didapati permukiman Tionghoa di beberapa tempat (Gunawan et al., 2017, hlm. 197, 199). Teks dalam bagian ini juga menampilkan gambar Laksamana Cheng Ho dan pernyataan bahwa catatan pelayaran Cheng Ho menulis tentang keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada abad ke-13 sampai 15 (Gunawan et al., 2017, hlm. 181). Hanya saja identitas Cheng Ho yang seorang muslim dan bersama para pengikutnya menyebarkan agama Islam di Sumatera dan Jawa sama sekali tidak disinggung. Tampak bahwa narasi pada kedua masa ini menonjolkan masalah relasi dagang dan pemanfaatan berita Cina sebagai sumber sejarah. Pengaruh Tionghoa di Nusantara dalam beragam bidang, hanya disinggung dalam penyebaran agama Buddha dan dalam pertanyaan uji kompetensi yang terkait dengan kuliner. Akan tetapi, pola narasi pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam secara umum menampilkan penerimaan yang terbuka dan jalinan relasi yang harmonis dengan Tionghoa.

Kedua, tujuan kedatangan Tionghoa untuk berdagang dimulai pada narasi masa Hindu-Buddha dan Islam. Pola yang mengarah pada sudut pandang Tionghoa sebagai pendatang yang hanya bergelut pada peran ekonomi terus direproduksi dalam narasi sejak masa kolonial hingga Orde Baru. Dalam narasi masa kolonial, perlawanan Tionghoa selalu dibalut oleh peran ekonominya. Setelah kemerdekaan, faktor ekonomi juga yang menyebabkan Tionghoa menjadi korban peristiwa rasial. Narasi-narasi ini menempatkan Tionghoa semata-mata sebagai *economic animal*. Hampir tidak ada peran dalam bidang lain yang diungkap mengenai Tionghoa.

Ketiga, bersamaan dengan narasi Tionghoa sebagai *economic animal*, dinamika sejarah juga memosisikan Tionghoa sebagai korban dari sentimen negatif yang muncul pada narasi sejak masa kolonial hingga Orde Baru. Secara umum, Tionghoa memang cenderung ditempatkan sebagai objek ketimbang subjek atau pelaku utama dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang dibicarakan. Satu-satunya yang secara jelas menulis judul yang langsung terkait dengan Tionghoa dan merepresentasikannya secara signifikan hanyalah teks "Orang-orang Cina Berontak" (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92–93). Dalam teks ini, lead atau pengantar pada intinya menekankan sekali lagi tentang Tionghoa sebagai pendatang. Mereka mencari penghidupan dan menikah⁹⁶ dengan penduduk Jawa. Bahkan VOC juga sengaja mendatangkan orang-orang Tionghoa untuk mendukung kemajuan perekonomian Batavia dan sekitarnya (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92). Selanjutnya dijelaskan latar belakang pembantaian terhadap Tionghoa di Batavia merupakan reaksi VOC atas persoalan sosial yang terjadi sehingga pendatang Tionghoa harus dibatasi dan dikenai surat izin tinggal. Penyelewengan yang dilakukan para

pegawai VOC membuat banyak orang Tionghoa tidak mampu memiliki surat izin tinggal dan membentuk gerombolan pengacau di Batavia. Pada paragraf ketiga dituliskan jalannya peristiwa pembantaian terhadap Tionghoa di Batavia yang dilakukan VOC. Dari situ muncul perlawanan Tionghoa terhadap VOC di berbagai daerah, contohnya di Jawa Tengah dipimpin Oey Panko atau Khe Panjang. Paragraf terakhir menjelaskan dampak dan tanggapan pihak lain terhadap peristiwa tersebut. Dikatakan bahwa perlawanan Tionghoa didukung para bupati pesisir dan Paku Buwana II. 5 pemberontakan orang-orang Cina yang satu per satu dapat dipadamkan VOC membuat Paku Buwana II bimbang dan berdamai dengan VOC (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 93).

Keseluruhan teks didominasi oleh penyampaian fakta-fakta sejarah. Hanya pada bagian pengantar tampak kalimat-kalimat yang cukup tendensius. Keberadaan pendatang Tionghoa yang disebut sebagai Cina miskin telah menghadirkan para pengemis dan pencuri. Teks seakan memberi frame persepsi terhadap pendatang Tionghoa dalam dua aspek. Pertama, mereka datang untuk kepentingan ekonomi. Kedua, mereka yang gagal dalam urusan ekonomi menjadi tetap atau jatuh miskin dan melakukan tindak kriminalitas sehingga maklum (pantas) apabila VOC bertindak. Penonjolan ini menggiring pembaca untuk sejak awal meyakini stereotipe tertentu terhadap Tionghoa yang bernuansa negatif. Dalam teks-teks tentang perlawanan penduduk terhadap kekuatan penjajah, umumnya yang diberi persepsi negatif adalah pihak penjajah bukan pelawan. Dalam teks ini, justru persepsi negatif lebih kuat ditimpakan pada pihak pelawan yakni orang-orang Tionghoa yang dilabeli sebagai Cina miskin yang mengganggu atau

gerombolan yang mengacau di Batavia. Sementara VOC sebagai penjajah artinya pihak yang harus dilawan justru tampil sebagai “polisi” masyarakat. Seakan teks mengajak pembaca untuk sepakat bahwa VOC sedang melaksanakan tugas memberantas pengacau, memelihara keamanan, dan ketertiban umum.

Peristiwa pembantaian terhadap Tionghoa juga tampak lebih menonjol ketimbang perlawanan Tionghoa terhadap VOC. Informasi yang dominan tentang pembunuhan orang-orang Tionghoa di Batavia mengonfirmasi gagasan teks bahwa VOC sedang menertibkan keamanan di Batavia yang kacau akibat gangguan dari gerombolan Cina miskin. Sekaligus juga mengonfirmasi alasan mengapa judul ditulis “Orang-orang Cina Berontak”. Judul ini tampak berbeda jika dibandingkan dengan judul-judul peristiwa perlawanan terhadap VOC yang dilakukan penduduk lainnya di berbagai daerah dalam buku teks ini. Judul lain menggambarkan penduduk daerah sebagai pihak pelawan terhadap VOC sebagai penjajah. Judul “Orang-orang Cina Berontak” memantaskan posisi VOC sebagai “polisi” yang menertibkan aksi orang-orang Tionghoa.

Perlawanan Tionghoa terhadap VOC di berbagai daerah tidak dibicarakan lebih lanjut. Pada bagian ini hanya ditampilkan nama tokoh pemimpin Tionghoa dan dukungan para bupati pesisir. Bahkan peristiwa Geger Pacinan juga tidak disebut sama sekali. Hanya ada keterangan bahwa **6** pada tahun 1741 benteng VOC di Kartasura dapat diserang dan membuat VOC menguatkan persenjataan sehingga pemberontakan dapat dipadamkan. Peristiwa di Kartasura inilah yang jika dijelaskan lebih lanjut akan sampai pada peristiwa Geger Pacinan sebagai puncak dari perang besar yang dilakukan masyarakat Tionghoa yang bekerja sama

dengan penduduk Jawa melawan VOC. Pembunuhan orang-orang Tionghoa di Batavia merupakan awal dari perang besar perlawanan Tionghoa terhadap VOC. Kenyataannya teks justru tidak menampilkan sisi perlawanan dan kerja sama Tionghoa-Jawa melawan VOC secara utuh, malah lebih menonjolkan peristiwa pembunuhan Tionghoa di Batavia.

Pada topik perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Tionghoa dijelaskan menjadi korban dari aksi-aksi Belanda di Jawa Barat. Informasi lain tentang Tionghoa sebagai subjek dan perannya selama masa Revolusi tidak dimunculkan. Kecenderungan senada dijumpai dalam topik masa awal kemerdekaan sampai Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru sampai Reformasi. Tionghoa di kedua topik ini ditempatkan sebagai economic animal yang kerap menjadi korban kerusuhan etnis. Posisi mayoritas Tionghoa dianggap mapan secara ekonomi sehingga memunculkan perasaan tidak senang di kalangan pribumi. Persepsi tersebut berulang kali direproduksi. Penonjolan terhadap masalah sentimen anti-Cina tidak diimbangi dengan informasi mengenai peran Tionghoa dalam berbagai bidang, seperti politik, sosial, budaya, olahraga, dan sebagainya. Padahal ada banyak tokoh Tionghoa sejak awal kemerdekaan hingga Reformasi yang berperan penting. Pola Tionghoa sebagai korban atau objek dari suatu peristiwa sejarah yang dibicarakan begitu kuat sepanjang narasi masa kolonial hingga Orde Baru. Tionghoa mengalami pemingggiran dan cenderung menjadi objek penderita dalam narasi yang ditulis.

Keempat, upaya pemulihan relasi harmonis dengan Tionghoa muncul pada teks masa Reformasi. Kendati pada awal teks, narasi menggambarkan Tionghoa sebagai korban kerusuhan 1998, namun upaya pemulihan relasi dengan Tionghoa tampak menonjol. Terutama tentang era peme-

rintahan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mengeluarkan Keppres No. 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 164). Aturan ini berdampak pada berkembangnya dan makin diterimanya Tionghoa beserta budayanya sebagai bagian dari masyarakat luas. Akan tetapi, upaya-upaya lain terkait pemulihan relasi harmonis dengan Tionghoa pada masa Presiden B. J. Habibie tentang penghapusan istilah pribumi dan nonpribumi, Presiden Megawati Soekarnoputri tentang penetapan hari raya Imlek, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penyebutan Tionghoa hingga pengangkatan pahlawan nasional dari kalangan Tionghoa tidak dituliskan dalam buku teks ini.

Kelima, peran Tionghoa secara terbatas dalam bidang-bidang tertentu seperti sosial budaya, pers, dan politik muncul sepintas lalu pada beberapa pokok bahasan. Misalnya dalam narasi tentang pergerakan nasional dibicarakan mengenai keberadaan pers dan penerbit Tionghoa yang menjadi pionir perkembangan pers nasional. Kendati diakui sebagai pelopor, namun perkembangan surat kabar dan penerbitan bumiputra yang lebih ditonjolkan selanjutnya dalam teks. Tokoh jurnalis Tionghoa hanya disebut satu nama yakni Kwee Khaij Khee yang segera diikuti dengan penjelasan sejumlah jurnalis bumiputra (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 187). Lainnya antara lain tentang peran dalam perkembangan masyarakat dan budaya praaksara, agama Buddha, budaya kuliner, perlawanan terhadap kolonialisme, Sumpah Pemuda, hingga persiapan kemerdekaan RI (Gunawan et al., 2017; Sardiman & Lestariningsih, 2017a, 2017b).

Wacana superstruktur atau skematis merupakan strategi²⁴ untuk mendukung topik yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu (Eriyanto, 2001). Pada kategori summary, judul maupun pengantar narasi yang terkait Tionghoa sebagai bagian dari teks tentu terikat dengan pokok bahasan. Sementara, kategori story menunjukkan pola-pola tertentu sesuai topik-topik yang merepresentasikan Tionghoa. Pemaparan yang mengedepankan jalinan keharmonisan pada topik masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam tidak lepas dari kenyataan ketiga periode ini dipenuhi oleh fakta keras dan jauh dari kepentingan politik tertentu. Sementara pada masa kolonial hingga Orde Baru, skema menunjukkan Tionghoa ditonjolkan hanya dalam urusan ekonomi dan kerap digambarkan menjadi korban sentimen negatif anti-Cina. Skema berikutnya pada narasi masa Reformasi menekankan adanya upaya pemulihan relasi yang harmonis dengan Tionghoa. Dengan demikian, skema yang terbentuk dimulai dari nuansa keharmonisan, stereotipe dan prasangka, kemudian kembali pada upaya pemulihan keharmonisan. Di luar pola ini, peran Tionghoa selain dalam bidang ekonomi ditampilkan sangat terbatas pada beberapa pokok bahasan.

Skema yang menampilkan Tionghoa berselimut stereotipe dan prasangka dalam narasi masa kolonial sampai Orde Baru berpotensi kontraproduktif dengan tujuan pendidikan sejarah. Tionghoa sebagai objek (korban) dan bukan subjek (pelaku perlawanan) dalam narasi “Orang-orang Cina Berontak”, misalnya, berpotensi membangun wacana tertentu. Untuk itu, perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian pembelajaran yang dikelola guru pada materi ini sangat menentukan pengalaman belajar dan wacana yang hendak dikonstruksi. Lagi pula, peristiwa ini tidak ditampilkan se-

banding dengan perlawanan lainnya. “New Order history has been successfully challenged but its legacy still holds sway” (Ashton & Trapeznik, 2019). Materi ajar sejarah gaya Orde Baru kadang lekat dari generasi ke generasi (Pendry, Husbands, & Kitson, 2005). Ini dikuatkan dengan penelitian Darmawan (2019) yang mengindikasikan relasi kuasa Orde Baru masih diproduksi dalam buku teks.

Selain itu, sekali lagi, materi yang disajikan oleh buku teks bersifat pilihan yang dianggap sebagai *the best story* bagi bangsa untuk menumbuhkembangkan memori kolektif masyarakat (Seixas, 2000, hlm. 20). Untuk itu, lebih diutamakan materi-materi yang dapat menumbuhkan nasionalisme, patriotisme, dan karakter kebangsaan lainnya untuk membentuk *national pride* (Aman, 2011; Pavlick, 2019; Sjamsuddin, 2017; Wineburg, 2006; Wiriaatmadja, 2002; Yao, 2018). Sementara representasi Tionghoa lebih mengacu pada penghargaan terhadap nilai kemanusiaan, kebinekaan, dan persatuan yang sejatinya juga diperlukan dalam membentuk kebanggaan nasional. Maksudnya Tionghoa merupakan bagian dari kebinekaan yang merupakan kekayaan bangsa. Potensi kebanggaan nasional bisa menjadi tidak bermakna ketika kebinekaan tidak dipahami sepenuhnya. Pembentukan nasionalisme perlu sejalan dengan konteks kemajemukan bangsa Indonesia (Saripudin & Komalasari, 2016). Penelitian tentang identitas Papua dalam buku teks Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa integrasi nasional juga dibentuk oleh konstruksi kebinekaan yakni identitas lokal termasuk suku (Handoko & Wasino, 2020). Nilai nasionalisme yang diusung buku teks semestinya tidak lepas dari kebinekaan (Tilaar, 2014). Termasuk ketika buku teks merepresentasikan Tionghoa sebagai bagian dari pembentuk Sejarah Nasional

Indonesia, maka perlu didukung oleh skema narasi yang menguatkan keharmonisan dan integrasi bangsa.

C. Analisis Struktur Mikro

1. Semantik

Semantik dianalisis dengan memperhatikan latar, detail, dan maksud teks. Narasi-narasi yang merepresentasikan Tionghoa tentu tidak lepas dari latar Sejarah Nasional Indonesia. Dalam konteks ini, Tionghoa cenderung ditempatkan sebagai pendatang dengan tujuan mencari penghidupan terutama melalui perdagangan. Latar historis ini paling mudah dihidupkan karena berhubungan dengan memori khalayak yang menegaskan pandangan Tionghoa sebagai *liyan* atau *the other*. Terkait detail, keseluruhan teks yang merepresentasikan Tionghoa hampir semuanya tidak menampilkan detail. Pada banyak topik, didapati hal yang terkait Tionghoa hanya sekadar disebutkan begitu saja tanpa detail lain yang memadai. Detail yang relatif lengkap dan panjang hanya dijumpai dalam narasi Orang-orang Cina Berontak.

Berikutnya yakni maksud teks. Para prinsipnya, ¹ informasi yang menguntungkan akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit, eufemistik, dan tersembunyi. Kendati narasi Orang-orang Cina Berontak tampil signifikan, namun struktur narasi yang dibangun mulai judul hingga keseluruhan isi tidak secara eksplisit menampilkan perjuangan Tionghoa melawan VOC yang sepadan dengan kisah perjuangan masyarakat lainnya (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92–93). Di sisi lain, narasi yang menggambarkan Tionghoa sebagai *economic animal* disampaikan secara

eksplisit dan berulang-ulang mulai dari narasi tentang era Hindu-Buddha, Islam, kolonialisme, kemerdekaan, hingga Orde Baru.

Narasi *economic animal* segendang sepenarian dengan sentimen anti-Cina yang menempatkan Tionghoa sebagai korban atau objek penderita. Pada materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Tionghoa disebut sebagai korban pembunuhan pasukan Belanda dalam agresi militer (Sardiman & Lestariningsih, 2017b, hlm. 179–180). Pada materi awal kemerdekaan sampai Demokrasi Terpimpin beberapa kali disebut munculnya masalah anti-Cina (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 59, 71–72). Demikian pula pada materi masa Orde Baru sampai Reformasi, persoalan anti-Cina mendominasi dalam representasi Tionghoa mulai dari Malari hingga 1998 (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 119, 148).

Sebaliknya, pelaku anti-Cina disamarkan. “Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif yaitu munculnya golongan yang membenci kalangan Cina” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 72). “Kelompok ini [Tionghoa] menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian Indonesia” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 148). Kedua kalimat ini tidak secara jelas menyebut siapa pelaku anti-Cina. Kalimat pertama menyebut “golongan” dan kalimat kedua menyebut “masyarakat”. Padahal tidak semua anggota masyarakat membenci Tionghoa, barangkali hanya sebagian kecil yang gemar melakukan provokasi anti-Cina. Dalam kesamaran itu, klaim yang diajukan adalah masyarakat. Seolah seluruh anggota masyarakat membenci Tionghoa atau dikondisikan untuk sepakat menentang Tionghoa. Analoginya mirip seperti

perasaan masyarakat yang sepakat bahwa penjajah harus dilawan.

Dengan demikian terkait semantik, didapati dua hal pokok yang ditekankan yakni pendatang dengan tujuan ekonomi dan korban sentimen negatif. Kedua hal ini dianggap sebagai informasi atau pengetahuan utama yang harus dipahami ketika berbicara tentang Tionghoa di Indonesia. Ada upaya pelanggaran terhadap stereotipe yang umum berkembang selama ini di masyarakat tentang Tionghoa. Pandangan ini tampaknya begitu kuat dan terus dilekatkan. Sementara kontribusi dan peran Tionghoa yang konstruktif cenderung disamarkan. Teks mengenai kontribusi dan peran Tionghoa memang didapati, namun tidak tampak detail serta tidak tampak pula upaya untuk menghadirkannya secara eksplisit.

Pada struktur mikro, temuan dalam elemen semantik berhubungan dengan makna yang ingin ditekankan dalam teks meliputi latar, detail, dan maksud teks (Eriyanto, 2001). Elemen semantik mengarah pada latar historis Tionghoa sebagai pendatang yang mencari penghidupan terutama dengan berdagang. Latar historis ini berpotensi menegaskan pandangan bahwa Tionghoa adalah liyan (*the other*). Temuan pada narasi-narasi tentang Tionghoa setelah kemerdekaan juga menunjukkan reproduksi stereotipe Tionghoa sebagai pengendali perekonomian sehingga tumbuh sentimen anti-Cina. Pemaknaan semacam ini memang tidak sepenuhnya keliru. Akan tetapi, persoalannya buku teks sejarah ditujukan untuk kepentingan pendidikan yang tidak bisa lepas dari nilai (*values*). Reproduksi makna terus-menerus yang kontraproduktif dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan tentu tidak diharapkan. Perlu ada penguatan atau kontra narasi (*counter narrative*) yang lebih menguatkan pandangan

2 bahwa Tionghoa telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan perannya tidak hanya dalam urusan ekonomi saja.

Sejarah mencatat kontak awal Tionghoa dengan wilayah kawasan selatan atau Nusantara yang disebut Nanyang terjadi sekitar abad ke-5 Masehi (Intisari & Indonesia, 2018; Lombard, 1996). Kedatangan Tionghoa ke Nusantara dalam jumlah besar mulai terjadi pada abad ke-9 pada zaman Dinasti Tang dengan tujuan mencari penghidupan yang lebih baik melalui berdagang atau bertani (Setiono, 2008, hlm. 21). Kontra narasi berusaha menekankan pandangan bahwa meskipun Tionghoa adalah pendatang, namun telah hidup dari generasi ke generasi di Indonesia. Mayoritas Tionghoa adalah kelompok peranakan yang berasal dari kawin campur dengan penduduk setempat. Selain itu, teori asal-usul manusia Indonesia kerap dihubungkan dengan para pendatang dari Yunnan atau Tiongkok Barat Daya. Artinya mempersoalkan asli-tidak asli, native-pendatang, murni-berdarah Tionghoa, dan sejenisnya sangat tidak relevan (Setiono, 2008, hlm. 16). Terkait kewarganegaraan, Mahfud (2013, hlm. 50) juga menegaskan bahwa sebagai 4 Warga Negara Indonesia (WNI), maka Tionghoa secara otomatis masuk ke dalam masyarakat Indonesia. Untuk itu reproduksi pandangan Tionghoa sebagai pendatang harus disisihkan, sementara Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus diketengahkan.

Tujuan berdagang memang yang terutama, namun keberadaan masyarakat Tionghoa sejak berabad-abad lalu telah mewarnai kehidupan masyarakat setempat. Pengaruh Tionghoa dalam bidang sosial budaya begitu tersebar luas. Sejak sebelum kemerdekaan, Tionghoa juga banyak yang berperan dalam berbagai bidang selain ekonomi.

Persoalannya tidak banyak yang membuka informasi mengenai peran-peran lain Tionghoa, termasuk dalam bidang politik, sosial, budaya, bahkan militer yang dapat menghapus stereotipe Tionghoa sebagai economic animal.

Terkait sebagai korban sentimen negatif anti-Cina, penelitian Giblin (2003) menjelaskan bahwa pasca 1998, sejumlah organisasi sipil didirikan untuk mencoba mengatasi stereotipe anti-Cina. Strategi yang digunakan untuk menyudahi sentimen anti-Cina yakni dengan menonjolkan wacana nasionalisme Indonesia. Untuk itu, kedua hal ini sangat berhubungan. Dalam wacana nasionalisme yang sama, harus dihindari anggapan bahwa Tionghoa merupakan orang luar (liyan) atau pendatang yang hanya sibuk sendiri dengan urusan ekonomi. Jika hal ini dapat dilakukan, maka kecenderungan mereproduksi sentimen anti-Cina dapat diakhiri. Bahwa pernah terjadi peristiwa-peristiwa konflik dan kerusuhan anti-Cina merupakan pengalaman buruk di masa lalu yang tidak boleh terulang kembali.

Untuk itu, dari elemen ini dapat ditegaskan bahwa kendati penerimaan terhadap Tionghoa sudah ditampakkan dalam buku teks, namun pengakuannya masih terbatas. Padahal pendidikan sejarah memiliki arti penting dalam mengembangkan hubungan antaretnis di Indonesia agar etnisitas dan nasionalisme terbangun paralel. Jangan sampai ada dominasi peran dari etnis tertentu dan menafikan peran etnis-etnis lainnya dalam pembentukan sejarah bangsa (Mulyana, 2008, hlm. 11). Pengakuan terhadap keberagaman, termasuk peran Tionghoa, yang sekadar formalitas harus dihindari. Pengakuan harus memiliki implikasi positif dan konstruktif bagi masyarakat (Tilaar, 2004).

2. Sintaksis

Elemen sintaksis dianalisis dengan memperhatikan koherensi, pengingkaran, bentuk kalimat, dan kata ganti yang digunakan. Pentingnya berita Cina sebagai sumber sejarah dalam menjelaskan keberadaan kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha dikuatkan dengan koherensi. Setidaknya ada dua koherensi yang muncul. “Di samping prasasti-prasasti tersebut, berita Cina juga merupakan sumber sejarah Sriwijaya yang penting” (Gunawan et al., 2017, hlm. 102). Hal senada dalam narasi Mataram Kuno. “Di samping beberapa prasasti tersebut, sumber sejarah untuk Kerajaan Mataram Kuno juga berasal dari berita Cina” (Gunawan et al., 2017, hlm. 111). Jika dicermati, maka tampak digunakan koherensi pembeda antara sumber sejarah berupa prasasti dengan sumber berita Cina. Dalam konteks ini, sumber berita Cina disampaikan sebagai hal yang menguatkan sumber sejarah prasasti. Kedua koherensi tersebut membentuk pandangan bahwa Tionghoa berdatangan ke Nusantara sejak silam. Kedatangannya juga berkontribusi dalam mendokumentasikan masa lalu yang dapat dimanfaatkan sampai sekarang ini.

Koherensi pembeda yang memberi efek positif bagi representasi Tionghoa juga muncul dalam teks perlawanan Gowa terhadap VOC. “Keterlibatan VOC dalam pembelian produk-produk lokal sangat kecil, termasuk produk-produk laut, sementara para pedagang Cina sangat menghargai produk lokal dan produk-produk laut ini” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 90). Dalam kalimat ini, para pedagang Tionghoa disebut menghargai produk lokal dan produk laut, lain halnya dengan VOC. Efek dari koherensi ini, para pedagang Tionghoa yang merupakan pendatang

digambarkan secara positif ketimbang VOC. Koherensi penjelasan yang bersifat positif juga muncul dalam kalimat berikut, “Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, yang menikah dengan penduduk Jawa khususnya ke Batavia” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92). Kalimat “yang menikah dengan penduduk Jawa” memberi penjelasan positif bahwa para pendatang Tionghoa hidup membaur bahkan melakukan kawin campur dengan penduduk setempat. Dengan demikian keberadaan kaum peranakan Tionghoa yang lahir, hidup, dan mati di Indonesia sudah dari generasi ke generasi. Kenyataan ini menguatkan pandangan bahwa mereka telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak masa yang lampau.

Dalam teks Orang-orang Cina Berontak, koherensi juga muncul. “Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis bahkan ada yang menjadi pencuri” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92). Kalimat ⁶ banyak di antara mereka termasuk miskin, menjadi pengemis, bahkan pencuri merupakan penjelas dari orang-orang Cina yang tidak memiliki modal. Pada satu sisi koherensi ini dapat mematahkan anggapan bahwa kenyataannya sejak dulu tidak semua orang Tionghoa kaya. Akan tetapi, dalam konteks peristiwa sejarah ini, koherensi tersebut berpotensi pula menyudutkan para pendatang Tionghoa, khususnya yang miskin itu, sebagai sampah masyarakat (pengemis) dan pelaku kriminal (pencuri) yang tentu saja mengganggu dan meresahkan lingkungan.

Ada sebuah kalimat yang semestinya menjadi intisari narasi dengan menempatkan Tionghoa sebagai subjek utama

dari peristiwa perlawanan terhadap VOC. “Orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 93). Kalimat yang bernuansa konstruktif dalam menggambarkan peran penting Tionghoa dalam perjuangan bangsa ini menjadi tampak kerdil dengan hadirnya penjelas “yang berhasil meloloskan diri”. Penjelas ini mengandaikan tidak semua orang Tionghoa terlibat aktif, hanya oknum kalangan Tionghoa yang berhasil meloloskan diri dari *sweeping* yang dilakukan VOC dan mereka tidak memiliki pilihan selain melawan dalam situasi tersebut.

Hal serupa juga tampil dalam narasi peristiwa Rengasdengklok. “Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa, Djiau Kie Siong yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia” (Sardiman & Lestariningsih, 2017b, hlm. 85). Penjelas “yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia” justru mengecilkan makna dari peran atau sumbangsih Kie Siong dalam peristiwa Rengasdengklok. Kie Siong ditempatkan sebagai liyan yang sekadar atau bahkan kebetulan bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Nuansa yang biasa muncul seperti ketika menjelaskan peran Laksamana Maeda, seorang Jepang, yang mengizinkan perumusan naskah Proklamasi di rumahnya karena bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Apakah posisi Kie Siong sama dengan Laksamana Maeda dalam konteks dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia?

Koherensi yang cenderung negatif juga sangat terasa dalam narasi-narasi yang menempatkan Tionghoa sebagai *economic animal*. “Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina

sebagai penggerak perekonomian Indonesia” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 70). “Selain tujuan tersebut, juga untuk menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 71). Selanjutnya juga dalam kalimat “Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dan persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 71). Kata hubung “dan” menunjukkan ada dua hal yang dibicarakan yakni Tionghoa dan asing. Berulang kali kedua hal ini disandingkan seakan menempatkan Tionghoa setara dengan pengusaha (orang) asing. Hal ini menggiring anggapan bahwa Tionghoa juga tergolong liyan dan bukan bagian dari bangsa Indonesia sebagaimana pengusaha asing.

Hal senada dijumpai pula dalam kalimat “Pada bulan-bulan awal 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 148). Demikian pula pada kalimat “Ditambah kerusuhan Mei 1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan, khususnya di kalangan investor keturunan Cina yang memainkan peran dominan dalam ekonomi Indonesia” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 153). Penjelas dalam kalimat-kalimat ini semuanya bermaksud menguatkan pandangan tentang Tionghoa sebagai *economic animal* yang hanya berkuat dengan masalah bisnis dan perekonomian saja. Tionghoa adalah penggerak perekonomian Indonesia, mendominasi perekonomian di Indonesia, dan memainkan peran dominan dalam ekonomi Indonesia. Kalimat-kalimat penjelas ini

menggiring pandangan terhadap Tionghoa sebagai penentu perekonomian di Indonesia, bahkan pihak yang harus bertanggung jawab tatkala terjadi kekacauan perekonomian nasional. Pandangan inilah yang muncul saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998. Orang-orang Tionghoa dianggap sebagai penyebab atau pemicu dan harus bertanggung jawab atas kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak tempat, dan kesulitan hidup masyarakat kebanyakan. Semua ini menjadi alasan pembenaran tindak perusakan, pembakaran, dan penjarahan harta benda milik Tionghoa, bahkan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Tionghoa.

Pengingkaran muncul dalam topik tentang peran pers Tionghoa. “Para penerbit Tionghoa itulah yang menjadikan pertumbuhan surat kabar berkembang pesat. Dalam perkembangannya kaum bumiputra juga mengambil bagian” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 186). Narasi ini setuju bahwa Tionghoa berperan dalam pertumbuhan surat kabar, namun selanjutnya lebih ditekankan peran dari kaum bumiputra. Narasi setuju dengan adanya peran Tionghoa, namun sekaligus mengingkarinya dengan lebih menonjolkan peran bumiputra. Pers kaum bumiputra seakan lebih “berhak” sebagai penentu perkembangan pers di Indonesia. Pandangan ini dikuatkan dengan disebutkan penerbit bumiputra pertama di Batavia yang muncul pada pertengahan abad ke-20 (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 186), padahal sebelumnya sudah ada penerbit Tionghoa. Demikian juga disebut tentang para jurnalis bumiputra yang memberi wawasan dan embrio kebangsaan (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 187), padahal banyak pula jurnalis Tionghoa yang mendukung

kemerdekaan dan kerap menyampaikan pemikirannya tentang kebangsaan Indonesia.

Bentuk kalimat menunjukkan struktur kalimat aktif dan pasif bergantian muncul. Hal yang perlu dicermati adalah tentang bagaimana Tionghoa ditempatkan, apakah sebagai subjek atau objek. Dalam teks *Orang-orang Cina Berontak*, dijumpai satu kalimat aktif yang menempatkan Tionghoa sebagai subjek dalam konstruksi positif. Kalimat ini semestinya menjadi intisari dari keseluruhan narasi tentang peristiwa perlawanan Tionghoa terhadap VOC. “Orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 93). Dalam kalimat ini, Tionghoa diposisikan sebagai subjek pelaku perlawanan terhadap VOC di berbagai daerah. Sayangnya didapati muncul kalimat penjelas “yang berhasil meloloskan diri” dan memberi koherensi yang tampak membatasi subjek. Temuan serupa muncul dalam narasi tentang peran pers Tionghoa. “Pada abad itu penerbit Tionghoa mulai bermunculan. Para penerbit Tionghoa itulah yang menjadikan pertumbuhan surat kabar berkembang pesat” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 186). Dalam kalimat ini, Tionghoa ditempatkan sebagai subjek dengan perannya menjadi pionir pertumbuhan surat kabar di Indonesia. Akan tetapi, jika mencermati kalimat berikutnya, maka subjek itu bergeser dari pers Tionghoa ke pers bumiputra.

Kalimat lainnya yang menempatkan Tionghoa sebagai subjek antara lain menegaskan Tionghoa sebagai pendatang di Indonesia, dan perannya yang dominan dalam perekonomian nasional. “Sejak abad ke-5 orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun makin banyak. Pada masa perkembangan

kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, yang menikah dengan penduduk Jawa khususnya ke Batavia” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92). Pada kalimat-kalimat ini tampak bahwa Tionghoa ditempatkan sebagai subjek dengan predikat-predikat “mengadakan hubungan”, “tinggal”, dan “menikah” yang menegaskan diri mereka adalah pendatang di Indonesia. “Kelompok ini [Tionghoa] menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 148). “Ditambah kerusuhan Mei 1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan, khususnya di kalangan investor keturunan Cina yang memainkan peran dominan dalam ekonomi Indonesia” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 153). Kedua kalimat ini menempatkan Tionghoa sebagai subjek dengan predikat-predikat “mendominasi” dan “memainkan” yang menegaskan mereka sebagai penentu perekonomian nasional.

Selebihnya didapati posisi Tionghoa sebagai objek, sedangkan subjek dalam kalimat ini adalah pihak-pihak lain yang berkaitan. “VOC mengeluarkan kebijakan membatasi imigran Cina” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92). “VOC menafsirkan ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. ... para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 93). “Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 93). Dari beberapa kalimat dalam narasi Orang-orang Cina Berontak, maka tampak

bahwa sebagai objek, Tionghoa ditempatkan sebagai pihak yang diperlakukan oleh subjek. Tionghoa dibatasi oleh VOC, Tionghoa ditafsir keliru oleh VOC karena termakan kabar burung alias hoaks, Tionghoa digeledah bahkan dibunuh oleh VOC, dan berikutnya Tionghoa dibantu oleh para pemimpin masyarakat setempat. Secara jelas sebagai objek juga tampak dalam kalimat “Apabila tidak memiliki surat izin, maka [Tionghoa] akan ditangkap dan dibuang ke Sailon (Sri Langka) untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau akan dikembalikan ke Cina” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 93). Dalam kalimat ini, Tionghoa menjadi objek yang mendapat perlakuan buruk atau penindasan oleh VOC dengan predikat “ditangkap”, “dibuang”, “dipekerjakan”, dan “dikembalikan” yang semuanya bermaksud sebagai ancaman atau hukuman.

Sebagai objek yang mendapat perlakuan tidak baik juga muncul dalam berbagai narasi setelah kemerdekaan. “Orang-orang Cina di Jawa Barat dan kaum bangsawan yang dipenjarakan di Sumatra Timur dibunuh” (Sardiman & Lestariningsih, 2017b, hlm. 180). Dalam kalimat teks masa revolusi ini, Tionghoa sebagai objek ditempatkan dengan predikat “dibunuh” oleh Belanda yang menjadi subjek. Pada narasi tentang sentimen anti-Cina, juga muncul kalimat “Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif yaitu munculnya golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 72). Hal serupa juga tampil dalam kalimat “Proyek Senen, gedung Toyota Astra, sejumlah toko milik pedagang Tionghoa di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Glodok dan Cempaka Putih, terbakar habis karena aksi tersebut (Abdurakhman

et al., 2018, hlm. 119). Dalam kalimat-kalimat ini, Tionghoa dan segala kepemilikannya ditempatkan sebagai objek yang “dibenci”, “dimusuhi”, “dirusak”, dan “dibakar” oleh subjek yang tidak disebut jelas dan hanya ditulis sebagai “golongan”. Kendati demikian, jika ditelusuri lebih lanjut golongan ini tentu saja muncul dari pihak yang bukan Tionghoa.

Bagian terakhir yaitu kata ganti. Sepanjang teks yang dianalisis, Tionghoa beberapa kali disebut dengan kata ganti “mereka”. “Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis bahkan ada yang menjadi pencuri” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92). Kata ganti “mereka” yang pertama mengacu pada orang-orang Tionghoa yang datang ke Jawa, sedangkan “mereka” yang kedua adalah Tionghoa yang tergolong miskin. Selain dengan kata ganti “mereka”, Tionghoa juga disebut sebagai “gerombolan” dan “kelompok”. “VOC bertindak tegas, orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim ditangkap. Tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 93). “Pada bulan-bulan awal 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 148).

Kata ganti “mereka” biasa diperhadapkan dengan “kami”. Keduanya menciptakan jarak dan memisahkan antara pihak yang disebut sebagai “mereka” dan “kami”. Bagi yang sependapat atau berada dalam pihak yang sama disebut “kami”, sedangkan yang tidak sependapat atau berada di

pihak lain atau berseberangan disebut “mereka”. Dalam konteks buku teks yang dianalisis ini, kata ganti “mereka” paling sering digunakan untuk merujuk pada bangsa Eropa sebagai pihak penjajah. Portugis, VOC, Belanda, Inggris, dan Jepang dalam buku teks kerap diganti dengan sebutan “mereka”. Akan tetapi, kata ganti “mereka” ternyata juga disematkan pada kelompok masyarakat maupun para tokoh yang berada di pihak dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, penggunaan kata ganti “mereka” dalam buku teks ini tidak selalu berarti sebagai pihak lain yang berseberangan. Akan tetapi, pada narasi Orang-orang Cina Berontak, ada kata ganti lain yang justru berpotensi mengarah pada konotasi negatif. Kata ganti “gerombolan” menurut KBBI daring bermakna kelompok atau kawan pengacau (perusuh dan sebagainya). Jika demikian, maka aneh apabila orang-orang Tionghoa yang melakukan perlawanan terhadap VOC sebagai pihak penjajah disebut “gerombolan”. Pada kalimat lain, kata ganti “kelompok” yang ditujukan pada masyarakat Tionghoa memang bermakna netral. Akan tetapi, jika mencermati konteks kalimatnya, penyebutan “kelompok” bisa memberi kesan adanya eksklusivitas terhadap Tionghoa.

Di sisi lain, adahal yang patut dianalisis yakni penggunaan subjek yang tidak jelas dalam narasi-narasi terkait sentimen anti-Cina. Ada dua kalimat yang menunjukkan ketidakjelasan tersebut. “Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif yaitu munculnya golongan yang membenci kalangan Cina” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 72). “Kelompok ini [Tionghoa] menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian Indonesia” (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 148). Subjek yang menjadi pelaku kebencian dan kemarahan terhadap

Tionghoa adalah suatu “golongan” atau “masyarakat”. Subjek “golongan” merujuk pada bagian dari masyarakat, sementara subjek “masyarakat” bisa bermakna luas yakni seluruh anggota masyarakat. Padahal tidak semua anggota masyarakat membenci dan marah terhadap Tionghoa. Ketika disebut sebagai “golongan” juga tidak jelas siapa mereka. Ada upaya penyamaran terhadap subjek dengan menggunakan kata ganti “golongan” yang tidak jelas siapa dan “masyarakat” yang maknanya begitu luas.

Temuan pada elemen sintaksis atau tata kalimat tampak menonjol dalam hal koherensi, pengingkaran, bentuk kalimat, dan kata ganti. Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata atau kalimat dalam teks (Eriyanto, 2001). Koherensi dapat memberi efek positif maupun negatif, lebih baik atau buruk. Koherensi positif ditunjukkan dalam kalimat-kalimat yang membentuk pandangan bahwa keberadaan Tionghoa di Nusantara sudah lama, penghargaan Tionghoa terhadap lokalitas, dan pernikahan Tionghoa dengan penduduk setempat. Koherensi negatif tampak dalam kalimat-kalimat yang bermakna pendatang Tionghoa termasuk golongan miskin dan berpotensi menjadi pelaku kriminal, sekadar bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia, perannya disamarkan atau ditutupi oleh peran kaum bumiputera, stereotipe economic animal, korban konflik, dan sentimen anti-Cina. Pengingkaran merupakan strategi wacana yang menunjukkan ketidaktegasan atau sikap tidak eksplisit, seolah menerima namun ternyata tidak setuju atau mengingkari (Eriyanto, 2001, hlm. 249). Sikap ini tampak dalam topik tentang peran pers Tionghoa yang pada akhirnya lebih menonjolkan peran pers bumiputra ketimbang Tionghoa.

Bentuk kalimat terkait dengan penempatan subjek maupun objek. Struktur kalimat aktif atau pasif akan menentukan subjek atau objek yang dibicarakan atau diekspresikan secara eksplisit atau implisit dalam teks (Eriyanto, 2001, hlm. 251–252). Tionghoa sebagai subjek muncul dalam kalimat-kalimat yang membangun pandangan bahwa Tionghoa adalah pendatang dan mendominasi perekonomian. Tionghoa sebagai objek tampil dalam kalimat-kalimat yang bermakna Tionghoa mengalami perlakuan buruk dari VOC, korban pembantaian oleh VOC, menjadi korban saat revolusi meletus, dibenci akibat sentimen anti-Cina, dan menjadi korban kerusuhan. Dalam kasus Tionghoa dikenai sebagai objek, maka para pelaku atau subjek ditempati oleh pihak lain. Pada masa kolonialisme, subjek ini ditempati oleh VOC maupun Belanda. Sementara setelah kemerdekaan, subjek ini disebut sebagai “masyarakat” dan “golongan” tertentu sehingga tidak jelas yang dimaksud.

Terakhir, kata ganti dimaknai sebagai elemen untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif yang menjadi alat untuk menunjukkan posisi seseorang dalam wacana (Eriyanto, 2001, hlm. 253). Tionghoa di Indonesia selama ini dilekatkan pada label pendatang dan perannya sebagai pelaku utama suatu peristiwa kerap dikecilkan. Beberapa kajian buku teks di negara lain mengungkap fenomena serupa tentang penyingkiran kelompok minoritas sebagai pelaku sejarah dalam buku teks. Penelitian Woynshner & Schocker (2015) menunjukkan perempuan kulit hitam terpinggirkan dalam buku teks yang beredar secara umum di Amerika Serikat. Bahkan dalam buku teks yang secara khusus digunakan oleh masyarakat kulit hitam, mereka tetap tidak mendapat tempat yang adil. Selain kelompok kulit hitam dan perempuan, imigran atau

pendatang juga terpinggirkan dalam buku teks di Amerika Serikat. Penelitian Hilburn & Fitchett (2012) mengkaji kelompok imigran di negara bagian North Carolina yang direpresentasikan dalam buku teks sejarah sebagai *the other* dengan informasi yang tidak akurat atau samar. Padahal sejak dulu North Carolina menjadi pintu masuk bagi imigran, maka keberadaan dan peran mereka juga turut membentuk sejarah di negara bagian tersebut. Terbukti manipulasi semacam ini memang banyak terjadi dalam penulisan buku teks sejarah di berbagai negara.

Sintaksis yang berbicara tentang makna susunan kalimat ini (Eriyanto, 2001), memberi arah makin jelas bagi representasi Tionghoa dalam buku teks Sejarah Indonesia. Temuan menunjukkan Tionghoa ditampilkan sebatas konten tanpa dibarengi wacana konstruktif yang mengarah pada penguatan kebinekaan untuk integrasi bangsa. Fenomena ini sejalan pemikiran Segall et al. (2018, hlm. 293) yang menyebut ilusi inklusi (*illusion of inclusion*). Upaya mengakomodasi Tionghoa – yang pernah mendapat “pengalaman” ditempatkan sebagai subaltern – dalam buku teks Sejarah Indonesia pada saat yang sama berpotensi sekaligus meminggirkannya. Representasi kelompok marginal dalam buku teks sejarah bukan sekadar upaya inklusi yang sederhana namun juga harus memiliki posisi dan makna secara pedagogis. Dalam konteks kepentingan pendidikan, buku teks dikembangkan dengan memperhatikan aspek demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif sebagaimana UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003) serta sejalan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 (Kemendikbud RI, 2016), termasuk Bhinneka Tunggal Ika. Buku teks tidak hanya fokus pada ranah kognitif, namun juga afektif dan psikomotorik sebagai sarana pendidikan

karakter (E. Supriatna, 2013). Dalam representasi Tionghoa ini, internalisasi nilai kebinekaan terancam dapat tereduksi dari buku teks Sejarah Indonesia.

Sejarah nasional disusun secara standar dengan memusatkan perhatian pada kontribusi tokoh-tokoh elite dalam membentuk suatu peristiwa sejarah. Hal ini secara kritis telah mendistorsi peran kelompok lain dan aktivitas kolektif masyarakat serta konteks lokalitas. Mereka ini sebagaimana kegundahan Spivak (Gandhi, 2001), tergolong subaltern yang menempati kelas non-hegemonik (Morton, 2008) yang berbeda peran dengan elite. Dalam konteks inilah Tionghoa pernah terpinggirkan dan menjadi subaltern dalam historiografi sejarah nasional. Saat peluang terbuka untuk merepresentasikannya kembali, upaya tersebut belum optimal karena bayang-bayang pengalaman historis yang pernah ada.

Terkait dengan ilusi inklusi atau inklusivitas semu bukanlah fenomena yang sama sekali baru dalam buku teks. Ilusi inklusi terjadi dalam representasi kelompok minoritas dalam buku teks di Amerika Serikat. Penelitian dengan menggunakan paradigma teori *AsianCrit* mengungkap orang Asia-Amerika mengalami ilusi inklusi dan terpinggirkan dalam pengetahuan sejarah resmi di sekolah (An, 2016). Penelitian Rodríguez (2020) dalam kasus lain, namun senada menggunakan teori *AsianCrit*, dijumpai guru-guru sejarah yang memilih bersikap *rhetoric of silent* saat membahas tentang episode sejarah yang kontroversial. Peristiwa penahanan orang-orang Jepang-Amerika ketika Perang Dunia II di Amerika Serikat diajarkan sambil lalu tanpa menjelaskan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan pemerintah saat itu. Rodríguez dalam penelitiannya itu menawarkan pedagogi of discomfort untuk mengkaji episode

sejarah yang kontroversial. Kendati prosesnya tidak nyaman, namun mempersiapkan generasi muda untuk memiliki sikap tanggung jawab dan solutif dalam menghadapi masa depan, bukan sekadar berempati tanpa makna. Pemikiran ini cukup relevan diterapkan pada materi tentang Tionghoa yang sensitif, seperti masalah Pao An Tui, mengakui Tionghoa kerap ditempatkan sebagai kambing hitam dalam kerusuhan yang sifatnya politis, dan praktik diskriminasi lainnya. Penelitian Rodríguez juga menegaskan pentingnya peran guru dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Tidak hanya Asia-Amerika, kecenderungan serupa dialami orang Latin dan Afrika-Amerika (Cruz, 2002).

3. Stilistika

Stilistika berkaitan dengan leksikon atau pemilihan kata yang dipakai dalam teks. Dalam analisis teks-teks yang merepresentasikan Tionghoa ini, elemen leksikon paling kentara dalam memilih istilah yang merujuk pada subjek utama yang dikaji. Hal pertama yakni bilamana digunakan istilah “Cina”, “orang-orang Cina” “keturunan Cina”, dan “Tionghoa”. Sejak awal teks yang berbicara tentang kedatangan Tionghoa digunakan istilah “Cina”. Dalam narasi mengenai Proto Melayu disebut bahwa “Mereka [Proto Melayu] diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan (Yunan) mereka bermigrasi ke Indocina dan Siam kemudian ke Kepulauan Indonesia” (Gunawan et al., 2017, hlm. 35). Dalam narasi ini, istilah Cina merujuk pada wilayah daratan Tiongkok sekaligus memberi gambaran bahwa Proto Melayu memiliki ciri fisik sebagaimana orang Tionghoa. Istilah Cina yang juga merujuk pada wilayah Tiongkok juga digunakan

dalam narasi zaman Hindu-Buddha. Antara lain terkait jalinan hubungan dagang dijelaskan “Interaksi itu terjalin sejalan dengan meluasnya hubungan perdagangan antara India dan Cina. Hubungan itu yang mendorong pedagang-pedagang India dan Cina datang ke kepulauan Indonesia” (Gunawan et al., 2017, hlm. 78). Narasi menggunakan istilah Cina yang merujuk pada negeri atau kekaisaran Tiongkok dan para pedagang Tionghoa. Selanjutnya juga digunakan istilah “sumber Cina” atau “berita Cina” maksudnya sumber sejarah yang berasal dari catatan perjalanan orang-orang Tionghoa yang datang ke Nusantara. Istilah Cina juga digunakan dalam narasi zaman Islam yang merujuk pada negara Tiongkok dan bangsa Tionghoa. Pembicaraan masih berkuat pada soal hubungan dagang dengan kekaisaran Tiongkok, kedatangan para pedagang Tionghoa, dan mulai disinggung tentang permukiman penduduk Tionghoa. “Demikian pula Kuta dan permukiman penduduk Cina, Portugis, Arab, dan bangsa-bangsa lainnya yang berada di seberang Kuta juga dibakar” (Gunawan et al., 2017, hlm. 197).

Narasi-narasi pada topik era kolonialisme dan imperialisme selain menggunakan istilah Cina juga kerap menyebut “orang-orang Cina”. Episode perlawanan Tionghoa terhadap VOC digunakan kalimat “Orang-orang Cina Berontak”. Keseluruhan isi narasi secara konsisten menggunakan istilah “orang-orang Cina” yang merujuk pada para pendatang Tionghoa yang telah menetap di Nusantara. Mereka sebenarnya sudah terhitung lama bermukim di Batavia bahkan menikah dengan penduduk setempat. Dari narasi ini juga tampak bahwa di sepanjang pantai utara Jawa sudah didapati masyarakat Tionghoa yang menetap. Mereka bersekutu dengan penduduk Jawa setempat untuk melawan VOC (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm.

92–93). Penggunaan istilah “orang-orang Cina” mengacu pada penduduk Tionghoa. Dalam narasi tersebut memang lebih difokuskan pembicaraan pada masyarakat Tionghoa yang tinggal menetap di Nusantara dan tidak disinggung lagi tentang relasi dengan negara Tiongkok.

Pada narasi pergerakan nasional, secara konsisten istilah “Tionghoa” dipakai sepanjang narasi tentang peran pers Tionghoa. “Pada abad itu penerbit Tionghoa mulai bermunculan. Para penerbit Tionghoa itulah yang menjadikan pertumbuhan surat kabar berkembang pesat” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 149). Penyebutan “orang-orang Cina” muncul lagi pada narasi zaman Jepang dan “golongan penduduk Cina” dalam narasi keanggotaan PPKI. Akan tetapi, istilah “Tionghoa” kembali digunakan saat membicarakan tentang Djiau Kie Siong dalam peristiwa Rengasdengklok (Sardiman & Lestariningsih, 2017b, hlm. 85). Gonta-ganti kosakata ini terjadi dalam dua jilid kelas XI yang ditulis oleh penulis yang sama. Semuanya mengacu pada penduduk Tionghoa yang telah menetap di Indonesia. Artinya semua mengacu pada kelompok masyarakat yang sama dan tidak ada kaitan dengan negara Tiongkok. Narasi-narasi yang tampil pada dua jilid ini juga lebih banyak membicarakan tentang kontribusi dan peran Tionghoa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa.

Kosakata kembali berubah dalam narasi-narasi tentang Tionghoa pasca-kemerdekaan. Narasi pada topik-topik ini memang lebih berkuat pada pembicaraan mengenai Tionghoa sebagai penopang perekonomian Indonesia dan sentimen anti-Cina. Dalam narasi-narasi ini digunakan istilah “orang-orang Cina” untuk merujuk mereka yang dibunuh oleh pasukan Belanda saat agresi militer. Selanjutnya disebut tentang masalah anti-Cina yang di dalamnya digunakan

penyebutan etnis Cina maupun keturunan Cina. Dalam konteks ini seakan masyarakat Tionghoa di Indonesia kembali dihubungkan dengan Cina sebagai negara atau Tiongkok. Bukan lagi orang-orang dari atau asal negara Cina yang telah menetap di Indonesia, namun memang orang Cina, etnis Cina, atau setidaknya keturunan (memiliki darah) Cina. Dengan pemilihan kosakata ini seakan keindonesiaan orang-orang Tionghoa diragukan atau dipertanyakan. Istilah “Tionghoa” kembali digunakan saat menyebut para pedagang Tionghoa dalam peristiwa Malari (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 119). “Tionghoa” juga digunakan dalam narasi masa Reformasi dengan kalimat “pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa” pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 164). Untuk yang terakhir ini ada penekanan bahwa Tionghoa adalah mereka yang “keturunan” artinya peranakan atau hasil dari pernikahan dengan penduduk setempat dan “minoritas”.

Selain leksikon yang beragam untuk memaknai realitas masyarakat Tionghoa di Indonesia, ada beberapa kosakata yang menunjukkan pemaknaan tertentu. Narasi tentang perlawanan Tionghoa terhadap VOC disebut sebagai “pemberontakan”. Hal ini tampak jelas dalam judul peristiwa yang digunakan yakni “Orang-orang Cina Berontak” (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92–93). Hal ini membuat narasi tampil beda apabila dibandingkan dengan peristiwa perlawanan rakyat lainnya terhadap VOC yang disebut sebagai “perlawanan”. Misalnya perlawanan Banten, perlawanan Gowa, atau Maluku angkat senjata, Rakyat Riau angkat senjata, dan sejenisnya. Ini menjadi satu-satunya peristiwa melawan hegemoni penjajah dalam buku teks yang disebut sebagai pemberontakan. Masih dalam narasi

ini, alih-alih disebut sebagai pejuang atau pasukan, Tionghoa yang menjadi pelaku perlawanan terhadap VOC diistilahkan sebagai “gerombolan” yang artinya adalah kawan pengacau atau perusuh (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 93).

Elemen stilistika tentang pemilihan kata menjadi temuan yang paling kentara. Pilihan kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu (Eriyanto, 2001, hlm. 255). Teks bergonta-ganti menggunakan istilah Cina dan Tionghoa. Istilah Cina lebih dominan digunakan ketimbang Tionghoa yang muncul dalam narasi pergerakan nasional, Rengasdengklok, Malari, dan pemulihan hak Tionghoa pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Selain tidak konsisten, penulis tampaknya sekadar mengikuti penulisan berdasarkan sumber yang mereka gunakan. Padahal kini telah ada aturan yang mengaturnya. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2014 yang memulihkan kembali sebutan Republik Rakyat Tiongkok untuk menyebut negara Republik Rakyat Cina dan Tionghoa untuk menyebut orang atau komunitas Cina di Indonesia. Buku teks terbitan negara semestinya tunduk pada ketentuan ini.

Terlepas itu, secara linguistik, Tionghoa dan Tiongkok merupakan istilah bahasa Indonesia yang khas. Hal ini menguatkan pandangan bahwa Tionghoa sudah menjadi bagian sejak sebelum konsensus kebangsaan disepakati dan negara Indonesia lahir. Tionghoa identik dengan kelompok peranakan atau mereka yang lahir, hidup, dan mati di Indonesia. Mereka tidak lagi mengenal dengan baik negara Tiongkok. Populernya istilah Tionghoa bermula dari Sin Po yang memelopori kata “Indonesia” menggantikan “Hindia Belanda” dan menolak istilah “inlander” yang

menghina. Sebagai timbal balik, berbagai penerbitan pers lain mengubah sebutan “Cina” menjadi “Tionghoa”. Istilah Cina semula memang tidak berkonotasi buruk (Lembong, 2011). Akan tetapi, pada masa kolonial Belanda di Indonesia – dalam sentimen yang emosional – istilah Cina sering diucapkan dengan aksen yang penuh rasa kebencian. Orde Baru meneruskannya lewat Seminar Angkatan Darat II tanggal 25-31 Agustus 1966 di Bandung yang mengusulkan istilah Cina kembali digunakan. Kini kendati telah ada aturan baru, latar sejarah ini terus melekat sebagai kognisi sosial bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Selain masalah leksikon untuk memaknai realitas masyarakat Tionghoa, dalam narasi Orang-orang Cina Berontak, muncul kosakata “berontak” dan “gerombolan”. Selain kesan ekstrem dan radikal, peristiwa ini seolah dapat dianalogikan dengan pemberontakan PKI Madiun atau pemberontakan DI/TII yang terjadi pada era kemerdekaan. Bahkan istilah “gerombolan” pada tahun 1950-an biasa disematkan pada kelompok DI/TII yang melakukan pelarian ke hutan-hutan dan kerap mengacaukan keamanan umum. Artinya ketika perlawanan terhadap VOC yang notabene adalah penjajah disebut sebagai pemberontakan, maka sebenarnya bagaimana Tionghoa ditempatkan dalam rumah kebangsaan Indonesia? Apakah sebagai bagian seutuhnya dari bangsa Indonesia atau pihak yang berada di ujung oposisi biner yang berbeda dan bahkan dianggap sebagai *the other*? Pemikiran Indonesiasentris dalam narasi ini mengalami kegamangan.

4. Retorik

Aspek retorik meliputi grafis maupun ekspresi dan metafora. Grafis dapat sebagai bagian tulisan yang dibuat berbeda dibanding tulisan lainnya dengan pemakaian huruf

tebal, miring, garis bawah, atau ukuran lebih besar dengan harapan khalayak menaruh perhatian pada bagian tersebut. Grafis dalam konteks ini mirip dengan ekspresi dalam wacana pembicaraan lisan. Temuan menunjukkan perbedaan pada bagian tulisan tertentu tidak berkaitan dengan ekspresi tentang Tionghoa, namun sebagai gaya selingkung buku teks. Penggunaan metafora juga tidak dijumpai. Teks disampaikan secara lugas dengan gaya naratif atau penceritaan secara kronologis tentang suatu peristiwa sejarah agar pembaca memperoleh pengetahuan, wawasan, dan manfaat dari teks. Artinya teks disajikan sebagaimana umumnya buku teks sejarah sebagai buku untuk kepentingan pendidikan.

Aspek retorik dalam buku teks ini hanya dijumpai pada elemen grafis dalam bentuk foto, gambar, atau ilustrasi untuk mendukung gagasan yang ingin ditonjolkan. Pertama, relief terakota yang menggambarkan paras wajah orang Tionghoa pada narasi masa Hindu-Buddha (Gunawan et al., 2017, hlm. 155). Kedua, kapal atau jung dari Tiongkok muncul pada teks masa Islam dan kolonial (Gunawan et al., 2017, hlm. 176; Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. viii). Gambar ini diberi keterangan yang intinya menguatkan kedatangan orang-orang Tionghoa ke Nusantara dengan menunggang kapal-kapal dagang tersebut. Ketiga, Laksamana Cheng Ho muncul sebagai penguat narasi tentang berharganya catatan-catatan perjalanan atau berita Cina yang ditulis para pendatang Tionghoa ke Nusantara pada masa Islam (Gunawan et al., 2017, hlm. 178). Keempat, rumah Djiau Kie Siong dalam narasi tentang peristiwa Rengasdengklok pada narasi Proklamasi Kemerdekaan RI (Sardiman & Lestariningsih, 2017b, hlm. 85).



Sumber: <https://www.disparbud.jabarprov.co.id>, 4-1-2016

Gambar 6.7 Rumah Djiau Kie Siong

Gambar 11 Tampilan gambar rumah Djiau Kie Siong dalam buku teks kelas XI SMA

(Sumber: Tangkap layar file buku digital atau e-book)

Retorik, yang terkait dengan bagaimana penekanan dilakukan, meliputi grafis, ekspresi, dan metafora (Eriyanto, 2001, hlm. 257). Temuan retorik terbatas karena representasi Tionghoa yang dinarasikan dalam buku teks juga terbatas. Retorik berfungsi memberi penekanan yang memperkuat praktik wacana. Akan tetapi, sebenarnya fokus utama analisis adalah teks atau wacana tulis sebagai perwujudan bahasa (Berger, 1997). Untuk itu, temuan elemen retorik dalam bentuk grafis tidak memberi pengaruh besar dalam proses analisis.



BAB VI

ANALISIS DIMENSI KOGNISI SOSIAL DAN KONTEKS SOSIAL TENTANG TIONGHOA DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA

Dalam kerangka Van Dijk, perhatian diberikan pada bagaimana suatu teks diproduksi melalui suatu analisis yang dinamai sebagai kognisi sosial (Eriyanto, 2001, hlm. 259). Teks merupakan struktur mikro sementara masyarakat merupakan struktur sosial yang makro. Dua kutub yang sangat besar jaraknya ini oleh Van Dijk dihubungkan dengan model kognisi sosial yang menggambarkan representasi mental dari penulis teks (Dijk, 1994, hlm. 107). Kognisi sosial merupakan variabel penengah karena penulis teks merupakan bagian dari masyarakat yang senantiasa melakukan “*socially shared knowledge, beliefs, attitudes and ideologies*” yang bertindak sebagai *interface* yang diperlukan dalam interaksi antara teks dengan masyarakat (Dijk, 1994, hlm. 107). Kognisi sosial merupakan sistem representasi sosial yang dimiliki bersama dalam masyarakat mencakup interpretasi, interaksi, dan wacana sosial (Dijk, 1990). Dalam

dimensi kognisi sosial ada dua hal utama yang dianalisis yakni skema atau model dan memori. Model adalah struktur mental dalam melihat suatu persoalan sementara memori adalah aktivitas berpikir dan pengetahuan tentang sesuatu (Eriyanto, 2001). Penulisan buku teks sejarah terkait erat dengan koridor kurikulum yang diacu, *official history*, dan aturan penulisan sebagai model. Selain juga ditentukan oleh memori dalam diri penulis.

Dalam kognisi sosial ditekankan pendekatan kognitif yang didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak memiliki makna, namun makna diberikan oleh pemakai bahasa atau tepatnya kesadaran mental dari pemakai bahasa. Untuk itu dibutuhkan analisis terhadap representasi kognisi dan strategi penulis dalam memproduksi suatu teks. Pada dasarnya setiap teks dihasilkan lewat kesadaran, pengetahuan, pandangan, kepercayaan, stereotipe, atau prasangka tertentu atas suatu peristiwa (Eriyanto, 2001, hlm. 260). Penulis buku teks tidak dianggap sebagai individu yang netral, namun membawa beragam nilai, pengetahuan, pandangan, pengalaman, dan pengaruh ideologi yang didapatkan dari kehidupannya.

Tabel 6. Temuan pada Dimensi Kognisi Sosial

Aspek	Temuan
Model	Penulisan buku teks Sejarah Indonesia yang diteliti ini dihadapkan pada <i>context model</i> sebagai buku untuk kepentingan pendidikan sehingga terikat terutama pada dinamika perubahan <i>official history</i> selain juga kurikulum yang berlaku yakni Kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh pemerintah. Aspek model merupakan standar baku yang menjadi determinan dari dimensi kognisi sosial dalam produksi buku teks ini.

Aspek	Temuan
Memori	Sebagian dari penulis buku teks ini terlibat dalam penulisan IDAS pada era Reformasi yang menjadi alternatif narasi sejarah resmi pasca-Orde Baru yang lebih mewadahi keberagaman perspektif. Akan tetapi, secara keseluruhan, para penulis buku teks juga menyimpan memori semantik dan episodik terhadap Orde Baru dengan narasi eksklusif dan tafsir tunggal sejarah resminya yang berakar. Dengan demikian, dalam produksi buku teks ini sulit untuk dihindari tampilnya pergulatan kognisi sosial warisan Orde Baru dengan kognisi sosial yang baru.

Sumber: Data yang diolah peneliti (2022)

Sebagai bagian dari masyarakat, pemikiran dan penafsiran yang membentuk kognisi sosial penulis banyak ditentukan oleh nilai-nilai sosial masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, diperlukan pula analisis pada dimensi konteks sosial. Dimensi kognisi sosial tidak lepas dari konteks buku teks diproduksi dan representasi mental penulisnya. Hal ini sejalan dengan teori Bandura (1986) bahwa fungsi manusia dipandang sebagai serangkaian interaksi timbal balik antara faktor-faktor personal, perilaku-perilaku, dan peristiwa di sekitarnya. Konteks pengalaman belajar siswa juga membawa kognisi sosial yang berasal dari konsumsi teks. Kognisi sosial menekankan pandangan bahwa sebagian besar pembelajaran terjadi dalam lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, pergaulan, hingga masyarakat yang lebih luas lagi (Schunk, 2012).

Terkait dengan representasi Tionghoa dalam buku teks Sejarah Indonesia ini, maka perlu dipahami pandangan mengenai Tionghoa yang diproduksi dalam masyarakat. Ada dua poin penting dalam dimensi konteks sosial yang digariskan Van Dijk yakni praktik kekuasaan (*power*) dan akses (*access*). Dalam konteks penulisan buku teks sejarah di suatu negara, maka kekuasaan sebagai kontrol atas kelompok

(masyarakat) ada di tangan pemerintah yang berkuasa. Kontrol bisa secara langsung bahkan fisik, maupun tidak langsung yang bersifat memaksa. Akses pemerintah untuk mengontrol dan memengaruhi kesadaran khalayak dilakukan melalui kebijakan atau aturan-aturan tertentu.

Tabel 7. Temuan pada Dimensi Konteks Sosial

Aspek	Temuan
Praktik kekuasaan	Secara historis, sejak era kolonialisme hingga kemerdekaan di bawah Demokrasi Liberal dan Terpimpin, Orde Baru, maupun Reformasi, pemerintah yang berkuasa menentukan sikap dan garis politik terhadap Tionghoa.
Akses	Sarana akses melalui perumusan <i>official history</i> dan pemanfaatan saluran pendidikan sejarah yang tercermin dalam ideologi kurikulum dan buku teks dilakukan untuk membentuk pandangan masyarakat.

Sumber: Data yang diolah peneliti (2022)

Oleh karena itu, dimensi konteks sosial memberi kontribusi dalam pembentukan kognisi sosial siswa. Konteks sosial merupakan situasi sosial yang menjadi kerangka kerja kognisi sosial (Dijk, 1990). Untuk itu, secara intertekstual diteliti bagaimana wacana diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat (Eriyanto, 2001, hlm. 271). Siswa dapat berperan dalam mengokohkan kognisi sosial masyarakat yang telah ada atau menyuarkan kognisi sosial yang baru dalam masyarakat. Penulis buku teks maupun siswa pengguna buku teks merupakan bagian dari masyarakat, maka pemikiran dan penafsirannya banyak ditentukan oleh nilai-nilai sosial masyarakat dan lingkungannya. Dimensi konteks sosial fokus pada wacana mengenai Tionghoa yang diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Ada dua poin penting menurut Van Dijk yakni praktik kekuasaan (*power*) dan akses. Kelompok yang lebih berkuasa mempunyai kesempatan akses yang lebih besar sehingga memiliki kesempatan yang

lebih besar pula untuk memengaruhi khalayak (Eriyanto, 2001).

A. Analisis Dimensi Kognisi Sosial

1. Skema atau Model

Suatu peristiwa dipahami dan dimengerti atas dasar skema yang oleh Van Dijk disebut sebagai model. Atas dasar model, penulis buku teks ini menggunakan struktur mentalnya untuk menyeleksi dan memproses informasi. Dengan demikian, model menjadi panduan, koridor, atau standar yang menolong dalam mengonstruksi dan menjelaskan realitas untuk dipahami dan dimaknai. Penulisan buku teks sejarah sebenarnya tidak lepas dari dua macam model yang disampaikan Van Dijk. *Event* model digunakan oleh penulis untuk memahami dan menafsirkan suatu peristiwa sejarah. Hal ini bersifat personal, seseorang dapat menggunakan pandangan dan keyakinannya untuk menilai suatu peristiwa sejarah. Akan tetapi, dalam penulisan buku teks sejarah, penulis terikat dengan *context* model. Pengetahuan dan pandangan penulis terhadap suatu peristiwa sejarah harus disampaikan menurut konteks situasi tertentu yakni sebagai buku teks pelajaran yang digunakan di sekolah untuk kepentingan pendidikan.

Dalam *context* model, teks ditulis menurut acuan kurikulum yang berlaku. Buku teks Sejarah Indonesia yang dianalisis mengacu pada Kurikulum 2013. Dalam standar isi mata pelajaran Sejarah Indonesia menurut Kurikulum 2013 tidak didapati petunjuk apalagi yang menetapkan tentang perlunya representasi *Tionghoa* dalam pembelajaran sejarah. Hal ini dikuatkan dengan kenyataan bahwa representasi *Tionghoa* tidak serta merta dijumpai dalam semua buku

teks Sejarah Indonesia yang tersedia di masyarakat. Akan tetapi, dalam buku teks yang diterbitkan oleh negara melalui Kemendikbud RI, didapati adanya representasi Tionghoa. Hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku teks sejarah dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya, kecuali pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Dengan demikian, kendati Kurikulum 2013 tidak mengatur secara khusus tentang representasi Tionghoa, namun menjadi kurikulum pertama di era Reformasi yang memuat tentang Tionghoa dalam buku teks yang disusunnya. Dengan demikian, terkait aspek model, Kurikulum 2013 berperan dalam menentukan struktur buku teks terutama dalam penentuan topik-topik materi dan distribusinya berdasarkan jenjang kelas. Representasi Tionghoa diketahui menjadi bagian dari topik-topik itu dan bukan berdiri sendiri sebagai topik khusus. Tionghoa tampil hampir pada setiap pembabakan zaman, namun dengan porsi yang berbeda-beda.

Didapatinya representasi Tionghoa dalam buku teks kendati tidak disyaratkan oleh kurikulum, menandakan adanya faktor lain yang lebih menentukan. Untuk itu, faktor utama penentu munculnya representasi Tionghoa dalam buku teks Sejarah Indonesia lebih didasarkan pada perubahan official history yang mengikuti jiwa zamannya. Sejak Kurikulum 1975, penulisan buku teks didasarkan pada buku babon SNI. Pada tahun 2008, seiring dengan bergulirnya Reformasi, SNI mengalami revisi dalam edisi pemuakhiran. Selanjutnya pada tahun 2012, muncul buku alternatif yang juga dapat menjadi acuan bagi sejarah nasional yakni IDAS. Perubahan ini seiring dengan makin diterimanya Tionghoa secara lebih baik di mata negara setelah sebelumnya mengalami kebijakan diskriminatif dan marginalisasi di tengah masyarakat. Berbagai aturan baru yang dikeluarkan

pemerintah pada masa Reformasi menjadi indikator penerimaan terhadap Tionghoa setidaknya di tataran kebijakan negara.

Dalam kedua buku inilah, episode sejarah mengenai Tionghoa ditampilkan. Seperti peristiwa perlawanan Tionghoa terhadap VOC dibantu pasukan Jawa, huru-hara Mei 1998, hingga peran Tionghoa dan kebijakan negara. Hanya saja masalah hilangnya tokoh Tionghoa dalam narasi BPUPK sejak era Orde Baru masih belum dikoreksi. Kedua buku ini, SNI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS, diinisiasi oleh negara. Buku teks Sejarah Indonesia dalam Kurikulum 2013 yang dianalisis ini juga diterbitkan oleh negara. Kemendikbud RI melalui direktorat maupun unit-unit terkait di bawahnya senantiasa terlibat dalam penulisan buku-buku tersebut. Dengan demikian, perubahan pandangan negara terhadap Tionghoa, yang terus bergulir sejak Reformasi, memberi pengaruh kuat bagi hadirnya Tionghoa dalam buku teks Sejarah Indonesia.

Buku SNI Edisi Pemutakhiran diterbitkan melalui PT Balai Pustaka. Editor umum untuk SNI Edisi Pemutakhiran adalah R. P. Soejono dan R. Z. Leirissa. Untuk setiap jilid direvisi oleh beberapa penulis, termasuk sebagian penulis SNI edisi lama. Sementara IDAS diterbitkan oleh PT Ichtiar Baru van Hoeve bekerja sama dengan Kemendikbud RI dengan melibatkan seratusan penulis. Beberapa nama penulis IDAS juga terlibat dalam SNI Edisi Pemutakhiran. Demikian pula beberapa penulis dan penelaah buku teks Sejarah Indonesia ternyata berperan aktif pula dalam penulisan buku IDAS. Restu Gunawan, penulis buku teks kelas X, menjadi redaksi pelaksana penulisan IDAS dan turut menulis pada Jilid 4, 5, dan 8. Susanto Zuhdi, penulis buku teks kelas XII, menjadi editor pada Jilid 8 dan turut menulis pada Jilid 6 dan 8.

Mohammad Iskandar, penelaah, menjadi salah satu penulis pada Jilid 6. Hariyono, penelaah, turut menjadi penulis pada Jilid 7. Nama-nama lainnya memang diketahui tidak turut serta dalam penulisan IDAS, namun tidak asing pula dalam bidang penulisan buku teks sejarah di Indonesia.

Didapatinya beberapa pelaku perbukuan yang sama membuat tidak menutup kemungkinan gagasan-gagasan baru dalam IDAS turut mewarnai penulisan buku teks Sejarah Indonesia. Apalagi diketahui bahwa IDAS lebih dulu terbit pada 2012, sementara buku teks Sejarah Indonesia yang dianalisis ini terbit pada tahun 2017-2018. Penulisan IDAS mengusung perubahan pandangan historiografi yang modern. Selain itu, IDAS lahir dengan semangat baru negara dan para penulis untuk merekonstruksi ulang sejarah. Sebelumnya sejarah pada masa Orde Baru lewat SNI merupakan sejarah versi pihak penguasa. Dari aspek pendidikan, IDAS terbit bersamaan dengan kebangkitan kesadaran akan pentingnya pembangunan karakter bangsa. Cita-cita yang sama ini juga diusung oleh Kurikulum 2013. Dengan demikian, gayung bersambut antara gagasan IDAS dengan penulisan buku teks Sejarah Indonesia dalam Kurikulum 2013.

Adanya kesadaran baru tersebut diungkap dalam kata pengantar buku teks Sejarah Indonesia.

Dalam K 13 ini diharapkan siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga mampu melakukan penulisan dan mendiskripsikan setiap peristiwa sejarah yang terjadi. Selain itu, siswa diharapkan dapat mengaitkan berbagai peristiwa di daerahnya dengan peristiwa yang terjadi tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu kemampuan melakukan analisis berbagai peristiwa sejarah sangat diperlukan. Untuk itu siswa diwajibkan selain membaca buku ini, juga harus mencari sumber-

sumber rujukan lain yang relevan. Dengan mempelajari sejarah, diharapkan siswa bisa mengambil nilai-nilai setiap peristiwa sejarah yang terjadi untuk memperkuat rasa cinta tanah air, bangga dan meningkatkan nasionalisme (Gunawan et al., 2017, hlm. iii).

Dalam pengantar pada jilid yang lain dikatakan bahwa buku teks Sejarah Indonesia menurut Kurikulum 2013 disusun dengan pendekatan regresif yang populer. Selain menggali sumber belajar lain yang tersedia di lingkungannya, siswa juga diajak untuk melihat sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mengamati kondisi sosial-budaya maupuninggalan sejarah di lingkungan sekitar dan menghubungkannya dengan peristiwa masa lalu. Harapannya siswa dapat berpikir plural-kausal yang melihat suatu peristiwa dari banyak hal bukan mono-kausal. Siswa dapat terampil menyajikan pengetahuan sejarah secara konkret dan abstrak serta terbentuk pola pikir sadar sejarah. Untuk itu peran aktif guru untuk memotivasi dan meningkatkan keterlibatan siswa untuk aktif dalam pembelajaran sangat penting (Abdurakhman et al., 2018, hlm. iii; Sardiman & Lestariningsih, 2017b, hlm. iii, 2017a, hlm. iii).

Di sisi lain, berdasarkan hasil analisis, setidaknya ada dua hal utama sebagai kebaruan yang diusung buku teks Sejarah Indonesia SMA menurut Kurikulum 2013 ini. *Pertama*, perubahan pandangan yang tampak kuat tentang gagasan Indonesiasentris yang diharapkan dapat menghasilkan karya buku teks yang inklusif. Atas dasar pandangan itulah, representasi Tionghoa muncul dalam buku teks ini. Sebagaimana juga munculnya materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Papua yang dalam berbagai buku teks sejarah menurut kurikulum sebelumnya tidak didapati. Dalam buku teks ini dipaparkan kerajaan-kerajaan Islam di

Papua yakni Kerajaan Waigeo, Misool, Salawati, Sailolof, Fatagar, Rumbati (meliputi Atiati, Sekar, Patipi, Arguni, dan Wertuar), Kowiai (Namatota), Aiduma, dan Kaimana (Gunawan et al., 2017, hlm. 229–231). Termasuk kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara yang juga jarang dibahas.

Kedua, buku teks berusaha menyesuaikan diri dengan penemuan fakta-fakta sejarah terbaru, tinjauan akademis terakhir, dan perkembangan informasi di tengah keterbukaan dewasa ini. Di antaranya dengan memasukkan teori *Out of Africa* dan *Out of Taiwan* dalam mengkaji tentang asal-usul nenek moyang Indonesia (Gunawan et al., 2017, hlm. 40–44), menyinggung peran Tionghoa dalam penyebaran Islam dengan membahas tentang pelayaran Laksamana Cheng Ho (Gunawan et al., 2017, hlm. 178), mengkaji peran Tionghoa dalam perlawanan terhadap penjajah dan pergerakan nasional khususnya pers (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92–93, 186), hingga memasukkan berbagai teori tentang Gerakan 30 September 1965 dan tidak menggiring pembaca pada kebenaran satu teori saja (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 16–18).

Dengan demikian temuan menunjukkan bahwa penulisan buku teks Sejarah Indonesia ini terikat oleh context model buku teks sebagai karya pendidikan. Arus perubahan official history yang diwujudkan dalam SNI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS dan kurikulum yang berlaku yakni Kurikulum 2013 – keduanya ditetapkan oleh pemerintah – menjadi faktor determinan dalam produksi buku teks ini. Dalam dokumen Kurikulum 2013 tidak didapati advis khusus terkait Tionghoa. Akan tetapi, Kurikulum 2013 juga memberi koridor pada ruang lingkup materi dan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Termasuk di

dalamnya mengakomodasi perkembangan sumber-sumber belajar sejarah yang makin terbuka. Hadirnya representasi Tionghoa dalam buku teks Sejarah Indonesia tidak lepas dari perubahan pandangan dalam official history yang menguatkan gagasan Indonesiasentris untuk terciptanya Sejarah Nasional yang inklusif. Selain adanya context model ini, berbagai kebaruan yang dijumpai dalam buku teks Sejarah Indonesia juga tidak lepas dari latar belakang para penulis maupun penelaah yang membentuk pemikirannya.

Penulisan buku teks Sejarah Indonesia terkait erat dengan *context model* sebagai buku untuk kepentingan pendidikan sehingga terikat pada kurikulum yang diacu yakni Kurikulum 2013. Sebagaimana Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan buku teks pelajaran merupakan perangkat operasional utama atas pelaksanaan kurikulum (Kemendikbud RI, 2016). Selain kurikulum, penulisan buku teks Sejarah Indonesia juga mengikuti perubahan *official history* dalam SNI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS. Berdasarkan temuan, Kurikulum 2013 memang menentukan struktur dan ruang lingkup materi buku teks. Akan tetapi, terkait representasi Tionghoa, penulisan buku teks lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan *official history*. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasan (2012, hlm. 29) bahwa dalam konteks pendidikan sejarah maka tafsiran resmi pemerintah atau *official history* yang digunakan. Bukan kebenaran yang berdasarkan kaidah ilmu semata yang menjadi kriteria namun kebenaran berdasarkan kaidah ilmu dan kepentingan bangsa. Kendati demikian, perlu disadari bahwa setiap pandangan terkandung “bias” termasuk pandangan resmi pemerintah. Kurikulum 2013 dan karya sejarah resmi merupakan standar baku yang menjadi

determinan dari dimensi kognisi sosial dalam produksi buku teks Sejarah Indonesia yang diteliti ini.

2. Analisis Memori

Elemen penting lain dalam proses kognisi sosial adalah memori. Memori jangka panjang (*long-term memory*) penulis tidak bisa diabaikan karena memengaruhi kognisi sosial penulis. Ada tujuh penulis yang terlibat dalam penulisan empat jilid buku teks ini yakni Restu Gunawan, Amurwani Dwi Lestariningsih, Sardiman A. M., Abdurakhman, Arif Pradono, Linda Sunarti, dan Susanto Zuhdi. Kemudian ada empat orang penelaah yakni Mohammad Iskandar, Hariyono, Mumuh Muhsin Z., dan Baha'Uddin. Para penelaah bertugas memeriksa semua jilid dan memberi masukan, sehingga peran mereka juga menentukan. Dengan mengacu pada profil penulis dan penelaah yang dicantumkan pada bagian belakang setiap jilid buku teks, diperoleh beberapa informasi. Para penulis maupun penelaah memiliki latar belakang keilmuan pendidikan sejarah maupun sejarah, mulai dari sarjana, magister, hingga doktor. Sebagian besar berasal dari kalangan akademisi, dan lainnya merupakan birokrat di Kemendikbud RI. Meskipun tidak tercantum informasi tentang usia, namun dari riwayat pendidikan, para penulis dan penelaah cukup beragam rentang usianya. Mereka menempuh pendidikan sarjana antara tahun 1970-an sampai 1990-an sehingga semua pernah mengalami era Orde Baru dan Reformasi. Bahkan ada yang sempat mengalami masa remajanya di era pemerintahan Presiden Sukarno (Abdurakhman et al., 2018; Gunawan et al., 2017; Sardiman & Lestariningsih, 2017a, 2017b).

Berdasarkan latar belakang tersebut, para penulis dan penelaah memiliki memori jangka panjang tentang

sejarah, penulisan sejarah, maupun buku teks sejarah yang kurang lebih sama. Hampir separuh kehidupan mereka dijalani sepanjang pemerintahan Orde Baru. Pengetahuan tentang sejarah yang ditekuni sebagai bidang keilmuan juga didapatkan pada saat Orde Baru tengah berjaya. Tentu lengkap dengan narasi-narasi sejarah dengan perspektif yang dipengaruhi oleh hegemoni Orde Baru. Pengetahuan mereka tentang berbagai peristiwa sejarah pada masa Orde Baru tidak hanya menjadi memori semantik namun juga episodik karena dirinya pernah merasakan kehidupan di era tersebut. Di sisi lain sebagian dari para penulis – sebagaimana telah dijelaskan – juga terlibat dalam penulisan IDAS yang terbukti memberi perspektif baru dalam penulisan sejarah termasuk lebih akomodatif terhadap kelompok minoritas (Kwartanada, 2020). Oleh karena itu, dalam aspek memori, produksi buku teks Sejarah Indonesia ini sulit untuk dihindari tampilnya pergulatan kognisi sosial warisan Orde Baru dengan kognisi sosial yang baru di era Reformasi. Hal ini misalnya tampak dari ketidakkonsistenan penggunaan istilah Tionghoa yang sebenarnya sudah diatur dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2014, beberapa tahun sebelum buku teks ini ditulis. Ada kecenderungan untuk meminggirkan peran Tionghoa sebagai pelaku utama dalam narasi-narasi yang ditulis. Termasuk juga masih lekatnya anggapan Tionghoa sebagai pendatang dan hanya berkuat pada perannya sebagai economic animal yang menyebabkan Tionghoa selalu menjadi korban konflik kebencian rasial. Pandangan-pandangan semacam ini erat dengan kognisi sosial warisan Orde Baru.

Pendekatan Van Dijk tentang kognisi sosial memang memiliki sifat personal, namun bukan berarti mengabaikan faktor sosial. Individu pada dasarnya tidak hidup sendiri namun pemikiran dan penafsirannya juga banyak dipengaruhi

oleh nilai-nilai yang diterimanya sebagai bagian dari anggota masyarakat. Konsekuensinya, analisis kognisi sosial menjadi sangat inheren dengan analisis konteks sosialnya. Analisis kognisi sosial tidak hanya menyediakan gambaran teks dengan menyertakan representasi penulis yang dilihat dari elemen model dan memori, namun juga strategi yang digunakan dalam memproduksi teks. Proses terbentuknya teks juga memasukkan di dalamnya bagaimana suatu peristiwa ditafsirkan, disimpulkan, dan dimaknai oleh penulis.

Strategi produksi teks meliputi seleksi, reproduksi, penyimpulan, dan transformasi lokal. Pertama, seleksi adalah strategi yang kompleks yang menunjukkan bagaimana peristiwa, informasi, sumber diseleksi oleh penulis untuk ditampilkan ke dalam teks (Eriyanto, 2001, hlm. 269). Seleksi dilakukan dengan menentukan materi-materi pilihan yang ditampilkan dalam buku teks. Pertimbangan utama untuk menentukan materi-materi tersebut adalah ruang lingkup materi yang diatur dalam standar isi Kurikulum 2013. Pertimbangan berikutnya yakni perubahan pandangan historiografi resmi melalui SNI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS. Dengan tetap mempertimbangkan jumlah halaman dan hal teknis lainnya, maka hanya peristiwa yang dianggap penting dan kajiannya pun tidak semuanya mendalam. Dalam konteks representasi Tionghoa, strategi seleksi ini juga diterapkan. Hasilnya telah dijelaskan dalam temuan tematik, Tionghoa muncul hampir pada setiap topik, namun dengan porsi yang beragam.

Berikutnya seleksi sumber juga sangat menentukan. Buku teks Sejarah Indonesia menggunakan sumber yang relatif kaya dan beragam. Selain SNI Edisi Pemutakhiran dan IDAS, juga digunakan karya-karya dari Sartono Kartodirdjo yakni Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid 1 dan 2,

Soekmono dengan Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 1, 2, dan 3, Denys Lombard, Ricklef, Anthony Reid, Vlekke, Hall, Kahin, dan beberapa karya sejarah lainnya yang ditulis oleh kalangan akademisi dari dalam maupun luar negeri. Selain itu beberapa buku teks sejarah dalam kurikulum sebelumnya digunakan sebagai rujukan atau barangkali juga pertimbangan. Antara lain Sejarah untuk SMA karya I Wayan Badrika dari Penerbit Erlangga yang mengacu Kurikulum 2006, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum sesuai Kurikulum 1994, Sejarah Nasional Indonesia untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sesuai Kurikulum 1984, hingga Sejarah Indonesia karya Sanusi Pane yang terbit tahun 1965. Sumber-sumber ini terutama digunakan dalam penulisan buku teks kelas X. Sementara narasi-narasi tentang Tionghoa terutama mengacu pada SNI Edisi Pemutakhiran dan IDAS.

Kedua, reproduksi berhubungan dengan apakah informasi dikopi, digandakan, atau tidak dipakai sama sekali oleh penulis (Eriyanto, 2001, hlm. 269). Dalam konteks ini, hal apa yang terus berulang disampaikan dalam buku teks atau justru disamarkan bahkan dlenyapkan dari buku teks. Representasi Tionghoa menjadi salah satu hal yang diusung dalam rangka menghasilkan buku teks Sejarah Indonesia yang inklusif. Poin ini telah terakomodasi, bahkan hampir di setiap topik muncul hal yang bersinggungan dengan Tionghoa. Akan tetapi, narasi yang dihadirkan berulang kali mereproduksi stereotipe dan pandangan tertentu tentang Tionghoa. Gagasan Tionghoa sebagai pendatang, peran ekonomi, dan kerap menjadi sasaran kebencian masyarakat terus direproduksi. Gagasan ini muncul sejak topik masa Hindu-Buddha yang menyebut kedatangan para pedagang Tionghoa hingga setelah kemerdekaan juga disebut Tionghoa mendominasi perekonomian Indonesia. Sentimen anti-Cina

sejak VOC hingga era kemerdekaan juga terus direproduksi. Bahkan dalam narasi Orang-orang Cina Berontak pun yang ditekankan – untuk pertama kalinya – Tionghoa sebagai korban anti-Cina yang dilancarkan VOC pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Valckenier.

Ketiga, strategi besar dalam memproduksi teks yang berhubungan dengan mental kognisi adalah penyimpulan atau peringkasan informasi. Hal ini berhubungan dengan bagaimana realitas yang kompleks dipahami dan ditampilkan dengan ringkas. Apakah ada penghilangan informasi yang tidak relevan, generalisasi, dan konstruksi atau kombinasi beberapa fakta sehingga membentuk pengertian secara keseluruhan (Eriyanto, 2001, hlm. 269–270). Tionghoa digeneralisasi dari masa ke masa sebagai economic animal yang apolitis dan asosial. Pengaruh maupun peran Tionghoa dalam aneka bidang dapat merusak pandangan yang hendak dikonstruksi itu. Peran Tionghoa dalam perjuangan bangsa Indonesia, termasuk dalam narasi Orang-orang Cina Berontak dan peran pers Tionghoa, tampak samar. Peran Tionghoa dalam berbagai bidang, selain ekonomi, seperti politik, militer, budaya, kuliner, pakaian, arsitektur, olahraga, dan sebagainya tidak dibicarakan sama sekali. Hanya muncul dalam soal uji kompetensi terkait pengaruh Tionghoa dalam bidang kuliner. Di sisi lain, reaksi masyarakat terhadap Tionghoa juga digeneralisasi pada konstruksi sikap kebencian dan sentimen anti-Cina. Kenyataannya banyak masyarakat setempat yang bersimpati dengan Tionghoa, menjalin relasi dan persahabatan yang baik, hidup berdampingan, bahkan menjalin hubungan keluarga dengan Tionghoa.

Keempat, transformasi lokal yang berhubungan dengan bagaimana suatu peristiwa ditampilkan (Eriyanto, 2001, hlm. 270). Misalnya dengan penambahan latar historis tertentu,

detail atau informasi lain sebagai pendukung, dan perubahan urutan teks untuk menegaskan atau meneguhkan pandangan yang dibentuk oleh kognisi sosial penulis. Representasi Tionghoa dalam buku teks Sejarah Indonesia lebih banyak ditekankan pada aspek pengetahuan. Teks yang disusun lebih didominasi oleh penggunaan istilah Cina, koherensi Tionghoa dengan pengusaha (orang) asing, dan meskipun secara teknis menjadi bagian dari perjalanan Sejarah Indonesia namun ditampilkan dalam serba keterbatasan. Ada dua kemungkinan, warisan asimilasi masih tersisa atau sebaliknya mengarah pada Tionghoa sebagai *the other*. Hal seperti ini berpotensi mengecilkan Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia seutuhnya, kendati hadir dalam buku teks.

Berikutnya yang juga memengaruhi kognisi sosial adalah memori penulis. Dalam hal ini, memori jangka panjang paling menentukan yang meliputi memori semantik dan memori episodik. Memori semantik untuk menjelaskan pengetahuan tentang realitas, sedangkan episodik terkait dengan pengalaman diri sendiri (Eriyanto, 2001, hlm. 265). Temuan menunjukkan bahwa sebagian dari penulis buku teks juga merupakan penulis IDAS, maka pandangan maupun narasi-narasi yang berasal dari IDAS juga kerap muncul dalam buku teks. Di sisi lain, memori episodik penulis dapat menyebabkan persepsi dan perlakuan Orde Baru terhadap Tionghoa kemungkinan besar telah mengkristal. Kognisi sosial yang dibentuk Orde Baru telah menjadi ideologi yang bermula dari nilai yang kemudian diyakini oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar atau absah (Dijk, 1990). Untuk itu, cara pandang para penulis terhadap Tionghoa sangat mungkin mendapat pengaruh oleh kognisi sosial yang dibentuk oleh relasi kuasa era Orde Baru. Tanpa sikap kritis dan terbuka, maka perubahan dinamika politik dan

sosial di era Reformasi terancam tidak dapat ditangkap dan dituangkan secara optimal dalam narasi-narasi buku teks.

Pergulatan antara pengetahuan yang telah lama bercokol dan menjadi memori jangka panjang dengan pengetahuan yang baru diterima terekam dalam produksi buku teks. Strategi produksi teks meliputi seleksi, reproduksi, penyimpulan, dan transformasi berlangsung dalam mental dan kognisi penulis buku teks. Seleksi meliputi materi dan porsi pembahasan yang mengacu pada ruang lingkup struktur Kurikulum 2013. Selain itu, sumber yang digunakan juga mengalami proses seleksi yang didominasi official history. Reproduksi wacana mengerucut pada Tionghoa sebagai pendatang dengan peran mereka di bidang ekonomi sehingga kerap menjadi sasaran kebencian masyarakat. Penyimpulan menekankan peran Tionghoa dalam bidang ekonomi saja dan abai dengan peran bidang lainnya. Reaksi masyarakat juga digeneralisasi pada sikap kebencian dan sentimen anti-Cina. Transformasi lokal menampilkan Tionghoa secara terbatas namun secara teknis memang diterima sebagai bagian dari perjalanan Sejarah Indonesia.

Produksi buku teks terkait dengan representasi Tionghoa menampilkan tarik-menarik kognisi sosial yang terbentuk oleh relasi kuasa Orde Baru dengan kognisi sosial yang mengusung kebaruan seiring Reformasi. Di sisi lain, sampai saat ini, buku teks sejarah merupakan sumber utama yang masih digunakan guru untuk mengembangkan proses pembelajaran di kelas (Saripudin & Komalasari, 2016). Akan tetapi, buku teks sebenarnya diharapkan tidak digunakan begitu saja. Buku teks ditulis dengan maksud memberi ruang menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis siswa (E. Supriatna, 2013). Untuk itu, proses pembelajaran yang

dikelola guru memegang peran penting dalam pemanfaatan buku teks.

B. Analisis Dimensi Konteks Sosial

1. Praktik Kekuasaan

Dalam produksi wacana tentang Tionghoa, kekuasaan dimiliki oleh negara melalui pemerintah yang berkuasa untuk mengontrol kesadaran masyarakat. Sikap negara terhadap Tionghoa melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan membentuk pandangan masyarakat. Dengan merujuk kajian historis, stereotipe dan prasangka terhadap Tionghoa mulai diproduksi pada era penjajahan Belanda yang dalam kekuasaan-kekuasaan selanjutnya terus direproduksi. Bermula dari Geger Pacinan 1740–1743 muncul perspektif baru di mata penjajah Belanda dalam menyikapi Tionghoa (Daradjadi, 2013; R Emmelink, 2002; Vermeulen, 2010). Belanda membatasi relasi antara Tionghoa dengan masyarakat setempat melalui aturan wijkensstelsel atau permukiman atas dasar etnis (pecinan) dan passenstelsel atau surat izin keluar wilayah (Setiono, 2008, hlm. 130).

Makin menguatnya stereotipe dan prasangka terhadap Tionghoa di masyarakat terbukti dengan munculnya huru-hara anti-Cina yang melibatkan para pimpinan SI pada tahun 1918 di Kudus (Suryadinata, 1984, hlm. 8). Berbagai konflik semacam ini tidak lepas dari pandangan yang keliru, syak wasangka, dan praduga satu sama lain yang tumbuh dan terus berkembang di masyarakat. Hal ini tentu saja membuat penguasa kolonial makin keras bertepuk tangan atas keberhasilannya menanamkan bibit-bibit perpecahan. Termasuk juga munculnya aksi-aksi anti-Cina pada awal kemerdekaan yang didasari atas pandangan negatif terhadap

Tionghoa sebagai kelompok oportunis dan berlingung pada penguasa kolonial. Aksi itu tak jarang disertai dengan penjarahan dan pembunuhan yang dikenal sebagai “Zaman Bersiap” seperti di Tangerang dan Bagansiapiapi tahun 1946 (Setiono, 2008, hlm. 564; Sumantri, 1963, hlm. 181–183).

Perlakuan pemerintah terhadap Tionghoa pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin juga banyak dipengaruhi oleh praktik-praktik yang sebelumnya terjadi pada masa kolonial (Permana & Purwantiningsih, 2021). Pandangan Tionghoa sebagai *economic animal* dan bersifat oportunis masih begitu lekat. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah rata-rata bertujuan untuk menghadapi persaingan dengan kelompok Tionghoa. Puncaknya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 (PP-10) yang melarang orang-orang asing (dalam hal ini cenderung ditujukan pada Tionghoa) untuk berdagang eceran di daerah pedalaman (Setiono, 2008, hlm. 811). Bahkan dalam pelaksanaannya banyak keluarga Tionghoa diusir dari desa-desa. Akibatnya sikap anti-Cina terus muncul dan kerusuhan yang menysasar etnis Tionghoa juga kerap kali terjadi. Salah satunya yang terjadi di beberapa kota di Jawa Barat seperti Cirebon, Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, Garut, dan Sukabumi pada kurun waktu Maret-Mei 1963. Kerusuhan yang sengaja direncanakan ini tidak hanya berdampak bagi kalangan Tionghoa namun juga bagi banyak orang dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok (Pangestu, Kumalasari, & Aman, 2021).

Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno muncul masalah dwi kewarganegaraan dan berkembang dua sikap yang berusaha menempatkan status Tionghoa di Indonesia secara lebih jelas. Ada kelompok pendukung integrasi wajar yang digawangi oleh Baperki dan ada yang memilih

asimilasi total dengan menghilangkan identitas ketionghoan seperti diusulkan LPKB. Kelak setelah tragedi 1965, Baperki dibubarkan dan LPKB dengan dukungan militer mendukung kebijakan program asimilasi yang digencarkan Orde Baru. Kampanye dan aksi anti-Cina (Sinophobia) juga meluas. Penjarahan, perusakan, dan pembakaran rumah, toko, sekolah, dan mobil milik Tionghoa terjadi di mana-mana. Pemerintah Orde Baru mengadopsi sikap politik kolonial terhadap Tionghoa. Termasuk penggunaan kembali istilah Cina. Tujuannya untuk menghapus perasaan superior dan inferior antara Tionghoa dengan pribumi, namun di sisi lain menimbulkan dampak psikososial bagi masyarakat Tionghoa (Lembong, 2011, hlm. 10; Mahfud, 2013, hlm. 51; Setiono, 2008, hlm. 986; Suryadinata, 2002, hlm. 107).

Pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan berbagai aturan yang bersifat diskriminatif bagi Tionghoa. Di antaranya larangan terhadap pelaksanaan tradisi dan budaya Tionghoa, penutupan sekolah-sekolah Tionghoa, pemberangusan surat kabar dan penerbitan berbahasa Tionghoa, larangan penggunaan nama-nama Tionghoa sehingga diimbau untuk mengganti nama menjadi lebih bernuansa Indonesia, dan mendorong asimilasi total salah satunya melalui perkawinan campur (Sunny Lie & Bailey, 2016). Pada akhirnya LPKB dibubarkan tahun 1967 dengan harapan lebih fokus pada peran pembangunan ekonomi sedangkan tugas asimilasi menjadi tanggung jawab pemerintah (Setiono, 2008, hlm. 1007). Sejak itulah perlakuan diskriminatif terhadap Tionghoa justru makin terlembaga.

Orde Baru menjadi masa yang suram bagi masyarakat Tionghoa pada umumnya, walaupun segelintir di antara mereka bisa menempati posisi aman sebagai konglomerat yang mendominasi perekonomian (Arifin et al., 2016;

Freedman, 2003; Sunny Lie & Bailey, 2016). Tentu yang paling dikenal relasi antara Presiden Soeharto dengan pengusaha Liem Sioe Liong (Chua, 2004, hlm. 469). Situasi ini makin memupuk kesenjangan sosial ekonomi yang seringkali menjadi pemantik timbulnya konflik horizontal dan kerusuhan akibat sentimen anti-Cina. Puncaknya terjadi pada Mei 1998 seiring kelahiran Reformasi. Dalam peristiwa ini tidak hanya perusakan, pembakaran, dan penjarahan terhadap harta benda milik kalangan Tionghoa namun juga terjadi pelecehan seksual dan pemerkosaan perempuan Tionghoa (Winarnita et al., 2018). Kendati Tionghoa menjadi sasaran amuk massa, namun korban dan kerugian juga banyak dialami oleh mereka yang bukan Tionghoa. Peristiwa ini kemudian menjadi titik balik relasi antara Tionghoa dengan kelompok masyarakat yang merasa sebagai penduduk asli (Turner, 2003, hlm. 344). Sekaligus juga penanda gagalnya program asimilasi gaya Orde Baru (Hoon, 2006, hlm. 153).

Praktik kekuasaan Orde Baru selama lebih dari tiga dekade paling berdampak melakukan kontrol pikiran masyarakat dalam memandang Tionghoa. Buah dari kontrol pikiran Orde Baru dalam memandang Tionghoa mencapai puncak kematangannya saat Presiden Suharto lengser. Tumbangannya pemerintahan Orde Baru itu diawali dengan berbagai kerusuhan rasialis dengan Tionghoa sebagai tumbal. Aksi-aksi itu antara lain terjadi di Purwakarta, Pekalongan, Situbondo, Tasikmalaya, Banjarmasin, Rengasdengklok, Makassar, Kebumen, Solo, dan Jakarta dalam kurun waktu 1996 sampai 1999. Puncaknya tentu saja di Jakarta dalam kerusuhan 12-15 Mei 1998. Tidak hanya kerusakan harta benda, namun juga harga diri dan nyawa. Ratusan perempuan Tionghoa diperkosa hingga mendorong banyak keluarga Tionghoa

mengungsi ke luar negeri (Winarnita et al., 2018). Hal ini telah menimbulkan dampak jangka panjang bagi mereka dan keluarganya. Satu-satunya kebebasan yang diberikan Orde Baru hanyalah di bidang bisnis sehingga membuat orang-orang Tionghoa posisinya dipinggirkan dan tak berdaya di saat-saat seperti ini. Peristiwa ini membuktikan kebenaran sinyalemen bahwa Tionghoa selama Orde Baru dipersiapkan untuk dijadikan kambing hitam dan bumper rezim saat menghadapi keruntuhannya (Setiono, 2008, hlm. 1085).

Kendati menyakitkan namun lahirnya Reformasi mendorong perubahan di segala bidang juga mengubah pandangan dan sikap terhadap Tionghoa. Masyarakat Tionghoa juga mulai memiliki kesempatan yang terbuka di berbagai bidang termasuk politik dengan mendirikan organisasi sosial politik, partai politik, dan menjadi pejabat politik. Salah satu daerah di Indonesia yang begitu dinamis dalam merespon perubahan ini adalah Kalimantan Barat (Tanasaldy, 2015). Selain itu mulai muncul kepercayaan diri di kalangan Tionghoa untuk menunjukkan identitas ketionghoannya (Giblin, 2003; Turner, 2003). Pada masa Reformasi, berbagai kajian, penelitian, dan publikasi ilmiah mengenai Tionghoa makin berlimpah. Perubahan ini membuka kesempatan bagi Tionghoa untuk memilih (kembali) jalan integrasi wajar dengan melestarikan budayanya dalam hidup berbangsa atau meneruskan asimilasi seperti cara Orde Baru (Purdey, 2003). Hal yang pasti, penerimaan terhadap Tionghoa yang makin terbuka, diharapkan perlahan mengikis stereotipe dan prasangka yang selama ini dibangun oleh Orde Baru.

Berbagai aturan baru yang memberi tempat pada Tionghoa juga bermunculan pada era Reformasi. Tahun 1999, Presiden B. J. Habibie mengeluarkan aturan penghapusan

istilah pribumi dan nonpribumi. Presiden K. H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto ini telah menghambat pelaksanaan tradisi dan berbagai hal berbau Tionghoa demi berhasilnya proses asimilasi. Sejak masa Reformasi, orang-orang Tionghoa tidak lagi takut menunjukkan identitas ketionghoannya (Arifin, Ananta, Utami, Handayani, & Pramono, 2015, hlm. 236). Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengambil peran dalam menetapkan Hari Raya Imlek sebagai libur nasional. Terakhir, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keluarlah Keppres Nomor 12 Tahun 2014 yang memulihkan kembali sebutan Republik Rakyat Tiongkok untuk menyebut negara Republik Rakyat Cina dan Tionghoa untuk menyebut orang atau komunitas Cina di Indonesia.

Kendati identitas dan budaya Tionghoa bebas diekspresikan, namun stereotipe terlanjur mendarah daging dan citra negatif terhadap Tionghoa belum sepenuhnya hilang (Kuntjara & Hoon, 2020). Sentimen-sentimen bernuansa rasis pasca-Reformasi masih kerap muncul di masyarakat. Misalnya isu ketionghoan yang sering diembuskan saat masa kampanye politik, peristiwa pemukulan yang disertai intimidasi terhadap korban dengan kata-kata rasis, peristiwa Tanjung Balai tahun 2017 lalu, dan beberapa lainnya yang menunjukkan sentimen negatif terhadap Tionghoa di era Reformasi masih ada (Kristiono, 2018, hlm. 35–36). Hal ini sejalan dengan penelitian Setijadi (2017) yang menyimpulkan bahwa stereotip terhadap etnis Tionghoa masih ada terkait dengan keistimewaan dalam hal ekonomi, pengaruh politik, dan kesetiaan terhadap negara. Berbagai kebijakan yang

dikeluarkan pemerintah demi pemerintah di era Reformasi belum mampu membentuk konter narasi yang mereset pikiran masyarakat. Citra negatif terhadap Tionghoa yang merupakan warisan kolonial dan dilanggengkan oleh Orde Baru kerap masih direproduksi hingga sekarang.

Dalam hal ini, kekuasaan negara paling kuat dan memiliki akses paling besar dalam mengontrol kesadaran masyarakat. Sarananya melalui pendidikan sejarah di sekolah dengan bahasa sebagai media penggerak, melalui *official history* dan buku teks (Habermas, 1987). Hegemoni inilah yang harus dibongkar mengingat Reformasi telah membawa perubahan, namun relasi kuasa Orde Baru masih berpeluang untuk diwarisi oleh masyarakat (Giroux, 2011). Analisis mengenai hal ini terkait dengan latar historis yang menunjukkan sikap negara terhadap Tionghoa melalui berbagai kebijakan yang terbukti membentuk pandangan masyarakat. Stereotipe, prasangka, dan kebencian yang berujung pada sentimen anti-Cina merupakan warisan politik era kolonial. Pandangan dan cara-cara diskriminatif pada era kolonial Belanda inilah yang kemudian dilanggengkan pada masa Orde Baru hingga meluaslah kampanye dan aksi anti-Cina atau Sinophobia (Wasino et al., 2019, hlm. 216).

Anggapan tentang Tionghoa merasa superior dan merendahkan yang lain mengindikasikan adanya sikap saling prasangka selain juga perasaan yang disematkan pada diri masing-masing. Orang Tionghoa kerap menganggap dirinya lebih unggul, sementara pribumi juga kerap merasa kecil hati dan minder. Akibatnya fenomena anti-Cina menjadi bara dalam sekam di tengah masyarakat. Di sisi lain juga kerap berkembang pandangan bahwa Tionghoa diragukan rasa nasionalisme dan kecintaannya pada negara. Selanjutnya atas nama asimilasi, pemerintah Orde Baru mengeluarkan

berbagai aturan dan kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi Tionghoa (Sunny Lie & Bailey, 2016).

Sejak Reformasi, berbagai aturan baru dikeluarkan yang memengaruhi pandangan dan perlakuan terhadap Tionghoa. Kendati demikian, akar historis tentang stereotipe dan prasangka terhadap Tionghoa masih tertanam di hampir sebagian besar masyarakat. Konteks sosial inilah yang memengaruhi wacana tentang representasi Tionghoa dalam buku teks. Hal ini sejalan dengan Lucy et al. (2020) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa isi buku teks tidaklah netral karena mencerminkan kekuatan dan keyakinan yang erat kaitannya dengan kondisi sosial budaya yang mendasarinya. Buku teks menjadi titik temu antara siswa dengan kekuatan makro masyarakat, budaya, dan politik. Hal ini sekaligus menegaskan perlunya buku teks digunakan secara kritis (E. Supriatna, 2013).

Pemerintahan Presiden Sukarno mendukung integrasi, Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto mengusung asimilasi bahkan pelenyapan, selanjutnya Reformasi kembali menghadirkannya namun masih dalam wacana yang abu-abu. Fenomena ini merupakan tanggapan terhadap perubahan politik dari masa ke masa. Akan tetapi, narasi juga berpotensi menjadi sekadar bersifat formalitas dan menghilangkan makna esensialnya. Dalam konteks pendidikan sejarah, internalisasi nilai yang seharusnya terjadi menjadi terhalang. Secara teoretis, narasi dapat melegitimasi pengetahuan untuk kepentingan politik maupun filosofis (Lyotard, 1984). Untuk itu peran guru dalam pembelajaran akan sangat menentukan. Akses pemerintah untuk membentuk kognisi sosial masyarakat melalui institusi sekolah menempatkan guru sejarah sebagai pihak yang meneruskan akses dalam

memengaruhi kesadaran siswa sebagai anggota masyarakat. Buku teks hanyalah sarana.

2. Akses

Sebagai pemegang kekuasaan di suatu negara, pemerintah memiliki akses untuk membentuk kognisi sosial masyarakat, termasuk mengenai pandangan dan sikap terhadap Tionghoa. Dalam hal ini, sarana akses yang digunakan yakni *official history* dan pendidikan sejarah di sekolah yang senantiasa tidak lepas dari kepentingan politik pemerintah. Pada awal kemerdekaan, *official history* memang belum dirumuskan, namun cita-cita penulisan sejarah nasional yang lepas dari perspektif *Neerlandosentris* mulai menguat. Pada masa ini, penulisan peran Tionghoa dalam sejarah nasional secara cukup signifikan dilakukan oleh Mr. Iwa Kusuma Sumantri dalam buku “Sedjarah Revolusi Indonesia” (Sumantri, 1963, hlm. 178–184). Termasuk narasi peristiwa pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia oleh VOC hingga meletusnya pemberontakan Tionghoa atau Geger Pacinan tahun 1740–1743 juga didapati dalam buku teks sejarah (Pane, 1950, hlm. 232–235; Sanusi, 1955, hlm. 68–72; Sundhoro, 1969, hlm. 31–34; Suparno, 1960, hlm. 5–10). Beberapa di antaranya malahan juga menyinggung peran Tionghoa dalam lingkup sejarah lokal. Misalnya Pane (1956, hlm. 110–111) dan Sundhoro (1969, hlm. 79) dalam buku teks yang ditulisnya memuat peristiwa perlawanan orang-orang Tionghoa terhadap Belanda di Montrado (Sambas) dan Mandor.

Perubahan terjadi pada masa Orde Baru melalui otoritas dan akses yang leluasa menentukan *official history* dan kurikulum sejarah yang mengacu pada narasi resmi dan tafsir tunggal. Orde Baru merumuskan SNI yang di dalamnya

membentuk memori kolektif tentang stereotipe dan prasangka terhadap Tionghoa. Kehadiran SNI telah memutus pemahaman yang objektif dan terbuka terhadap Tionghoa. Peran Tionghoa dilenyapkan atau ditampilkan dalam persepsi negatif yang erat dengan ekonomi. Selanjutnya SNI juga menjadi sumber utama penulisan buku teks sejarah, maka pembelajaran sejarah sejak Kurikulum 1975 tidak pernah lagi membicarakan eksistensi dan peran Tionghoa (Kwartanada, 2020).

Seiring Reformasi, perubahan pandangan terhadap Tionghoa sebagai wujud konter narasi dituangkan melalui terbitnya SNI Edisi Pemutakhiran pada tahun 2008. Narasi mengenai Tionghoa-Jawa melawan VOC kembali muncul dalam Jilid IV dan Tionghoa sebagai tumbal tragedi Mei 1998 dimuat pada Jilid VI (Poesponegoro & Notosusanto, 2008d, hlm. 49, 2008f, hlm. 669). Lebih jelas lagi disusul dengan terbitnya IDAS pada tahun 2012. Buku ini lebih akomodatif terhadap Tionghoa. Sebagai catatan, hilangnya tokoh Tionghoa dalam narasi mengenai BPUPK masih belum dikoreksi dalam SNI Edisi Pemutakhiran ini maupun IDAS (Kwartanada, 2020, hlm. 32). Dalam konteks pendidikan sejarah, Tionghoa mulai diakomodasi kembali dalam Kurikulum 2006 setelah lebih dari 30 tahun menghilang. Dalam buku teks Sejarah untuk SMA/MA Kelas XI Bahasa yang diterbitkan salah satu pihak swasta, muncul pembahasan mengenai Sastra Melayu Tionghoa dan tokoh Kwee Tek Hoay (Kwartanada, 2020, hlm. 33). Paling signifikan, Tionghoa hadir dalam buku teks Sejarah Indonesia pada Kurikulum 2013 yang diterbitkan Kemendikbud RI.

Institusi sekolah menjadi saluran utama bagi pemerintah dari masa ke masa sejak kemerdekaan hingga era Reformasi sekarang ini untuk mengontrol kesadaran

khalayak. Guru sejarah diharapkan mampu berperan menjadi pihak berikutnya yang meneruskan akses kekuasaan dari pemerintah dalam mengonstruksi kognisi sosial siswa sebagai anggota masyarakat. Tugas ini tidak mudah karena masih banyak pelaku pendidikan sejarah yang menyimpan memori semantik sekaligus episodik yang erat dengan Orde Baru. Bagi guru yang masih lekat dengan narasi-narasi sejarah gaya Orde Baru, maka kognisi sosial mereka dalam memandang Tionghoa juga telah berakar dan tidak mudah diubah. Selain itu, keberadaan buku teks juga sangat menentukan isi dan wacana yang diteruskan oleh guru kepada siswa. Hal ini bagaikan buah simalakama bagi guru yang sebenarnya memiliki pandangan dan sikap terhadap Tionghoa yang sejalan dengan semangat Reformasi. Guru sejarah kerap merasa berada di bawah tekanan hegemoni kurikulum dan buku teks yang ada sehingga tidak mudah untuk terbuka dan kritis dalam menyampaikan sumber belajar lain dan pandangan yang berbeda. Kebijakan Merdeka Belajar sekarang ini diharapkan menjadi jawaban atas kekhawatiran tersebut.

Pandangan penulis buku teks dan guru yang mengajar memberi pengaruh kuat terhadap wacana yang dibangun dari narasi tersebut. Penanaman nilai melalui pendidikan sejarah terancam gagal apabila guru menggunakan mentah-mentah narasi buku teks yang merepresentasikan Tionghoa ke dalam pembelajaran. Malahan bisa terjadi melanggengkan pandangan diskriminatif yang menempatkan Tionghoa sebagai liyan. Apalagi ada temuan bahwa sebagian besar guru cenderung mengartikulasikan pentingnya persatuan ketimbang terlebih dahulu menumbuhkan kesadaran akan keberagaman (Djono & Joebagio, 2019). Kekhawatiran ini dapat terjadi sebagaimana penelitian tentang buku teks

Sejarah Amerika yang mengalami misinterpretasi ketika guru tidak menjalankan perannya dengan baik saat menjelaskan tentang gerakan abolisi dalam Perang Sipil (Pearcy, 2014).

Guru juga hendaknya melibatkan siswa dalam mengkritisi dan memperkaya buku teks (N. Supriatna, 2007). Salah satu strateginya dengan membaca teks secara dekonstruktif melalui pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai teks yang dianggap eksklusif dan meminggirkan kelompok sosial tertentu atau berpihak pada kepentingan tertentu (N. Supriatna, 2007). Siswa didorong untuk membangun narasi baru yang dianggap lebih bermakna. Dengan demikian, siswa turut berperan dalam mempromosikan kontra-wacana (*counter-discourse*) yang mengubah pandangan sosial terhadap Tionghoa. *Counter-discourse* merupakan perlawanan terhadap ideologi, dominasi, diskriminasi, atau prasangka yang melekat pada narasi (Haryatmoko, 2019). Tujuannya mewujudkan transformasi sosial yang mengubah masyarakat dari gagasan-gagasan yang telah mentradisi ke arah pemikiran kritis (Horkheimer, 1972). Dengan mengembangkan pengetahuan dan pemikiran kritis, maka diharapkan kuasa – Orde Baru – tidak lagi melekat (N. Supriatna, 2007).



BAB VII

REPRESENTASI TIONGHOA DAN KEBINEKAAN DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA

Representasi Tionghoa dalam buku teks bukan sekadar mengakomodasi muncul atau tidaknya Tionghoa pada setiap periode Sejarah Nasional Indonesia. Tidak berarti pula menampilkan peran Tionghoa dalam berbagai peristiwa sejarah secara berlebihan sehingga terjadi penonjolan terhadap Tionghoa. Tujuan utama dari representasi Tionghoa dalam buku teks adalah menghadirkan buku teks sejarah yang inklusif. Dari situ muncul pandangan bahwa perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa diraih dengan keterlibatan berbagai golongan masyarakat, termasuk Tionghoa. Buku teks Sejarah Indonesia hadir untuk kepentingan pendidikan, maka ada *value* yang diusung yakni kesadaran akan kebinekaan untuk mempererat integrasi bangsa. Untuk itu diperlukan analisis *value* dengan fokus pada konstruksi kebinekaan melalui representasi Tionghoa. Ada lima variabel yang dianalisis yakni eksplorasi pengetahuan, penghormatan terhadap keberagaman, penghilangan stereotipe dan pra-

sangka, refleksi kritis pengalaman kebinekaan, serta kesadaran inklusif untuk keharmonisan hidup bersama.

Representasi Tionghoa dalam pembelajaran sejarah menjadi bagian dari pendidikan multikultural dengan dimensi-dimensi berikut (1) Integrasi sejarah dan peran Tionghoa di Indonesia ke dalam sejarah nasional yang menjadi konten pembelajaran Sejarah Indonesia di SMA; (2) Konstruksi pengetahuan tentang sejarah dan peran Tionghoa di Indonesia beserta wacana nilai-nilai hidup berbangsa; (3) Pengurangan prasangka atau stereotipe dapat diraih melalui pembelajaran Sejarah Indonesia yang merepresentasikan Tionghoa; (4) Representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia menunjukkan adanya pedagogi yang setara; dan (5) Pemberdayaan budaya dan struktur sosial yang berbineka di sekolah makin kuat dengan memberi ruang pada eksplorasi sejarah dan peran Tionghoa di Indonesia.

Dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, representasi Tionghoa menunjukkan beberapa hal sebagai berikut (1) Tidak perlu konsep baru dalam membentuk persatuan karena keberadaan masyarakat Tionghoa adalah kenyataan sosial yang sejak dulu ada sejak Indonesia belum merdeka; (2) Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif, bukan sektarian dan eksklusif, sebagaimana muara dari pembelajaran sejarah yang merepresentasikan Tionghoa; (3) Bhinneka Tunggal Ika bukan formalitas, maka buku teks membutuhkan peran kritis guru dalam proses pembelajaran Sejarah Indonesia yang merepresentasikan Tionghoa; (4) Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen (menyatukan) tidak divergen sebagaimana harapan representasi Tionghoa dalam pendidikan sejarah yakni menguatkan integrasi bangsa (Kemendikbud RI, 2017).

Sejalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka, representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah

Indonesia diharapkan menguatkan salah satu dari enam keutamaan Profil Pelajar Pancasila yakni berkebinekaan global. Empat elemen kunci dari kebinekaan global dihubungkan dengan representasi Tionghoa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia dapat menunjukkan sikap (1) Mengenal dan menghargai budaya Tionghoa yang sejak sebelum kemerdekaan telah menjadi bagian dan turut membentuk budaya masyarakat Indonesia; (2) Komunikasi dan interaksi antarbudaya Tionghoa dengan budaya lain, bahkan dalam hal tertentu, misalnya bahasa, budaya kuliner, pakaian, dan lainnya telah menghasilkan akulturasi budaya yang khas Indonesia; (3) Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan yang mengajak siswa untuk menemukenali lingkungan masyarakat sekitarnya terkait interaksi dengan Tionghoa dan budayanya yang menghilangkan stereotipe dan prasangka serta menyesuaikan perbedaan budaya; dan (4) Berkeadilan sosial melalui pemikiran pedagogi kritis dengan memberi ruang pada keberagaman termasuk Tionghoa dalam belajar sejarah nasional untuk masa depan bangsa yang lebih baik (Kemendikbudristek RI, 2022).

Berdasarkan korelasi yang erat antara representasi Tionghoa dengan upaya pendidikan kebinekaan, maka setidaknya ada lima variabel utama konstruksi kebinekaan yang relevan untuk dianalisis dalam buku teks dan pengalaman belajar siswa. Variabel tersebut menyangkut konten dan konstruksi pengetahuan, penghormatan terhadap keberagaman, penghilangan stereotipe dan prasangka, refleksi kritis atas pengalaman kebinekaan, dan kesadaran inklusif untuk keharmonisan hidup bersama. Untuk itu, pembelajaran Sejarah Indonesia dalam merepresentasikan Tionghoa sebagai konstruksi kebinekaan bangsa hendaknya

bersifat eksploratif, dialogis, tanggap zaman, reflektif kritis, dan inklusif. Berikut pembahasan kelima variabel yang ditemukan dalam buku teks dan pengalaman belajar siswa beserta relevansinya.

A. Eksplorasi Pengetahuan

Buku teks menggambarkan eksplorasi pengetahuan sejarah yang berhubungan dengan Tionghoa sebagai bagian dari keberagaman bangsa secara memadai dari aspek keluasan. Sebagaimana temuan dalam identifikasi materi yang merepresentasikan Tionghoa, tampak bahwa Tionghoa muncul dalam hampir semua periode dan pokok bahasan menurut standar isi Kurikulum 2013 mata pelajaran Sejarah Indonesia. Dari total 17 pokok bahasan dari kelas X hingga XII SMA, Tionghoa hadir dalam sepuluh pokok bahasan. Kesepuluh pokok bahasan tersebut yakni (1) Indonesia zaman Praaksara: awal kehidupan manusia Indonesia, (2) Indonesia zaman Hindu dan Buddha: silang budaya lokal dan global tahap awal, (3) Zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, (4) Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa, (5) Pendidikan dan pergerakan nasional, (6) Pendudukan Jepang di Indonesia, (7) Proklamasi kemerdekaan Indonesia, (8) Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda, (9) Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan Demokrasi Terpimpin, dan (10) Kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan Reformasi.

Materi yang berkaitan dengan Tionghoa tersebut mencakup setiap pembabakan zaman mulai dari praaksara sampai Reformasi. Kendati demikian, eksplorasi pengetahuan terkait Tionghoa tersebut masih terbatas pada aspek kedalaman materi. Sebagian besar sekadar menyebut fakta

sejarah tentang Tionghoa begitu saja, hanya beberapa kajian yang tergolong cukup memadai dari aspek kedalaman materi. Misalnya pada materi Orang-orang Cina Berontak (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92–93), peran pers Tionghoa (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 186), peran Tionghoa dalam perekonomian nasional pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 70–72), dan masalah sentimen anti-Cina pada masa Orde Baru hingga Reformasi (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 119, 148, 153, 164).

Harus diakui, apabila dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, eksplorasi pengetahuan sejarah yang berhubungan dengan Tionghoa sebagai bagian dari keberagaman bangsa memang tergolong lebih representatif. Dalam buku teks ini, representasi Arab dan Indo-Eropa tidak dijumpai sesering Tionghoa. Hal ini sepadan dengan pertimbangan Tionghoa sebagai minoritas (pendatang) terbesar di Indonesia. Di sisi lain, upaya inklusivisme buku teks ini juga mengakomodasi keberagaman daerah dengan tidak lagi didominasi oleh peristiwa-peristiwa sejarah di Jawa saja. Materi tentang kerajaan-kerajaan Islam juga mengungkap tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Papua, Nusa Tenggara, dan beberapa di Kalimantan yang selama ini hampir tidak pernah dibicarakan.

Kendati eksplorasi pengetahuan memadai, namun posisi Tionghoa sebagai aktor sosial atau pelaku sejarah masih tampil samar. Salah satunya dalam narasi Orang-orang Cina Berontak. Teks ini menjadi bagian dari materi tentang perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, namun sebagian besar teks justru didominasi oleh VOC sebagai subjek (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92–93). Akibatnya keseluruhan narasi memberi kesan

peristiwa dibicarakan dari sudut pandang VOC atau kolonial (*Neerlandosentris*). Apabila senada dengan teks lainnya, maka sudut pandang narasi semestinya dari rakyat Indonesia sebagai pelaku yang berjuang melawan penjajah. Peran Tionghoa kurang ditampilkan secara objektif pada peristiwa tersebut. Pada beberapa narasi lain, Tionghoa juga cenderung ditampilkan sebagai korban peristiwa bukan pelaku peristiwa.

Dari segi penggunaan sumber referensi, buku teks Sejarah Indonesia dominan memanfaatkan narasi-narasi dalam SNI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS. Padahal referensi yang secara spesifik mengusung historiografi Tionghoa sangat berlimpah. Misalnya perlawanan Tionghoa terhadap VOC dapat memanfaatkan buku karya Daradjadi tentang Geger Pacinan atau Vermeulen tentang Huru-Hara Tionghoa 1740 di Batavia. Bandingkan dengan kajian tentang Gerakan 30 September 1965 dalam buku teks yang sama. Kajian menggunakan cukup banyak sumber spesifik seperti karya Harold Crouch yang sempat dilarang edar pada masa Orde Baru, Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh tentang Percobaan Kup G30S/PKI, Ong Hok Ham tentang Refleksi Gestok, Julie Southwood dan Patrick Flanagan tentang Teror Orde Baru, hingga Olle Tornquist tentang Penghancuran PKI (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 254–257). Sumber yang sangat beragam dengan berbagai sudut pandang dapat menghadirkan narasi seputar Gerakan 30 September 1965 secara kaya dan objektif. Hal yang sama, beberapa sumber referensi yang spesifik mengkaji tentang Tionghoa perlu dipertimbangkan agar dihasilkan eksplorasi pengetahuan yang lebih komprehensif dan objektif.

Variabel eksplorasi pengetahuan dalam buku teks sejarah diarahkan pada tujuan mengembangkan karakter

kebangsaan. Dalam kaitannya dengan nilai kebinekaan, maka materi pembelajaran sejarah harus memperlihatkan perjalanan sejarah yang menggambarkan keanekaragaman di masa lampau, kini, dan akan datang. Untuk itu, buku teks sejarah yang mengakomodasi multikulturalisme perlu dikembangkan dan dijadikan acuan pembelajaran di sekolah (Saripudin & Komalasari, 2016). Temuan menunjukkan peran Tionghoa terepresentasikan secara merata hampir di setiap pokok bahasan dan periode sejarah. Secara konseptual maupun teknis, buku teks hanya menampilkan materi-materi pilihan yang merepresentasikan Tionghoa dengan pembahasan yang terbatas. Akan tetapi, walaupun masih lemah pada kedalaman materi, buku teks telah berupaya mengarah pada sifatnya yang inklusif dengan mengutamakan keluasan kajian.

Selain tergolong memadai secara keluasan materi, eksplorasi pengetahuan tentang representasi Tionghoa dalam buku teks juga telah menunjukkan adanya upaya mengakomodasi sejarah kritis. Menurut Morton (2008), sejarah kritis menekankan ajakan untuk memberi perhatian pada kehidupan dan kesadaran orang-orang atau kelompok masyarakat yang tidak dihiraukan negara. Akan tetapi, sumber referensi terkait Tionghoa yang digunakan dalam buku teks memang terbatas yang berdampak pula pada kurangnya kedalaman dan wacana yang dikonstruksi. Jika disandingkan, berbeda dengan materi Peristiwa 1965 yang menggunakan sumber-sumber referensi cukup kaya. Berbagai karya sejarah populer secara khusus digunakan untuk mengkaji teori-teori pelaku Peristiwa 1965. Sementara narasi tentang Tionghoa dalam buku teks kebanyakan hanya mengacu pada SNI Edisi Pemutakhiran atau IDAS. Padahal

sejak Reformasi, karya-karya sejarah yang mengkaji Tionghoa sangat berlimpah dengan beragam perspektif.

Situasi ini menunjukkan bahwa representasi Tionghoa hanya menjadi salah satu perhatian kecil dalam buku teks yang masih kalah penting dengan teka-teki pelaku Gerakan 30 September 1965 yang selama ini mengundang kontroversi. Penggunaan referensi yang terbatas berpotensi membuat pembelajaran menjadi kurang bermakna dan jika tidak hati-hati dapat memunculkan pemahaman yang kontraproduktif dengan visi pendidikan sejarah dalam menginternalisasi nilai. Kekhawatiran ini terkait dengan pengalaman historis masyarakat Tionghoa yang pernah mengalami diskriminasi dan peminggiran dalam sejarah nasional sebagai subaltern. Bahkan Klinken (2001) mengatakan bahwa historiografi – termasuk buku teks sejarah – pada era Orde Baru bersifat anti-intelektual dan telah menimbulkan kurangnya pengetahuan sejarah karena berfokus pada peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh besar saja. Dengan hadirnya kembali peristiwa-peristiwa yang menyangkut peran Tionghoa tentu diharapkan buku teks sejarah menjauh dari potensi anti-intelektual. Akan tetapi, temuan keterbatasan sumber yang digunakan dalam buku teks dalam merepresentasikan Tionghoa tentu perlu ditanggapi secara kritis.

Identifikasi materi tentang Tionghoa dalam buku teks juga cenderung menyampaikan fakta keras ketimbang menekankan aspek penanaman nilai. Pembelajaran sejarah yang hanya fokus pada fakta keras, apalagi sekadar menghafal nama tokoh, angka tahun, dan tempat peristiwa, sudah usang dan telah banyak ditinggalkan agar siswa lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar sejarah (Hsiao, 2005). Lebih dari itu, pembelajaran sejarah harus bermakna sebagai upaya

integrasi nasional dan melatih perilaku yang sesuai dengan norma sosio-kulturalnya sehingga mendorong perkembangan individu sebagai warga masyarakat yang baik (Kartodirdjo, 1982, hlm. 253). Terkait itu, pembelajaran pada materi itu memerlukan perhatian khusus agar mengenalkan nilai-nilai bangsa yang diperjuangkan di masa lalu, dipertahankan dan disesuaikan di masa sekarang, dan dikembangkan lebih lanjut untuk masa depan (Hasan, 2012, hlm. 8).

Buku teks yang samar dalam memosisikan Tionghoa sebagai pelaku sejarah membutuhkan strategi yang tepat agar pembelajaran tetap bermakna dalam merepresentasikan peran Tionghoa. Dalam beberapa peristiwa sejarah yang diakomodasi buku teks, pihak lain justru mendominasi sebagai subjek, sementara Tionghoa ditempatkan sebagai objek bahkan korban. Misalnya narasi Orang-orang Cina Berontak yang lebih menekankan Tionghoa sebagai korban pembantaian di Batavia tahun 1740, Tionghoa sebagai korban revolusi fisik, hingga korban dalam setiap kerusuhan rasial pada era kemerdekaan. Ini berpotensi menjauhkan siswa dari kesadaran bahwa Tionghoa turut berperan dalam perjuangan bangsa yang diraih bersama oleh berbagai kelompok masyarakat. Untuk itu, praksis pembelajaran Sejarah Indonesia yang erat dengan proses interaksi antarsiswa dan lingkungannya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Misalnya mempererat persaudaraan antarsiswa yang berbeda, kepekaan siswa dengan lingkungan sekitarnya, dan sebagainya. Dari situ diharapkan terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Hal ini senada dengan Banks (2016) yang menegaskan perlunya kesempatan bagi siswa untuk saling mengenal, menerima, menghargai, dan mempelajari perbedaan yang dimiliki satu sama lain.

Pembelajaran yang mengeksplorasi pengetahuan sangat menentukan karena keterbatasan buku teks dalam menampilkan Tionghoa. Temuan mencatat masih ada bayang-bayang pergumulan memori para penulis buku teks dengan narasi Orde Baru, kendati di sisi lain kebaruan SNI Edisi Pemutakhiran maupun IDAS sebagai *official history* di era Reformasi juga diakomodasi dalam penulisan buku teks. Objektivitas dalam mengkaji peran Tionghoa penting karena materi pembelajaran sejarah harus mampu memperlihatkan perjalanan sejarah yang menggambarkan keanekaragaman peran masyarakat di masa lampau. Aspek bina ika (bineka) dalam pembelajaran sejarah harus ditonjolkan sama dengan aspek tunggal ika sebagai dasar bagi pengembangan jati diri kebangsaan (Hasan, 2012b). Pengenalan jati diri sebagai bangsa yang berbineka akan menumbuhkan kecintaan dan kesediaan untuk bekerja keras bagi diri dan bangsanya (Wiriaatmadja, 2002).

B. Penghormatan terhadap Keberagaman

Dari segi bahasa, teks didominasi penggunaan istilah Cina, etnis Cina, atau keturunan Cina ketimbang Tionghoa yang seakan menegaskan mereka adalah pendatang (dari Tiongkok) yang bagaimana pun memiliki keterikatan dengan negara asalnya. Istilah Tionghoa merupakan sebutan yang khas bagi orang-orang dari Tiongkok yang menetap, hidup, dan telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia (Lembong, 2011). Untuk itu, penggunaan istilah Cina seakan meragukan keindonesiaan dari orang-orang Tionghoa. Termasuk juga narasi yang mencerminkan koherensi antara pengusaha Tionghoa dengan asing (Abdurakhman et al., 2018, hlm. 71), lagi-lagi menempatkan Tionghoa sebagai liyan dan bukan

bagian dari Indonesia. Dengan demikian, dari segi bahasa, pilihan kata masih mengandung konotasi negatif sehingga buku teks belum sepenuhnya menunjukkan pengakuan terhadap Tionghoa sebagai bagian dari keberagaman bangsa.

Materi Orang-orang Cina Berontak menunjukkan kegagalan sudut pandang Indonesiasentris (Sardiman & Lestariningsih, 2017a). Peran Tionghoa ditampilkan secara samar karena cenderung dinarasikan dari sudut pandang VOC. Sudut pandang yang sama juga muncul dalam menarasikan peran pers Tionghoa yang seolah kalah penting dengan peran pers bumiputera (Sardiman & Lestariningsih, 2017a). Sementara pada materi Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru, penekanan Tionghoa sebagai *economic animal* dan korban sentimen anti-Cina lebih menonjol (Abdurakhman et al., 2018). Buku teks masih gamang dalam menampilkan narasi-narasi tentang Tionghoa dari sudut Indonesiasentris. Eksistensi Tionghoa masih diragukan sebagai bagian utuh dari bangsa Indonesia.

Penghormatan baru sebatas pada pengakuan terhadap keberadaan Tionghoa sebagai hal yang wajar dalam keberagaman. Buku teks belum sepenuhnya menampilkan Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang turut berkontribusi dalam sejarah perjuangan bangsa. Teks-teks yang ada lebih menekankan Tionghoa sebagai objek bahkan korban ketimbang sebagai subjek atau pelaku peristiwa, misalnya dalam materi Orang-orang Cina Berontak, revolusi kemerdekaan RI, hingga Reformasi. Materi Orang-orang Cina Berontak merupakan bukti perlawanan Tionghoa terhadap VOC, namun narasi ternyata lebih menekankan kisah pembantaian Tionghoa di Batavia (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92–93). Revolusi kemerdekaan RI hanya menarasikan tentang Tionghoa sebagai korban kekejaman

Belanda, padahal banyak pemuda Tionghoa yang bergabung dalam laskar-laskar pendukung kemerdekaan RI (Sardiman & Lestariningsih, 2017b, hlm. 180). Narasi tentang Tionghoa pada masa Orde Baru dan Reformasi hanya diisi tentang peran ekonomi dan korban konflik rasial, sementara peran di bidang lain tidak disinggung termasuk dalam mendorong terjadinya Reformasi (Abdurakhman et al., 2018).

Penghormatan terhadap eksistensi dan peran Tionghoa sebagai bagian dari keberagaman dalam buku teks paling kentara dalam penggunaan bahasa dengan wacana yang positif. Untuk itu, temuan pada variabel ini paling tampak dalam hal bahasa khususnya pemilihan kata. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, buku teks cukup berpersoalan dalam hal leksikon. Hal ini mendapatkan kontra narasi sangat baik oleh guru dengan menunjukkan komitmen menggunakan pilihan bahasa yang lebih berkonotasi positif. Bahkan guru beberapa kali menegaskan tentang aturan penyebutan Tionghoa dan Tiongkok yang sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2014. Komitmen semacam ini tidak hanya menunjukkan pengakuan terhadap Tionghoa namun juga penghargaan sebagai bagian dari keberagaman bangsa.

Dalam narasi buku teks, Tionghoa hadir sebagai wujud pengakuan kendati samar dalam menunjukkan perannya. Buku teks kurang menampilkan eksistensi Tionghoa sebagai bagian utuh dari bangsa Indonesia. Akan tetapi, hal ini sudah merupakan kemajuan ketimbang buku teks pada era Orde Baru. Kala itu banyak peristiwa lokal, tokoh daerah, dan tema sejarah yang tidak mendapat tempat sehingga pemikiran Indonesiasentris mengalami kegagalan karena buku teks didominasi oleh peristiwa sejarah di Jawa (Mulyana, 2017). Peran Tionghoa yang dinarasikan dalam buku teks juga kabur karena lebih menekankan Tionghoa sebagai

economic animal dan korban sentimen anti-Cina. Kendati tidak mengurangi wujud pengakuan terhadap keberagaman, namun narasi semacam ini berpotensi menjegal kemurnian dari menghormati keberagaman. Dari segi kebahasaan juga berulang kali disampaikan, buku teks masih dominan menggunakan istilah Cina sekaligus menegaskan Tionghoa sebagai pendatang asing (liyan).

Situasi buku teks ini berpotensi mengulang pengalaman masa lalu yang mengarah pada *uniformed diversities* dan bukan lagi *united and unified diversities* (Kusumohamidjojo, 2000, hlm. 148). Bersatu bukan berarti harus seragam karena justru dengan menyadari dan menghargai keberagaman itulah yang menjadi alasan betapa pentingnya persatuan (Kemendikbud RI, 2017). Dalam upaya reformasi pendidikan sejarah di Amerika Serikat, Epstein (1998) mendorong dekonstruksi dilakukan terhadap kurikulum agar narasi buku teks sejarah memasukkan pengalaman sejarah kelompok masyarakat yang beragam. Pemahaman sejarah nasional yang satu harus dibangun dengan memperhatikan keberagaman yang ada.

Rekomendasi Epstein (1998) tentu sangat baik, namun tidak mudah diwujudkan dalam pendidikan sejarah di Indonesia. Secara teknis saja, kurikulum dan buku teks sejarah tentu akan menjadi sangat tebal dan berat. Sejatinya memang kurikulum pendidikan sejarah tidak boleh menggunakan wawasan bahwa kesatuan bangsa harus didasarkan pada kesamaan atau mencoba mengubah perbedaan menjadi suatu kesamaan (Hasan, 2012, hlm. 110). Visi tentang kesatuan bangsa yang selama ini menjadi pandangan kurikulum pendidikan sejarah sudah semestinya berubah. Inilah yang sebenarnya dicoba dalam Kurikulum 2013 untuk diwujudkan dengan memberi

ruang, salah satunya bagi representasi Tionghoa. Upaya tersebut sebagaimana dijumpai dalam buku teksnya telah menunjukkan pengakuan terhadap Tionghoa sebagai hal yang wajar dalam keberagaman.

C. Penghilangan Stereotipe dan Prasangka

Bahasa terutama pilihan kata yang digunakan dalam buku teks berpotensi menimbulkan misrepresentasi atau kesalahanggapan terhadap Tionghoa. Hal ini menjadi cara yang digunakan untuk mereproduksi wacana yang dengan tendensius menimbulkan stereotipe dan prasangka terhadap Tionghoa. Reproduksi stereotipe dan prasangka terutama terjadi berulang kali mulai dari narasi Orang-orang Cina Berontak sampai peran dominan Tionghoa dalam perekonomian dan masalah sentimen anti-Cina. Dalam narasi-narasi ini terjadi reproduksi wacana yang menimbulkan stereotipe dan prasangka terhadap Tionghoa. Strategi yang lain dengan menempatkan Tionghoa sebagai objek dan korban. Dalam narasi Orang-orang Cina Berontak, Tionghoa difokuskan pada kisahnya sebagai korban pembantaian yang dilakukan VOC (Sardiman & Lestariningsih, 2017a, hlm. 92–93). Pada materi masa setelah kemerdekaan, Tionghoa juga dinarasikan menjadi korban agresi militer Belanda, korban kerusuhan Malari, hingga puncaknya menjadi korban dari tragedi Mei 1998.

Sebagai objek dan korban, Tionghoa ditempatkan dalam stigma peran ekonomi atau *economic animal* dengan mengabaikan peran lainnya. Narasi buku teks menjelaskan kedatangan Tionghoa dengan tujuan berdagang pada materi masa Hindu-Buddha, kolonialisme, hingga kemerdekaan. Penggunaan istilah Cina juga berpotensi menempatkan

Tionghoa secara inferior. Berdasarkan latar historis, istilah Cina digunakan pada masa kolonial Belanda bermaksud menghina atau merendahkan. Pemerintah Orde Baru melegitimasi istilah ini dengan maksud menghilangkan perasaan superioritas Tionghoa (Lembong, 2011, hlm. 10; Mahfud, 2013, hlm. 51; Setiono, 2008, hlm. 986; Suryadinata, 2002, hlm. 107). Akan tetapi, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penggunaan istilah Cina sudah diganti dengan Tionghoa dan Tiongkok. Istilah Cina juga cenderung berorientasi pada orang-orang dari negara Tiongkok, sementara untuk mereka yang sudah lama tinggal dan berketurunan di Indonesia lebih tepat disebut Tionghoa. Kenyataannya, buku teks lebih banyak menggunakan istilah Cina ketimbang Tionghoa yang hanya disebut pada materi tentang peran pers Tionghoa dan pemulihan hak-hak Tionghoa oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dengan demikian, Tionghoa dihadirkan namun sekaligus pula dipinggirkan dalam narasi yang disusun.

Stereotipe terhadap Tionghoa dapat dimaknai sebagai kesalahan konsepsi mengenai Tionghoa yang didasarkan pada prasangka yang subjektif. Prasangka terhadap Tionghoa berarti anggapan buruk terhadap Tionghoa tanpa mengetahui dan menyelidikinya secara pasti. Bahasa yang menimbulkan misrepresentasi (kesalahanggapan) terhadap Tionghoa menjadi hal pertama yang harus diperhatikan. Pada buku teks didapati narasi yang berpotensi menggiring pembaca pada reproduksi stereotipe dan prasangka. Buku teks lebih dominan menggunakan istilah Cina ketimbang Tionghoa, menegaskan stigma Tionghoa sebagai pendatang, dan seolah mencitrakan Tionghoa sebagai orang asing yang nasionalisme keindonesiaannya diragukan. Dalam menarasikan perannya, Tionghoa senantiasa ditempatkan

sebagai objek dan korban, serta dikebiri perannya dengan ditonjolkan posisinya sebagai *economic animal*.

Sulit lenyapnya citra negatif terhadap Tionghoa tidak lepas dari kuatnya warisan kolonial yang pernah dilang-gengkan Orde Baru. Kolonialisme tidak hanya mengubah bentuk wilayah-wilayah fisik, namun juga wilayah sosial dan identitas-identitas manusia (Loomba, 2003, hlm. 240). Relasi harmonis Tionghoa dengan penduduk lokal setempat rusak sejak Geger Pacinan berakhir tahun 1743. Wilayah sosial bahkan juga pembatasan secara jelas identitas-identitas masyarakat melalui pembagian strata sosial ternyata juga tidak mudah hilang kendati kolonialisme telah angkat kaki dari bumi Indonesia. Kendati Indonesia telah merdeka lebih dari tujuh dekade, namun perjuangan antikolonial ternyata belum sepenuhnya usai karena masih gagal dalam menciptakan gagasan hidup membangsa yang sukar lepas dari jeratan pemikiran-pemikiran kolonial.

Sudah cukup panjang upaya pemerintah untuk meng-hilangkan stereotipe dan prasangka. Setelah Reformasi bergulir, tahun 1999, Presiden B. J. Habibie menghapus istilah pribumi dan nonpribumi. Presiden K. H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 yang selama Orde Baru telah membunuh tradisi dan berbagai hal berbau Tionghoa demi kesuksesan asimilasi (Arifin et al., 2015; Giblin, 2003; Turner, 2003). Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan aturan tentang penyebutan Tionghoa dan Tiongkok tahun 2014. Kenyataan yang dijumpai dalam buku teks terbitan pemerintah tahun 2017 dan 2018 ini tentu cukup mengenyak jika disandingkan dengan berbagai aturan yang telah dikeluarkan oleh negara. Kesadaran tentang ini juga diungkap

oleh guru dan beberapa siswa yang diwawancarai. Tentu hal ini harus menjadi perhatian di kemudian hari dalam penulisan buku teks sejarah.

Kendati tidak mudah mengubah konteks sosial masyarakat, namun temuan-temuan implementasi pembelajaran menunjukkan dorongan untuk menampilkan pengakuan, penghormatan, dan penghargaan terhadap eksistensi dan peran Tionghoa. Siswa disadarkan bahwa stereotipe dan prasangka yang muncul itu dipengaruhi oleh wacana sosial yang berkembang di masyarakat. Reproduksi wacana ini bisa melalui keluarga, teman pergaulan, maupun sekolah. Upaya melenyapkannya membutuhkan pula peran guru dalam proses pembelajaran sejarah di sekolah. Idealnya, tidak didapati tendensi guru menggiring siswa pada wacana yang mereproduksi stereotipe dan prasangka. Guru harus memiliki kognisi sosial yang konstruktif dalam memandang peran sejarah masyarakat Tionghoa dalam memaknai buku teks yang dihadapinya.

D. Refleksi Kritis Pengalaman Kebinekaan

Narasi tentang peristiwa sejarah yang merepresentasikan Tionghoa dalam buku teks menyajikan perspektif yang terbatas. Pasalnya narasi cenderung menekankan penyampaian informasi atau pengetahuan sejarah saja. Bahkan kerap hanya informasi sepintas lalu yang berupa fakta keras. Artinya paparan informasi satu arah jauh lebih kuat. Hal ini masih ditambah dengan keharusan berbagi ruang karena ada materi maupun peran kelompok lain yang juga perlu mendapat tempat sehingga tidak semua dapat dikaji secara mendalam. Penugasan yang memberi kesempatan siswa untuk menggali sumber belajar lain

atau pengalamannya dan mengembangkan daya pikir kritis tentang Tionghoa hanya muncul sekali dalam pertanyaan “Cobalah kamu identifikasi, pengaruh budaya Cina pada kuliner di sekitar tempat tinggalmu!” (Gunawan et al., 2017, hlm. 157). Buku teks Sejarah Indonesia yang dianalisis ini memang secara keseluruhan lebih berorientasi pada penyampaian materi ketimbang kegiatan belajar yang menuntut keaktifan siswa.

Narasi kurang menyediakan kesempatan bagi siswa agar dapat menarik maknanya secara kontekstual dengan kehidupan sehari-hari melalui pengalaman kebinekaan yang reflektif dan kritis. Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam temuan sebelumnya, penggunaan sumber referensi yang tidak secara spesifik mengkaji tentang Tionghoa membuat narasi yang disajikan cenderung miskin. Representasi Tionghoa dalam berbagai peristiwa sejarah tidak disampaikan dari berbagai perspektif. Justru memori kolektif tentang Tionghoa yang penuh dengan stereotipe dan prasangka masih mendominasi. Kehadiran Reformasi yang mengubah pandangan dan penerimaan terhadap Tionghoa masih belum mampu membendung arus kuat narasi yang dibangun sejak Orde Baru.

Perspektif tunggal yang dijumpai dalam narasi tidak lepas dari kognisi sosial penulis buku teks dan berpotensi menutup ruang dialog bagi siswa. Hal ini bisa dibandingkan dengan narasi Gerakan 30 September 1965 di buku teks yang sama menghadirkan beragam teori mengenainya dengan sumber-sumber yang kaya. Hal ini dapat memberi kesempatan pada siswa untuk menanggapi dan mengambil sikap atas dasar *historical thinking skills* yang dimilikinya (Abdurakhman et al., 2018). Untuk itu, peran guru dibutuhkan agar siswa mengkritisi dan mencari berbagai sumber

belajar yang lain sehingga ruang dialog terbuka. Guru juga harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang reflektif dan bermakna.

Temuan buku teks menunjukkan materi tentang Tionghoa yang disajikan cenderung berupa paparan informasi satu arah. Buku teks sebenarnya dapat bersifat interaktif di tangan guru yang kritis dan kreatif. Situasi ini tidak lepas dari persoalan teknis yakni keharusan berbagi ruang buku teks. Ada banyak peristiwa sejarah pada level lokal, nasional, dan internasional maupun para pelaku sejarah yang beragam membutuhkan pula ruang untuk diakomodasi dalam buku teks. Sumber-sumber yang digunakan dalam buku teks juga tergolong terbatas karena hanya bergantung pada *official history*. Berbagai situasi ini berpotensi menutup ruang dialog. Apabila guru menyampaikan buku teks apa adanya maka tertutup kesempatan bagi siswa untuk melakukan refleksi kritis atas pengalaman kebinekaannya, secara khusus terkait dengan representasi Tionghoa.

Buku teks dengan informasi pengetahuan satu arah dapat melanggengkan pendidikan bergaya bank. Siswa sebagai “celengan” dan guru sebagai penabungnya. Guru merupakan subjek yang memiliki pengetahuan dan diisikan kepada siswa yang menjadi wadah atau tempat deposit. Akibatnya yang terjadi adalah “penjinakan” manusia dan proses dehumanisasi (Freire, 2000). Untuk itu, pendidikan yang dialogis (*dialogic education*) diperlukan agar penggunaan bahasa tidak lagi satu arah namun secara interaktif untuk belajar dan membentuk perkembangan kognitif siswa (Wegerif, Mercer, & Major, 2020). Setiap tindakan pembelajaran harus kreatif sehingga setiap siswa dapat belajar dengan cara mereka sendiri. Siswa menentukan

apakah yang dipelajarinya itu dapat memberdayakan mereka dalam konteks kehidupan yang unik (Wegerif, 2020). Termasuk mendorong siswa untuk mengungkap atau menulis sejarahnya sebagai bahan belajar.

Ketidakmampuan buku teks dalam memberi ruang refleksi kritis terhadap pengalaman kebinekaan siswa harus diambil alih sepenuhnya oleh guru. Refleksi kritis tentang pengalaman kebinekaan siswa dalam proses pembelajaran sejarah sangat ditentukan oleh guru. Ruang dialog bagi refleksi kritis antarsiswa harus diakomodasi dalam RPP dan implementasi pembelajaran yang dirancang dan dikelola oleh guru. Pembelajaran yang hanya menggunakan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar tentu saja menutup kesempatan ini. Sebaliknya pembelajaran yang kontekstual, menggunakan beragam sumber belajar, dan membuka ruang dialog seluas-luasnya akan memberi kesempatan bagi siswa berefleksi kritis secara pribadi maupun terstruktur dengan arahan guru. Selain itu, pembelajaran kontekstual lebih mudah diinternalisasikan dan dapat mendukung perkembangan karakter siswa (Komalasari, 2012).

E. Kesadaran Inklusif untuk Keharmonisan Hidup Bersama

Sebagian besar narasi belum sepenuhnya menghadirkan dinamika relasi sosial yang harmonis antara Tionghoa dengan kelompok masyarakat lainnya pada masa lalu. Narasi tentang keharmonisan hanya dijumpai secara terbatas pada pokok bahasan masa Prasejarah, Hindu-Buddha, dan Islam, serta kemudian Reformasi. Sementara narasi tentang Tionghoa yang cukup signifikan pada pokok bahasan kolonialisme dan imperialisme hingga Orde Baru justru menjauh dari wacana

relasi sosial yang harmonis. Tionghoa ditampilkan sebagai pendatang, *economic animal* yang mendominasi secara nasional, dan sebagai akibatnya menjadi objek atau korban sentimen anti-Cina.

Semestinya pengetahuan, pengakuan, dan penghormatan terhadap representasi Tionghoa sebagai bagian dari kebinekaan ditambah refleksi pengalaman dalam konteks sosial diharapkan dapat mengantar siswa sampai pada peraih nilai-nilai yang menguatkan integrasi bangsa. Peran Tionghoa belum ditampilkan secara berimbang dalam konteks wacana kebinekaan sehingga upaya peraih kesadaran inklusif untuk keharmonisan hidup bersama masih jauh panggang dari api. Buku teks ini berpotensi menghadirkan ilusi inklusi sehingga perlu diperkuat dan diperkaya dalam penggunaannya.

Buku teks semata menunjukkan *accomodative multiculturalism*, padahal kesadaran inklusif merupakan muara dari upaya konstruksi kebinekaan yang membutuhkan kesetaraan atau *autonomist multiculturalism* (Parekh, 1997). Buku teks sejarah sebagai bahan ajar diharapkan mengacu pada Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan buku teks sebagai bahan ajar dilakukan atas dasar pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2016 juga menyebut keharusan buku teks sejalan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan norma positif di masyarakat. Berbagai aturan ini harus menjadi pijakan dalam merepresentasikan Tionghoa secara objektif dan mengarah pada pendidikan sejarah yang inklusif dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Buku teks sejarah di Indonesia, sebagaimana juga umumnya terjadi di banyak negara, menekankan penanaman nilai nasionalisme yang membentuk identitas nasionalnya (Huntington & Won, 2020; Kim & Kim, 2019; Kochhar, 2008; Pavlick, 2019; Hieronymus Purwanta et al., 2015; Qazi & Shah, 2019; Sumaludin, 2017; Wang, 2016). Pada beberapa negara tertentu, buku teks sejarah juga berperan dalam memahami pengalaman konflik yang pernah terjadi serta membina perdamaian dan hidup harmonis antarkelompok masyarakat (Ide et al., 2018). Peran yang terakhir ini sebenarnya relevan diusung oleh buku teks Sejarah Indonesia dalam persoalan sentimen anti-Cina untuk menyudahi stereotipe dan prasangka serta menumbuhkan keinginan membina perdamaian dan keharmonisan antarkelompok. Hal ini perlu menjadi perhatian para pemangku kebijakan maupun penulis buku teks.

Hasan (2012a) menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan sejarah maka tafsir resmi pemerintah atau *official history* bukan kebenaran yang berdasarkan kaedah ilmu semata namun juga kebenaran berdasarkan kaedah keilmuan dan kepentingan bangsa. Dengan bergulirnya Reformasi, cara pandang terhadap Tionghoa dan kemajemukan bangsa berubah. Kepentingan bangsa bukan lagi penonjolan nasionalisme dengan penyeragaman perbedaan gaya Orde Baru, namun nasionalisme yang dibentuk atas semangat Bhinneka Tunggal Ika (Tilaar, 2014). Apalagi pemupukan nasionalisme dengan penyeragaman seperti era Orde Baru telah gagal (Gandhi, 2001; Morton, 2008). Terbukti dengan menguatnya ancaman disintegrasi di berbagai daerah pada pengujung kekuasaan Orde Baru. Nasionalisme perlu kembali pada gagasan tentang hidup membangun sebagai wujud kebersamaan yang bukan berarti menyamakan perbedaan.

Pemerintah memiliki wewenang politis dalam menentukan narasi atau versi mana yang digunakan untuk pendidikan sejarah. Dengan wewenang itu dan seturut dinamika masa kini, sikap politis pemerintah harus berubah dan diperjelas dalam menarasikan dan mewacanakan Tionghoa dalam Sejarah Indonesia.

Kurikulum yang inklusif juga diperlukan sebagai acuan penyusunan buku teks sejarah yang inklusif. Sebagaimana Segall et al. (2018, hlm. 287) menyorotinya dengan pertanyaan-pertanyaan kritis “Materi pembelajaran sejarah ini milik siapa?”, “Untuk kepentingan siapa materi ini dikaji?”, “Untuk kepentingan siapa materi ini disusun dan legitimasi kepentingan tersebut?”, atau “Kisah siapa yang perlu dimasukkan dalam materi ini?”. Siswa-siswa di SMA Santa Angela Bandung didorong untuk sampai pada kesadaran bahwa pendidikan sejarah ditujukan untuk kepentingan bangsa yang majemuk. Kurikulum pendidikan sejarah yang inklusif berarti memperhatikan kepentingan emansipatoris yang memberi kesempatan mengakomodasi kemajemukan melalui pembelajaran dialogis. Pada dasarnya keberagaman memang harus disikapi dengan aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa melalui dialog sehingga dapat hidup berdampingan secara harmonis. Klasifikasi mayoritas-minoritas, pribumi-nonpribumi, asli-pendatang, dan polarisasi sejenisnya harus ditanggalkan dalam hidup bersama di masyarakat.

Minimnya upaya pembentukan kesadaran inklusif dalam buku teks membutuhkan tanggapan dari guru. Buku teks hanya menjadi dokumen mati ketika pembelajaran bersifat *textbook thinking* dan tidak ada upaya pengembangan. Penggunaan buku teks oleh guru secara apa adanya, tanpa kehati-hatian, dan tidak tepat makna dapat berpotensi membangun kepahitan terhadap Tionghoa yang terus

memelihara sentimen anti-Cina. Jika ini terjadi, maka pendidikan sejarah gagal menunaikan visinya dalam membangun semangat kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, dan integrasi bangsa, sebaliknya bisa menanamkan benih kebencian yang berujung pada konflik. Untuk sampai pada perairan kesadaran inklusif dan keharmonisan hidup bersama, representasi Tionghoa dalam buku teks membutuhkan kebijaksanaan guru dalam mengelola pembelajaran.

Pendidikan sejarah harus kembali pada pandangan hidup manusia Indonesia yakni Pancasila (Wiriaatmadja, 2002). Dalam kaitannya dengan representasi Tionghoa sebagai konstruksi kebinekaan, maka prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika memegang peran sentral. Sekarang ini, belajar sejarah bukan lagi semata-mata tentang perang dan tragedi, namun membawa pada kesadaran betapa berharganya kemanusiaan, perdamaian, kerja sama, persatuan, dan keharmonisan. Sejarah mempersatukan atas dasar kesamaan nasib namun lebih dari itu sejarah mengandung nilai-nilai kehidupan yang penting dipelajari dan diinternalisasikan untuk masa depan (Wineburg, 2006, hlm. 6). Dengan demikian, walau dalam keterbatasan buku teks, namun pembelajaran Sejarah Indonesia yang merepresentasikan Tionghoa di sekolah hendaknya dapat menciptakan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna (*meaningful learning*) bagi siswa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Lapian, A. B. (Eds). (2012a). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 1: Prasejarah*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve & Kemendikbud RI.
- Abdullah, T., & Lapian, A. B. (Eds). (2012b). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 2: Kerajaan Hindu-Buddha*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve & Kemendikbud RI.
- Abdullah, T., & Lapian, A. B. (Eds). (2012c). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 3: Kedatangan dan Peradaban Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve & Kemendikbud RI.
- Abdullah, T., & Lapian, A. B. (Eds). (2012d). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 4: Kolonisasi dan Perlawanan*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve & Kemendikbud RI.
- Abdullah, T., & Lapian, A. B. (Eds). (2012e). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 5: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve & Kemendikbud RI.
- Abdullah, T., & Lapian, A. B. (Eds). (2012f). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 6: Perang dan Revolusi*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve & Kemendikbud RI.
- Abdullah, T., & Lapian, A. B. (Eds). (2012g). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7: Pascarevolusi*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve & Kemendikbud RI.
- Abdullah, T., & Lapian, A. B. (Eds). (2012h). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve & Kemendikbud RI.

- Abdurakhman, Pradono, A., Sunarti, L., & Zuhdi, S. (2018). *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Adam, A. W. (2008). Militerisasi Sejarah Indonesia: Peran A.H. Nasution. In H. S. Nordholt, B. Purwanto, & R. Saptari (Eds.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (pp. 111–124). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV.
- Aman. (2011). *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- An, S. (2016). Asian Americans in American History: An AsianCrit Perspective on Asian American Inclusion in State U.S. History Curriculum Standards. *Theory & Research in Social Education*, 44(2), 244–276. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1170646>
- Ankersmit, F. (2012). *Meaning, Truth, and Reference in Historical Representation*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Arifin, E. N., Ananta, A., Utami, D. R. W. W., Handayani, N. B., & Pramono, A. (2015). Quantifying Indonesia's Ethnic Diversity. *Asian Population Studies*, 11(3), 233–256. <https://doi.org/10.1080/17441730.2015.1090692>
- Arifin, E. N., Hasbullah, M. S., & Pramono, A. (2016). Chinese Indonesians: How Many, Who, and Where? *Asian Ethnicity*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/14631369.2016.1227236>
- Ashton, P., & Kean, H. (2009). *People and Their Pasts: Public History Today*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ashton, P., & Trapeznik, A. (2019). *What is Public History Globally? Working with the Past in the Present*. New York: Bloomsbury Publishing.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk*

Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.

Banks, J. A. (2016). Multicultural Education: Characteristics and Goals. In J. Banks & C. A. M. Banks (Eds.), *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (Ninth Edit, pp. 2–23). NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Berger, A. A. (1997). *Narratives in Popular Culture, Media, and Everyday Life*. California: Sage Publications, Inc.

Blust, R. (1995). The Prehistory of the Austronesian-Speaking Peoples: A View from Language. *Journal of World Prehistory*, 9(4), 453–510. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/25801085>

Capelli, C., Wilson, J. F., Richards, M., Stumpf, M. P. H., Gratrix, F., Oppenheimer, S., ... Goldstein, D. B. (2001). A Predominantly Indigenous Paternal Heritage for the Austronesian-Speaking Peoples of Insular Southeast Asia and Oceania. *The American Journal of Human Genetics*, 68(2), 432–443. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/318205>.

Chang, K. C. (1964). Prehistoric and Early Historic Culture Horizons and Traditions in South China. *Current Anthropology*, 5(5), 359–375. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2739987>

Chang, P.-C. (2021). Defiant Memories in Confronting the Chinese Stereotype in Indonesia: The Politics of Memory of Souw Beng Kong. *Asian Ethnicity*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14631369.2021.1976613>

Chu, Y. (2015). The Power of Knowledge: A Critical Analysis of the Depiction of Ethnic Minorities in China's Elementary

- Textbooks. *Race Ethnicity and Education*, 18(4), 169–487. <https://doi.org/10.1080/13613324.2015.1013460>
- Chua, C. (2004). Defining Indonesian Chineseness under the New Order. *Journal of Contemporary Asia*, 34(4), 465–479. <https://doi.org/10.1080/00472330480000221>
- Crutchley, J., Parker, S. G., & Roberts, S. (2018). Sight, Sound and Text in the History of Education. *History of Education*, 47(2), 143–147. <https://doi.org/10.1080/0046760X.2017.1421718>
- Cruz, B. C. (2002). Don Juan and Rebels Under Palm Trees: Depictions of Latin Americans in U.S. History Textbooks. *Critique of Anthropology*, 22(3), 323–342. <https://doi.org/10.1177/0308275X02022003761>
- Daradjadi. (2013). *Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Darmawan, W. (2019). *Pendidikan Nasionalisme dalam Penulisan Buku Teks Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Atas Masa Orde Baru dan Reformasi di Indonesia*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Darmawan, W., & Mulyana, A. (2019). A History and Ideology in The Development of The Writing of History Textbooks for High School in Indonesia 1994-2013. *HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.17509/historia.v3i1.20991>
- Darmawan, W., Sjamsuddin, H., & Mulyana, A. (2018). The Past Ghost: The Expression of Narrative Ideology in History Textbooks During The New Order and Reformasi in Indonesia. *Paramita: Historical Studies Journal*, 28(2), 224–233. <https://doi.org/10.15294/paramita.v28i2.15043>

- Davidson, S. J. (2009). Studies of Massive, Collective Violence in Post-Soeharto Indonesia. *Critical Asian Studies*, 41(2), 329–349. <https://doi.org/10.1080/14672710902809450>
- De Graaf, H.J dan Pigeud, T. (1997). *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI: Antara Historisitas dan Mitos*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Deng, G. (1995). An Evaluation of the Role of Admiral Zheng He's Voyages in Chinese Maritime History. *International Journal of Maritime History*, 7(2), 233–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/084387149500700221>
- Dhakidae, D. (2020). Historiografi Orde Baru. *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 39(2), 34–49.
- Dijk, T. A. van. (1990). Social Cognition and Discourse. In H. Giles & W. P. Robinson (Eds.), *Handbook of Language and Social Psychology* (pp. 163–183). New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Dijk, T. A. van. (1994). Discourse and Cognition in Society. In D. Crowley & D. Mitchell (Eds.), *Communication Theory Today* (pp. 107–126). California: Stanford University Press.
- Djono, & Joebagio, H. (2019). Narration and Discourse of Bhinneka Tunggal Ika in Indonesia Revised History Textbook: A History Didactics Approach. *Paramita: Historical Studies Journal*, 29(1), 18–27. <https://doi.org/10.15294/paramita.v29i1.15311>
- Epstein, T. (1998). Deconstructing Differences in African-American and European-American Adolescents' Perspectives on U.S. History. *Curriculum Inquiry*, 28(4), 397–423. <https://doi.org/10.1111/0362-6784.00100>
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.

- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Farawita, F. (2018). Degradasi Ekologi dan Kapitalisme Revolusi Hijau dalam Buku Teks Sejarah SMA. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 1(2), 77–82.
- Freedman, A. (2003). Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia. *Asian Ethnicity*, 4(3), 439–452. <https://doi.org/10.1080/1343900032000117259>
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of The Oppressed (Translated by Myra Bergman Ramos)*. New York: The Continuum International Publishing Group Inc.
- Gandhi, L. (2001). *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Giblin, S. (2003). Civil Society Groups Overcoming Stereotypes? Chinese Indonesian Civil Society Groups in Post-Suharto Indonesia. *Asian Ethnicity*, 4(3), 353–368. <https://doi.org/10.1080/1343900032000117196>
- Giroux, H. A. (2011). *On Critical Pedagogy*. New York: The Continuum International Publishing Group Inc.
- Gunawan, R., Lestariningsih, A. D., & Sardiman, A. M. (2017). *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas X*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Habermas, J. (1987). *The Theory of Communicative Action Volume 2 (Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Translated by Thomas Mc Carthy)*. Boston, Massachusetts: Beacon Press.
- Hall, S. (1997). The Work of Representation. In *Representation* (pp. 13–74). London: Sage Publications, Inc.
- Handoko, S. T., & Wasino. (2020). Discourse on Relations between Indonesia and Papua: Content Analysis of History Textbook of 2013 Curriculum. *Paramita:*

- Historical Studies Journal*, 30(1), 23–35. <https://doi.org/10.15294/paramita.v30i1.16215>
- Haryatmoko. (2019). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*. Depok: Rajawali Pers.
- Hasan, S. H. (1997). Kurikulum dan Buku Teks Sejarah. In R. Gunawan (Ed.), *Kongres Nasional Sejarah 1996 Sub Tema Perkembangan Teori dan Metodologi dan Orientasi Pendidikan Sejarah* (pp. 135–159). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hasan, S. H. (2000). Kurikulum dan Buku Teks Sejarah. *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1), 24–28.
- Hasan, S. H. (2012a). *Pendidikan Sejarah Indonesia: Isu dalam Ide dan Pembelajaran* (A. Mulyana, Ed.). Bandung: Penerbit Rizqi Press.
- Hasan, S. H. (2012b). Pendidikan Sejarah untuk Memperkuat Pendidikan Karakter. *Paramita*, 22(1), 81–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/paramita.v22i1.1875>
- Hilburn, J., & Fitchett, P. G. (2012). The New Gateway, An Old Paradox: Immigrants and Involuntary Americans in North Carolina History Textbooks. *Theory & Research in Social Education*, 40(1), 35–65. <https://doi.org/10.1080/00933104.2012.647976>
- Hoon, C.-Y. (2006). Assimilation, Multiculturalism, Hybridity: The Dilemmas of the Ethnic Chinese in Post-Suharto Indonesia. *Asian Ethnicity*, 7(2), 149–165. <https://doi.org/10.1080/14631360600734400>
- Horkheimer, M. (1972). *Critical Theory: Selected Essays*. Translated by Matthew J. O'Connell and others. New York: Continuum.
- Hsiao, Y.-M. (2005). Taiwanese Students' Understanding of Differences in History Textbook Accounts. In R. Ashby &

- et al (Eds.), *Understanding History: Recent Research in History Education* (pp. 49–61). London and New York: Routledge Falmer-Taylor & Francis Group.
- Huntington, A., & Won, C. (2020). What It Means to be Korean: National Identity in North and South Korean Elementary Textbooks 1960–2019. *Comparative Education*, 1–23. <https://doi.org/10.1080/03050068.2020.1812237>
- Ibrahim, R., & Syaodih, N. (2002). *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ide, T., Kirchheimer, J., & Bentreovato, D. (2018). School Textbooks, Peace and Conflict: An Introduction. *Global Change, Peace & Security*, 30(3), 287–294. <https://doi.org/10.1080/14781158.2018.1505717>
- Intisari, & Indonesia, K. L. B. (2018). *Peranakan Tionghoa Indonesia: Sebuah Perjalanan Budaya* (3 (diperba; A. H. Kustara, Ed.). Jakarta: PT Intisari Mediatama dan Komunitas Lintas Budaya Indonesia.
- Jorgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2017). *Analisis Wacana: Teori & Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, M. (1980). *Pemilihan Bahan Pengajaran*. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kartodirdjo, S. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Dampai Imperium (Jilid 1)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. (1989). Fungsi Sejarah dalam Pembangunan Nasional. *Historika*, 1(1).

- Kartodirdjo, S. (1990). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme (Jilid 2)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kello, K., & Wagner, W. (2017). History Teaching as “Propaganda”? Teachers’ Communication Styles in Post-Transition Societies. In C. Psaltis, M. Carretero, & S. Cehajic-Clancy (Eds.), *History Education and Conflict Transformation: Social Psychological Theories, History Teaching, and Reconciliation* (pp. 201–230). Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Kemendikbud RI. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Kemendikbud RI. (2017). *Pendidikan Kebinekaan pada Satuan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Kemendikbudristek RI. (2022). *Dimensi, Elemen, Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek RI.
- Kim, H., & Kim, S. K. (2019). Global Convergence or National Identity Making?: The History Textbook Controversy in South Korea 2004-2018. *Asia Pacific Journal of Education*, 39(2), 252–263. <https://doi.org/10.1080/02188791.2019.1621801>
- Klinken, G. van. (2001). The Battle for History After Suharto: Beyond Sacred Dates, Great Men, and Legal Milestones. *Critical Asian Studies*, 33(3), 323–350. <https://doi.org/10.1080/14672710122604>
- Kochhar, S. K. (2008). *Pembelajaran Sejarah*. Jakarta: Grasindo.
- Komalasari, K. (2012). The Living Values-Based Contextual Learning to Develop the Students’ Character. *Journal of*

- Social Sciences*, 8(2), 246–251. <https://doi.org/10.3844/jssp.2012.246.251>
- Korbits, K. (2014). The Representation of the Cold War in Three Estonian History Textbooks. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/03057925.2014.917948>
- Korostelina, K. (2010). War of Textbooks: History Education in Russia and Ukraine. *Communist and Post-Communist Studies*, 43, 129–137. <https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2010.03.004>
- Kristiono, M. J. (2018). Dari Tionghoa ke Tjina: Telaah Sejarah terhadap Demonisasi Etnis Tionghoa di Indonesia. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 10(19), 34–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/verity.v10i19.1309>
- Kuntjara, E., & Hoon, C.-Y. (2020). Reassessing Chinese Indonesian Stereotypes: Two Decades After Reformasi. *South East Asia Research*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2020.1729664>
- Kurniawan, H. (2020). Infografik Sejarah dalam Media Sosial: Tren Pendidikan Sejarah Publik. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 14(2), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um020v14i22020p1-13>
- Kurniawan, H., Supriatna, N., Mulyana, A., & Yulifar, L. (2023a). Content Analysis of The Little Nyonya for Learning Resources in History Education. In R. Ridhoi, A. Subekti, F. M. Navarro, & Hariyono (Eds.), *Embracing New Perspectives in History, Social Sciences, and Education* (pp. 64–68). London: Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003295273-13>

- Kurniawan, H., Supriatna, N., Mulyana, A., & Yulifar, L. (2023b). From Integration to Marginalization: Representation of the Chinese in History Textbooks in Indonesia. *Social and Education History*, 12(2).
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebinekaan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kwartanada, D. (2020). Diingat Sekaligus Dihapuskan: “Cina” dalam Memori Kolektif dan Historiografi Orde Baru. *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 39(2), 12–33.
- Lee, T. (2016). Defining the Aesthetics of the Nyonyas’ Batik Sarongs in the Straits Settlements, Late Nineteenth to Early Twentieth Century. *Asian Studies Review*, 40(2), 173–191. <https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1162137>
- Lembong, E. (2011). *Istilah “Cina”, “China”, dan “Tionghoa”: Tinjauan Historis dan Masalah Penggunaannya Dewasa Ini*. Jakarta: Yayasan Nabil.
- Lohanda, M. (2001). *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Loomba, A. (2003). *Kolonialisme/Pascakolonialisme*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Lucy, L., Demszky, D., Bromley, P., & Jurafsky, D. (2020). Content Analysis of Textbooks via Natural Language Processing: Findings on Gender, Race, and Ethnicity in Texas U.S. History Textbooks. *AERA Open*, 6(3), 1–27. <https://doi.org/10.1177/2332858420940312>
- Lyotard, J.-F. (1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. United Kingdom: Manchester University Press.

- Mackie, J. (2005). How Many Chinese Indonesians? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 97–101. <https://doi.org/10.1080/00074910500072732>
- Mahfud, C. (2013). *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- McGregor, K. E. (2008). *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Syarikat.
- Michael, D. L. (2013). Holocaust Education in the ‘Black Hole of Europe’: Slovakia’s Identity Politics and History Textbooks Pre- and Post-1989. *Intercultural Education*., 24(1–2), 19–40. <https://doi.org/10.1080/14675986.2013.790209>
- Ming, W. (2004). Reflections on the Study of Zheng He’s Expeditions. *Ming Studies*, 1, 17–33. <https://doi.org/10.1179/014703704788762899>
- Morton, S. (2008). *Gayatri C. Spivak: Etika, Subalternitas, & Kritik Penalaran Poskolonial*. Yogyakarta: Penerbit Pararaton.
- Muljana, S. (2005). *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LKiS.
- Mulyana, A. (2008). Hubungan Etnis Dalam Pendidikan Sejarah di Indonesia. *The International Seminar on Ethnics and Education, The Faculty of Education & Institute Research of Ethnicity Universiti Kebangsaan Malaysia, 27 Maret 2008*. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Retrieved from http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196608081991031-AGUS_MULYANA/Artikel_Malaysia.pdf

- Mulyana, A. (2013). Nasionalisme dan Militerisme: Ideologisasi Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA. *Paramita Historical Studies Journal*, 23(1), 78–87. <https://doi.org/10.15294/paramita.v23i1.2498>
- Mulyana, A. (2017). Multikulturalisme dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Suatu Kajian Historiografi. In S. Margana, Baha'Uddin, & A. Faisol (Eds.), *Kapita Selekta (Pendidikan) Sejarah Indonesia* (pp. 1–21). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mulyana, A. (2021). Narratives of Nationalism in Indonesia and Malaysia's History Textbooks. *Paramita: Historical Studies Journal*, 31(2), 291–301. <https://doi.org/10.15294/paramita.v31i2.31428>
- Neo, D. H., Ngo, S.-S., & Heng, J. G. K. (2020). Popular Imaginary and Cultural Constructions of the Nonya in Peranakan Chinese Culture of the Straits Settlements. *Ethnicities*, 20(1), 24–48. <https://doi.org/10.1177/1468796819867399>
- Nur'aini, F., Supriatna, N., & Ratmaningsih, N. (2023). Podcasts As a Medium to Foster the Historical Imagination of Students During the Covid-19 Pandemic. *Paramita: Historical Studies Journal*, 33(1), 129–138. <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i1.31102>
- Pane, S. (1950). *Sedjarah Indonesia (Djilid 1)*. Djakarta: Balai Pustaka.
- Pane, S. (1956). *Sedjarah Indonesia II*. Djakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P. P. dan K.
- Pangestu, D. A., Kumalasari, D., & Aman. (2021). Anti-Chinese Incident in West Java in 1963. *Paramita: Historical Studies Journal*, 31(1), 93–103. <https://doi.org/10.15294/paramita.v31i1.23428>

- Parekh, B. (1997). National Culture and Multiculturalism. In K. Thompson (Ed.), *Media and Cultural Regulation* (pp. 164–205). London: Sage Publications.
- Pavlick, J. (2019). Reproducing Patriotism: An Exploration of Freedom in US History Textbooks. *Discourse & Society*, 30(5), 482–502. <https://doi.org/10.1177/0957926519855787>
- Pearcy, M. (2014). “We Have Never Known What Death was Before”: U.S. History Textbooks and the Civil War. *The Journal of Social Studies Research*, 38, 45–60. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2013.12.004>
- Pendry, A., Husbands, C., & Kitson, A. (2005). Understanding the Knowledge Bases of History Teaching: Subject, Pupils, and Professional Practices. In R. Ashby, P. Gordon, & P. Lee (Eds.), *Understanding History: Recent Research in History Education* (pp. 148–158). New York: Routledge Falmer-Taylor & Francis Group.
- Permana, S. A., & Purwantiningsih, A. (2021). Chinese Community Under the Soekarno Era in Indonesia. *Paramita Historical Studies Journal*, 31(1), 104–110. <https://doi.org/10.15294/paramita.v31i1.23986>
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2008a). *Sejarah Nasional Indonesia I: Zaman Prasejarah di Indonesia (Edisi Pemutakhiran -cet.2-)* (R. P. Soejono & R. Z. Leirissa, Eds.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2008b). *Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno (Edisi Pemutakhiran -cet.2-)* (R. P. Soejono & R. Z. Leirissa, Eds.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2008c). *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia (Edisi*

- Pemutakhiran -cet.2-*) (R. P. Soejono & R. Z. Leirissa, Eds.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2008d). *Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia (Edisi Pemutakhiran -cet.2-)* (R. P. Soejono & R. Z. Leirissa, Eds.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2008e). *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda (Edisi Pemutakhiran -cet.2-)* (R. P. Soejono & R. Z. Leirissa, Eds.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Eds.). (2008f). *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik (Edisi Pemutakhiran -cet.2-)* (R. P. Soejono & R. Z. Leirissa, Eds.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastowo, A. (2014). *Pengembangan Bahan Ajar Tematik: Tinjauan Teoretis dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Preucel, R. W. (2020). In Defence of Representation. *World Archaeology*, 52(3), 395–411. <https://doi.org/10.1080/00438243.2021.1924852>
- Purdey, J. (2003). Political Change Reopening the Asimilasi vs Integrasi Debate: Ethnic Chinese Identity in Post-Suharto Indonesia. *Asian Ethnicity*, 4(3), 421–437. <https://doi.org/10.1080/1343900032000117231>
- Purdey, J. (2006). *Kekerasan Anti-Tionghoa di Indonesia: 1996-1999*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Purwanta, H., & Novianto, V. (2022). The Politics of History: Indonesian High School Textbooks during the New Order period (1966-1998). *Social and Education History*, 11(1), 55–79. <https://doi.org/10.17583/hse.9606>

- Purwanta, Hieronymus. (2012). *Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA: Analisis Isi dan Wacana Nasionalisme*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Purwanta, Hieronymus. (2016). Discourse of the “1965’s Bloody Coup” in Indonesia Education Historiography. *International Journal of Social Sciences & Educational Studies*, 2(4), 59–73. Retrieved from <https://ijsses.tiu.edu.iq/index.php/volume-2-issue-4-article-6/>
- Purwanta, Hieronymus, Santosa, H. H., & Haryono, A. (2015). Wacana Identitas Nasional pada Buku Teks Pelajaran Sejarah di Inggris dan Indonesia. *Patrawidya*, 16(3), 345–362.
- Pusat Perbukuan. (2019). *Panduan Pembekalan Penulis dan Penelaah Buku Teks Pelajaran untuk Program Peminatan SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Kemendikbud.
- Qazi, M. H., & Shah, S. (2019). A Study of Bangladesh’s Secondary School Curriculum Textbooks in Students’ National Identity Construction in an Overseas Context. *Asia Pacific Journal of Education*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/02188791.2019.1671806>
- Rommelink, W. (2002). *Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa 1725-1743*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Ricoeur, P. (2021). *Hermeneutika dan Ilmu-Ilmu Humaniora*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Rodríguez, N. N. (2020). Invisibility is Not a Natural State for Anyone”: (Re)constructing Narratives of Japanese American Incarceration in Elementary Classrooms. *Curriculum Inquiry*. <https://doi.org/10.1080/03626784.2020.1831369>
- Rowland, L., & Barrs, K. (2013). Working with Textbooks: Reconceptualising Student and Teacher Roles in The Classroom. *Innovation in Language Learning and*

- Teaching*, 7(1), 57–71. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1080/17501229.2012.686499>
- Santosa, I. (2014). *Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran Sejak Nusantara sampai Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sanusi, A. (1955). *Sedjarah Indonesia untuk Sekolah Menengah II* (7th ed.). Bandung: Pustaka “Pakuan.”
- Sardiman, A. M., & Lestariningsih, A. D. (2017a). *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sardiman, A. M., & Lestariningsih, A. D. (2017b). *Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Saripudin, D., & Komalasari, K. (2016). The Development of Multiculturalism Values in Indonesian History Textbook. *American Journal of Applied Sciences*, 13(6), 827–835. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2016.827.835>
- Sayer, F. (2017). *Sejarah Publik: Sebuah Panduan Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Schunk, D. H. (2012). *Teori-teori Pembelajaran: Perspektif Pendidikan* (6th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Segall, A., Trofanenko, B. M., & Schmitt, A. J. (2018). Critical Theory and History Education. In S. A. Metzger & L. M. Harris (Eds.), *The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning* (pp. 283–309). New York: Wiley Blackwell.
- Seixas, P. (2000). Schweigen! die Kinder! or, Does Post-modern History Have a Place in the Schools? In P. N. Stearns, P. Seixas, & S. Wineburg (Eds.), *Knowing, Teaching, and Learning History: National and International Perspectives* (pp. 19–37). New York: NYU Press.

- Seixas, P., Fromowitz, D., & Hill, P. (2005). History, Memory and Learning to Teach. In R. Ashby & et al (Eds.), *Understanding History: Recent Research in History Education* (pp. 107–123). London and New York: Routledge Falmer-Taylor & Francis Group.
- Setijadi, C. (2017). Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public. *Perspective*, 73, 1–12.
- Setiono, B. G. (2008). *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: TransMedia.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sjamsuddin, H. (2017). Doing History, Teaching History, Learning History, and Mining Meaning & Value of History: History Education in “Life Cycle.” *Seminar Internasional UPI, 26 Oktober 2017*. Bandung.
- Soeharso, R., Sodik, I., & Wardayanti, R. (2022). Utilization Little Historian Model for Local History Learning. *Paramita: Historical Studies Journal*, 32(2), 306–314. <https://doi.org/10.15294/paramita.v32i2.29962>
- Stoskopf, A., & Bermudez, A. (2017). The Sounds of Silence: American History Textbook Representation of Non-Violence and the Abolition Movement. *Journal of Peace Education*, 14(1), 92–113. <https://doi.org/10.1080/17400201.2016.1230543>
- Sumaludin, M. M. (2017). Identitas Nasional dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(2), 139–147. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/jpis>
- Sumantri, I. K. (1963). *Sedjarah Revolusi Indonesia Djilid Kedua Masa Revolusi Bersendjata*. Djakarta: Grafica.
- Sundhoru. (1969). *Sedjarah Indonesia II*. Djakarta: P.P. Adil.

- Sunny Lie, & Bailey, B. (2016). The power of names in a Chinese Indonesian family's negotiations of politics, culture, and identities. *Journal of International and Intercultural Communication*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/17513057.2016.1216577>
- Suparno. (1960). *Sedjarah Indonesia III: Achir V.O.C. hingga Pemerintahan Inggeris*. Djakarta: Sari Pers.
- Supriatna, E. (2013). Buku Teks sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah untuk Menumbuhkan Berpikir Kritis dan Integratif Siswa di SMA. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 22(2).
- Supriatna, N. (2007). *Konstruksi Pembelajaran Sejarah Kritis*. Bandung: Historia Utama Press.
- Supriatna, N. (2021). The Creative History Teacher as A Creative Historian. *Paramita: Historical Studies Journal*, 31(2), 281–290. <https://doi.org/10.15294/paramita.v31i2.31341>
- Suryadinata, L. (1984). *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Suryadinata, L. (1986). *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadinata, L. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Suryadinata, L. (2016). *Tionghoa dalam Keindonesiaan: Peran dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa Jilid I* (L. Suryadinata, Ed.). Jakarta: Yayasan Nabil.
- Suswandari, Absor, N. F., & Soleh, M. B. (2021). Dutch Meme as a History Learning Media in The Post-Millennial Generation. *Paramita: Historical Studies Journal*, 31(2), 270–280. <https://doi.org/10.15294/paramita.v31i2.26854>

- Tanasaldy, T. (2015). A Decade after the Reform: Political Activism of the Chinese of West Kalimantan, Indonesia. *Asian Ethnicity*, 16(4), 446–479. <https://doi.org/10.1080/14631369.2015.1005035>
- Tanasaldy, T., & Palmer, C. (2019). Discrimination, Sport, and Nation Building among Indonesian Chinese in the 1950s. *Indonesia and the Malay World*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1559564>
- Terra, L. (2014). New Histories for A New State: A Study of History Textbook Content in Northern Ireland. *Journal of Curriculum Studies*, 46(2), 225–248. <https://doi.org/10.1080/00220272.2013.797503>
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2014). Multikulturalisme, Bahasa Indonesia, dan Nasionalisme dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 213–224. <https://doi.org/10.15408/DIALEKTIKA.V1I2.6287>
- Trost, T. P., & Trbovc, J. M. (2020). History Textbooks in Wartime: The Use of Second World War Narratives in 1990s War Propaganda in the Former Yugoslavia. *War & Society*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/07292473.2020.1811472>
- Turner, S. (2003). Setting the Scene Speaking Out: Chinese Indonesians After Suharto. *Asian Ethnicity*, 4(3), 337–352. <https://doi.org/10.1080/1343900032000117187>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (2003).
- Vermeulen, J. T. (2010). *Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 1740*. Jakarta: Komunitas Bambu.

- Wang, D. (2016). Learning or Becoming: Ideology and National Identity in Textbooks for International Learners of Chinese. *Cogent Education*, 3(1140361), 1–16. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2016.1140361>
- Wasino, Putro, S., Aji, A., Kurniawan, E., & Shintasiwi, F. A. (2019). From Assimilation to Pluralism and Multiculturalism Policy: State Policy Towards Ethnic Chinese in Indonesia. *Paramita: Historical Studies Journal*, 29(2), 213–223. <https://doi.org/10.15294/paramita.v29i2.20869>
- Wegerif, R. (2020). Towards a Dialogic Theory of Education for the Internet Age. In R. Wegerif, N. Mercer, & L. Major (Eds.), *Routledge International Handbook of Research on Dialogic Education* (pp. 14–26). New York: Routledge.
- Wegerif, R., Mercer, N., & Major, L. (2020). Introduction to the Routledge International Handbook of Research on Dialogic Education. In N. Mercer, R. Wegerif, & L. Major (Eds.), *The Routledge International Handbook of Research on Dialogic Education* (pp. 1–8). New York: Routledge.
- Wijayakusuma, H. (2005). *Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke*. Jakarta: Putaka Populer Obor.
- Winarnita, M., Chan, C., & Butt, L. (2018). Narratives of Exile Twenty Years On: Long-term Impacts of Indonesia's 1998 Violence on Transnational Chinese-Indonesian Women. *Identities*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/1070289X.2018.1537639>
- Wineburg, S. (2006). *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Wirawan, Y. (2017). Penelitian Masyarakat Tionghoa di Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 1960-an hingga 2000-an: Sebuah Studi Awal. In *Pluralisme dan Identitas: Pengalaman dan Pandangan Berkebangsaan* (pp. 358–383). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wiriaatmadja, R. (2002). *Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*. Bandung: Historia Utama Press.
- Wood, M. (2013). *Sejarah Resmi Indonesia Modern: Versi Orde Baru dan Para Penantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Woysner, C., & Schocker, J. B. (2015). Cultural Parallax and Content Analysis: Images of Black Women in High School History. *Textbooks, Theory, & Research in Social Education*, 43(4), 441–468. <https://doi.org/10.1080/00933104.2015.1099487>
- Xi, C. (2014). *Pelepasan Kebijakan Dwikewarganegaraan oleh Tiongkok (1955): Studi Hubungan Urusan Perantauan dan Diplomasi*. Jakarta: Yayasan Nabil.
- Yan, F., & Vickers, E. (2019). Portraying “Minorities” in Chinese History Textbooks of the 1990s and 2000s: The Advance and Retreat of Ethnocultural Inclusivity. *Asia Pacific Journal of Education*, 39(2), 190–208. <https://doi.org/10.1080/02188791.2019.1621800>
- Yao, M.-L. (2018). Creating and Recreating the Nation of Taiwan: Representations of the History of the Japanese Colonial Era in History Textbooks and Teachers’ Discourses. *National Identities*, 6(3), 1–27. <https://doi.org/10.1080/14608944.2018.1443324>
- Yulifar, L. (2019). *Kabupaten Galuh-Ciamis 1809-1942: Pemerintahan, Sosial-Ekonomi, dan Politik*. Bandung: Gapura Press.



BIODATA PENULIS



Hendra Kurniawan lahir di Gombong, Kebumen pada tanggal 21 Agustus 1986. Anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Irwan Dwidjo Seno dan Lani Herawati (almarhumah). Menikah dengan dr. Mellyta Karunia Yuliani dan dikaruniai seorang putri bernama Kimberly Kurnia Njoo.

Pendidikan yang pernah ditempuh yakni Taman Kanak-kanak Pius Bakti Utama Gombong selesai tahun 1992, SD Pius Bakti Utama Gombong tamat tahun 1998, SMP Pius Bakti Utama Gombong tamat tahun 2001, SMA Negeri 1 Gombong tamat tahun 2004, dan S1 (sarjana) Pendidikan Sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta lulus tahun 2008. Setelah lulus S1, mengajar di SMP Pius Bakti Utama Gombong hingga tahun 2011. Selanjutnya meneruskan S2 (magister) Pendidikan Sejarah di Program Pascasarjana UNS tahun 2011-2012. Sempat mengajar di SMA Regina Pacis Surakarta pada tahun 2011 hingga 2013. Sejak tahun 2013 berkarya sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah di FKIP Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta. Di kampus yang sama juga mengampu mata kuliah Pen-

didikan Pancasila untuk beberapa prodi lain dan menjadi dosen/instruktur pada program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP USD (2015-2019). Pada tahun 2020 mendapat tugas belajar dengan beasiswa dari Yayasan Sanata Dharma untuk menempuh S3 (doktor) Pendidikan Sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan berhasil diselesaikannya tepat waktu pada tahun 2023.

Sebagai dosen, aktif menulis karya ilmiah di berbagai jurnal nasional dan internasional, buku, serta ratusan artikel di surat kabar lokal dan nasional. Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan selama menempuh studi di UPI yakni

1. From Integration to Marginalization: Representation of the Chinese in History textbooks in Indonesia. *Social and Education History*. Vol. 12, No. 2 (2023). Internasional terindeks Scopus Q2.
2. Public History of Chinese-Javanese Harmony in Yogyakarta for History Learning with Diversity Insights. *Paramita: Historical Studies Journal*. Vol. 33, No. 1 (2023). Internasional terindeks Scopus No-Q, Nasional terindeks Sinta-1.
3. Paradigma Baru Pendidikan Sejarah dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*. Vol. 4, No. 2 (2021). Nasional terindeks Sinta-3.
4. Content Analysis of The Little Nyonya for Learning Resources in History Education. *Proceeding of The 1st International Conference on History, Social Sciences and Education (ICHSE)* Universitas Negeri Malang (2021). Terbit dalam *Embracing New Perspectives in History, Social Sciences, and Education* (2023). Penerbit: CRC Press/Taylor & Francis Group. Internasional Bereputasi.

5. Teacher's Response to the Narrative of The Chinese Rebellion in Indonesian History Textbook. *Proceeding The 6th International Seminar on Social Studies and History Education (ISSHE)* di Universitas Pendidikan Indonesia (2021). Penerbit: SPs Universitas Pendidikan Indonesia. Internasional.
6. Cura Personalis in Creative Pedagogy: Mining the Meaning of History Learning in the Digital Era. *Proceeding The 6th International Conference on Education and Social Sciences (ICESS)* Universitas Negeri Semarang (2021). Penerbit: Atlantis Press. Internasional Bereputasi.

Selain menulis, selama menjalani studi di UPI juga sempat menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan berikut

1. Webinar “Menumbuhkan Bangsa Kreatif di Era Merdeka Belajar melalui Pendidikan Sejarah” pada tanggal 13 Agustus 2021 yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah SPs UPI.
2. Seminar Sejarah Publik “Rekonstruksi Sejarah dalam Perspektif Akademisi dan Komunitas Sejarah” pada tanggal 15 Februari 2023 yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

Buku ini merupakan salah satu karyanya selain berbagai buku yang terbit sebelum studi antara lain

1. Gendu-gendu Rasa (2015). Penerbit: Bimotry, Yogyakarta.
2. Kajian Kurikulum dan Bahan Ajar Sejarah SMA (2018). Penerbit: Sanata Dharma University Press, Yogyakarta.
3. Literasi dalam Pembelajaran Sejarah (2018). Penerbit: Gava Media, Yogyakarta.

4. Pembelajaran Era 4.0: Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter, Keterampilan Abad 21, HOTS, dan Literasi dalam Perspektif Merdeka Belajar (2020). Penerbit: Media Akademi, Yogyakarta.
5. Kepingan Narasi Tionghoa Indonesia: The Untold Histories (2020). Penerbit: PT Kanisius, Yogyakarta.

Penulis kini telah kembali aktif berkarya sebagai dosen Pendidikan Sejarah di USD dan dapat dihubungi melalui email hendrak@usd.ac.id.

● 10% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 10% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 5% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	text-id.123dok.com Internet	1%
2	ejournal.upi.edu Internet	<1%
3	repository.wima.ac.id Internet	<1%
4	e-journal.usd.ac.id Internet	<1%
5	scribd.com Internet	<1%
6	eprints.uny.ac.id Internet	<1%
7	kherysuryawan.com Internet	<1%
8	repository.usd.ac.id Internet	<1%

9	repository.ub.ac.id Internet	<1%
10	lexminanderdoda.blogspot.com Internet	<1%
11	adoc.tips Internet	<1%
12	id.123dok.com Internet	<1%
13	docobook.com Internet	<1%
14	repository.uinjkt.ac.id Internet	<1%
15	ringkasanteori.com Internet	<1%
16	journal2.um.ac.id Internet	<1%
17	docplayer.info Internet	<1%
18	Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur on 2022-... Submitted works	<1%
19	123dok.com Internet	<1%
20	eprints.walisongo.ac.id Internet	<1%

21	UPN Veteran Yogyakarta on 2020-07-17 Submitted works	<1%
22	lib.unnes.ac.id Internet	<1%
23	Gerry van Klinken. "THE BATTLE FOR HISTORY AFTER SUHARTO: Beyo... Crossref	<1%
24	digilib.unila.ac.id Internet	<1%
25	blog.ub.ac.id Internet	<1%
26	karyailmiah.trisakti.ac.id Internet	<1%
27	Universitas Negeri Jakarta on 2020-02-12 Submitted works	<1%
28	nos.jkt-1.neo.id Internet	<1%
29	mafiadoc.com Internet	<1%
30	diakronika.ppj.unp.ac.id Internet	<1%
31	jogloabang.com Internet	<1%
32	Universitas Pendidikan Indonesia on 2012-07-19 Submitted works	<1%

33	files1.simpkb.id Internet	<1%
34	filebuku.com Internet	<1%
35	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	<1%
36	repository.umy.ac.id Internet	<1%
37	repository.lppm.unila.ac.id Internet	<1%
38	digilib.uin-suka.ac.id Internet	<1%
39	lugtyastyono60.files.wordpress.com Internet	<1%
40	sumberbelajar.seamolec.org Internet	<1%
41	informasipendidikanbaru.blogspot.com Internet	<1%
42	repository.ipb.ac.id Internet	<1%
43	bundet.com Internet	<1%
44	eprints.undip.ac.id Internet	<1%

45	doaj.org Internet	<1%
46	nurafifah156052a.blogspot.com Internet	<1%
47	edoc.tips Internet	<1%
48	moam.info Internet	<1%
49	Universitas Islam Riau on 2018-05-03 Submitted works	<1%
50	rappler.com Internet	<1%
51	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%
52	repository.unisba.ac.id:8080 Internet	<1%
53	repository.usu.ac.id Internet	<1%
54	Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta on 2016-02-22 Submitted works	<1%
55	UPN Veteran Jawa Timur on 2020-06-30 Submitted works	<1%
56	Universitas Diponegoro on 2020-12-14 Submitted works	<1%

57	Universitas Negeri Semarang on 2022-09-17	<1%
	Submitted works	
58	akupintar.id	<1%
	Internet	
59	repository.bsi.ac.id	<1%
	Internet	
60	Arif Rahman, Zalik Nuryana. "Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri ...	<1%
	Publication	
61	overseasthinktankforindonesia.com	<1%
	Internet	
62	Christiany Juditha. "FENOMENA TRENDING TOPIC DI TWITTER: ANALI...	<1%
	Crossref	
63	budisansblog.blogspot.com	<1%
	Internet	
64	web.budaya-tionghoa.net	<1%
	Internet	
65	Sriwijaya University on 2021-04-05	<1%
	Submitted works	
66	St. Joseph's College on 2021-10-20	<1%
	Submitted works	
67	UM Surabaya on 2024-08-09	<1%
	Submitted works	
68	id.m.wikipedia.org	<1%
	Internet	

69	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
70	vdocuments.site Internet	<1%
71	Universitas Muhammadiyah Ponorogo on 2020-02-13 Submitted works	<1%
72	id.scribd.com Internet	<1%
73	Universitas Negeri Jakarta on 2022-09-06 Submitted works	<1%
74	konepnegaraideal.blogspot.com Internet	<1%
75	yesussangmesiasnaif.blogspot.com Internet	<1%
76	maghrobiahmad.blogspot.com Internet	<1%
77	slideshare.net Internet	<1%
78	perpusmanja.files.wordpress.com Internet	<1%
79	Universitas Diponegoro on 2021-06-14 Submitted works	<1%
80	ia802301.us.archive.org Internet	<1%

81	serikatnews.com Internet	<1%
82	tetisecret.blogspot.com Internet	<1%
83	kerjakno.com Internet	<1%
84	sainsologi.com Internet	<1%
85	Faisal Faisal, Nursariani Simatupang. "Kebijakan Nonpenal dalam Rang... Crossref	<1%
86	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa on 2022-09-23 Submitted works	<1%
87	indonesiahebatpdip.wordpress.com Internet	<1%
88	pendidikan-sejarah.fis.uny.ac.id Internet	<1%
89	Fumiharu MIENO, Shihong BI, Nualnoi TREERAT, Didi KWARTANADA, R... Publication	<1%
90	Universitas Sebelas Maret on 2019-07-23 Submitted works	<1%
91	es.scribd.com Internet	<1%
92	jurisarrozy.wordpress.com Internet	<1%

93	Dadan Adi Kurniawan, Nasta Ayundra Oktavian Mahardi. "Jejak Gelar D... Crossref	<1%
94	Universitas Negeri Jakarta on 2019-08-02 Submitted works	<1%
95	Universitas Negeri Jakarta on 2019-08-06 Submitted works	<1%
96	adityakurniawanbuangwaktu.blogspot.com Internet	<1%
97	eprints.uns.ac.id Internet	<1%
98	id.wikipedia.org Internet	<1%
99	jed.revolutia.info Internet	<1%
100	missevi.wordpress.com Internet	<1%
101	suyasdotsugih.blogspot.com Internet	<1%
102	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2019-01-20 Submitted works	<1%
103	Universitas Negeri Jakarta on 2017-07-05 Submitted works	<1%
104	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet	<1%

105	hipatiapress.com Internet	<1%
106	iGroup on 2012-06-05 Submitted works	<1%
107	press.uhnsugriwa.ac.id Internet	<1%
108	pt.scribd.com Internet	<1%
109	repository.unpas.ac.id Internet	<1%
110	Imas Siti Masitoh, Ajat Sudrajat. "Analisis muatan nilai-nilai karakter d... Crossref	<1%
111	Padjadjaran University on 2019-06-23 Submitted works	<1%
112	Rochester Adams High School on 2021-05-08 Submitted works	<1%
113	School of Business and Management ITB on 2023-12-13 Submitted works	<1%
114	UPN Veteran Yogyakarta on 2019-01-28 Submitted works	<1%
115	Universitas Mulawarman on 2021-01-15 Submitted works	<1%
116	Universitas Negeri Jakarta on 2024-07-19 Submitted works	<1%

117	Universitas Negeri Malang on 2022-12-29 Submitted works	<1%
118	Universitas Pendidikan Indonesia on 2016-12-29 Submitted works	<1%
119	chanha13.wordpress.com Internet	<1%
120	dininurlelasari.wordpress.com Internet	<1%
121	doku.pub Internet	<1%
122	dspace.uui.ac.id Internet	<1%
123	hes-gotappointment-newspaper.icu Internet	<1%
124	journal.unnes.ac.id Internet	<1%
125	jurnal.peko.uniba-bpn.ac.id Internet	<1%
126	kbm matematika.files.wordpress.com Internet	<1%
127	pdfcoffee.com Internet	<1%
128	rahmayantisitimaya.blogspot.com Internet	<1%

129	repo.usni.ac.id Internet	<1%
130	materisekolah.net Internet	<1%
131	pergerakansosialis.com Internet	<1%
132	zonajakarta.pikiran-rakyat.com Internet	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Abstract
- Manually excluded sources
- Quoted material
- Small Matches (Less than 9 words)

EXCLUDED SOURCES

repository.upi.edu

Internet

5%

sejarah.upi.edu

Internet

1%